Pemerintah Provinsi
Bengkulu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

Provinsi Bengkulu

2025-2029

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2052 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
    a. penyusunan Renstra PD;dan
    b. penyusunan RKPD.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN.
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh PD terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

(3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tindak lanjut oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD;dan/atau

b. penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.

(5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Dalam hal masa jabatan Gubernur berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintahan Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur PD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan PD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang PD.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2025
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (4-95/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,

ROSEPPENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk.I
NIP. 19721012 200212 1 004

GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029* telah dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini merupakan instrumen strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

RPJMD ini memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, meliputi gambaran umum kondisi daerah, visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, serta indikasi pendanaan. Sebagai pedoman strategis, dokumen ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu: "*Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.*" Visi tersebut menjadi landasan dalam perumusan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan penguatan nilai religiusitas, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Melalui RPJMD ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan dapat berjalan secara terencana, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, yang telah memberikan kontribusi berupa pemikiran, data, dan masukan konstruktif. Semoga RPJMD ini menjadi pijakan bersama dalam mewujudkan kemajuan Provinsi Bengkulu yang diridhai Allah SWT dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Bengkulu, 25 Agustus 2025

H. HELMI HASAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR				**i**
DAFTAR ISI				**iii**
DAFTAR TABEL				**v**
DAFTAR GAMBAR				**xi**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**BAB I.**	**1**
	1.1	LATAR BELAKANG	BAB I.	1
	1.2	DASAR HUKUM	BAB I.	2
	1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	BAB I.	6
		1.3.1 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN Tahun 2025-2029	BAB I.	7
		1.3.2 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJPD Tahun 2025- 2045	BAB I.	9
		1.3.3 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043	BAB I.	10
		1.3.4 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Bengkulu	BAB I.	12
		1.3.5 Hubungan Rancangan Akhir RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	BAB I.	14
	1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	BAB I.	16
		1.4.1 Maksud	BAB I.	16
		1.4.2 Tujuan	BAB I.	17
	1.5	SISTEMATIKA RPJMD PROVINSI BENGKULU TH. 2025- 2029	BAB I.	17
BAB II	**GAMBARAN UMUM DAERAH**		**BAB II.**	**1**
	2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	BAB II.	1
		2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	BAB II.	1
		2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	BAB II.	27
		2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	BAB II.	59
		2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	BAB II.	98
		2.1.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	BAB II.	113
	2.2	Gambaran Keuangan Daerah	BAB II.	132
		2.2.1 Realisasi Pendapatan	BAB II.	136
		2.2.2 Realisasi Belanja	BAB II.	142
		2.2.3 Realisasi Pembiayaan	BAB II.	146
		2.2.4 Neraca Daerah	BAB II.	149
		2.2.5 Proyeksi Keuangan Daerah	BAB II.	153
		2.2.6 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah	BAB II.	160
	2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	BAB II.	165
		2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	BAB II.	165
		2.3.2 Isu Strategis	BAB II.	180

BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**BAB III.**	**1**
	3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	BAB III.	1
	3.1 Visi dan Misi	BAB III.	1
	3.2 Tujuan dan sasaran	BAB III.	6
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	BAB III.	15
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029	BAB III.	15
	3.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029	BAB III.	52
	3.2.3 Program Unggulan Provinsi Bengkulu 2025-2029	BAB III.	54
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**BAB IV.**	**1**
	4.1 Program Perangkat Daerah	BAB IV.	1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BAB IV.	125
BAB V	**PENUTUP**	**BAB V.**	**1**
	5.1 Manajemen Risiko	BAB V.	1
	5.2 Kesimpulan	BAB V.	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota	BAB II.	2
Tabel 2. 2	Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	BAB II.	4
Tabel 2. 3	Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	8
Tabel 2. 4	Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	9
Tabel 2. 5	Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu	BAB II.	10
Tabel 2. 6	Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	BAB II.	10
Tabel 2. 7	Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu	BAB II.	11
Tabel 2. 8	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	BAB II.	11
Tabel 2. 9	Kesimpulan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Bengkulu	BAB II.	12
Tabel 2. 10	Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	13
Tabel 2. 11	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	14
Tabel 2. 12	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	14
Tabel 2. 13	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	15
Tabel 2. 14	Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	17
Tabel 2. 15	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024	BAB II.	17
Tabel 2. 16	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	17
Tabel 2. 17	Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu	BAB II.	19
Tabel 2. 18	Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	21
Tabel 2. 19	Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu	BAB II.	21
Tabel 2. 20	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024	BAB II.	22
Tabel 2. 21	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	BAB II.	22

Tabel 2. 22	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	BAB II.	23
Tabel 2. 23	Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	23
Tabel 2. 24	Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu	BAB II.	24
Tabel 2. 25	Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik dan Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	BAB II.	24
Tabel 2. 26	Proyeksi Jumlah dan kepadatan penduduk menurut umur dan jenis kelamin (dalam Ribu)	BAB II.	25
Tabel 2. 27	Proyeksi penduduk usia produktif (dalam Ribu)	BAB II.	26
Tabel 2. 28	Proyeksi angka ketergantungan (dalam Ribu)	BAB II.	26
Tabel 2. 29	Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (15-59) (Persen)	BAB II.	26
Tabel 2. 30	Proyeksi penduduk usia lanjut (dalam Ribu)	BAB II.	27
Tabel 2. 31	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	29
Tabel 2. 32	Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	29
Tabel 2. 33	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	30
Tabel 2. 34	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu,2020-2024	BAB II.	31
Tabel 2. 35	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Maret 2020 - September 2024	BAB II.	31
Tabel 2. 36	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Menurut Kebupaten/Kota, 2020-2024	BAB II.	32
Tabel 2. 37	Persentase Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024	BAB II.	33
Tabel 2. 38	Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Bengkulu 2021-2023	BAB II.	34
Tabel 2. 39	Status Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024	BAB II.	34
Tabel 2. 40	Karakteristik Pengangguran, Februari 2022—Februari 2024	BAB II.	37
Tabel 2. 41	Perkembangan Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	37
Tabel 2. 42	Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023	BAB II.	39
Tabel 2. 43	Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	41

Tabel 2. 44	Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu Tahun 2023	BAB II.	41
Tabel 2. 45	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	42
Tabel 2. 46	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu	BAB II.	44
Tabel 2. 47	Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	44
Tabel 2. 48	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	44
Tabel 2. 49	Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi	BAB II.	45
Tabel 2. 50	Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi	BAB II.	45
Tabel 2. 51	Status Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024	BAB II.	45
Tabel 2. 52	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2023	BAB II.	48
Tabel 2. 53	Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu	BAB II.	50
Tabel 2. 54	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	52
Tabel 2. 55	Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut kabupaten/kota Provinsi Bengkulu, 2022	BAB II.	52
Tabel 2. 56	Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023	BAB II.	56
Tabel 2. 57	Jumlah penduduk usia produktif (dalam Ribu)	BAB II.	57
Tabel 2. 58	Jumlah Penduduk Tidak Produktif (dalam Ribu)	BAB II.	60
Tabel 2. 59	Angka Ketergantungan/Rasio Ketergantungan Provinsi Bengkulu	BAB II.	60
Tabel 2. 60	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021-2024	BAB II.	60
Tabel 2. 61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 dan 2024	BAB II.	62
Tabel 2. 62	Rasio PDRB Industri pengolahan	BAB II.	62
Tabel 2. 63	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2023-2024	BAB II.	63
Tabel 2. 64	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu	BAB II.	65
Tabel 2. 65	Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Provinsi Bengkulu	BAB II.	67
Tabel 2. 66	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Provinsi Bengkulu	BAB II.	69

Tabel 2. 67	Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	69
Tabel 2. 68	Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	71
Tabel 2. 69	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	71
Tabel 2. 70	Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	72
Tabel 2. 71	Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu	BAB II.	73
Tabel 2. 72	Perkembangan Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu	BAB II.	74
Tabel 2. 73	Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu	BAB II.	75
Tabel 2. 74	Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	76
Tabel 2. 75	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	77
Tabel 2. 76	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	78
Tabel 2. 77	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	79
Tabel 2. 78	Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	81
Tabel 2. 79	Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu	BAB II.	81
Tabel 2. 80	Luasan Areal Kumuh di Provinsi Bengkulu	BAB II.	83
Tabel 2. 81	Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	84
Tabel 2. 82	Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	87
Tabel 2. 83	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2020 – 2024	BAB II.	89
Tabel 2. 84	PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bengkulu (miliar rupiah) Tahun 2020–2024	BAB II.	92
Tabel 2. 85	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024	BAB II.	94
Tabel 2. 86	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bengkulu (miliar rupiah) Tahun 2020-2024	BAB II.	94
Tabel 2. 87	Distribusi Persentase PDRB ADHK Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024	BAB II.	95

Tabel 2. 88	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024	BAB II.	95
Tabel 2. 89	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) 2020-2024	BAB II.	96
Tabel 2. 90	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	97
Tabel 2. 91	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2024	BAB II.	97
Tabel 2. 92	PDRB Perkapita ADHK Kabupaten/Kota 2020-2024	BAB II.	98
Tabel 2. 93	Perkembangan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	98
Tabel 2. 94	Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	100
Tabel 2. 95	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu	BAB II.	100
Tabel 2. 96	Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	101
Tabel 2. 97	Perkembangan akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu	BAB II.	102
Tabel 2. 98	Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu	BAB II.	103
Tabel 2. 99	Perkembangan Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu	BAB II.	104
Tabel 2. 100	Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu	BAB II.	107
Tabel 2. 101	Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu	BAB II.	108
Tabel 2. 102	Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu	BAB II.	109
Tabel 2. 103	Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	110
Tabel 2. 104	Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu	BAB II.	111
Tabel 2. 105	Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu	BAB II.	113
Tabel 2. 106	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.	BAB II.	114
Tabel 2. 107	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020 - 2024	BAB II.	134
Tabel 2. 108	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020-2024	BAB II.	141
Tabel 2. 109	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020-2024	BAB II.	145
Tabel 2. 110	Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020-2024	BAB II.	148
Tabel 2. 111	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	BAB II.	150
Tabel 2. 112	Implikasi Kebijakan menggunakan prinsip akuntansi akrual	BAB II.	153
Tabel 2. 113	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	BAB II.	154

Tabel 2. 114	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	BAB II.	202
Tabel 3. 1	Keselarasan Visi RPJPD 2025-2045, Visi RPJMN 2025-2029 dan Visi RPJMD 2025-2029	BAB III.	3
Tabel 3. 2	Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045, Misi RPJMN 2025-2029, dan Misi RPJMD 2025-2029	BAB III.	4
Tabel 3. 3	Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	BAB III.	9
Tabel 3. 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029	BAB III.	15
Tabel 3. 5	Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu 2025 – 2029	BAB III.	18
Tabel 3. 6	Rumusan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu 2025 – 2029	BAB III.	24
Tabel 3. 7	Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	BAB III.	25
Tabel 3. 8	Tahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2030	BAB III.	26
Tabel 3. 9	Strategi Pencapaian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8% Provinsi Bengkulu 2030	BAB III.	51
Tabel 3. 10	Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran,Outcome berserta Indikator dengan Program Prioritas	BAB III.	77
Tabel 4.1	Program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah	BAB IV.	2
Tabel 4.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	BAB IV.	126
Tabel 4.3	Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	BAB IV.	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen	BAB I.	6
Gambar 2. 1	Peta Administratif Provinsi Bengkulu	BAB II.	3
Gambar 2. 2	Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2024 (Persen)	BAB II.	33
Gambar 2. 3	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, 2024	BAB II.	35
Gambar 2. 4	Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2024	BAB II.	36
Gambar 2. 5	Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	40
Gambar 2. 6	Tren IKS Provinsi Bengkulu	BAB II.	40
Gambar 2. 7	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	BAB II.	54
Gambar 2. 8	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023	BAB II.	54
Gambar 2. 9	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022	BAB II.	57
Gambar 2. 10	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021-2024	BAB II.	58
Gambar 2. 11	Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2024	BAB II.	61
Gambar 2. 12	Jumlah Pendapatan dan PAD, 2020-2024	BAB II.	136
Gambar 2. 13	Pajak Daerah dari tahun 2020-2024	BAB II.	137
Gambar 2. 14	Pertumbuhan Sektor Pajak per tahun	BAB II.	137
Gambar 2. 15	Retribusi Daerah dari tahun 2020-2024	BAB II.	138
Gambar 2. 16	Pertumbuhan Retribusi Daerah per tahun	BAB II.	138
Gambar 2. 17	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dari tahun 2020-2024	BAB II.	138
Gambar 2. 18	Sektor yang berkontribusi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	BAB II.	139
Gambar 2. 19	Tren Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Provinsi Bengkulu, 2020-2024	BAB II.	149
Gambar 3. 1	Tahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2030	BAB III.	42

BAB I.
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan mewujudkan kesinambungan, keselarasan, dan efektivitas pembangunan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Dokumen ini menjadi jembatan strategis antara arah pembangunan jangka panjang daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan implementasi visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, yakni H. Helmi Hasan dan H. Mian, untuk periode jabatan 2025–2030.

Visi yang diusung, yaitu "Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan", dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Visi ini mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur dengan penguatan nilai-nilai religiusitas, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, penyusunan RPJMD ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menegaskan bahwa RPJMD Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMN sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu Tahun 2024 (Pasal 2 ayat 1 & 6). Dengan demikian, RPJMD Bengkulu diarahkan agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Adapun Asta Cita, yakni delapan misi Presiden, menjadi kerangka fundamental RPJMN dan terdiri dari:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan dan kemandirian nasional berbasis energi, pangan, dan ekonomi berkelanjutan;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja berkualitas;
4. Memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender;
5. Meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi inklusif;
7. Memperkuat reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang bersih dan efektif;

8. Memperkuat harmoni sosial, budaya, lingkungan, serta toleransi antarumat beragama.

RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 disusun untuk menginternalisasi misi-misi tersebut ke dalam kebijakan daerah melalui pendekatan terukur, adaptif, dan berbasis data. Fokus pembangunan diarahkan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan infrastruktur konektivitas, hilirisasi pertanian dan perikanan, serta inovasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Hal ini menjadi kontribusi aktif Provinsi Bengkulu terhadap pencapaian visi nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketimpangan wilayah, dan ketidakpastian geopolitik, RPJMD ini disusun dengan pendekatan teknokratik berbasis *evidence-based policy*. Proses perencanaan melibatkan analisis mendalam terhadap isu strategis daerah, proyeksi pembangunan lintas sektor, dan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD ini disusun sesuai dengan pedoman teknis nasional untuk menjamin proses yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini menjadi sangat krusial dalam masa transisi pemerintahan daerah, guna memastikan kesinambungan agenda pembangunan, stabilitas kebijakan, serta percepatan transformasi struktural daerah.

Dengan demikian, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 bukan sekadar dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga merupakan instrumen strategis pembangunan daerah yang:

1. Memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional
2. Mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
3. Mendukung pencapaian misi Presiden melalui implementasi prioritas nasional; dan
4. Menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bengkulu yang lebih maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan secara nyata dan inklusif.

1. 2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 didasari melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6042):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Menteri Oalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025 - 2029;

27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6).

1. 3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

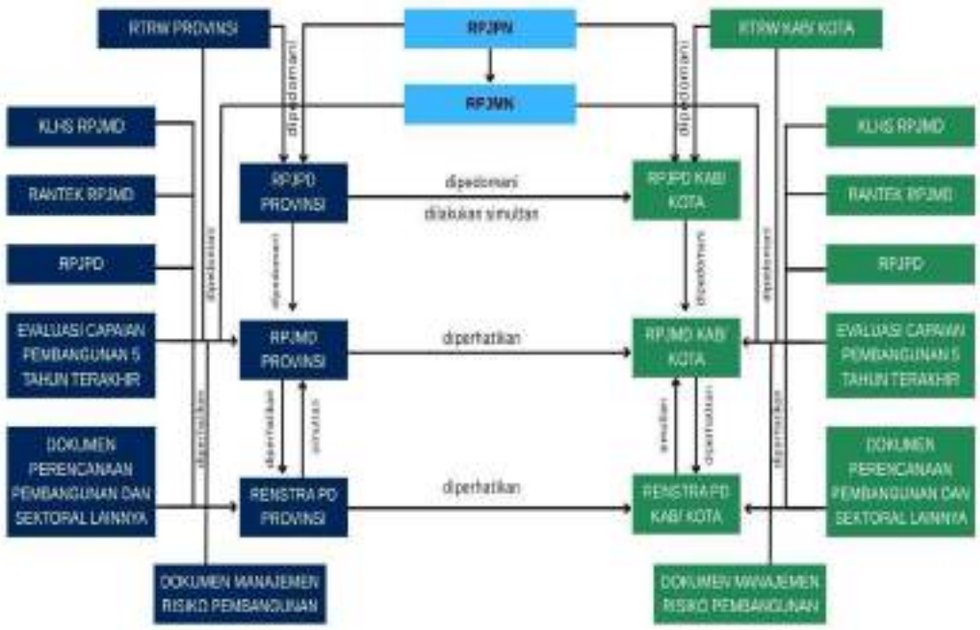

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

Gambar di atas menunjukan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

A. Pemerintah Pusat:

1. RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) sebagai pedoman utama bagi seluruh perencanaan pembangunan nasional.
2. RPJM Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan Dokumen yang menjabarkan RPJP Nasional dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

B. Pemerintah Daerah:

1. RPJP Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah): Pedoman utama bagi perencanaan pembangunan daerah, diacu dari RPJP Nasional.
2. RTRW Provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPJMD.
3. RPJM Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah): Dokumen yang menjabarkan RPJP Daerah dan menjadi dasar penyusunan RKP Daerah.
4. RKP Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah): Rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RPJM Daerah.
5. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah): Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.
6. KLHS RPJMD menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
7. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
8. RJPJPID (Rencana Jangka Panjang Pembangunan Infrastruktur Daerah) menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
9. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun Terakhir menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
10. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD.
11. Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan menjadi salah satu yang menjadi perhatian dalam RPJMD terkait risiko ataupun dampak negatif dalam proses pembangunan.
12. RPJP Nasional menjadi pedoman bagi RPJP Daerah.
13. RPJM Nasional menjabarkan RPJP Nasional dan memberikan pedoman untuk RPJM Daerah.
14. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan dijabarkan dalam RKP Daerah.
15. Renstra PD dan Renja-PD merupakan dasar bagi penyusunan RKA-SKPD yang menjadi bahan untuk RAPBD dan akhirnya APBD.

Proses penyelarasan ini dilakukan melalui mekanisme seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk memastikan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, serta antara rencana strategis dengan anggaran.

1.3.1 Hubungan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang strategis dan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2025. Hubungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan aplikatif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta ditegaskan kembali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa RPJMD harus mengacu dan diselaraskan dengan dokumen RPJMN sebagai dasar perencanaan nasional lima tahunan.

Secara subtantif, RPJMD Provinsi Bengkulu berperan sebagai instrumen perencanaan daerah yang menerjemahkan Asta Cita (8 Misi Presiden) dan Prioritas Nasional dalam konteks lokal Bengkulu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, sekaligus mempertahankan relevansi lokal dan aspirasi masyarakat provinsi. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui:

1. Penyelarasan visi, misi, dan sasaran RPJMD dengan prioritas nasional;
2. Integrasi indikator kinerja utama (IKU) nasional ke dalam dokumen kinerja daerah;
3. Pemanfaatan kerangka ekonomi makro nasional sebagai referensi sinkronisasi program prioritas;
4. Penyesuaian program unggulan daerah agar mendukung proyek-proyek strategis nasional di wilayah Bengkulu.

Selain itu, dokumen RPJMD menjadi dasar hukum dan referensi strategis bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 48 Permendagri 86/2017, yang menyatakan bahwa Renstra harus mengacu pada RPJMD dan selaras dengan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, serta memperhatikan arah dan sasaran nasional. Dalam tataran praktis, penyelarasan dilakukan melalui:

1. Pemetaan keterkaitan program nasional dengan urusan daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
2. Penyesuaian struktur program dan kegiatan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
3. Pengintegrasian indikator pembangunan nasional ke dalam sistem evaluasi kinerja daerah (SIPD);
4. Koordinasi teknis dengan Bappenas dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri dalam forum *Desk Sinkronisasi*.

Ruang lingkup hubungan antara RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMN tidak hanya terbatas pada aspek makroekonomi dan prioritas pembangunan, tetapi juga menyangkut sinkronisasi spasial, sektoral, serta tematik, seperti:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Transformasi digital dan layanan publik;
3. Ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya alam;
4. Pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko

bencana;
5. Pembangunan SDM unggul dan inklusif;
6. Reformasi birokrasi daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan yang sinkron, RPJMD harus mencantumkan secara eksplisit keterkaitan dengan dokumen RPJMN melalui:

1. Matriks keterpaduan kebijakan pusat-daerah;
2. Referensi indikator nasional dalam pengukuran kinerja daerah;
3. Bab khusus atau sub-substansi yang menyajikan kontribusi daerah terhadap capaian nasional, sebagaimana diamanatkan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Lampiran I poin 5.

Dengan demikian, RPJMD Provinsi Bengkulu berfungsi sebagai jembatan koordinatif dan aplikatif antara kebijakan nasional dan implementasi daerah. Hubungan ini memastikan bahwa Provinsi Bengkulu tidak hanya menjadi objek pembangunan nasional, tetapi juga aktor utama dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, melalui pencapaian sasaran nasional jangka menengah secara terintegrasi, responsif, dan berbasis kebutuhan lokal.

1.3.2 Hubungan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJPD Tahun 2025- 2045

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045. RPJPD sebagai dokumen perencanaan makro selama 20 (dua puluh) tahun, berfungsi sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen jangka menengah dan pendek di tingkat daerah.

Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta diperkuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD. Hal ini memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan indikator kinerja dalam RPJMD berada dalam lintasan strategis pembangunan 20 tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Secara aplikatif, hubungan antara RPJMD dan RPJPD diwujudkan melalui:

1. Penjabaran tujuan dan sasaran RPJPD ke dalam tahapan 5 tahunan (RPJMD), dengan tetap menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan;
2. Penyelarasan visi dan misi kepala daerah dengan visi besar dalam RPJPD;
3. Penetapan program prioritas dan indikator kinerja yang

berbasis pada *roadmap* pembangunan jangka panjang daerah;

4. Integrasi skenario pembangunan jangka panjang dalam proyeksi pembangunan menengah di sektor-sektor utama seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan.

RPJMD 2025–2029 berfungsi sebagai tahapan awal dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Bengkulu 2025–2045. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan lima tahunan biasa, tetapi sebagai fondasi pelaksanaan awal tahapan pembangunan jangka panjang, yang nantinya akan dievaluasi dan diakumulasi untuk periode berikutnya. Dalam praktiknya, untuk menjamin keterhubungan tersebut, RPJMD:

1. Merujuk secara langsung pada visi dan misi RPJPD Provinsi Bengkulu 2025–2045;
2. Menyusun narasi keterkaitan antara sasaran RPJMD dan *milestone* pembangunan 20 tahun;
3. Memuat indikator antara (intermediate indicators) yang menandai capaian tahapan awal dari RPJPD;
4. Menyusun peta jalan (roadmap) dan matriks integrasi RPJMD–RPJPD yang menggambarkan keterkaitan tematik dan sektoral antar keduanya;
5. Menyesuaikan alokasi sumber daya dan pembiayaan dalam kerangka waktu 5 tahun yang mendukung target jangka panjang.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran I Inmendagri No. 2 Tahun 2025, RPJMD juga wajib mencantumkan uraian konsistensi dan kesinambungan antara RPJPD dan RPJMD secara eksplisit dalam dokumen. Konsistensi ini menjadi dasar bagi pengawasan dan evaluasi Bappeda serta Kemendagri terhadap logika perencanaan jangka panjang dan menengah di tingkat daerah.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJPD tidak hanya bersifat formal, tetapi juga strategis, aplikatif, dan terukur, guna memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan dalam koridor jangka panjang yang telah ditetapkan dan berkontribusi signifikan terhadap capaian Visi Bengkulu 2045.

1.3.3 Hubungan RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 harus mempertimbangkan dan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043 yang telah ditetapkan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip bahwa perencanaan pembangunan dan penataan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun

2017, serta diperkuat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023.

RTRW berfungsi sebagai kerangka spasial untuk mengarahkan pembangunan wilayah yang seimbang, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus merujuk dan mempedomani struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW provinsi. Secara aplikatif, keterkaitan ini diwujudkan dalam aspek-aspek berikut:

1. **Sinkronisasi Pola dan Struktur Ruang**
   RPJMD harus mengacu pada struktur ruang (jaringan transportasi, sistem kota, pusat pertumbuhan) dan pola ruang (peruntukan lahan: kawasan lindung dan budidaya) yang telah ditetapkan dalam RTRW. Setiap rencana pembangunan infrastruktur, pemukiman, kawasan industri, dan pariwisata harus dipastikan berada dalam zona ruang yang sesuai.
   Contoh Aplikasi: Penetapan lokasi proyek strategis daerah, kawasan ekonomi khusus, dan konektivitas antarwilayah harus mengacu pada zona prioritas dalam RTRWP Bengkulu 2023–2043.
2. **Integrasi Indikatif Lokasi dan Program**
   Melalui penyusunan peta keterpaduan rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang, RPJMD dapat menetapkan lokasi kegiatan prioritas pembangunan sesuai zonasi RTRW. Ini penting untuk menjamin keterpaduan perencanaan sektoral dengan alokasi ruang secara spasial.
   Contoh Aplikasi: Rencana pembangunan pelabuhan, jalan provinsi, atau kawasan strategis pariwisata harus dikonfirmasi kesesuaiannya dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi.
3. **Penghindaran Konflik dan Tumpang Tindih**
   Dengan penyelarasan ini, potensi konflik penggunaan lahan, tumpang tindih kebijakan sektoral, serta ketidaksesuaian antarinstansi dapat diminimalkan. Kesesuaian program pembangunan dengan pemanfaatan ruang menjadi instrumen penting dalam mencegah sengketa tata ruang dan mempercepat proses perizinan.
   Contoh Aplikasi: Proyek pembangunan kawasan industri atau perkebunan besar harus mendapat verifikasi kesesuaian ruang dari RTRW sebelum dimasukkan dalam RPJMD.
4. **Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**
   RTRW mengatur zonasi kawasan lindung dan konservasi yang harus menjadi perhatian dalam penetapan lokasi kegiatan pembangunan. RPJMD wajib menghindari alokasi

proyek di kawasan dengan daya dukung rendah, atau di kawasan berisiko tinggi seperti daerah rawan bencana.

Contoh Aplikasi: Rencana pembangunan pemukiman dan jaringan jalan harus mempertimbangkan peta rawan longsor, banjir, dan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam RTRW.

5. **Dokumentasi Kesesuaian dan Rekomendasi Teknis**

   Sebagaimana diamanatkan oleh SE Mendagri 100.4.4/110/SJ Tahun 2023, RPJMD harus menyusun lampiran/tautan matriks kesesuaian dengan RTRW, serta peta tematik yang menunjukkan integrasi program pembangunan dengan zonasi ruang.

   Contoh Aplikasi: Lampiran khusus dalam dokumen RPJMD memuat tabel "Kesesuaian Program Strategis RPJMD dengan Rencana Pola Ruang Wilayah".

Dengan menyelaraskan RPJMD dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan didukung secara spasial dan legal, serta sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk implementasi nyata dari integrasi sistem perencanaan pembangunan dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3.4 Hubungan RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Bengkulu

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 secara hukum wajib mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 6, 10, dan 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
2. Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan
4. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang menggarisbawahi bahwa hasil KLHS wajib menjadi dasar dalam substansi RPJMD

KLHS adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan, termasuk di dalam dokumen RPJMD. Melalui KLHS, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memastikan bahwa strategi pembangunan lima tahunan tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan dan mampu mengantisipasi dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem. Bentuk dan Tahapan Integrasi KLHS dalam RPJMD.

1. **Analisis Isu Strategis Lingkungan**
    - KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan prioritas yang relevan dengan wilayah Bengkulu, seperti: degradasi lahan, banjir, deforestasi, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
    - Isu-isu tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Bab Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD.
2. **Penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL)**
    - KLHS menyediakan hasil analisis kuantitatif atas kapasitas lingkungan hidup daerah.
    - RPJMD harus menjadikan data ini sebagai dasar penentuan skala prioritas program/kegiatan, termasuk alokasi pemanfaatan ruang, sektor ekonomi prioritas, dan kebijakan sosial.
3. **Formulasi Tujuan dan Sasaran Berkelanjutan**
    - Hasil KLHS menjadi referensi dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan lingkungan antarwilayah dan antar-generasi.
4. **Integrasi ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan**
    - Kebijakan, program, dan kegiatan dalam RPJMD harus memuat elemen mitigasi dan adaptasi terhadap risiko lingkungan, sebagaimana disarankan dalam dokumen KLHS.
5. **Indikator Kinerja Lingkungan**
    - RPJMD wajib menyusun indikator pembangunan yang mempertimbangkan indikator keberlanjutan, seperti indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), jejak karbon, indeks rawan bencana, dan indeks risiko iklim.
6. **Rencana Mitigasi dan Adaptasi**
    - Langkah-langkah mitigatif dari KLHS, seperti perlindungan kawasan lindung, pembangunan rendah emisi, dan konservasi sumber daya alam, harus tercermin dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas RPJMD.

Manfaat Aplikatif Integrasi KLHS dalam RPJMD

1. Mengurangi potensi konflik pembangunan dengan perlindungan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas evaluasi dampak pembangunan terhadap ekosistem;
3. Memperkuat legitimasi perencanaan daerah di mata pusat dan lembaga pengawas lingkungan;
4. Menjadi dasar untuk memperoleh persetujuan lingkungan, terutama dalam perencanaan infrastruktur dan investasi;
5. Mendukung integrasi dengan agenda global, seperti Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan komitmen penurunan emisi GRK (NDC Indonesia).

Rekomendasi Teknis dalam perumusan RPJMD, hasil KLHS wajib dilampirkan dan dijadikan:

1. Bagian dari analisis awal perumusan kebijakan;
2. Acuan dalam penyusunan peta kebijakan spasial;
3. Referensi dalam pengawasan dan evaluasi dampak lingkungan pembangunan daerah;
4. Dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI) serta RAD-GRK.

Dengan demikian, integrasi KLHS ke dalam RPJMD Provinsi Bengkulu bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi landasan moral dan strategis untuk menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan secara inklusif, efisien sumber daya, dan harmonis dengan daya dukung lingkungan jangka panjang.

1.3.5 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral dan tematik. Keterkaitan ini sangat penting untuk menciptakan perencanaan yang koheren, tidak tumpang tindih, dan mampu mengarahkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 5 dan Pasal 165–170 serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, dokumen RPJMD wajib merujuk dan menyinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik yang bersifat regulatif, sektoral, maupun lintas-tematik. Beberapa dokumen yang wajib diintegrasikan dalam proses penyusunan RPJMD antara lain:

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**
   RPJMD Provinsi Bengkulu harus mengintegrasikan prinsip, tujuan, indikator, dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja utama (IKU), dan program pembangunan daerah.
   Aplikasi: Penyusunan Matriks Integrasi SDGs–RPJMD untuk 17 tujuan dan 169 indikator, serta pengukuran capaian TPB melalui indikator daerah.
2. **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (RPKD)**
   RPJMD menjadi landasan dalam perumusan RPKD yang memuat strategi dan program-program intervensi kemiskinan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Aplikasi: Penetapan target pengurangan kemiskinan dalam RPJMD harus sinkron dengan rencana aksi RPKD yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

3. **Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)**
   RPJMD harus menjamin penyelarasan program ketahanan pangan, gizi anak, dan akses makanan bergizi dengan kebijakan nasional dan provinsi yang tercantum dalam RAD-PG.
   Aplikasi: Penyusunan program intervensi gizi terintegrasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan daerah.
4. **Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-MAPI) dan Rencana Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)**
   Kedua dokumen ini wajib dijadikan referensi dalam merumuskan arah pembangunan rendah karbon di tingkat daerah.
   Aplikasi: Integrasi program penghijauan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pembangunan energi terbarukan ke dalam RPJMD.
5. **Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)**
   RPJMD harus memuat arah kebijakan pembangunan kependudukan, mencakup pengendalian jumlah penduduk, kualitas SDM, mobilitas, dan penataan persebaran penduduk.
   Aplikasi: RPJMD merumuskan strategi pembangunan SDM yang sesuai dengan bonus demografi dan proyeksi struktur usia penduduk.
6. **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**
   RPJMD menjadi dasar dan acuan resmi bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renstra selama 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Permendagri 86/2017.
   Aplikasi: RPJMD mencantumkan program prioritas lintas perangkat daerah yang diturunkan menjadi indikator dan target dalam Renstra.
7. **RPJMD Kabupaten/Kota**
   RPJMD Provinsi menjadi acuan vertikal bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD masing-masing agar selaras secara substansi, wilayah, dan prioritas pembangunan.
   Aplikasi: Forum Musrenbang Provinsi menjadi ruang koordinasi vertikal agar RPJMD kabupaten/kota mendukung target provinsi dan nasional.
8. **KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**
   Sebagaimana dijelaskan pada Subbab 1.3.4, RPJMD wajib mengadopsi hasil KLHS untuk menjamin kesesuaian

pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Aplikasi: Indikator lingkungan dari KLHS wajib dimasukkan dalam sistem monitoring dan evaluasi RPJMD.

9. **Dokumen Tematik dan Inisiatif Daerah**

   Selain dokumen di atas, RPJMD juga harus memperhatikan dokumen strategis lainnya yang relevan, seperti:

   - Dokumen Peta Jalan Ekonomi Digital;
   - Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
   - Rencana Aksi Daerah Gender dan Anak;
   - Strategi Penanganan Ketimpangan Wilayah;
   - Strategi Ekonomi Biru dan Ekowisata di wilayah pesisir dan laut.

   Agar keterkaitan ini bukan sekadar administratif, integrasi dilakukan melalui:

   - Pemetaan awal dokumen acuan pada tahap persiapan RPJMD;
   - Forum konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis;
   - Penggunaan aplikasi SIPD sebagai platform integrasi dan pelaporan;
   - Pencantuman dokumen acuan dalam lampiran dan daftar referensi resmi RPJMD;
   - Pengawasan dan verifikasi oleh Bappeda dan Kemendagri saat penilaian dokumen RPJMD.

Dengan memperkuat hubungan antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan berjalan integratif, harmonis, dan akuntabel, serta mendukung upaya kolektif dalam mewujudkan visi Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan selaras dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

1. 4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 bermaksud untuk memberikan informasi pembangunan daerah melalui penyajian data terkait gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi dan misi dan program prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu periode masa pemerintahan tahun 2025-2029 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis;
3. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah;
5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional;
6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bengkulu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota;
7. Sebagai pedoman bagi *stakeholder* khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
8. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Bengkulu berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN;
9. Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, kebijakan nasional dan lingkungan strategis sebagai bahan perumusan permasalahan, dan isu strategis daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan;
10. Mengidentifikasi agenda kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029.

1. 5. SISTEMATIKA RPJMD PROVINSI BENGKULU TH. 2025-2029

Adapun sistematika RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.5. Sistematika penulisan

Memuat sistematika penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah yang terdiri dari :

1.1.1. Aspek Geografi dan demografi

1.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1.2. Gambaran Keuangan Daerah

Sub bab ini menggambarkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Pada BAB III ini, struktur keuangan daerah menggunakan struktur sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai dasar menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Selanjutnya pada bab ini juga menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan daftar program perangkat daerah kurun waktu 2025-2029 beserta indikator program, target dan pagu indikatifnya. Disamping itu juga menampilkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) juga target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II.
GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2. 1.Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) kota, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 129 (seratus dua puluh sembilan) Kecamatan, dan 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) desa/kelurahan.

Provinsi Bengkulu memiliki posisi yang strategis di wilayah barat Pulau Sumatera. Keunggulan geografis, ekonomi, serta sumber daya alamnya menjadikan Bengkulu sebagai daerah dengan peran penting dalam pembangunan nasional. Posisi suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain:

a. Geografis: Letak daerah yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional, berbatasan dengan negara lain, atau memiliki akses ke pelabuhan dan bandara strategis.
b. Ekonomi: Keberadaan industri utama, pusat perdagangan, atau kawasan ekonomi khusus yang menjadi penggerak pertumbuhan nasional.
c. Sosial dan Budaya: Keberagaman etnis, adat, dan budaya yang menjadi daya tarik pariwisata serta memperkaya identitas nasional.

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit

Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang 2°16´ - 3°31' LS dan garis bujur 101°1´ - 103°41' BT, sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
b. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
c. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
d. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun luas wilayah Provinsi Bengkulu seluas 20.122,210 Km² yang terdiri atas garis pantai sepanjang ± 525 km terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki 129 kecamatan, 172 kelurahan dan 1.341 desa. Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau Enggano, serta pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus, dan pulau-pulau kecil lainnya yang belum diberi nama.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kota Bengkulu	Bengkulu	150,183	9	67	-
2	Bengkulu Selatan	Manna	1.219,063	11	16	142
3	Rejang Lebong	Curup	1.559,419	15	34	122
4	Bengkulu Utara	Argamakmur	4.478,107	19	5	215
5	Kaur	Bintuhan	2.607,839	15	3	192
6	Seluma	Tais	2.432,088	14	20	182
7	Mukomuko	Mukomuko	4.137,520	15	3	148
8	Lebong	Tubei	1.666,621	12	11	93
9	Kepahiang	Kepahiang	738,965	8	12	105
10	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	1.132,405	11	1	142
Jumlah			**20.122,210**	**129**	**172**	**1.341**

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Berdasarkan luas wilayah, daratan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Kabupaten yang paling luas yang mencapai 4.478,107 km², atau sebesar kurang lebih 22 % dari total wilayah Provinsi

Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu memiliki wilayah terkecil dan menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, tidak ada perubahan jumlah kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu. Kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan terbanyak terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebanyak 19 kecamatan, sedangkan yang paling sedikit pada Kabupaten Kepahiang yaitu sebanyak 8 kecamatan. Sama dengan jumlah kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 220 desa dan kelurahan, namun jumlah desa dan kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh Kota Bengkulu yaitu sebanyak 67 kelurahan.

Sumber : Perda RTRW Provinsi Bengkulu

Gambar 2. 1 Peta Administratif Provinsi Bengkulu

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari utara ke selatan. Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar +50 Km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai,

dengan panjang garis pantai +525 Km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (altitude) berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran aluvium;
b. Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari aluvium ke perbukitan;
c. Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;
d. Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kaur yang merupakan Taman Nasional;
e. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664 ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional;
f. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630 ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur;
g. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338 ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Tabel 2. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Provinsi
Bengkulu Selatan	25 - 500	138
Rejang Lebong	500 - 1.900	88
Bengkulu Utara	0 - 2.300	42
Kaur	0 - 1.500	200
Seluma	100 - 500	60
Mukomuko	0 - 1.500	273

Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Provinsi
Lebong	500 - 1.000	114
Kepahiang	350 - 1.200	55
Bengkulu Tengah	0 - 541	20
Kota Bengkulu	0 - 500	0
Provinsi Bengkulu	**0 - 2.300**	**0**

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Bengkulu

Geografi Bengkulu memberikan potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata. Provinsi Bengkulu memiliki kondisi geografis yang unik, Geografi Bengkulu memberikan potensi besar dalam beberapa sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang sangat mempengaruhi langsung perekonomian Provinsi Bengkulu. Berikut adalah beberapa dampak utama geografi Bengkulu terhadap ekonominya:

a. Potensi Kelautan dan Perikanan
   Bengkulu memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Samudra Hindia, yang memberikan potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Namun, karena ombak yang besar dan arus yang kuat, nelayan sering mengalami kendala dalam melaut, sehingga hasil tangkapan bisa fluktuatif.
b. Pertanian dan Perkebunan sebagai Sektor Utama
   Wilayah Bengkulu didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan, khususnya di bagian timur yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Kondisi ini membuat sektor pertanian dan perkebunan berkembang pesat, terutama untuk komoditas seperti:
   a) Kopi (terutama kopi robusta)
   b) Kelapa sawit
   c) Karet
   d) Cengkeh
c. Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas
   Pegunungan yang membentang di bagian timur Bengkulu menyebabkan akses transportasi ke provinsi lain, seperti Sumatera Selatan dan Jambi, menjadi cukup sulit. Hal ini berdampak pada biaya distribusi barang yang tinggi, yang berpengaruh pada harga komoditas dan daya saing ekonomi Bengkulu.
d. Sumber Daya Alam dan Pertambangan
   Bengkulu memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Selain itu, terdapat potensi emas dan bahan tambang lainnya.

Namun, eksploitasi sumber daya ini masih menghadapi tantangan, seperti isu lingkungan dan keterbatasan teknologi eksplorasi.

e. Pariwisata Berbasis Alam
Keindahan alam Bengkulu, seperti Pantai Panjang, Danau Dendam Tak Sudah, dan Taman Nasional Kerinci Seblat, memberikan potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun, pengembangan wisata masih terkendala oleh infrastruktur dan promosi yang kurang optimal.

Letak geografis Provinsi Bengkulu memberikan berbagai dampak terhadap aspek sosial dan budaya masyarakatnya.Keberagaman suku dan adat di Bengkulu sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti kondisi pegunungan yang membuat komunitas berkembang secara terpisah, wilayah pesisir yang mendukung interaksi antarbudaya, dan keterisolasian wilayah seperti Pulau Enggano yang mempertahankan keunikan budayanya. Kondisi geografis Bengkulu yang terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir menyebabkan munculnya beragam suku dengan budaya yang berbeda. Contohnya:

a) Suku Rejang (di daerah pegunungan seperti Rejang Lebong dan Lebong) memiliki tradisi agraris yang kuat.
b) Suku Serawai (di wilayah Bengkulu Selatan dan Seluma) memiliki budaya yang dekat dengan Minangkabau.
c) Suku Enggano (di Pulau Enggano) memiliki adat istiadat yang unik dan lebih tertutup dari pengaruh luar.

Adat Istiadat yang Beragam, setiap suku memiliki sistem adat sendiri, seperti hukum adat Rejang dan Serawai yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. **Pengaruh Budaya dari Luar Akibat Letak Strategis**
   a) Kontak dengan Budaya Melayu dan Minangkabau
   Berbatasan dengan Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat, budaya Bengkulu banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Minangkabau, terutama dalam bahasa dan adat perkawinan.
   b) Pengaruh Kolonial Inggris
   Bengkulu pernah menjadi pusat kekuasaan Inggris di masa kolonial (sebelum diserahkan ke Belanda), sehingga terdapat peninggalan sejarah seperti Benteng Marlborough serta pengaruh dalam sistem pemerintahan dan arsitektur.

2. **Mobilitas Penduduk dan Akulturasi Budaya**
   a) Pelabuhan dan Jalur Perdagangan
      Posisi Bengkulu yang berbatasan dengan Samudra Hindia membuatnya menjadi daerah perdagangan sejak zaman kolonial. Ini menyebabkan masuknya suku-suku lain seperti Jawa, Minang, dan Batak yang berbaur dengan budaya setempat.
   b) Program Transmigrasi
      Banyak penduduk dari Pulau Jawa yang datang melalui program transmigrasi pada era Orde Baru, sehingga membawa serta budaya Jawa yang kini turut memperkaya keberagaman budaya Bengkulu.
3. **Keterisolasian Wilayah dan Tradisi yang Masih Kuat**
   a) Sulitnya Akses ke Beberapa Wilayah
      Kondisi geografis Bengkulu yang dikelilingi Pegunungan Bukit Barisan menyebabkan beberapa daerah sulit dijangkau, sehingga budaya lokal masih terjaga dengan baik, terutama di daerah pedalaman.
   b) Pulau Enggano yang Terpencil
      Masyarakat di Pulau Enggano masih mempertahankan tradisi dan bahasa asli mereka karena minimnya pengaruh dari luar akibat keterbatasan akses.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 29,83 persen. Dengan nilai nominal 31,01 triliun rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan. Provinsi Bengkulu juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan.

Selain sayuran dan buah-buahan, juga terdapat tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Jenis tanaman hias yang ada antara lain anggrek, krisan, mawar, dan sedap malam. Sedangkan jenis tanaman biofarmaka yang menghasilkan antara lain jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. Pada sektor perkebunan, dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Pada sektor peternakan, hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, itik, ayam ras, dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan kinerja urusan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Produksi padi	Ton GKG	290.413	272.773	290.156	286.684	272.848
Produksi jagung	TON PK	141.680	83.115	103.706	71.976	n/a
Produksi bawang merah	Kwintal	5.197	990	6.430	6.706	7.222*
Produksi cabai merah	Kwintal	114.926	48.868	863.057	1.089.332,8	n/a
Produksi kopi	Ton	62.759	62.215	56.029	50.370	54.084
Produksi karet	Ton	101.246	113.521	90.109	102.322	88.039
Produksi sawit	Ton	799.891	727.269	730.789	1.053.614	1.000.962
Jumlah produksi daging sapi	Ton	3.149,00	2.753	2.616	1.512	1.311
Jumlah Produksi daging kambing	Ton	114,40	102	176	102,87	49,54
Jumlah produksi daging unggas	Ton	13.881,80	16.451	13.282	11.117	12.026*

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian Provinsi Bengkulu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka

Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai yang diperkirakan sekitar 525 km, dengan luas Laut Teritorial sebesar 53.000 km^2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan luas sebesar 685.000 km^2. Sebagai daerah maritim, sektor kelautan dan perikanan menjadi komoditas utama Provinsi Bengkulu. Perkembangan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton (ribu)	65,75	35,31	41,64	81,90	90,11
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	227.683	112.203	113.918	160.092	232,957

Sumber: DKP Provinsi Bengkulu 2024

Kehutanan

Salah satu elemen ekosistem yang paling penting adalah hutan. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga berperan dalam mengontrol iklim, menghentikan erosi tanah, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah. Semua peran ini sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Pada tahun 2023, luas lahan kritis sebesar 277.708 ha. Karena rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat, luas lahan kritis telah berkurang, tetapi masih sedikit kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi lahan kritis.

Sebagai hasil dari kurangnya upaya perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat melalui program perhutanan sosial, dan pemeliharaan batas kawasan hutan, laju deforestasi diproyeksikan menurun pada tahun 2021, menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Di bawah ini adalah perkembangan kinerja Departemen Kehutanan Provinsi Bengkulu:

Tabel 2. 5 Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tutupan Lahan	Nilai	53,15	55,52	55,19	n/a	n/a
Luas Lahan Kritis	Ha	713.985	713.985	524.709	277.708	n/a
Laju Deforestasi	Nilai	0,22	0,045	n/a	n/a	n/a

*Sumber: Buku Profil Daerah, 2024 (*n/a = data belum tersedia/belum rilis)*

Sebaran Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Kab	Lahan Kritis 2017		Lahan Kritis 2018		Lahan Kritis 2019		Lahan Kritis 2020		Lahan Kritis 2021	
	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan
Bengkulu Selatan	16,382.11	44,391.45	16,132.11	44,291.45	16,132.11	44,291.45	16,132.11	44.541,90	16.571,88	44.541,90
Bengkulu Tengah	20,860.78	72,562.74	20,860.78	72,562.74	20,860.78	71,462.74	20,860.78	72.562,75	20,860.77	72.562,75
Bengkulu Utara	14,061.16	163,031.99	13.811,16	162,931.99	13,811.16	162.781,99	16.250,47	176.282,70	16.250,70	176.282,70
Kaur	23,730.58	69,379.23	23.555,58	69,379.23	22.805,58	68.754,23	35.338,48	70.839,00	35.338,48	70.839,00
Kota Bengkulu	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58
Lebong	20,181.21	44,735.43	20,181.21	44.585,43	20,181.21	44.360,43	20.178,25	28.226,24	20.178,25	28.226,24
Mukomuko	21,589.20	65,276.41	21,589.20	65,276.41	21.539,20	65.076,41	21.591,38	65.300,98	21.591,38	65.300,98
Rejang Lebong	16,138.04	9,986.17	15,843.04	9,986.17	15,843.04	9,986.17	554,86	908,48	554.86	908,48
Seluma	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943.79	20.936,18	86.645,73	20.936,18	86.645,73
Kepahiang	7,138.38	5,067.67	7,138.38	4.967,67	7,138.38	4,967.67	7,138.38	4,967.67	7,138.38	4,967.67
TOTAL	**139.146,13**	**561.658,46**	**158.176,13**	**561.208,46**	**157.376,13**	**558.908,46**	**159.426,45**	**554.559,03**	**159.426,45**	**554.559,03**

Sumber: Buku Profil Daerah, 2024

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Bengkulu, infrastruktur kelistrikan terus dibangun. Ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah ada, menambah mesin pembangkit listrik baru, dan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Bengkulu agak meningkat dari 2019 hingga 2023. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sebanyak 1512 desa di Provinsi Bengkulu telah memiliki listrik, termasuk 1 desa yang menggunakan kincir non-PLN dan 1512 desa yang menggunakan listrik PT. PLN.

Salah satu faktor utama yang memastikan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor ekonomi (industri, perdagangan, dan sebagainya) adalah ketersediaan pasokan listrik. Salah satu cara untuk mengukur ketersediaan pasokan listrik adalah dengan menghitung rasio elektrifikasi (RE), yang merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dan jumlah total rumah tangga. Sementara itu, peran subsektor pertambangan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu sangat kecil, seperti yang ditunjukkan oleh perannya yang relatif rendah dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2023, perannya hanya sebesar 5,67 persen dari PDRB. Tidak optimalnya eksploitasi sumber daya tambang yang ada di Provinsi Bengkulu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu telah mencapai perkembangan kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi	%	99,99	99,04	99,61	99,99	99,99
Persentase Luas lahan Reklamasi	%	69,24	n/a	n/a	n/a	n/a

*Sumber: Buku Profil Daerah, 2024 (*n/a = data belum tersedia/belum rilis)*

Sebaran Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Bengkulu	99.78	99.78	99.94	99.99	99.99
2	Bengkulu Utara	99.58	99.29	99.85	99.99	99.99
3	Bengkulu Selatan	98.24	99.25	99.84	99.99	99.99
4	Kaur	99.31	98.36	99.76	99.99	99.99
5	Rejang Lebong	99.57	99.48	99.90	99.99	99.99
6	Seluma	100.00	99.99	99.06	99.99	99.99
7	Mukomuko	100.00	99.99	100.00	99.99	99.99
8	Kepahiang	91.21	92.28	98.44	99.99	99.99
9	Lebong	100.00	99.99	99.44	99.99	99.99
10	Bengkulu Tengah	100.00	99.99	100.00	99.98	99.98

Sumber: Buku Profil Daerah, 2024

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam dokumen KLHS RPJPD Provinsi Bengkulu periode tahun 2025-2045. Kesimpulan dari laporan KLHS

RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Kesimpulan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Bengkulu

Jenis muatan Lingkungan	Kondisi Lingkungan	Persentase Kriteria	
Daya Dukung Pangan	• Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 2.112.235 jiwa • Ketersediaan air di Provinsi Bengkulu 144.664.516 Kg/Tahun • Kebutuhan air di Provinsi Bengkulu: 286.684.430 Kg/Tahun • Nilai Status Ambang Batas Kebutuhan Pangan 1.98 • Status Daya Dukung Panan Belum terlampaui (surplus) untuk Provinsi Bengkulu • 7 Kabupaten dengan status Daya dukung pangan yang belum terlampaui yaitu Kabupaten Lebong (6.97), Kabupaten Bengkulu Selatan (4.30), Kabupaten Seluma (2.93), Kabupaten Kaur (2,84), Kabupaten Rejang Lebong (1.92), Kabupaten Mukomuko (1.90) dan Kabupaten Kepahiang (1.77). • 3 Kabupaten/Kota dalam kondisi Daya Dukung Pangan yang sudah terlampaui/Defisit yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah (0.62), Kabupaten Bengkulu Utara (0.92), dan Kota Bengkulu (0.18)	Kebutuhan Pangan (m^3/Tahun) 34 %	Ketersediaan Pangan (m^3/Tahun) 66%
Daya Dukung Daya Tampung Air	• Ketersediaan air di Provinsi Bengkulu 30,049,994,860 m3 /Tahun • Kebutuhan air di Provinsi Bengkulu: 7,589,289,442 m3 /Tahun • Nilai Status Ambang Batas Kebutuhan Air 3.96 • Status Daya Dukung Air Belum terlampaui (surplus) untuk seluruh Kabupaten se Provinsi Bengkulu	Kebutuhan (m^3/Tahun) 57 %	Ketersediaan (m^3/Tahun) 43%

Sumber: KLHS Provinsi Bengkulu

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Selain PPH, indikator yang menjadi rujukan kinerja ketahanan pangan adalah Angka Stabilitas Harga Pangan. Harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Stabilitas harga pangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjamin agar roda perekonomian terus berputar. Kenaikan harga pangan yang sulit diantisipasi dapat menimbulkan gejolak keresahan ditengah masyarakat.

Stabilitas harga pangan pada sisi produksi harus dijaga ketersediaannya, agar tidak terjadi kekurangan pasokan. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peningkatan produksi berada di Kementerian Pertanian. Namun produksi pertanian kita sangat rentan terhadap iklim dan gangguan cuaca. Jika cuaca mendukung terkadang harga pangan rendah akibat produksi melimpah, namun jika cuaca ekstrem seperti fenomena cuaca El Nino dan La Nina produksi terganggu dan harga pangan tinggi.

Tabel 2. 10 Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	-	69,94	65,74	72,27	N/A
Skor PPH Ketersediaan Pangan	Angka	82	86,52	89,66	89,28	89,8
Skor PPH Konsumsi Pangan	Angka	82,60	82,7	87,1	87,8	N/A
Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	%	-	80	98	86,6	N/A

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Provinsi bengkulu, 2024 dan Badan Ketahanan Pangan.

Stabilitas harga pangan pada sisi konsumsi atau hilir terkait stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi tupoksi terbesar Kementerian Perdagangan. Jika ke dua sisi produksi dan konsumsi berjalan pada relnya, sebenarnya harga kebutuhan pokok di pasaran sudah pasti stabil. Namun jika harga terus mengalami kenaikan, maka harus dilakukan pengecekan pada dua sisi tersebut. Ada kemungkinan sisi produksi memang bermasalah karena gagal panen atau memang distribusi yang terhambat akibat infrastruktur yang rusak.

Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu terus meningkat hingga mencapai Rp. 11.733.000 pada tahun 2024 yang artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu

selama setahun adalah Rp. 11.733.000. Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita	x 000 rupiah	10.380	10.487	10.840	11.172	11.733

Sumber:BPS Provinsi Bengkulu.

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	62,47	67,39	73,07	73,08	72,1

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Dalam periode 2020 hingga 2024, akses rumah tangga terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 62,47% pada tahun 2020 menjadi 67,39% pada tahun 2021. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan signifikan hingga 73,07%, yang sedikit naik menjadi 73,08% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 72,1%.

Penurunan menunjukkan adanya perkembangan desa dalam pemekaran wilayah tidak di imbangi atas ketersediaan atau kualitas akses air minum layak di tahun terakhir. Hal ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat akses air minum layak adalah salah satu indikator penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2. 13 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkulu Selatan	45,78	58,22	65,00	67,72	68,26
2.	Rejang Lebong	45,24	65,07	57,25	56,37	55,60
3.	Bengkulu Utara	56,24	53,11	82,64	84,11	80,40
4.	Kaur	79,40	86,20	83,94	84,18	79,79
5.	Seluma	37,54	47,04	71,59	70,93	70,46
6.	Mukomuko	79,41	75,99	75,73	75,45	75,82
7.	Lebong	61,16	57,37	54,85	59,70	57,41
8.	Kepahiang	63,82	62,65	61,81	62,14	61,20
9.	Bengkulu tengah	49,32	63,06	51,89	50,44	50,44
10.	Kota Bengkulu	88,77	92,21	94,51	93,38	92,21
Provinsi Bengkulu		**62,47**	**67,39**	**73,07**	**73,08**	**72,10**

Sumber :Provinsi Bengkulu dalam Angka tahun 2025

Data ini menunjukkan dinamika yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota terkait akses rumah tangga terhadap air minum layak. Secara keseluruhan, Provinsi Bengkulu mencatat peningkatan persentase dari 62,47% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 73,08% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 72,10% pada tahun 2024.Bengkulu Selatan mengalami peningkatan konsisten dari 45,78% pada tahun 2020 menjadi 68,26% pada tahun 2024.

a) Rejang Lebong menunjukkan tren fluktuatif, meningkat tajam dari 45,24% (2020) menjadi 65,07% (2021), tetapi menurun secara bertahap hingga 55,60% di tahun 2024
b) Bengkulu Utara mencatat kenaikan pesat dari 56,24% (2020) hingga mencapai 84,11% pada 2023, meskipun mengalami penurunan ke 80,40% di 2024.
c) Kaur stabil di kisaran tinggi, mencapai 86,20% pada 2021, namun turun perlahan hingga 79,79% di tahun 2024.
d) Seluma memperlihatkan pertumbuhan signifikan dari 37,54% (2020) ke 71,59% (2022), tetapi turun sedikit ke 70,46% pada 2024.
e) Mukomuko stabil di angka tinggi, berfluktuasi tipis sekitar 75,73%-79,41% selama periode tersebut.
f) Lebong mengalami penurunan dari 61,16% (2020) ke 57,41% pada tahun 2024.
g) Kepahiang dan Bengkulu Tengah cenderung menurun perlahan dengan angka masing-masing mencapai 61,20% dan 50,44% pada 2024.
h) Kota Bengkulu memimpin dengan angka tertinggi secara konsisten, dari 88,77% (2020) hingga 94,51% pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 92,21% pada 2024.

Perbedaan tren ini mencerminkan tantangan dan keberhasilan spesifik di masing-masing wilayah, yang bisa terkait dengan faktor pengelolaan infrastruktur, kondisi geografis, atau program pemerintah setempat. Peningkatan di beberapa daerah menunjukkan adanya perbaikan akses, sedangkan penurunan di wilayah lain memerlukan perhatian untuk memperbaiki cakupan layanan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Keanekaragaman Hayati

Selama periode 2021 hingga 2024, Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati melalui berbagai program perlindungan kawasan, rehabilitasi lingkungan, dan penguatan pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem. Pengukuran Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH) di beberapa ekosistem utama menunjukkan capaian sebagai berikut:

1. Ekosistem Hutan

   Kawasan Taman Wisata Alam Seblat yang merupakan habitat satwa liar seperti gajah sumatera dan berbagai jenis burung menunjukkan nilai IKH yang tinggi. Pada tahun 2021, nilai indeks Shannon-Wiener (H') untuk burung tercatat H' = 2,64 di hutan primer dan H' = 2,44 di hutan sekunder. Hingga 2024, kondisi keanekaragaman relatif stabil seiring dengan upaya perlindungan kawasan dan penguatan koridor satwa liar.

   - Ekosistem Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Keanekaragaman makroinvertebrata di sungai-sungai utama seperti Sungai Selagan dan Sungai Kampai menunjukkan kondisi bervariasi.
   - Nilai IKH pada tahun 2021 berada dalam kisaran H' = 0,84 – 2,20, menunjukkan tekanan ekologis terutama di bagian hilir.
   - Upaya pengendalian pencemaran dan rehabilitasi DAS mulai dilakukan secara bertahap sejak 2022.

2. Ekosistem Danau dan Lahan Basah
   - Kawasan Danau Dusun Besar memiliki indeks keanekaragaman tinggi pada vegetasi semak dan herba (H' = 3,68), namun rendah pada vegetasi pohon (H' = 0,29), mengindikasikan perlunya rehabilitasi vegetasi arboreal.
   - Kawasan Danau Dendam Tak Sudah juga menunjukkan nilai IKH burung yang tergolong sedang (H' = 2,41), dengan potensi peningkatan melalui pengelolaan lanskap dan edukasi masyarakat.

3. Lahan Pertanian dan Pekarangan

   Di wilayah pertanian rakyat seperti di Kabupaten Seluma, nilai IKH makrofauna tanah tergolong rendah (H' = 0,868 pada tahun 2021), mencerminkan dampak dari penggunaan bahan kimia dan pola tanam monokultur. Hingga 2024, program agroforestry, diversifikasi tanaman, dan pelatihan pertanian ramah lingkungan mulai diterapkan di beberapa desa.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung naik turun. Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 71,48 kemudian kembali turun pada tahun 2022 menjadi 70,82, naik 72,1 di

tahun 2023 dan kembali naik menjadi 73,45 pada tahun 2024, IKLH dibentuk oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Perkembangan kinerja Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	Angka	61,16	71,48	70,82	72,1	73,45
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	42,5	49,81	46,18	48,98	51,99
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	90,52	90,81	91,27	92.49	94,13

Sumber: DLHK Provinsi Bengkulu.

IKLH Tahun 2020 menurun hingga menjadi 61,16. IKA Tahun 2020 terjadi penurunan diakibatkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa lokasi di seluruh kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. IKU pada Tahun 2020-2024 berada pada kulitas udara di level Baik, yaitu pada angka 94,14 pada tahun 2024.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses Sanitasi layak	%	78,10	79,81	79,58	80,28	83,01

Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bengkulu Selatan	77,57	78,18	84,09	83,81	84,42
2	Rejang Lebong	70,59	75,44	70,20	64,41	71,81
3	Bengkulu Utara	74,17	78,12	83,44	82,84	85,53
4	Kaur	77,04	77,78	81,23	86,43	87,75

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Seluma	74,87	76,15	86,16	87,17	88,75
6	Mukomuko	76,73	77,55	79,12	80,94	85,82
7	Lebong	54,61	60,96	51,92	55,62	59,38
8	Kepahiang	68,66	71,49	64,58	69,25	69,81
9	Bengkulu Tengah	79,92	79,94	74,65	83,07	83,17
10	Kota Bengkulu	89,68	89,76	94,49	93,94	96,15
	Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang positif secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data dari "Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025," persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di tingkat provinsi meningkat dari 78,1% pada tahun 2020 menjadi 83,01% pada tahun 2024.

a) Bengkulu Selatan mencatat peningkatan konsisten, dari 77,57% pada 2020 menjadi 84,42% pada 2024.
b) Rejang Lebong mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2023 (64,41%) setelah peningkatan pada 2021 (75,44%), namun kembali naik ke 71,81% pada 2024.
c) Bengkulu Utara menunjukkan tren peningkatan, dari 74,17% pada 2020 hingga mencapai 85,53% di 2024.
d) Kaur secara stabil mengalami kenaikan, dari 77,04% pada 2020 menjadi 87,75% pada 2024.
e) Seluma mencatat pertumbuhan signifikan dari 74,87% pada 2020 menjadi 88,75% pada 2024, dengan peningkatan besar terlihat pada 2022 dan seterusnya.
f) Mukomuko menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 76,73% pada 2020 menjadi 85,82% pada 2024.
g) Lebong mengalami fluktuasi dengan penurunan pada 2022 (51,92%), tetapi perlahan meningkat ke 59,38% pada 2024.
h) Kepahiang juga fluktuatif, menurun ke 64,58% pada 2022 sebelum kembali naik ke 69,81% pada 2024.
i) Bengkulu Tengah mencatat peningkatan signifikan, terutama dari 74,65% pada 2022 menjadi 83,17% pada 2024.
j) Kota Bengkulu terus menjadi daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi, dari 89,68% pada 2020 hingga mencapai 96,15% pada 2024.

Perkembangan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi Bengkulu. Peningkatan di sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program terkait, meskipun tetap ada tantangan di beberapa wilayah yang perlu perhatian lebih.

Rumah Tangga yang menempati RLH

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas

berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/*vinyl*/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 17 Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga yang menempati RLH (%)	47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Sumber : Dinas Perkim Provinsi Bengkulu

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase rumah tangga yang menempati Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas Perkim Provinsi Bengkulu, persentase rumah tangga yang menempati RLH tercatat sebesar 47,94% pada tahun 2020. Angka ini meningkat menjadi 51,36% pada 2021 dan terus naik hingga mencapai puncaknya 54,98% pada tahun 2022. Meskipun pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,74%, persentase ini kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 56,52%.

Tren ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencerminkan efektivitas program-program pemerintah di bidang perumahan dan permukiman. Meski demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Persampahan

Saat ini, sampah belum menjadi permasalahan utama di Provinsi Bengkulu. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, dalam beberapa tahun ke depan, sampah akan menjadi persoalan yang serius. Volume sampah yang dihasilkan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampah dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti kegiatan harian rumah tangga, transportasi, rumah sakit, hotel, rumah makan, serta kawasan pariwisata. Jenis sampah yang dihasilkan pun sangat beragam, antara lain limbah domestik, limbah B3, limbah radioaktif, limbah nosokomial, dan jaringan tubuh. Setiap jenis limbah memerlukan penanganan yang tepat.

Prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan sampah adalah 5R, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle, Replace,* dan *Replant*. Dalam penanganan volume sampah, diperlukan langkah-langkah khusus agar kota kita tidak tenggelam dalam timbunan sampah beserta dampak negatif yang ditimbulkannya. Hasil perhitungan beban pencemaran sungai lintas kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa limbah domestik merupakan penyumbang dominan pencemaran air sungai yang berasal dari aktivitas manusia.

Sebaiknya, sistem pengelolaan sampah dilakukan secara *sanitary landfill*, yaitu metode pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, lalu menimbunnya dengan tanah.

Lokasi yang digunakan biasanya berada jauh dari permukiman untuk menghindari berbagai permasalahan sosial. Beberapa tempat pembuangan akhir (TPA) telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk air lindi, namun belum berjalan secara efektif karena sarana pendukung lainnya belum tersedia.

Sampah yang dihasilkan masyarakat semestinya dikelola dengan baik melalui manajemen persampahan. Pengelolaan sampah mencakup pengaturan terkait pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir dengan merujuk pada prinsip-prinsip terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan lainnya. Hal ini juga harus tanggap terhadap perilaku masyarakat. Tujuan mendasar dari pengelolaan persampahan meliputi peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, perlindungan terhadap sumber daya alam (terutama air), perlindungan terhadap fasilitas sosial dan ekonomi, serta dukungan terhadap sektor strategis.

Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga merupakan bagian dari gaya hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, selain edukasi dan imbauan, perlu pula diterapkan peraturan yang tegas serta penegakan hukum terkait larangan membuang sampah sembarangan. Pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu:

- 40% berasal dari kondisi lingkungan,
- 30% dari perilaku hidup,
- 20% dari pelayanan kesehatan, dan
- 10% dari faktor genetik.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard, Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	Nilai	162,00	157,14	155,35	148,75	144,08

Sumber : Buku Profil Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren penurunan yang signifikan, mencerminkan adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Buku Profil Daerah 2025, nilai indeks ini tercatat sebesar 162,00 pada tahun 2020 dan secara konsisten menurun menjadi 157,14 pada tahun 2021, 155,35 pada tahun 2022, 148,75 pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai 144,08 pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait dalam mengimplementasikan strategi mitigasi bencana, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, edukasi masyarakat, dan kesiapan menghadapi bencana. Meski menunjukkan hasil yang positif, langkah-langkah berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga dan mempercepat penurunan risiko bencana, mengingat pentingnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Satuan Perlindungan Masyarakat

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 19 Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Satlinmas	%	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk

Sumber : Buku Profil Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Provinsi Bengkulu tetap stabil di angka 61 anggota Satlinmas per 10.000 penduduk setiap tahunnya, data di atas menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan jumlah personel Satlinmas untuk mendukung upaya penegakan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan penanganan bencana.

Stabilitas rasio ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam program pengelolaan dan keberadaan Satlinmas, namun juga mengindikasikan perlunya evaluasi apakah jumlah ini memadai untuk kebutuhan perlindungan

masyarakat seiring dengan perkembangan populasi dan kompleksitas tantangan di daerah.

2.1.1.7 Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebanyak 2.112.235 jiwa yang terdiri atas 1.078.754 jiwa penduduk laki-laki dan 1.033.481 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bengkulu Selatan	142,9	166,3	168,0	170,09	171463	173315
2.	Rejang Lebong	246,8	276,7	278,8	281,28	285710	288832
3.	Bengkulu Utara	257,7	296,5	299,4	302,83	306659	310125
4.	Kaur	107,9	126,6	128,0	129,66	131063	132659
s5.	Seluma	173,5	207,9	210,5	213,76	215063	217507
6.	Mukomuko	155,8	190,5	193,2	196,57	198794	201700
7.	Lebong	99,2	106,3	106,8	107,25	110347	111750
8.	Kepahiang	124,9	149,7	151,6	154	154651	156353
9.	Bengkulu tengah	98,3	116,7	118,1	119,81	121139	122673
10.	Kota Bengkulu	308,5	373,6	378,6	384,84	391117	397321
Provinsi Bengkulu		1.715,5	2.010,7	2.032,9	2.060,09	2.086,06	2.112,2

Sumber: BPS 2024

Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
	2024	2024	2024
0-4	93.545	89.582	183.127
5-9	89.184	85.420	174.604
10-14	88.597	84.523	173.120
15-19	88.615	82.742	171.357
20-24	88.311	83.266	171.577
25-29	88.810	84.733	173.543
30-34	86.878	82.967	169.845
35-39	84.047	80.836	164.883
40-44	78.724	75.800	154.524
45-49	72.752	69.806	142.558
50-54	63.140	60.400	123.540
55-59	52.272	49.791	102.063
60-64	41.095	39.239	80.334
65-69	29.598	28.246	57.844
70-74	18.851	18.716	37.567
75+	14.335	17.414	31.749
Jumlah	**1.078.754**	**1.033.481**	**2.112.235**

Sumber: BPS 2024

Dari tabel di atas, komposisi penduduk Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 menurut kelompok usia, menunjukkan bahwa jumlah tertinggi ada pada kelompok penduduk usia (0-4 tahun) yaitu sebanyak 183.127 jiwa dan paling rendah ada pada kelompok penduduk usia (75 tahun ke atas) yaitu sebanyak 31.749 jiwa. Berdasarkan hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa penduduk Provinsi Bengkulu didominasi kelompok usia muda.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu Kota Bengkulu sebesar 1,66 dan terendah yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan 1,12. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sepanjang Tahun 2020-2024 sebesar 1,32, laju pertumbuhan penduduk terjadi karena dipengaruhi faktor kematian, kelahiran, dan migrasi.

Tabel 2. 22 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%), 2020-2024
Provinsi Bengkulu	**1,32**
Bengkulu Selatan	1,12
Rejang Lebong	1,16
Bengkulu Utara	1,20
Kaur	1,26
Seluma	1,21
Mukomuko	1,54
Lebong	1,34
Kepahiang	1,16
Bengkulu Tengah	1,34
Kota Bengkulu	1,66

Sumber: BPS 2025

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas daerah yang ditempati, dihitung dengan cara jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah. Semakin besar angkanya maka semakin padat wilayahnya, sebaliknya semakin kecil angkanya maka semakin renggang penduduknya. Kepadatan penduduk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 23 Kepadatan Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	Kepadatan Penduduk di Provinsi Bengkulu (jiwa/km²)		
	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	**102.34**	**103.63**	**104.93**
Bengkulu Selatan	139.40	140.52	142.04
Rejang Lebong	181.59	184.45	186.46
Bengkulu Utara	67.57	68.42	69.19
Kaur	49.70	50.24	50.85
Seluma	87.86	88.40	89.41
Mukomuko	47.50	48.03	48.74
Lebong	64.35	66.21	67.05
Kepahiang	205.49	206.37	208.64
Bengkulu Tengah	105.81	106.98	108.34
Kota Bengkulu	2.560.32	2.602.07	2.643.34

Sumber: BPS 2025

Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Bengkulu ada di Kota Bengkulu, yaitu berjumlah 2.643,34 jiwa/km². Wilayah kabupaten terpadat ada di Kabupaten Kepahiang, sebesar 208,64 jiwa/km² dan terkecil yaitu Kabupaten Mukomuko sebesar 48,74 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yaitu 104,93 jiwa/km². Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong beberapa faktor. Selain karena pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya Fisiografis, Ekonomi, Sosial, dan budaya.

Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.

Tabel 2. 24 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bengkulu Selatan	115.612	118.424	122.475	128.560	126.531
2	Kab. Rejang Lebong	135.906	139.423	195.681	214.501	204.238
3	Kab. Bengkulu Utara	80.676	82.850	209.991	219.464	219.978
4	Kab. Kaur	181.512	188.996	89.777	98.912	94.376
5	Kab. Seluma	200.813	205.620	142.893	158.924	146.806
6	Kab. Mukomuko	246.371	254.998	134.393	141.123	140.904
7	Kab. Lebong	98.649	101.057	81.491	84.388	83.999
8	Kab. Kepahiang	127.539	130.336	103.503	114.890	106.819
9	Kab. Bengkulu Tengah	77.400	79.244	84.933	89.304	88.632
10	Kota Bengkulu	84.704	87.619	265.554	277.070	280.915
	Provinsi Bengkulu	**1.349.182**	**1.388.567**	**1.430.691**	**1.527.136**	**1.493.138**

Sumber: Profil Diskdukcapil Provinsi Bengkulu 2024

Tabel 2. 25 Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektronik dan Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Dokumen Kependudukan			
		KTP	KIA	Akta Kelahiran	KK
1	Bengkulu Selatan	126.531	26.187	51.590	55.826
2	Rejang Lebong	204.238	58.899	80,642	92.046
3	Bengkulu Utara	219.978	86.929	92,751	99.040
4	Kaur	94.376	24.749	39,883	42.423
5	Seluma	146.806	49.829	61,934	70.172
6	Mukomuko	140.904	47.574	66,480	61.888
7	Lebong	83.999	27.812	32,640	38.709
8	Kepahiang	106.819	23.876	43,468	49.103
9	Bengkulu Tengah	88.632	23.850	38,824	40.360
10	Kota Bengkulu	280.915	71.892	123,830	122.578
	Provinsi Bengkulu	**1.493.198**	**441.597**	**632.042**	**672.145**

Sumber : BPS 2025

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun ke atas (UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selain KTP, dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

Tabel 2. 26 Proyeksi Jumlah dan kepadatan penduduk menurut umur dan jenis kelamin (dalam Ribu)

Laki-laki	Tahun				
Umur	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0–4	94,46	94,30	94,09	93,82	93,52
5–9	89,29	90,38	91,40	92,37	93,28
10–14	88,61	88,69	88,83	89,01	89,19
15–19	88,65	88,63	88,58	88,52	88,49
20–24	88,10	88,01	88,01	88,08	88,14
25–29	88,88	88,76	88,50	88,18	87,89
30–34	87,21	87,60	88,01	88,37	88,62
35–39	84,78	85,35	85,77	86,08	86,38
40–44	79,54	80,43	81,37	82,31	83,18
45–49	73,98	75,04	75,93	76,72	77,49
50–54	64,77	66,37	67,92	69,40	70,75
55–59	53,85	55,45	57,06	58,67	60,26
60–64	42,64	44,14	45,61	47,06	48,52
65–69	30,90	32,27	33,67	35,09	36,51
70–74	20,11	21,26	22,34	23,37	24,43
75–79	9,85	10,80	11,81	12,84	13,83
80+	5,64	6,00	6,42	6,91	7,47
Total	**1.091,26**	**1.103,45**	**1.115,30**	**1.126,80**	**1.137,97**

Perempuan	Tahun				
Umur	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
0–4	90,54	90,39	90,20	89,96	89,69
5–9	85,42	86,47	87,49	88,51	89,51
10–14	84,90	85,20	85,39	85,50	85,55
15–19	82,93	83,22	83,61	84,04	84,47
20–24	82,87	82,61	82,47	82,45	82,55

Perempuan	Tahun				
Umur	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
25–29	84,72	84,47	84,05	83,53	83,02
30–34	83,16	83,44	83,77	84,08	84,27
35–39	81,44	81,85	82,10	82,25	82,39
40–44	76,68	77,60	78,56	79,47	80,26
45–49	71,12	72,26	73,25	74,14	74,99
50–54	62,16	63,86	65,51	67,07	68,51
55–59	51,50	53,27	55,06	56,86	58,65
60–64	40,99	42,69	44,32	45,94	47,56
65–69	29,71	31,29	32,96	34,67	36,38
70–74	19,99	21,21	22,40	23,58	24,82
75–79	10,82	11,75	12,78	13,87	14,97
80+	7,83	8,32	8,86	9,48	10,20
Total	**1.046,79**	**1.059,89**	**1.072,77**	**1.085,4**	**1.097,78**

Sumber : BPS 2025

Tabel 2. 27 Proyeksi penduduk usia produktif (dalam Ribu)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
15–19	171.58	171.85	172.19	172.56	172.96
20–24	170.97	170.62	170.48	170.53	170.69
25–29	173.60	173.23	172.55	171.71	170.91
30–34	170.37	171.04	171.78	172.45	172.89
35–39	166.22	167.20	167.87	168.33	168.77
40–44	156.22	158.03	159.93	161.78	163.44
45–49	145.10	147.30	149.18	150.86	152.48
50–54	126.93	130.23	133.43	136.47	139.26
55–59	105.35	108.72	112.12	115.53	118.91
Total	**1,386.34**	**1,398.22**	**1,409.53**	**1,420.22**	**1,430.31**

Sumber : BPS 2025

Tabel 2. 28 Proyeksi angka ketergantungan (dalam Ribu)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	185.00	184.69	184.29	183.78	183.21
5–9	174.71	176.85	178.89	180.88	182.79
10–14	173.51	173.89	174.22	174.51	174.74
60–64	83.63	86.83	89.93	93.00	96.08
65–69	60.61	63.56	66.63	69.76	72.89
70–74	40.10	42.47	44.74	46.95	49.25
75–79	20.67	22.55	24.59	26.71	28.80
80+	13.47	14.32	15.28	16.39	17.67
Total	**751.70**	**765.16**	**778.57**	**791.98**	**805.43**

Sumber : BPS 2025

Tabel 2. 29 Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (15-59) (Persen)

2025	2026	2027	2028	2029
64.84	64.63	64.42	64.20	63.97

Sumber : BPS 2025

Berdasarkan tabel di atas, proporsi lebih jumlah Penduduk Usia Produktif (15-59) dibanding dengan usia non produktif di provinsi Bengkulu telah terjadi pada tahun 2024 dan ini merupakan bonus demografi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu saat ini. Namun berdasarkan proyeksi jumlah tersebut

cenderung mengalami penurunan Bonus demografi Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan dalam lima tahun kedepan hingga tahun 2029. bonus demografi dimaksud adalah masa dimana penduduk usia produktif (15-60 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk.

Tabel 2. 30 Proyeksi penduduk usia lanjut (dalam Ribu)

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
60–64	83.63	86.83	89.93	93.00	96.08
65–69	60.61	63.56	66.63	69.76	72.89
70–74	40.10	42.47	44.74	46.95	49.25
75–79	20.67	22.55	24.59	26.71	28.80
80+	13.47	14.32	15.28	16.39	17.67
TOTAL	**218.48**	**229.73**	**241.17**	**252.81**	**264.69**

Sumber : BPS 2025

Melihat dari data capaian kinerja pada aspek Aspek Geografi dan Demografi Provinsi Bengkulu dalam 5 Tahun terakhir, pada Aspek geografi dan demografi mengacu pada karakteristik fisik wilayah yang dapat mempercepat atau menghambat proses pembangunan.

Beberapa data pada Aspek Geografi seperti data Kondisi Lingkungan, Potensi Sumber Data Alam dan kebencanaan sampai dengan data Data Demografi, faktor seperti lokasi Provinsi Bengkulu yang berada pada garis pantai dan memiliki Topografi wilayah garis pantai dan pegunungan menimbukan dampak pada komoditas pertanian yang dihasilkan pada provinsi bengkulu serta provinsi bengkulu juga terdapat potensi sumber data alam seperti tambang batubara dan potensi panas bumi, kembali melihat data pada aspek geografi dan demografi provinsi bengkulu perlu adanya program yang langsung menyasar pada potensi capaian daerah yang cenderung mengalami kenaikan secara stabil.

Pada Aspek Demografi diperoleh data capaian yang cenderung stabil seperti perkembangan penduduk, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk sampai dengan administrasi kependudukan yang secara berkala mengalami capaian yang terus membaik, Faktor demografi meliputi Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, migrasi dan urbanisasi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Bengkulu pada periode 2020–2024 menunjukkan keterkaitan yang kuat antara kinerja ekonomi makro dan indikator sosial. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu selama periode tersebut bergerak dalam kisaran 4,5–5,2 persen per tahun. Meskipun pertumbuhan tersebut menunjukkan arah yang positif pascapandemi COVID-19, struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi lebih dari 27 persen terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi masih menjadi agenda strategis ke depan.

Perkembangan inflasi daerah selama periode yang sama menunjukkan tingkat yang relatif terkendali, dengan rata-rata berada di kisaran 3,0–3,5

persen per tahun. Stabilitas harga ini mencerminkan efektivitas pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama pada komoditas pangan strategis. Namun demikian, gejolak harga musiman masih menjadi tantangan utama dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari sisi pemerataan, nilai Indeks Gini Bengkulu berada di kisaran 0,32–0,34, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif moderat dibandingkan rata-rata nasional. Namun, ketimpangan antarwilayah masih cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini berimplikasi pada efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang pada tahun 2024 masih tercatat sekitar 14 persen — lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sekitar 9,0 persen.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 0,2–0,3 persen. Rendahnya elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan tersebut menandakan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif, terutama melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta perluasan akses terhadap layanan dasar.

Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan 0,4 poin per tahun, mencapai kisaran 72 pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pendapatan per kapita. Namun, ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah ke atas serta layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, interaksi antara PDRB, inflasi, Indeks Gini, kemiskinan, dan IPM menunjukkan adanya keterkaitan sistemik yang harus dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif, inflasi dijaga agar tetap terkendali dengan memperkuat ketahanan pangan lokal, pemerataan pendapatan didorong melalui penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan IPM difokuskan pada kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada upaya pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan sosial, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan menjadi solusi strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Beberapa indikator yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi antara lain:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Laju inflasi
3. Persentase penduduk miskin
4. Indeks Gini
5. Kemiskinan
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
7. Ketenagakerjaan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2020-2024, kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita di Provinsi Bengkulu dari tahun 2020-2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada indikator dibawah ini.

Tabel 2. 31 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	73.305,27	79.602,64	90.111,95	96.583,09	103.991,92
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	46.338,43	47.853,78	49.916,06	52.051,56	54.454,65
PDRB perkapita ADHB (Juta Rupiah)	36,5	39,1	43,7	46,29	49,23
PDRB perkapita ADHK (Juta Rupiah)	23,1	23,5	24,2	24,9	25,7
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	3,27	4,31	4,26	4,62

Sumber : Buku Profil Daerah, 2024.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) mengalami peningkatan setiap tahun. Sejalan dengan peningkatan PDRB, PDRB Per Kapita juga meningkat setiap tahunnya, menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. Pertumbuhan ekonomi tumbuh stabil di atas 3% per tahun, dengan puncak pertumbuhan pada 2024 sebesar 4,62% yang menunjukkan pemulihan dan ekspansi ekonomi yang lebih kuat.

Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus, Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang, dengan demikian inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Tabel 2. 32 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Bulan	Inflasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,14	0,39	0,54	0,62	0,82
Februari	0,09	0,14	-0,10	0,04	0,04
Maret	-0,02	0,23	0,74	0,25	-1,54
April	-0,35	0,10	1,45	0,28	-0,04
Mei	0,41	0,11	0,53	0,17	-0,04
Juni	0,04	0,31	0,60	0,21	0,06
Juli	-0,23	-0,12	0,91	0,49	0,14
Agustus	-0,22	0,16	-0,24	- 0,07	-0,02
September	0,08	0,17	1,22	0,23	0,03
Oktober	0,02	-0,02	-0,14	0,28	0,10
November	0,35	0,52	0,05	0,30	0,24
Desember	0,14	0,39	0,23	0,24	0,26
Tahunan	**0,89**	**2,42**	**5,92**	**3,09**	**0,09**

Sumber : Buku Profil Daerah, 2024.

Laju inflasi tahun kalender 2024 sebesar 0,09 persen lebih rendah dari tahun 2023 dengan laju inflasi sebesar 3,09 persen. Inflasi y-on-y di Provinsi Bengkulu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks harga kelompok pengeluaran, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan inflasi di Provinsi Bengkulu.

Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebesar 0,343.

Tabel 2. 33 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Tahun	Variabel Penyusun	Rasio Gini		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	Maret	0,38	0,28	0,33
	September	0,38	0,27	0,32
2021	Maret	0,38	0,26	0,33
	September	0,38	0,26	0,32
2022	Maret	0,370	0,262	0,315
	September	0,371	0,264	0,315
2023	Maret	0,386	0,283	0,333
	September	Tidak Rilis	Tidak Rilis	Tidak Rilis
2024	Maret	0,413	0,275	0,342
	September	0,409	0,278	0,343

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2024

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 mencapai 281,36 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 12,52 persen, menurun 1,04 persen poin terhadap Maret 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 3 ribu orang, sedangkan di daerah pedesaan turun sekitar 4,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di daerah perkotaan turun dari 14,21 persen menjadi 13,56 persen. Sementara itu, di pedesaan turun dari 13,96 persen menjadi 13,56 persen. Apabila dibandingkan persentase kemiskinan di Pulau Sumatera pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Bengkulu merupakan tertinggi kedua di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Aceh dengan 14,23 persen. Provinsi dengan persentase kemiskinan terendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan penduduk miskin sejumlah 4,55 persen dari total penduduknya. Sedangkan, jika dibandingkan dengan penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin Bengkulu masih berada di atas nasional yang sebesar 9,03 persen.

Tabel 2. 34 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu

Tahun		Persentase Penduduk Miskin		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	Maret	14,77	15,16	15,03
2020	September	15,06	15,42	15,30
2021	Maret	15,10	15,28	15,22
2021	September	14,73	14,28	14,43
2022	Maret	14,88	14,49	14,62
2022	September	14,53	14,24	14,34
2023	Maret	14,21	13,96	14,04
2023	September	Tidak Rilis	Tidak Rilis	Tidak Rilis
2024	Maret	13,56	13,56	13,56
2024	September	12,32	12,63	12,52

Sumber : Buku Profil Daerah, 2024.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pemerintah juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada bulan September 2024, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 12,52 persen (261,15 ribu orang), berkurang sebesar 1,04 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 13,56 persen (281,36 ribu orang).

Tabel 2. 35 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Mar 2020 - Sept 2024

Tahun		Indeks Kedalaman Kemiskinan		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	Maret	2,44	2,38	2,40
2020	September	2,49	2,52	2,51
2021	Maret	2,78	2,47	2,58
2021	September	2,56	2,39	2,45
2022	Maret	2,61	2,34	2,43
2022	September	2,06	2,23	2,18
2023	Maret	2,22	2,10	2,14
2023	September	Tidak Rilis	Tidak Rilis	Tidak Rilis
2024	Maret	2,44	1,94	2,11
2024	September	.....	.....	1,84

Tahun		Indeks Keparahan Kemiskinan		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	Maret	0,58	0,56	0,56
2020	September	0,59	0,67	0,64
2021	Maret	0,68	0,59	0,62
2021	September	0,59	0,52	0,55
2022	Maret	0,68	0,54	0,58
2022	September	0,43	0,49	0,47
2023	Maret	0,60	0,48	0,52
2023	September	Tidak Rilis	Tidak Rilis	Tidak Rilis
2024	Maret	0,62	0,42	0,49
2024	September	.....	.....	0,37

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perkotaan relatif lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Pada Maret 2024,

nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,44 sementara di daerah pedesaan sebesar 1,94. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,62 sedangkan di daerah pedesaan mencapai sebesar 0,42.

Jika dibandingkan dengan angka Nasional, kemiskinan di Provinsi Bengkulu selalu berada di atas kemiskinan nasional, namun secara ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Provinsi Bengkulu lebih rendah dari ketimpangan pengeluaran yang terjadi secara Nasional. Gini Ratio menggambarkan ketimpangan pendapatan/pengeluaran di suatu wilayah, Indeks ini berada pada nilai 0 - 1, dimana bila mendekati 0 berarti tidak ada sama sekali ketimpangan, dan ketimpangan sempurna bila nilai indeks sebesar 1. Sejak Maret 2020 hingga Maret 2024 angka Gini Ratio di Provinsi Bengkulu relatif mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Provinsi Bengkulu. Dari data persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota tahun 2024, terlihat bahwa Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bengkulu berada di Kabupaten Seluma sebesar 17,23% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 10,14%.

Tabel 2. 36 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Menurut Kebupaten/Kota, 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)					
		Maret			September		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Provinsi Bengkulu		590.754	637.142	671.095	625.652	-	672.816

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
		Maret			September		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Provinsi Bengkulu		306,00	288,46	281.36	292.93	-	261.15

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin					
		Maret			September		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Provinsi Bengkulu		15,22	14,04	13,56	14,34	-	12,52

Sumber : BPS, 2024.

Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan beserta hambatannya di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. **Struktur ekonomi** yang belum beragam (dominasi sektor primer).
2. **Infrastruktur kurang merata**, terutama di daerah terpencil.
3. **Pengeluaran konsumtif tinggi** (rokok).
4. **Keterbatasan peluang ekonomi desa**.
5. **Efektivitas program masih belum optimal** ((pendekatan belum menyasar kebutuhan lokal sepenuhnya).
6. **Masih adanya kemiskinan ekstrem**, (membutuhkan penanganan berlapis dan kolaboratif).

Secara keseluruhan, meski terjadi penurunan kemiskinan di Bengkulu sepanjang Tahun 2024, hambatan struktural tetap besar dan memerlukan

strategi terpadu, mulai dari reformasi ekonomi lokal hingga peningkatan tata kelola dan infrastruktur.

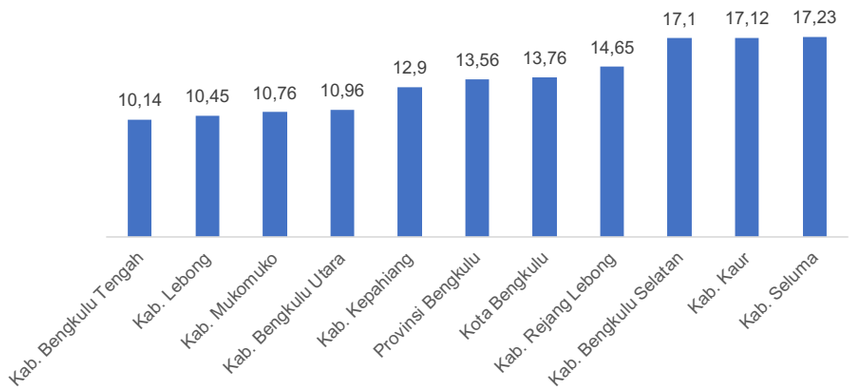

Sumber: Susenas Maret 2024

Gambar 2. 2 Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2024 (Persen)

Grafik tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2024 menunjukkan adanya disparitas antarwilayah yang cukup jelas. Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat persentase kemiskinan terendah sebesar 10,14 persen, diikuti Lebong 10,45 persen, Mukomuko 10,76 persen, dan Bengkulu Utara 10,96 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu berada pada angka 12,90 persen, dengan Kota Bengkulu sedikit lebih tinggi yaitu 13,56 persen. Beberapa daerah menunjukkan angka kemiskinan yang lebih tinggi, seperti Rejang Lebong 14,65 persen, Bengkulu Selatan 17,10 persen, Kaur 17,12 persen, dan tertinggi adalah Seluma sebesar 17,23 persen. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi intervensi yang lebih terarah untuk menekan angka kemiskinan di wilayah dengan persentase tinggi, sekaligus menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan di daerah yang sudah lebih rendah. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidupdi bawah US $ 1,9 PPP per hari. Pada tahun 2017, nilai US $ 1,9 PPP ≈ Rp10.195,6 per kapita per hari. Untuk keterbandingan antar negara, kemiskinan diukur menggunakan konsep Purchasing Power Parity (PPP).

Tabel 2. 37 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi 2023 dan 2024

Provinsi	Maret 2023	Maret 2024	Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Aceh	1,83	0,95	Kalimantan Barat	0,99	0,57
Sumatera Utara	0,78	0,54	Kalimantan Tengah	0,35	0,30
Sumatera Barat	0,41	0,57	Kalimantan Selatan	0,47	0,37
Riau	0,67	0,43	Kalimantan Timur	0,10	0,27
Jambi	0,81	0,41	Kalimantan Utara	0,34	0,44
Sumatera Selatan	1,29	0,59	Sulawesi Utara	0,78	0,56
Bengkulu	**2,08**	**0,69**	Sulawesi Tengah	1,44	1,27
Lampung	1,32	0,90	Sulawesi Selatan	1,01	0,70
Kep. Bangka Belitung	0,24	0,29	Sulawesi Tenggara	1,65	1,06
Kep. Riau	0,35	0,23	Gorontalo	2,44	1,46
DKI Jakarta	0,57	0,35	Sulawesi Barat	0,75	1,46
Jawa Barat	0,79	0,78	Maluku	2,59	1,98

Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Jawa Tengah	1,11	0,89
DI Yogyakarta	1,24	0,85
Jawa Timur	0,82	0,66
Banten	1,12	0,62
Bali	0,19	0,23
Nusa Tenggara Barat	2,64	2,04
Nusa Tenggara Timur	3,93	2,82

Provinsi	Maret 2023	Maret 2024
Maluku Utara	0,67	0,52
Papua Barat	6,43	4,45
Papua	7,67	5,59
Papua Barat Daya	-	5,25
Papua Selatan	-	3,60
Papua Tengah	-	6,09
Papua Pegunungan	-	4,01

Tabel perbandingan tingkat kemiskinan ekstrem per provinsi tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya dinamika yang berbeda di setiap daerah. Provinsi Bengkulu mencatat penurunan terbesar sebesar 1,39 persen poin, dari 2,08 persen pada Maret 2023 menjadi 0,69 persen pada Maret 2024, sementara peningkatan terbesar terjadi di Sulawesi Barat yang naik 0,71 persen poin dari 0,75 persen menjadi 1,46 persen. Beberapa provinsi lain juga mengalami penurunan signifikan seperti Aceh, Jambi, dan Papua, meskipun Papua masih mencatat angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah, masih ada provinsi yang menghadapi tantangan peningkatan, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang lebih spesifik dan terarah.

Tabel 2. 38 Persentase Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024

No.	Nama Daerah	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Bengkulu	3,72	3,61	2,08	0,69
2	Bengkulu Selatan	4,61	3,97	2,98	
3	Rejang Lebong	1,27	3,48	2,94	
4	Bengkulu Utara	4,84	1,74	0,43	
5	Kaur	6,48	7,87	3,50	
6	Seluma	3,51	4,26	3,71	
7	Mukomuko	2,60	3,17	1,19	
8	Lebong	1,34	1,05	0,84	
9	Kepahiang	1,64	2,03	1,07	
10	Bengkulu Tengah	1,32	1,26	0,43	
11	Kota Bengkulu	6,21	5,63	2,76	

Sumber data: Bappenas

Kendati pada beberapa kabupaten persentase kemiskinan ekstrem berfluktuatif, namun pada tingkat provinsi, persentase kemiskinan ekstrem konsisten mengalami penurunan. Pada Tahun 2021, persentase kemiskinan ekstrem di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 3,72 persen. Angka tersebut terus menurun hingga menjadi 0,69 persen pada tahun 2024.

Tabel 2. 39 Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Bengkulu 2021-2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)		
		2021*	2022*	2023**
1	Provinsi Bengkulu	74,84	73,33	42,73
2	Bengkulu Selatan	8,03	7,08	5,43
3	Rejang Lebong	3,48	9,59	8,19
4	Bengkulu Utara	14,84	5,40	1,33
5	Kaur	8,00	9,82	4,41
6	Seluma	6,94	8,51	7,50
7	Mukomuko	4,91	6,05	2,29

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)		
		2021*	2022*	2023**
8	Lebong	1,56	1,24	0,99
9	Kepahiang	2,32	2,89	1,54
10	Bengkulu Tengah	1,52	1,46	0,50
11	Kota Bengkulu	23,24	21,29	10,54

Keterangan :
** : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)*
*** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE*

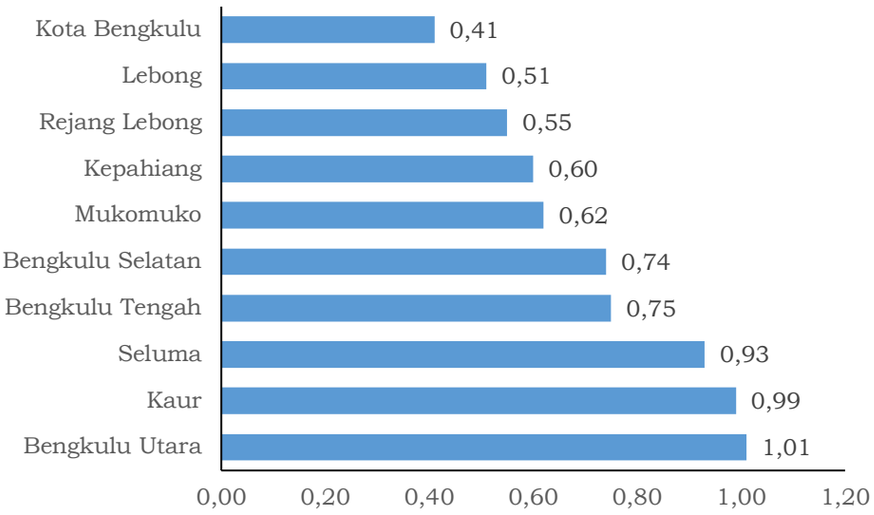

Gambar 2. 3 Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, 2024

Grafik estimasi persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Bengkulu tahun 2024 memperlihatkan variasi antar kabupaten/kota, dengan angka tertinggi terdapat di Bengkulu Utara sebesar 1,01 persen, disusul Kaur 0,99 persen, dan Seluma 0,93 persen. Sementara itu, beberapa daerah mencatat angka lebih rendah, seperti Rejang Lebong 0,55 persen, Lebong 0,51 persen, dan yang terendah adalah Kota Bengkulu dengan 0,41 persen. Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota berada di bawah 1 persen, namun adanya perbedaan antarwilayah ini menandakan perlunya perhatian khusus pada daerah dengan angka miskin ekstrem yang relatif tinggi, agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bengkulu dapat tercapai secara merata.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar yang digunakan dalam mengukur IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

a) Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk);

b) Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS);
c) PNB per kapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS.

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Selama 2020-2024, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 72,93 pada tahun 2020 menjadi 74,91 pada tahun 2024.

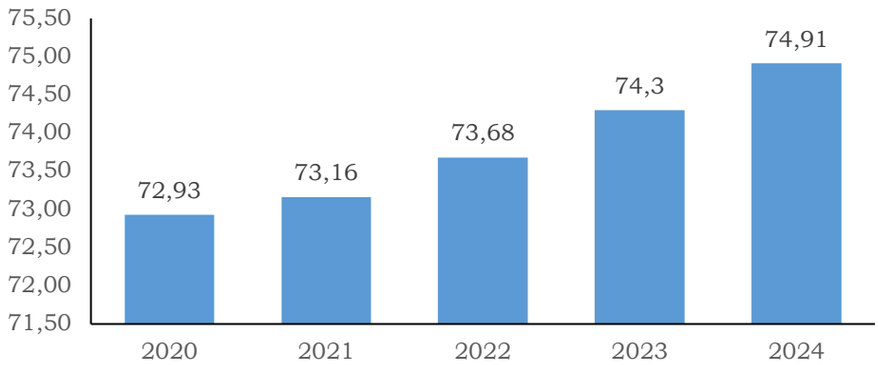

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2024

Gambar 2. 4 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2024

Ketenagakerjaan

Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2024:

a) Jumlah angkatan kerja Provinsi Bengkulu pada Februari 2024 sebanyak 1.116.138 orang, turun 14.035 orang dibandingkan Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,80 persen poin;
b) Penduduk yang bekerja sebanyak 1.080.744 orang, mengalami penurunan sebanyak 13.109 orang dibandingkan Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dibandingkan Februari 2023 adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (1,88 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (3,15 persen poin);
c) Sebanyak 697.181 orang (64,51 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik sebesar 5,75 persen poin dibandingkan Februari 2023;
d) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,17 persen, turun 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2023;
e) Persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 0,80 persen poin, dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,63 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 1.573.688 orang, naik sebanyak 19.523 orang jika dibanding Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 70,92 persen (1.116.138 orang), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri atas 1.080.744 orang penduduk yang bekerja dan 35.394 orang pengangguran.

Apabila dibandingkan Februari 2023, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 14.035 orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 13.109 orang dan jumlah pengangguran mengalami penurunan sebanyak 926 orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK pada Februari 2024 sebesar 70.92 persen, turun sebesar 1,79 persen poin dibandingkan Februari 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,04 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,15 persen.

Tabel 2. 40 Status Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Feb 2022	Feb 2023	Feb 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
Penduduk Usia Kerja	1.528.549	1.554.165	1.573.688	26.616	1,68	19.523	1,26
Angkatan Kerja	1.092.782	1.130.173	1.116.138	37.391	3,42	-14.035	-1,24
Bekerja	1.055.772	1.093.853	1.080.744	38.081	3,61	-13.109	-1,20
Pengangguran	37.010	36.320	35.394	-690	-1,86	-926	-2,55
Bukan Angkatan kerja	435.767	423.992	457.550	-11.775	-2,70	33.558	7,91
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,39	3,21	3,17	-0,18		-0,04	
Perkotaan	4,37	4,26	3,48	-0,11		-0,78	
Pedesaan	2,92	2,77	3,01	-0,15		0,24	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,49	72,72	70,92	1,23		-1,80	
Laki-laki	86,07	85,20	86,04	-0,87		0,85	
Perempuan	56,25	59,69	55,15	3,44		-4,54	

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 3,17 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Tabel 2. 41 Karakteristik Pengangguran, Februari 2022—Februari 2024

Karakteristik Pengangguran	Feb 2022	Feb 2023	Feb 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023	Perubahan Feb 2023-Feb 2024
	Persen	Persen	Persen	Persen poin	Persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,39	3,21	3,17	-0,18	-0,04
TPT Menurut Jenis Kelamin					
Laki-laki	3,30	3,00	3,17	-0,30	0,17
Perempuan	3,52	3,53	3,18	0,01	-0,35
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
Perkotaan	4,37	4,26	3,48	-0,11	-0,78
Perdesaan	2,92	2,77	3,01	-0,15	0,24

Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,17 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,18 persen. Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki naik sebesar 0,17 persen poin dan TPT perempuan turun sebesar 0,35 persen poin. Sementara itu, jika dibandingkan periode Februari 2023 dengan Februari 2022, TPT laki-laki turun sebesar 0,30 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,01 persen poin. Pada Februari 2024, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,36 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu sebesar 1,48 persen.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Kondisi kesehatan penduduk di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang positif, dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari 72,59 pada tahun 2020 menjadi 73,31 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dan gizi masyarakat. Namun, terdapat variasi antar kabupaten/kota, dengan Kota Bengkulu memiliki AHH tertinggi (71,03 pada 2024) dan Kabupaten Lebong terendah (64,13 pada 2024), menandakan masih adanya kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan.

Dari segi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya perbaikan akses layanan kesehatan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Penurunan angka stunting di Provinsi Bengkulu cukup signifikan dari 26,86% pada 2019 menjadi 5,1% pada 2023, yang menandakan keberhasilan program gizi dan intervensi kesehatan ibu dan anak. Dari segi fasilitas kesehatan, Provinsi Bengkulu memiliki 179 unit puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, serta adanya peningkatan jumlah rumah sakit di tahun 2020 dari 23 unit bertambah menjadi 24 unit di tahun 2024.

Secara keseluruhan, kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan, tetapi masih terdapat beberapa tantangan dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas medis, dan pengurangan disparitas kesehatan antar wilayah. Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kesehatan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan

melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Angka harapan hidup dari tahun 2020 sebesar 72,59 hingga tahun 2024 sebesar 73,31 menunjukkan adanya tren kenaikan meskipun relatif kecil setiap tahunnya, dengan kenaikan berkisar antara 0,06 sampai dengan 0,21. secara keseluruhan, angka harapan hidup Provinsi Bengkulu menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang konsisten di setiap tahun. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 42 Perkembangan Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bengkulu Selatan	67.90	67.93	68.15	72,87	68,53
2.	Rejang Lebong	68.57	68.75	69.00	69,22	69,42
3.	Bengkulu Utara	68.19	68.27	68.53	73,03	68,99
4.	Kaur	66.63	66.73	67.01	67,27	67,51
5.	Seluma	67.75	67.90	68.13	68,35	68,53
6.	Mukomuko	66.64	66.73	67.00	67,30	67,57
7.	Lebong	63.29	63.40	63.68	63,93	64,13
8.	Kepahiang	67.95	68.08	68.28	68,46	68,61
9.	Bengkulu tengah	68.19	68.19	68.37	68,52	68,64
10.	Kota Bengkulu	70.13	70.20	70.46	70,74	71,03

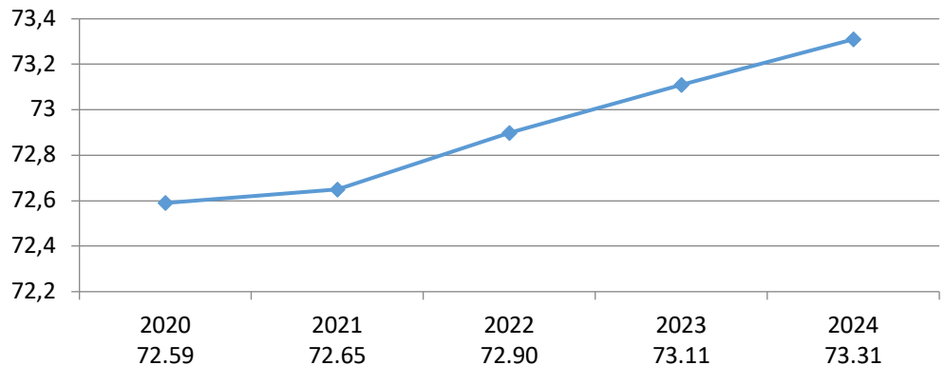

Gambar 2. 5 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun dari 2020 hingga 2024, Kenaikan dari tahun ke tahun cukup konsisten meskipun tidak terlalu signifikan. Selama lima tahun angka harapan hidup meningkat sebesar 0,72 tahun dari 72,59 pada tahun 2020 menjadi 73,31 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti akses layanan kesehatan, kualitas hidup, dan kondisi sosial ekonomi.

Indeks keluarga sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Indeks keluarga sehat Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :

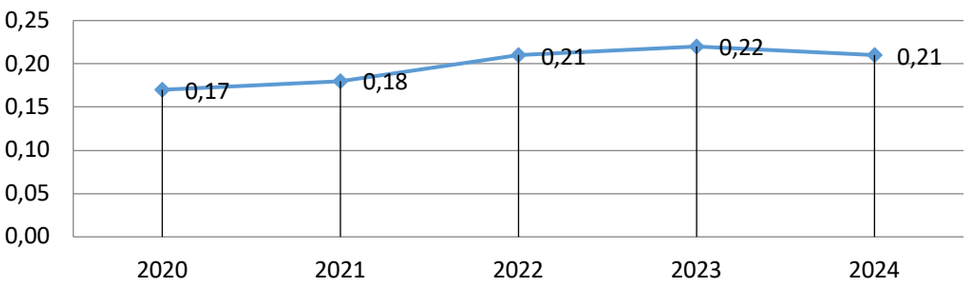

Gambar 2. 6 Tren IKS Provinsi Bengkulu

Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi

balita stunting mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 22,1 persen pada tahun 2021 menjadi 19,8 persen pada tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023, persentasenya sebesar 20,2 persen.

Tabel 2. 43 Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Stunting	%	26,86	n/a	22,1	19,8	20,2

Sumber :Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu

Dalam program penanganan stunting capaian penurunan paling signifikan terjadi antara tahun 2022 ke tahun 2023, yang bisa menjadi cerminan keberhasilan program intervensi stunting atau peningkatan signifikan dalam layanan kesehatan masyarakat. Prevalensi stunting dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perbaikan yang sangat positif, terutama pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting mulai menunjukkan hasil yang nyata. beberapa kondisi yang menjadi faktor penghambat penanganan stunting di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. **Kelangkaan pangan** dan minimnya tenaga diversifikasi konsumsi rumah tangga.
2. **Akses kesehatan primer terbatas**, terutama di daerah terpencil dan pesisir.
3. **Pengetahuan gizi masyarakat** masih kurang, terutama di kalangan calon pengantin dan ibu hamil.
4. **Intervensi gizi kurang efektif dan tuntas**, dengan capaian program yang belum optimal.
5. **Prevalensi stunting tinggi dan cenderung meningkat** di tahun 2023–2024.

Dengan pendekatan menyeluruh dan mencakup ketahanan pangan, akses kesehatan, dan pendidikan gizi diharapkan angka stunting di Bengkulu bisa kembali turun dan target nasional dapat tercapai.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jejaringnya dan Rumah Sakit (baik RS umum maupun RS khusus) yang ada di Provinsi Bengkulu. Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 44 Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	Unit	179	179	179	179	179
Jumlah Rumah Sakit	Unit	23	24	24	24	24

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu

Tabel 2. 45 Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

No	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Pemilik	Kelas	Akreditasi
1.	RSUD dr. M. Yunus	Kota Bengkulu	Pemprov	B	Paripurna
2.	RS Jiwa Soeprapto	Kota Bengkulu	Pemprov	B	Paripurna
3.	RSUD Harapan dan Doa	Kota Bengkulu	Pemda Kota	C	Madya
4.	RS Rafflesia	Kota Bengkulu	Organisasi Sosial	C	Perdana
5.	RS Tiara Sella	Kota Bengkulu	Swasta	C	Paripurna
6.	RS Bayangkara Jitra	Kota Bengkulu	POLRI	C	Utama
7.	RS TkIV Bengkulu	Kota Bengkulu	TNI AD	D	Madya
8.	RSU Ummi	Kota Bengkulu	Swasta	C	Paripurna
9.	RS Gading Medika	Kota Bengkulu	Swasta	C	Madya
10.	RSUD Bengkulu Tengah	Bengkulu Tengah	Pemkab Benteng	D	Perdana
11.	RSUD Kepahiang	Kepahiang	Pemkab Kepahiang	C	Utama
12.	RSUD Lebong	Lebong	Pemkab Lebong	D	Perdana
13.	RSUD Curup	Rejang Lebong	Pemkab Rejang Lebong	C	Dasar
14.	RSUD Argamakmur	Bengkulu Utara	Pemkab Bengkulu Utara	C	Madya
15.	RS Lagita	Bengkulu Utara	Pemkab Bengkulu Utara	D	Belum
16.	RS Hana charitas	Bengkulu Utara	Organisasi Khatolik	D	Utama
17.	RS Bergerak Enggano	Bengkulu Utara	Pemkab Bengkulu Utara	D	Dasar
18.	RSUD Mukomuko	Mukomuko	Pemkab Mukomuko	C	Perdana
19.	RS Ibu dan Anak Al-bara	Mukomuko	Swasta	C	Belum
20.	RSUD Tais	Seluma	Pemkab Seluma	C	Dasar
21.	RSUD Hasanudin Damrah	Bengkulu Selatan	Pemkab Bengkulu Selatan	C	Paripurna
22.	RS Asy-Syifa	Bengkulu Selatan	Swasta	D	Madya
23.	RSUD Kaur	Kaur	Pemkab Kaur	C	Perdana
24.	RS Annisa	Rejang Lebong	Swasta	D	Belum

Sumber : Laporan Tahunan Bidang Yankes Dinkes Provinsi Bengkulu

Pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, tercermin dari peningkatan berbagai indikator kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan secara konsisten dari 72,59 pada tahun 2020 menjadi 73,31 pada tahun 2024. Ini mencerminkan perbaikan akses layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi secara umum. Indeks Keluarga Sehat (IKS) menunjukkan adanya peningkatan, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta membaiknya akses terhadap layanan kesehatan dasar di seluruh kabupaten/kota. Prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan dari 26,86% pada 2019 menjadi 5,1% pada 2023. Capaian ini merupakan indikator keberhasilan intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan pola asuh dan sanitasi. Fasilitas kesehatan mengalami perkembangan stabil dengan jumlah puskesmas tetap 179 unit sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dan jumlah rumah sakit meningkat dari 23 unit

menjadi 24 unit. Sebagian besar rumah sakit telah terakreditasi, meskipun masih ada beberapa yang belum terakreditasi atau berada di kelas D.

Secara keseluruhan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan yang signifikan. Meskipun masih ada tantangan dalam hal pemerataan layanan kesehatan antar daerah, peningkatan kualitas sarana kesehatan di daerah tertinggal, serta penguatan sistem informasi kesehatan agar kebijakan dapat dibuat secara tepat dan berbasis data.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan memegang peran sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Kondisi pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang positif, meskipun masih perlu peningkatan lebih lanjut. Dilihat dari rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 mencapai 9,04 tahun, meningkat secara bertahap dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin banyaknya penduduk yang mengenyam pendidikan formal lebih lama. Sejalan dengan itu, angka harapan lama sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan mencapai 13,75 tahun pada tahun 2024, yang menunjukkan optimisme terhadap masa depan pendidikan di Provinsi Bengkulu. Tingkat partisipasi sekolah juga mengalami perkembangan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan menengah mencapai 79,07% pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), yang mendorong akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Selain itu, pendidikan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Bengkulu menunjukkan peningkatan dari 54,56% pada tahun 2021 menjadi 61,45% pada tahun 2023. Dimensi pendidikan dalam IPK juga mengalami peningkatan dengan rata-rata lama sekolah dan angka kesiapan sekolah yang lebih baik. Secara keseluruhan, peningkatan indikator pendidikan ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dengan terus meningkatnya kesadaran dan akses pendidikan, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehingga mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas. Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di

Provinsi Bengkulu tumbuh 0,1 persen pertahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Pada tahun 2024, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 adalah 9,04 tahun untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Tabel 2. 46 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04

Sumber: BRS- BPS Provinsi Bengkulu 2024

a) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 47 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75

Sumber: Buku Profil Daerah

b) Angka Partisipasi Sekolah

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun. Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Bengkulu dalam tujuh tahun terakhir (tahun 2014-2020) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2024 APS sebesar 79,07 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.

Tabel 2. 48 Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APS Dikmen	%	79,72	79,75	79,31	79,57	79,07

Sumber: BDA Provinsi Bengkulu

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 54,56%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Tabel 2. 49 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	56,59	54,56	57,28	61,45	n/a

Sumber : Buku Profil Daerah

Selain karya seni budaya, peninggalan cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan. Pada tahun 2022 Persentase meningkat menjadi 57,28 dilanjutkan pada tahun 2023 menjadi 61,45 dari cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Bengkulu adalah sebanyak 5 Cagar Budaya, yaitu Benteng Marlborough, Makam Inggris, Rumah Pengasingan Bung Karno, Tugu Thomas Parr, dan Makam Sentot Alibasyah. Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 2. 50 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	2020	2021	2022	2023	2024
D1	Ekonomi Budaya	21.77	25.35	30.66	49.73	n/a
D2	Pendidikan	71.38	71.22	74.44	79.35	n/a
D3	Ketahanan Sosial Budaya	78.32	73.15	75.77	76.90	n/a
D4	Warisan Budaya	51.02	50.85	52.51	53.41	n/a
D5	Ekspresi Budaya	28.32	21.94	23.92	27.69	n/a
D6	Budaya Literasi	58.33	53.22	57.60	61.91	n/a
D7	Gender	61.05	58.39	57.81	58.21	n/a
IPK Provinsi		**61.13**	**56.59**	**54.56**	**57.28**	**n/a**

Tabel 2. 51 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.22	0.25	0.31	0.50	n/a
X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	8.84	8.87	8.91	9.03	n/a

Kode	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	13.61	13.67	13.68	13.74	n/a
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	76.10	76.55	75.93	77.72	n/a
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul Kesenian	26.13	19.51	30.95	35.22	n/a
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	65.77	78.86	73.79	90.54	n/a
X2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	93.77	93.47	92.74	93.02	n/a
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	83.84	60.21	66.11	69.13	n/a
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	89.33	80.62	84.54	87.08	n/a
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	91.58	83.94	87.14	87.39	n/a
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	92.44	91.03	92.99	94.22	n/a
X3.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	82.65	73.98	73.11	75.02	n/a
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	34.28	29.86	29.45	32.05	n/a
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	18.59	8.60	4.99	4.75	n/a
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	89.60	82.75	82.83	79.82	n/a
X4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	3.88	4.27	4.20	4.77	n/a
X4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	7.43	8.72	9.09	8.77	n/a
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir *tahun 2021 ada perluasan definisioperasional (termasuk yang tidak langsung)	37.40	76.07	78.51	79.10	n/a
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	19.41	11.05	10.60	11.23	n/a
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	70.50	71.05	78.02	80.30	n/a
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir	12.44	10.57	11.68	13.51	n/a
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	6.11	3.63	4.18	5.45	n/a
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	1.55	1.14	1.22	1.15	n/a
X5.4	Persentase rumah tangga yang	8.59	8.12	8.27	9.95	n/a

Kode	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir					
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	44.08	48.74	52.46	54.82	n/a
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	48.01	56.76	65.01	67.83	n/a
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	13.88	5.81	5.34	6.90	n/a
X7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	67.72	66.38	64.16	66.15	n/a
X7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	88.95	89.89	90.86	90.05	n/a
X7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	26.47	18.92	18.42	18.42	n/a

Pendidikan memegang peranan sentral dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Bengkulu. Data menunjukkan tren positif, baik dari segi rata-rata lama sekolah (9,04 tahun) maupun harapan lama sekolah (13,75 tahun) yang mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah yang mencapai 79,07% serta berbagai program bantuan pendidikan turut mendorong pemerataan akses bagi kelompok kurang mampu. Selain itu, dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan juga menunjukkan perbaikan signifikan, mencerminkan kontribusi pendidikan dalam membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, berdaya saing, dan bermartabat. Peningkatan kualitas pendidikan ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul menuju kemajuan daerah dan bangsa.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, setiap individu, terutama pekerja, memiliki akses terhadap perlindungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi mereka. Berdasarkan indikator kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Provinsi Bengkulu, terlihat bahwa partisipasi tenaga kerja mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan dari 72,72% pada Februari 2023 menjadi 70,92% pada Februari 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam keterlibatan tenaga kerja dalam pasar kerja. Hal ini mengindikasikan pentingnya perlindungan sosial agar masyarakat tetap memiliki daya tahan ekonomi meskipun terjadi dinamika ketenagakerjaan.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus menurun dari 3,39% pada Februari 2022 menjadi 3,17% pada Februari 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja masih menjadi tantangan. Partisipasi perempuan mengalami penurunan signifikan dari 59,69% pada Februari 2023 menjadi 55,15% pada Februari 2024, yang

mengindikasikan perlunya kebijakan inklusif yang mendorong lebih banyak perempuan untuk masuk ke dunia kerja dengan perlindungan yang memadai. Untuk memastikan kesejahteraan pekerja, program jaminan sosial tenaga kerja harus diperluas dan diperkuat, khususnya bagi sektor informal yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Dengan perlindungan sosial yang lebih baik, masyarakat dapat menghadapi risiko ketenagakerjaan, seperti kehilangan pekerjaan atau kecelakaan kerja, tanpa harus terjerumus ke dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, meningkatkan kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja di Bengkulu harus menjadi prioritas. Dengan memperluas cakupan perlindungan sosial, memberikan edukasi mengenai manfaatnya, serta memastikan akses yang lebih mudah bagi semua kelompok masyarakat, maka kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif. Semua individu, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik dan bekerja dengan rasa aman serta kepastian masa depan yang lebih cerah.

Tabel 2. 52 Status Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Feb 2022	Feb 2023	Feb 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
Penduduk Usia Kerja	**1.528.549**	**1.554.165**	**1.573.688**	**26.616**	**1,68**	**19.523**	**1,26**
Angkatan Kerja	**1.092.782**	**1.130.173**	**1.116.138**	**37.391**	**3,42**	**-14.035**	**-1,24**
Bekerja	1.055.772	1.093.853	1.080.744	38.081	3,61	-13.109	-1,20
Pengangguran	37.010	36.320	35.394	-690	-1,86	-926	-2,55
Bukan Angkatan kerja	**435.767**	**423.992**	**457.550**	**-11.775**	**-2,70**	**33.558**	**7,91**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**3,39**	**3,21**	**3,17**	**-0,18**		**-0,04**	
Perkotaan	4,37	4,26	3,48	-0,11		-0,78	
Pedesaan	2,92	2,77	3,01	-0,15		0,24	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**71,49**	**72,72**	**70,92**	**1,23**		**-1,80**	
Laki-laki	86,07	85,20	86,04	-0,87		0,85	
Perempuan	56,25	59,69	55,15	3,44		-4,54	

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penanganan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 53 Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2023

No	Nama Wilayah	Jenis bantuan											
		APBD											
		KBS				TABUNG GAS 3 Kg				BPJS Ketenagakerjaan			
		Target	Satuan	realisasi kinerja	realisasi anggaran	Target	Satuan	realisasi kinerja	realisasi anggaran	Target	Satuan	realisasi kinerja	realisasi anggaran
1	Kota bengkulu	100	KPM	100 KPM	120.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	4.103	OB	4.103	206.791.200
2	Lebong	100	KPM	100 KPM	120.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	2.532	OB	2.532	127.612.800
3	Bengkulu Utara	100	KPM	99 KPM	117.900.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	5.599	OB	5.599	282.189.600
4	Mukomuko	100	KPM	98 KPM	117.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	2.638	OB	2.638	132.955.200
5	Seluma	100	KPM	98 KPM	116.700.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	6.165	OB	6.165	310.716.000
6	Bengkulu Selatan	100	KPM	100 KPM	120.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	2.791	OB	2.791	140.666.400
7	Kaur	100	KPM	100 KPM	120.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	2.752	OB	2.752	138.700.800
8	Kepahiang	100	KPM	97 KPM	118.500.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	3.936	OB	3.936	198.374.400
9	Bengkulu Tengah	100	KPM	100 KPM	120.000.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	1.582	OB	1.582	79.732.800
10	Rejang Lebong	100	KPM	98 KPM	118.200.000	100	KPM	100 KPM	21.978.000	7.389	OB	7.389	372.405.600
TOTAL		**1000**	**KPM**	**990 KPM**	**1.188.300.000**	**1000**	**KPM**	**1000 KPM**	**219.780.000**	**39.487**	**OB**	**39.487**	**1.990.144.800**

Sumber : *Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025*

Perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika yang kompleks namun mengarah pada perbaikan di beberapa aspek. Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 72,72% pada Februari 2023 menjadi 70,92% pada Februari 2024 menunjukkan tantangan dalam keterlibatan masyarakat di pasar kerja. Penurunan signifikan partisipasi perempuan juga menandakan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Di sisi lain penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,39% (2022) menjadi 3,17% (2024) merupakan sinyal positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun keberlanjutan perbaikan ini memerlukan penguatan sistem perlindungan sosial, khususnya untuk pekerja informal yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah, dengan realisasi bantuan kepada hampir 40 ribu orang dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan sosial lainnya melalui APBD dan subsidi kebutuhan dasar. Ini menjadi fondasi penting dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Secara keseluruhan untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang tangguh dan inklusif diperlukan Perluasan akses jaminan social ketenagakerjaan terutama untuk sektor informal, Penguatan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, Pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan, Serta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong perlindungan sosial yang adil dan merata.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Dalam konteks pembangunan nasional, agama memiliki peran strategis sebagai landasan spiritual, etika, moral, serta modal dasar dalam pembangunan. Agama bukan hanya menjadi pedoman hidup individu, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan harmoni sosial, meningkatkan solidaritas, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Provinsi Bengkulu dalam penyelesaian konflik antar umat beragama persentase selalu mencapai 100% dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan efektivitas dalam menjaga kerukunan serta menunjukkan keberhasilan berbagai pihak dalam mengelola potensi perbedaan secara damai dan konstruktif. Namun di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan dari 78,79% pada tahun 2020 menjadi 72,20% pada 2021, meskipun terdapat sedikit peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga 74,26% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi terus berkembang, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait hak-hak politik, kebebasan sipil, serta penguatan kelembagaan demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, agama dan kebudayaan berperan penting sebagai elemen perekat sosial dan penguat karakter bangsa. Agama memberikan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk kesadaran kolektif

dalam menjaga persatuan, sedangkan kebudayaan menjadi medium dalam memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan harus terus diupayakan untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga, sekaligus menjadi inspirasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperkuat guna memastikan bahwa agama dan budaya tetap menjadi fondasi utama dalam memperkuat karakter bangsa. Pendidikan multikultural, dialog antaragama, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari harus terus digalakkan sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas sosial dan memperteguh jati diri bangsa Indonesia. Perkembangan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 54 Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100
Indeks Demokrasi	%	78,79	72,20	72,73	74,26	n/a

Sumber: Buku Profil Daerah

Tabel 2. 55 Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	56,59	54,56	57,28	61,45	n/a

Sumber : Buku Profil Daerah

Dalam konteks pembangunan nasional penguatan peran agama dan kebudayaan dalam pembangunan serta karakter bangsa di Provinsi Bengkulu, agama dan kebudayaan memegang peranan strategis sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter bangsa dan memperteguh jati diri nasional. Di Provinsi Bengkulu peran agama telah diaktualisasikan secara nyata sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian Provinsi Bengkulu dalam menjaga kerukunan antarumat beragama yang konsisten mencapai 100% penyelesaian konflik sepanjang tahun 2020 hingga 2024.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah, tokoh agama, serta elemen masyarakat dalam mengelola perbedaan secara damai dan konstruktif, sehingga mampu menciptakan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat penting dalam pembangunan. Namun demikian, tantangan masih

dihadapi dalam aspek demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 78,79% pada tahun 2020 menjadi 72,20% di tahun 2021, sebelum mengalami perbaikan bertahap hingga mencapai 74,26% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun demokrasi terus berkembang, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan sipil, partisipasi politik, dan penguatan kelembagaan demokratis.

Di sisi lain, kebudayaan sebagai elemen perekat sosial dan simbol identitas kolektif masyarakat Bengkulu juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), terjadi peningkatan signifikan dari 54,56% pada tahun 2021 menjadi 61,45% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah sebagai bagian dari pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal. Agama dan kebudayaan berperan penting dalam memperkuat karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur, baik dalam kehidupan individu maupun dalam tatanan sosial. Agama memberikan dasar moral dan spiritual yang membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sementara kebudayaan menjadi wahana untuk memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, budayawan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pendidikan multikultural dan nilai-nilai kebangsaan, mendorong dialog antar agama dan antar kebudayaan secara berkelanjutan, mengintegrasikan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan pembangunan, mengembangkan program pelestarian budaya berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, peran agama dan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan akan semakin kokoh dalam memperkuat karakter bangsa serta mempertegas jati diri Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Provinsi Bengkulu secara bertahap menunjukkan peningkatan dalam hal pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat merupakan pondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, sehat, produktif, dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengupayakan berbagai program strategis untuk meningkatkan kapasitas dan resiliensi masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa indikator dalam peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan Masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak Pembangunan di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

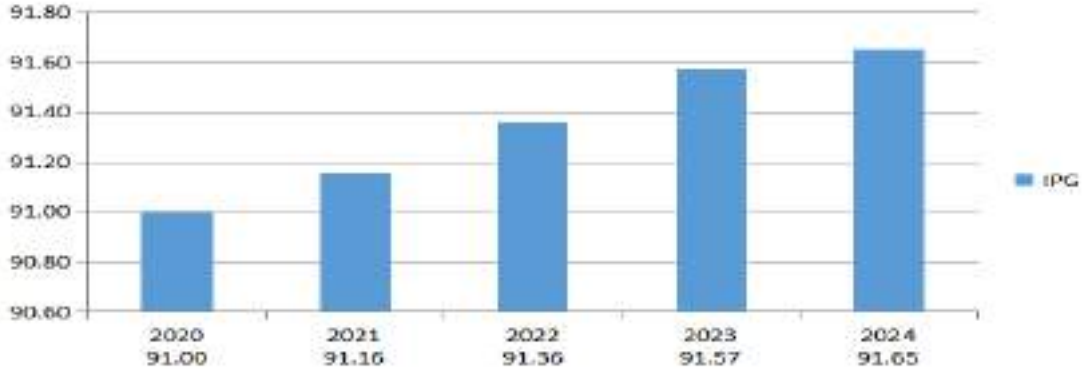

Sumber : Buku Profil Daerah

Gambar 2. 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

b) Indeks Pemberdayaan Gender

Selain IPG, indeks lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

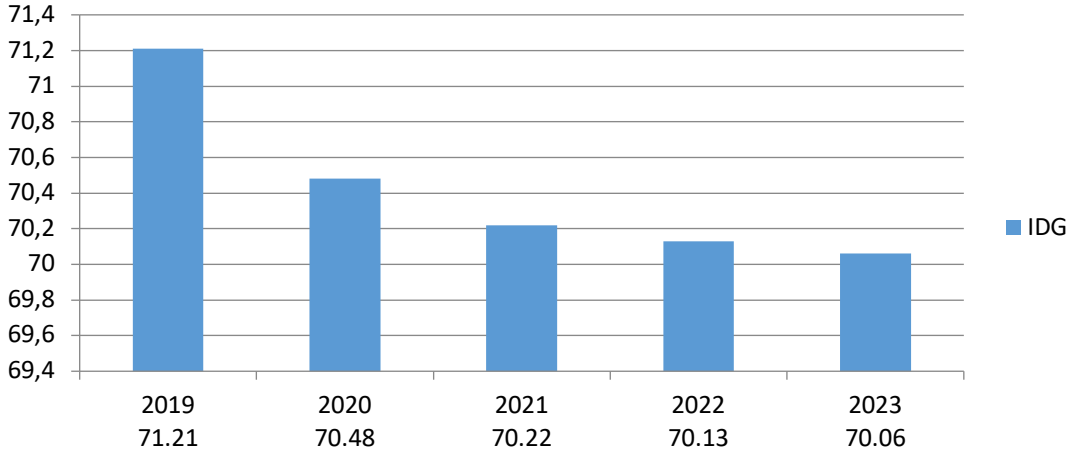

Sumber : Buku Profil Daerah

Gambar 2. 8 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

c) Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak adalah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Capaian IPA-IPHA-IPKA pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Bengkulu memiliki nilai IPA (65,56) dan IPHA (63,11) dengan capaian tertinggi di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, capaian IPA dan IPHA terendah diraih oleh Kabupaten Rejang Lebong (IPA = 58,05; IPHA = 56,27).

Tabel 2. 56 Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut kabupaten/kota Provinsi Bengkulu, 2022

No	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Bengkulu Selatan	51,50	82,23	74,67	32,77	69,05	62,92	61,13	70,90
2	Rejang Lebong	49,08	73,72	71,19	28,23	64,17	58,05	56,27	64,45
3	Bengkulu Utara	49,91	82,52	73,10	29,96	71,70	62,46	59,79	73,59
4	Kaur	48,32	78,96	80,68	30,33	71,31	62,70	60,20	72,62
5	Seluma	52,77	81,01	73,91	33,30	69,58	62,98	61,06	70,75
6	Mukomuko	48,82	79,62	78,31	30,00	78,16	63,97	59,90	80,03
7	Lebong	50,15	73,63	71,72	31,33	65,15	59,11	57,36	65,90
8	Kepahiang	49,52	70,78	75,25	29,93	63,87	58,46	56,88	63,53
9	Bengkulu Tengah	50,34	77,01	77,44	31,55	72,34	62,54	59,72	75,27
10	Kota Bengkulu	47,86	88,01	79,73	33,40	73,92	65,56	63,11	75,17
Provinsi Bengkulu		48,53	80,87	75,42	29,99	71,44	62,19	59,51	73,06

Sumber: Kemen PPPA dan BPS (2022)

Tindak kekerasan dan trafficking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak di permukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Selain masalah utama kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 57 Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	161	126	147	206	480

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

d) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda mencakup dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, partisipasi, serta kesempatan dan kepemimpinan pemuda. Bengkulu menunjukkan potensi besar dari kelompok pemuda sebagai agen perubahan Pembangunan. Dengan banyaknya komunitas pemuda, wirausaha muda, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pembangunan pemuda di Bengkulu menjadi aspek strategis. Namun, masalah pengangguran pemuda, keterbatasan akses modal, dan literasi digital masih perlu mendapat perhatian serius.

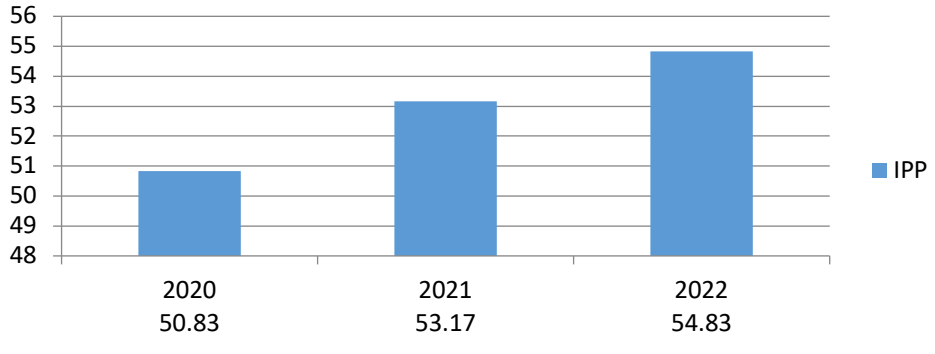

Sumber: https://img-deputi2.kemenpora.go.id - indeks-pembangunan-pemuda-ipp-tahun-2023.pdf

Gambar 2. 9 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2022

e) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar yang digunakan dalam mengukur IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

a. Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk);
b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS);
c. PNB per kapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS.

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Selama 2020-2024, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 72,93 pada tahun 2020 menjadi 74,91 pada tahun 2024.

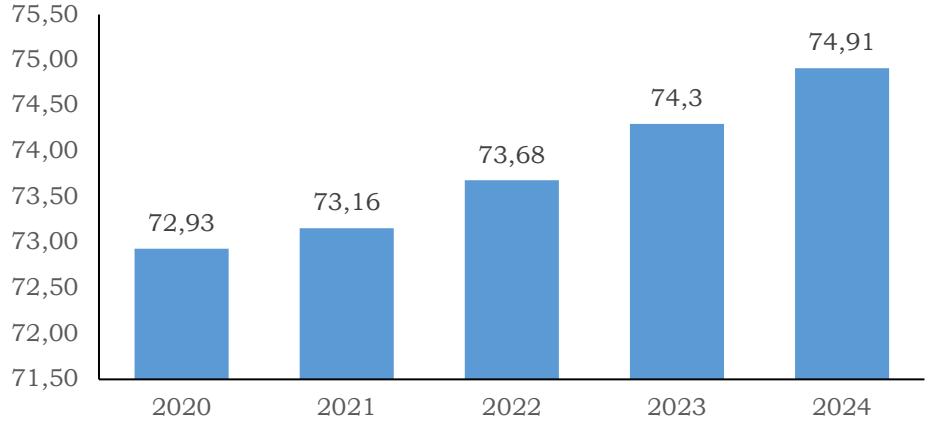

Sumber : BPS Bengkulu

Gambar 2. 10 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021-2024

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat di Provinsi Bengkulu merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas sebagai penggerak pembangunan daerah. Dengan dukungan program lintas sektor dan pemanfaatan data dari berbagai indeks seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks

Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan secara berkala setiap tahun, namun masih ada indeks yang belum dicapai secara maksimal seperti Indeks Pemberdayaan Gender, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan inklusif. Percepatan pembangunan sumber daya manusia juga menuntut kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem yang mendukung ketahanan sosial dan keberlanjutan pembangunan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dalam menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, tata kelola pemerintah, aksesibilitas, dan kualitas hidup. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan turut menentukan kemampuan suatu daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang transparan dan pro-bisnis membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Daerah yang mampu memanfaatkan potensi lokal, seperti keunggulan geografis atau budaya, cenderung memiliki daya tarik lebih tinggi. Misalnya, daerah dengan keunggulan pariwisata dapat memperkuat sektor tersebut untuk mendongkrak ekonomi lokal. Oleh karena itu, membangun daya saing daerah membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

2.1.3.1 Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kualitas SDM yang unggul tidak hanya mencerminkan kemampuan individu untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan daya saing daerah secara keseluruhan. Indikator utama yang menggambarkan daya saing SDM meliputi :

Angka Ketergantungan: Rasio antara penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Rasio yang rendah menunjukkan beban ekonomi yang lebih kecil pada kelompok usia produktif, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi. Jumlah

Penduduk Usia Produktif , Usia Non Produktif dan Angka Ketergantungan disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 58 Jumlah penduduk usia produktif (dalam Ribu)

Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15–19	172.144	171.394	171.201	171.357	171.578
20–24	174.783	173.151	172.386	171.577	170.967
25–29	171.539	173.280	173.123	173.543	173.594
30–34	167.798	169.931	169.413	169.845	170.372
35–39	158.105	162.135	163.225	164.883	166.222
40–44	147.546	151.172	152.896	154.524	156.219
45–49	130.428	136.788	139.725	142.558	145.098
50–54	109.946	136.788	120.072	123.540	126.932
55–59	89.322	95.815	98.840	102.063	105.350
Total	1.321.611	1.370.454	1.360.881	**1.373.89**	**1386.332**

Tabel 2. 59 Jumlah Penduduk Tidak Produktif (dalam Ribu)

Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0–4	175.561	175.938	181.218	183.127	184.995
5–9	173.886	174.253	174.381	174.604	174.714
10–14	172.247	172.415	172.736	173.120	173.515
60–64	67.304	73.456	76.963	80.334	83.630
65–69	47.569	52.765	55.239	57.844	60.613
70–74	27.355	32.284	34.907	37.567	40.098
75+	25.137	28.031	29.681	31.749	34.147
Total	689.059	709.141	725.125	**738.345**	**751.712**

Tabel 2. 60 Angka Ketergantungan/Rasio Ketergantungan Provinsi Bengkulu

	2020	2021	2022	2023	2024
Angka/Rasio Ketergantungan	52,13 %	51,74 %	53,28 %	53,74 %	54,22 %

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan indikator penting yang mencerminkan komposisi demografis suatu wilayah, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia) terhadap jumlah penduduk usia produktif. Di Provinsi Bengkulu. Kenaikan angka ketergantungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk usia anak-anak atau lansia, perubahan tingkat kelahiran, atau migrasi. Implikasi dari peningkatan rasio ketergantungan ini dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan sistem pensiun yang lebih kuat. Strategi peningkatan kualitas SDM dan efisiensi ekonomi perlu dilakukan untuk

mengurangi dampak negatif dari rasio ketergantungan yang tinggi. Upaya seperti pengembangan pelatihan keterampilan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan tenaga kerja usia produktif menjadi langkah yang penting untuk menjaga keseimbangan demografis.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mengukur kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. IPM yang tinggi menunjukkan SDM yang lebih kompetitif dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dimensi dasar yang digunakan dalam mengukur IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

a) Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk);
b) Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS);
c) PNB per kapita diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan SUSENAS.

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Selama 2020-2024, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,67 persen per tahun, dari 72,93 pada tahun 2020 menjadi 74,91 pada tahun 2024.

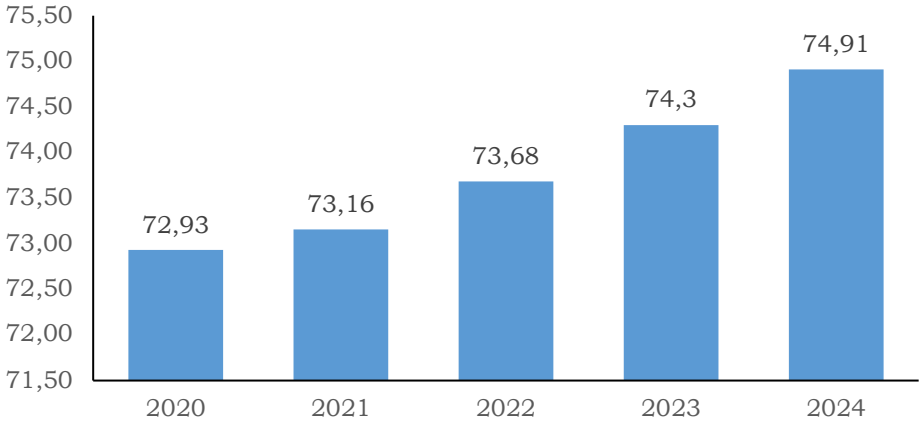

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2024

Gambar 2. 11 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, 2020-2024

Tabel 2. 61 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2021-2024

No	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024
1	Bengkulu Selatan	72,93	73,58	74,06	74,53
2	Rejang Lebong	72,85	73,54	74,43	75,04
3	Bengkulu Utara	71,28	71,76	72,27	73,1
4	Kaur	69,71	70,3	70,92	71,53
5	Seluma	69	69,74	70,27	70,98
6	Mukomuko	71,67	72,15	73	73,65
7	Lebong	71,67	72,35	72,95	73,54
8	Kepahiang	70,38	70,85	71,38	72,05
9	Bengkulu tengah	69,78	70,29	70,81	71,67
10	Kota Bengkulu	82,49	82,93	83,38	73,1
	Provinsi Bengkulu	**73,16**	**73,68**	**74,3**	**74,91**

Sumber : BPS Bengkulu

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): Persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK yang tinggi mencerminkan keterlibatan SDM yang baik dalam perekonomian daerah Angka partisipasi angkatan kerja mencerminkan sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong keterlibatan perempuan serta kelompok rentan dalam pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 dan 2024 sebagai berikut

Tabel 2. 62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	TPT		TPAK	
	2023	2024	2023	2024
Bengku Selatan	3,56	3,25	75,95	74,45
Rejang Lebong	2,94	2,43	77,86	74,92
Bengkulu Utara	3,33	2,89	68,6	71,9
Kaur	3,81	3,71	68,44	71,63
Seluma	2,68	2,38	73,44	73,45
Mukomuko	3,14	2,41	67,16	66,46
Lebong	2,72	2,55	70,23	71,67
Kepahiang	2,41	2,37	75,73	76,51

Kabupaten/Kota	TPT		TPAK	
	2023	2024	2023	2024
Bengkulu Tengah	3,2	2,56	64,96	68,89
Kota Bengkulu	5,04	5	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	**3,42**	**3,11**	**70,91**	**71,71**

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, penurunan TPT dan stabilitas atau kenaikan TPAK di beberapa wilayah mencerminkan adanya perbaikan dalam iklim ketenagakerjaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama di wilayah dengan TPT tinggi seperti Kota Bengkulu dan beberapa daerah dengan TPAK menurun. Ke depan, diperlukan strategi terpadu, seperti pelatihan keterampilan kerja, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan sektor ekonomi produktif, untuk mendukung perbaikan ketenagakerjaan yang lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, dan produktivitas ekonomi memiliki peranan sentral sebagai motor penggerak utama bagi perkembangan berbagai sektor ekonomi di tingkat daerah. Ketiga elemen ini tidak hanya mendukung transformasi ekonomi, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi peningkatan beberapa indikator kinerja ekonomi berikut :

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pemanfaatan teknologi canggih dan inovasi proses produksi memungkinkan industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan diversifikasi produk. Dengan adopsi teknologi modern, industri pengolahan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, yang pada akhirnya meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB daerah.

Tabel 2. 63 Rasio PDRB Industri pengolahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5.98	5.81	5.48	5.33	5.19

Data dalam tabel menunjukkan tren penurunan pada Rasio PDRB Industri Pengolahan dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan rasio ini dapat menunjukkan adanya perubahan dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti pergeseran struktur ekonomi, perubahan dalam investasi industri, atau dampak kebijakan ekonomi dapat menjadi penyebabnya. Penurunan dari

5.98% pada tahun 2020 menjadi 5.19% pada tahun 2024 menandakan adanya penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa sektor industri pengolahan menghadapi tantangan tertentu, seperti kompetisi dari sektor lain, perubahan permintaan pasar, atau inovasi teknologi yang mempengaruhi efisiensi produksi.

b. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Inovasi layanan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pemesanan dan pembayaran, telah mendorong peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu, kreativitas dalam menciptakan pengalaman kuliner berbasis kearifan lokal memperkaya daya tarik sektor ini. Sektor akomodasi dan makan minum di Provinsi Bengkulu menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data terbaru, sektor ini mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,39% pada tahun 2024, menjadikannya salah satu pendorong utama peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bengkulu.

Tabel 2. 61 Rasio PDRB Industri pengolahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.82	1.73	1.68	1.75	1.82

Berdasarkan tabel tentang Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum, dapat disimpulkan bahwa sektor ini mengalami fluktuasi ringan selama periode 2020 hingga 2024. Rasio PDRB sektor ini menurun dari 1.82% pada tahun 2020 menjadi 1.68% pada tahun 2022, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 1.82% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sektor tersebut, seperti dampak pandemi, kebijakan ekonomi, atau pola konsumsi masyarakat. Peningkatan rasio pada tahun 2023 dan 2024 juga menunjukkan pemulihan atau pertumbuhan sektor ini setelah masa penurunan.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif yang berbasis pada kreativitas, keterampilan, dan inovasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat. Pengembangan teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial membuka peluang besar bagi pelaku ekonomi

kreatif untuk memasarkan produk dan layanan mereka, yang berdampak langsung pada pertumbuhan PDRB sektor ini.

d. Rasio Kewirausahaan

Peningkatan kewirausahaan didorong oleh akses terhadap teknologi, pelatihan, dan inovasi bisnis. Dengan dukungan iptek, pengusaha mampu menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, sehingga meningkatkan angka kewirausahaan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2023-2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 64 PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2023-2024

Kategori PDRB Lapangan Usaha	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan [2010]	
	2023	2024	2023	2024
A.PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	27.287,94	31.019,11	13.981,68	14.341,27
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	20.155,73	23.452,30	10.283,54	10.489,29
a. Tanaman Pangan	7.361,56	7.922,73	3.687,49	3.644,48
b. Tanaman Hortikultura	3.202,59	3.728,04	1.758,77	1.848,39
c. Perkebunan	5.290,25	7.059,36	2.468,90	2.511,61
d. Peternakan	3.703,78	4.090,59	2.062,63	2.172,79
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	597,54	651,58	305,74	312,03
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	396,91	404,78	241,78	242,06
3. Perikanan	6.735,30	7.162,03	3.456,37	3.609,92
B.PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	5.517,20	4.370,60	1.723,28	1.761,52
C.INDUSTRI PENGOLAHAN	5.143,87	5.396,39	2.915,67	2.959,00
D.PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	98,82	103,15	59,67	62,08
E.PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	167,84	188,34	112,18	119,01
F.KONSTRUKSI	4.777,66	5.082,61	2.368,40	2.501,77
G.PERDAGANGAN BESAR DAN	13.617,34	14.353,35	8.119,54	8.388,93

Kategori PDRB Lapangan Usaha	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)			
	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan [2010]	
	2023	2024	2023	2024
ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR				
H.TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9.784,57	10.027,86	4.548,19	4.728,85
I.PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	1.687,95	1.888,52	972,15	1.063,48
J.INFORMASI DAN KOMUNIKASI	3.710,73	4.110,88	2.839,84	3.101,98
K.JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	2.785,48	2.974,19	1.561,32	1.646,62
L.REAL ESTATE	3.232,46	3.406,85	2.261,17	2.357,68
M,N.JASA PERUSAHAAN	2.163,31	2.418,55	1.219,30	1.319,41
O.ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.248,72	9.148,62	4.561,64	4.945,28
P.JASA PENDIDIKAN	5.583,35	6.377,97	3.288,02	3.499,04
Q.JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.911,79	2.149,94	1.054,15	1.149,78
R,S,T,U.JASA LAINNYA	863,26	974,98	465,35	508,95
PDRB	**144.025,95**	**158.463,32**	**76.316,77**	**79.285,22**

Secara keseluruhan, PDRB tahunan menurut lapangan usaha menunjukkan tren positif dari tahun 2023 ke 2024. Sektor-sektor utama seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar dan eceran terus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam aktivitas ekonomi domestik. Namun, beberapa sektor seperti pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dalam nilai harga berlaku, yang bisa jadi menunjukkan tantangan dalam industri tersebut. Sementara itu, sektor jasa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan mencerminkan perhatian pada peningkatan pelayanan publik dan sumber daya manusia. Secara agregat, data ini menggarisbawahi peran penting dari diversifikasi ekonomi, stabilitas sektor jasa, dan keberlanjutan sektor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indeks Inovasi Daerah Iptek dan inovasi memainkan peran signifikan dalam mendorong indeks inovasi daerah. Daerah yang mampu menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif, seperti melalui

penguatan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif. Perkembangan kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 65 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52.69	57,93	48,57	51,49	53,39

Sumber: Buku Profil Daerah

Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada awal periode di tahun 2020, indeks berada di angka 52,69, yang mencerminkan tingkat inovasi daerah yang cukup baik. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan indeks mencapai 53,39, mencerminkan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang mulai menunjukkan hasil dalam menciptakan ekosistem inovasi yang lebih baik. Fluktuasi ini menyoroti pentingnya penguatan kebijakan yang berkesinambungan dan dukungan terhadap pengembangan inovasi di tingkat daerah untuk menjaga pertumbuhan yang stabil.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Provinsi Bengkulu menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan, sementara ekonomi biru menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan.

Provinsi Bengkulu, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam berbagai kebijakan pembangunan. Salah satu contohnya adalah pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui mitigasi bencana ekologis dan perlindungan ekosistem hutan. Selain itu, konsep ekonomi biru diterapkan melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang mendukung keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah-langkah ini mencakup penguatan kebijakan berbasis informasi, partisipasi publik, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan ini, Provinsi Bengkulu berupaya memastikan

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di era revolusi industri , Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) menjadi indikator kunci untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah atau negara telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat umum.

Pada tahun-tahun mendatang, target peningkatan IP-TIK menjadi fokus utama untuk mempercepat transformasi digital. Peningkatan ini akan dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital, perluasan akses internet ke seluruh penjuru wilayah, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, pemerintah dan swasta diharapkan dapat berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem inovasi digital. Dengan tercapainya transformasi digital yang inklusif, diharapkan masyarakat dan perekonomian dapat semakin adaptif terhadap perubahan global, menciptakan peluang baru, serta memperkuat daya saing di tingkat internasional.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Provinsi Bengkulu terus mengupayakan integrasi ekonomi domestik dan global sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam integrasi ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang mencerminkan besarnya investasi dalam infrastruktur, fasilitas produksi, serta pengembangan teknologi dan sumber daya manusia di berbagai sektor unggulan.

Selain itu, Ekspor Barang dan Jasa menjadi salah satu pilar penting yang menunjukkan kemampuan Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi dalam pasar internasional. Komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi andalan ekspor daerah, yang terus ditingkatkan nilainya melalui diversifikasi produk dan peningkatan kualitas. Pemerintah Provinsi bengkulu telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendukung integrasi ekonomi ini, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik, penyederhanaan regulasi yang mendukung iklim investasi, serta program promosi ekspor. Kolaborasi dengan pihak swasta dan kemitraan internasional juga menjadi elemen penting untuk

mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mencapai peningkatan PMTB dan ekspor barang dan jasa yang signifikan, serta memperkuat perannya dalam ekonomi domestik dan global.

Tabel 2. 66 Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Provinsi Bengkulu

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41.06	41.20	39.83	39.40	38.19

Dari tabel terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu adalah bahwa terdapat tren penurunan selama periode 2021 hingga 2024, meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 41.06%, meningkat menjadi 41.20% di tahun 2021, namun kemudian menurun konsisten hingga mencapai 38.19% di tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya investasi tetap di Provinsi Bengkulu, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, penurunan daya tarik investasi, atau pengaruh kebijakan pemerintah terkait investasi di daerah tersebut. Data ini bisa menjadi perhatian untuk mengevaluasi strategi peningkatan pembentukan modal tetap guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. 67 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Provinsi Bengkulu

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	33.36	35.73	36.11	34.63	33.63

Dari tabel terkait Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu adalah bahwa rasio ekspor mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Rasio ini meningkat dari 33.36% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 36.11%. Namun, setelah itu terjadi penurunan hingga 33.63% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika dalam sektor ekspor, yang dipengaruhi oleh kondisi pasar global, perubahan harga komoditas, atau kebijakan perdagangan internasional. Penurunan pada tahun 2023 dan 2024 juga dapat mencerminkan tantangan dalam menjaga daya saing ekspor atau penurunan permintaan dari pasar luar negeri.

Selain hal tersebut diatas, permasalahan pendangkalan pelabuhan dapat berperan signifikan dalam mempengaruhi fluktuasi rasio Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu. Ketika pelabuhan

mengalami pendangkalan, efisiensi operasionalnya dapat menurun, sehingga menghambat kelancaran arus barang keluar-masuk. Hal ini dapat meningkatkan biaya logistik, memperpanjang waktu pengiriman, dan mengurangi daya saing produk ekspor dari wilayah tersebut.

Pada tahun-tahun dengan rasio ekspor yang menurun, seperti 2023 dan 2024, pendangkalan pelabuhan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekspor. Akses kapal-kapal besar yang terbatas akibat pendangkalan dapat mengurangi volume perdagangan internasional yang dapat dikelola oleh pelabuhan. Sebaliknya, upaya untuk menangani pendangkalan, seperti pengerukan atau peningkatan infrastruktur, dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekspor di masa mendatang.

2.1.3.6 Perkotaan Dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Setiap wilayah ini memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana perkotaan dan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.

a. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu

Perkotaan di Provinsi Bengkulu, terutama Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi, menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dinamis. Beberapa faktor yang mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu adalah Provinsi Bengkulu sebagai pusat jasa dan perdagangan, memiliki infrastruktur dan aksesibilitas dan memiliki industry dan sector ekonomi yang memadai. Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain cangkang sawit, CPO (Crude Palm Oil), batubara dan karet. Perkembangan kinerja urusan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 68 Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor	US $ (Juta)	208,55	238,10	311,20	246,36	194,42
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	10.592	11.457	12.631	13.617	14.353

Sumber : BPS, Bengkulu Dalam Angka 2025.

Pada Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Bengkulu yang menjadikan industri kecil menengah dan industri besar dan sedang sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah-wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain. Perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 69 Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Industri Kecil Menengah	IKM	5.971	6.670	7.475	7.475	7.475
Jumlah industri Sedang dan Besar	Industri	43	54	61	64	64

Sumber: Buku Profil Daerah, 2024.

Sebaran Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 70 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bengkulu Selatan	487	564	597	597	597
2	Kab. Kaur	359	369	379	379	379
3	Kab. Seluma	624	680	723	723	723
4	Kota Bengkulu	870	1.025	1.025	1.025	1.025
5	Kab. Rejang Lebong	1.043	1.065	1.096	1.096	1.096
6	Kab. Kepahiang	329	329	329	329	329
7	Kab. Bengkulu Tengah	713	1.075	1.517	1.517	1.517
8	Kab. Lebong	673	713	733	733	733
9	Kab. Bengkulu Utara	1.773	1.778	1.778	1.778	1.778
10	Kab. Mukomuko	931	1.005	1.076	1.076	1.076

Sumber: Buku Profil Daerah

b. Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

Meskipun perkotaan berperan penting, perdesaan di Provinsi Bengkulu juga memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian, terutama dalam sektor pertanian dan sumber daya alam. Beberapa alasan mengapa perdesaan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi antara lain:

1) Sumber Daya Alam dan Pertanian

Banyak kabupaten di Provinsi Bengkulu mengandalkan pertanian sebagai sektor utama. Produk seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan buah-buahan menjadi komoditas utama yang diekspor ke luar daerah. Pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di pedesaan menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Pada sektor perkebunan, dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Data perkebunan rakyat yang ditampilkan adalah data tahun 2024 yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

2) Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Beberapa daerah perdesaan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Keindahan alam dan potensi budaya lokal dapat menjadi daya tarik wisata yang

mendukung perekonomian lokal. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kepariwisataan Bengkulu beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan pariwisata ditandai dengan kemajuan di bidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin memberikan kemudahan bagi mobilitas manusia dan pergerakan lintas negara, provinsi, serta kabupaten/kota.

Dalam mengukur perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu, wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu meningkat signifikan menjadi 4,57 juta orang wisman pada tahun 2024 dibandingkan 2.138.119 orang wisman pada tahun 2023. Kemudian rata-rata lama menginap pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,21 hari dan tingkat hunian hotel mencapai 57,95%. Perkembangan kinerja urusan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 71 Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah wisatawan	orang	456.708	1.043.722	1.682.470	2.138.119	4,57 Jt
Rata-rata Lama Menginap	hari	1,8	2,5	1,43	1,42	1,21
Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	67,97	46,36	51,43	53,93	57,95

Sumber: Buku Profil Daerah, 2024 dan BPS Provinsi Bengkulu, 2024

c. Peran Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu berperan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi di kedua wilayah ini. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

1) Peningkatan Infrastruktur pada sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan perkotaan dan perdesaan sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan

pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

i. Infrastruktur Dasar

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 72 Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap	%	68,29	75,92	57,25	54,69	62,84*

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Selama periode 2020 hingga April 2024, kondisi jalan baik/mantap di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dengan tren penurunan signifikan sejak 2022. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, pada tahun 2020, persentase jalan dalam kondisi baik/mantap tercatat sebesar 68,29%. Angka ini meningkat menjadi 75,92% pada tahun 2021, menunjukkan adanya upaya perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan yang cukup baik pada

periode tersebut. Namun, setelah tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2022, persentase jalan baik/mantap menurun menjadi 57,25%, kemudian menurun lebih lanjut menjadi 54,69% di tahun 2023. Hingga April 2024, angka tersebut kembali mengalami penurunan, mencapai 51,49%. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas jalan di Provinsi Bengkulu, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran pemeliharaan, peningkatan volume kendaraan, atau kerusakan akibat cuaca. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pihak terkait untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah secara optimal.

2) Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jembatan merupakan prasarana penting yang menjadi penghubung antara dua jalan yang terpisah oleh sungai/danau/rintangan lainnya. Perkembangan jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 73 Perkembangan Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	April 2024
Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap	%	68,14	68,14	68,14	86,85	86,85

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Pada kurun waktu 2020 hingga April 2024, terdapat perkembangan signifikan dalam kondisi jembatan di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, persentase jembatan yang berada dalam kondisi baik atau mantap tercatat stabil pada angka 68,14% selama periode 2020 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana angka ini melonjak menjadi 86,85% dan tetap stabil hingga April 2024. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam peningkatan kualitas infrastruktur jembatan di Provinsi Bengkulu,

yang didorong oleh program perbaikan atau pemeliharaan yang intensif. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu.

3) Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya. Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan Provinsi di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 74 Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap	%	56,07	56,72	56,72	56,72	59,61

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu 2024

Data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu menunjukkan fluktuasi dalam persentase irigasi yang berada dalam kondisi baik atau mantap selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase irigasi dalam kondisi baik/mantap berada pada angka 56,07% dan mengalami peningkatan kecil menjadi 56,72% pada tahun 2021. Persentase ini tetap stabil di angka yang sama hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 50,74%. Penurunan ini dikarenakan adanya tantangan atau kendala dalam pemeliharaan atau pengelolaan jaringan irigasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat irigasi yang baik sangat berkontribusi terhadap produktivitas sektor pertanian di daerah tersebut.

4) Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 75 Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW	%	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Selama periode 2020 hingga 2024, luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bengkulu menunjukkan kestabilan yang konsisten. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, proporsi kawasan budidaya tetap berada pada angka 64%, sementara kawasan lindung terus dipertahankan pada 36% sepanjang periode tersebut. Kestabilan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kawasan budidaya untuk aktivitas pembangunan dan ekonomi serta kawasan lindung untuk keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Hal ini penting sebagai wujud penerapan tata ruang yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang terencana di Provinsi Bengkulu.

ii. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi

Bengkulu kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

   Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), kran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 76 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	62,47	67,39	73,07	73,08	72,10

Sumber :Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Dalam periode 2020 hingga 2024, akses rumah tangga terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 62,47% pada tahun 2020 menjadi 67,39% pada tahun 2021. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan signifikan hingga 73,07%, yang sedikit naik menjadi 73,08% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 72,1%. Penurunan menunjukkan adanya perkembangan desa dalam pemekaran wilayah tidak di imbangi atas ketersediaan atau kualitas akses air minum layak di tahun terakhir. Hal ini penting untuk menjadi

perhatian, mengingat akses air minum layak adalah salah satu indikator penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2. 77 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bengkulu Selatan	45,78	58,22	65,00	67,72	68,26
2.	Rejang Lebong	45,24	65,07	57,25	56,37	55,60
3.	Bengkulu Utara	56,24	53,11	82,64	84,11	80,40
4.	Kaur	79,40	86,20	83,94	84,18	79,79
5.	Seluma	37,54	47,04	71,59	70,93	70,46
6.	Mukomuko	79,41	75,99	75,73	75,45	75,82
7.	Lebong	61,16	57,37	54,85	59,70	57,41
8.	Kepahiang	63,82	62,65	61,81	62,14	61,20
9.	Bengkulu tengah	49,32	63,06	51,89	50,44	50,44
10.	Kota Bengkulu	88,77	92,21	94,51	93,38	92,21
Provinsi Bengkulu		**62,47**	**67,39**	**73,07**	**73,08**	**72,10**

Sumber :Provinsi Bengkulu dalam Angka tahun 2025

Data ini menunjukkan dinamika yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota terkait akses rumah tangga terhadap air minum layak. Secara keseluruhan, Provinsi Bengkulu mencatat peningkatan persentase dari 62,47% pada tahun 2020 menjadi puncaknya 73,08% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 72,10% pada tahun 2024.

- Bengkulu Selatan mengalami peningkatan konsisten dari 45,78% pada tahun 2020 menjadi 68,26% pada tahun 2024.
- Rejang Lebong menunjukkan tren fluktuatif, meningkat tajam dari 45,24% (2020) menjadi 65,07% (2021), tetapi menurun secara bertahap hingga 55,60% di tahun 2024.
- Bengkulu Utara mencatat kenaikan pesat dari 56,24% (2020) hingga mencapai 84,11% pada 2023, meskipun mengalami penurunan ke 80,40% di 2024.
- Kaur stabil di kisaran tinggi, mencapai 86,20% pada 2021, namun turun perlahan hingga 79,79% di tahun 2024.

- Seluma memperlihatkan pertumbuhan signifikan dari 37,54% (2020) ke 71,59% (2022), tetapi turun sedikit ke 70,46% pada 2024.
- Mukomuko stabil di angka tinggi, berfluktuasi tipis sekitar 75,73%-79,41% selama periode tersebut.
- Lebong mengalami penurunan dari 61,16% (2020) ke 57,41% pada tahun 2024.
- Kepahiang dan Bengkulu Tengah cenderung menurun perlahan dengan angka masing-masing mencapai 61,20% dan 50,44% pada 2024.
- Kota Bengkulu memimpin dengan angka tertinggi secara konsisten, dari 88,77% (2020) hingga 94,51% pada 2022, meskipun sedikit menurun menjadi 92,21% pada 2024.

Perbedaan tren ini mencerminkan tantangan dan keberhasilan spesifik di masing-masing wilayah, yang bisa terkait dengan faktor pengelolaan infrastruktur, kondisi geografis, atau program pemerintah setempat. Peningkatan di beberapa daerah menunjukkan adanya perbaikan akses, sedangkan penurunan di wilayah lain memerlukan perhatian untuk memperbaiki cakupan layanan.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 78 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan akses Sanitasi layak	%	78,10	79,81	79,58	80,28	83,01

Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 79 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81	84,42
2	Rejang Lebong	70,02	71,5	70,20	64,41	71,81
3	Bengkulu Utara	79,23	81,37	83,44	82,84	85,53
4	Kaur	76,09	78,63	81,23	86,43	87,75
5	Seluma	78,26	84,29	86,16	87,17	88,75
6	Mukomuko	81,04	86,78	79,12	80,94	85,82
7	Lebong	46,8	51,55	51,92	55,62	59,38
8	Kepahiang	65,95	66,89	64,58	69,25	69,81
9	Bengkulu Tengah	85,44	80,23	74,65	83,07	83,17
10	Kota Bengkulu	95,71	95,79	94,49	93,94	96,15
	Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang positif secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data dari "Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025," persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di tingkat provinsi meningkat dari 78,1% pada tahun 2020 menjadi 83,01% pada tahun 2024.

- Bengkulu Selatan mencatat peningkatan konsisten, dari 77,57% pada 2020 menjadi 84,42% pada 2024.
- Rejang Lebong mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2023 (64,41%) setelah

peningkatan pada 2021 (75,44%), namun kembali naik ke 71,81% pada 2024.

- Bengkulu Utara menunjukkan tren peningkatan, dari 74,17% pada 2020 hingga mencapai 85,53% di 2024.
- Kaur secara stabil mengalami kenaikan, dari 77,04% pada 2020 menjadi 87,75% pada 2024.
- Seluma mencatat pertumbuhan signifikan dari 74,87% pada 2020 menjadi 88,75% pada 2024, dengan peningkatan besar terlihat pada 2022 dan seterusnya.
- Mukomuko menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 76,73% pada 2020 menjadi 85,82% pada 2024.
- Lebong mengalami fluktuasi dengan penurunan pada 2022 (51,92%), tetapi perlahan meningkat ke 59,38% pada 2024.
- Kepahiang juga fluktuatif, menurun ke 64,58% pada 2022 sebelum kembali naik ke 69,81% pada 2024.
- Bengkulu Tengah mencatat peningkatan signifikan, terutama dari 74,65% pada 2022 menjadi 83,17% pada 2024.
- Kota Bengkulu terus menjadi daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi, dari 89,68% pada 2020 hingga mencapai 96,15% pada 2024.

Perkembangan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan akses sanitasi layak di Provinsi Bengkulu. Peningkatan di sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program terkait, meskipun tetap ada tantangan di beberapa wilayah yang perlu perhatian lebih.

3) Rumah Tangga yang menempati RLH

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa

marmer/granit, keramik, parket/vinyl/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah. Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 80 Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga yang menempati RLH (%)	47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Dinas Perkim Provinsi Bengkulu, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam persentase rumah tangga yang menempati Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas Perkim Provinsi Bengkulu, persentase rumah tangga yang menempati RLH tercatat sebesar 47,94% pada tahun 2020. Angka ini meningkat menjadi 51,36% pada 2021 dan terus naik hingga mencapai puncaknya 54,98% pada tahun 2022. Meskipun pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,74%, persentase ini kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 56,52%.

Tren ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencerminkan efektivitas program-program pemerintah di bidang perumahan dan permukiman. Meski demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

4) Luasan Kumuh di Provinsi Bengkulu

Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan intégral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius adalah permasalahan lahan di perkotaan, permasalahan prasarana dan sarana

dasar, permasalahan sosial ekonomi, permasalahan sosial budaya, permasalahan tata ruang kota, permasalahan aksesibilitas. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan permukiman layak dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selain itu, pada UU tersebut juga menjelaskan jika terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan SK kepala daerah masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 81 Luasan Areal Kumuh di Provinsi Bengkulu

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
1	**Kota Bengkulu No. 81 Tahun 2021**		91,55 Ha
	a) Bentiring Permai	13,65 Ha	
	b) Kebun Tebeng	14,13 Ha	
	c) Panorama	13,99 Ha	
	d) Sumber Jaya	13,03 Ha	
	e) Lempuing	10,74 Ha	
	f) Tanah Patah	12,55 Ha	
	g) Teluk Sepang	13,46 Ha	
2	**Kab. Kaur No. 188.4.45-706 Tahun 2018**		66 Ha
	a) Nasal	10 Ha	
	b) Kaur Selatan	14 Ha	
	c) Kaur Tengah	11 Ha	
	d) Tanjung Kemuning	10 Ha	
	e) Kaur Utara	11 ha	
	f) Padang Guci	10 Ha	
3	**Kab. Bengkulu Tengah No. 760-369 Tahun 2017**		137,45 Ha
	a) Kembang Seri	11,24 Ha	
	b) Nakau	11,86 Ha	
	c) Taba Pasemah	13,45 ha	
	d) Harapan Makmur	11, 54 Ha	
	e) Dusun Anyar	10,55 Ha	
	f) Harapan	12,78 Ha	
	g) Rindu Hati	13,25 Ha	
	h) Pematang Tiga	13,68 Ha	
	i) Pematang Tiga Lama	10,78 Ha	

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
	j) Komering	14,65 Ha	
	k) Pungguk Beringin	13,67 Ha	
4	**Kab Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020**		15, 20 Ha
	a) Kota Padang	15,20 Ha	
5	**Kab Seluma No. 470-341 Tahun 2020**		94,98 Ha
	1. Pasar Tais Blok 2	10,75 Ha	
	2. Puguk Blok 2	10,29 Ha	
	3. Tumbuan Blok 2	11,7 Ha	
	4. Talang Benuang Blok 1	10,94 Ha	
	5. Talang Benuang Blok 2	14,39 Ha	
	6. Air Periukan Blok 2	11,39 Ha	
	7. Cahaya Negeri Blok 1	13,03 Ha	
	8. Mas Mambang Blok 1	12,49 Ha	
6	**Kab Rejang Lebong No. 180-26.1 Tahun 2019**		67,5 Ha
	1. Pasar Baru	10, 54 Ha	
	2. Air Rumbai	12,94 Ha	
	3. Tanjung Dalam	10,22 Ha	
	4. Lubuk Kembang	13,80 Ha	
	5. Kepal Curup	10,00 Ha	
	6. Bedeng SS	10,00 Ha	
7	**Kab. Bengkulu Utara No. 660/730/BAPPEDA/ Th 2016**		15,02 Ha
	1. Lubuk Durian	15,02 Ha	

Data mengenai luasan areal kumuh di Provinsi Bengkulu menunjukkan distribusi wilayah kumuh yang telah ditetapkan melalui berbagai Surat Keputusan Kepala Daerah. Secara keseluruhan, luasan areal kumuh tersebar di beberapa kabupaten/kota dengan total luas yang signifikan. Berikut rincian utamanya:

- Kota Bengkulu memiliki luasan areal kumuh sebesar 91,55 Ha, yang tersebar di tujuh kawasan, seperti Bentiring Permai (13,65 Ha) dan Kebun Tebeng (14,13 Ha).
- Kabupaten Kaur mencatat luasan areal kumuh sebesar 66 Ha, tersebar di enam wilayah, termasuk Nasal (10 Ha) dan Kaur Selatan (14 Ha).
- Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki luasan areal kumuh terbesar, yaitu 137,45 Ha, tersebar di sebelas lokasi, seperti Komering (14,65 Ha) dan Pematang Tiga (13,68 Ha).

- Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki satu kawasan kumuh, yaitu Kota Padang, dengan total luas 15,20 Ha.
- Kabupaten Seluma mencatat luasan kumuh sebesar 94,98 Ha, tersebar di delapan kawasan, seperti Pasar Tais Blok 2 (10,75 Ha) dan Talang Benuang Blok 2 (14,39 Ha).
- Kabupaten Rejang Lebong memiliki luasan kumuh sebesar 67,5 Ha, terbagi ke dalam enam wilayah, termasuk Lubuk Kembang (13,80 Ha) dan Air Rumbai (12,94 Ha).
- Kabupaten Bengkulu Utara mencatat satu kawasan kumuh di Lubuk Durian dengan luas 15,02 Ha.

Data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memetakan kawasan kumuh sebagai langkah awal dalam penanganan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Peningkatan kualitas kawasan ini menjadi prioritas penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuannya untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Berikut ini tercantum perkembangan

kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Bengkulu, periode tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 82 Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6417	0,6559	0,6748	0,6935	0,7129
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	290	213	142	75	75
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	**Desa**	**5**	**2**	**1**	**0**	**0**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi bengkulu dan Kemendes 2024

Indeks Desa Membangun Provinsi Bengkulu pada Tahun 2024 sebesar 0,7129 nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,0194 dari Tahun 2023. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa.

Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi

- Ketimpangan Pembangunan: Meskipun kota-kota besar seperti Kota Bengkulu berkembang pesat, beberapa daerah perdesaan masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses ke layanan dasar.
- Penyediaan Lapangan Kerja: Salah satu tantangan utama adalah menyediakan lapangan kerja yang memadai di pedesaan. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja di sektor pertanian, yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

Kesimpulan

Kedua wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kota-kota besar menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri, sementara perdesaan berkontribusi dengan sumber daya alam dan komoditas pertanian. Dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah, serta pembangunan yang merata antara perkotaan dan perdesaan, Provinsi Bengkulu dapat mengoptimalkan potensi ekonominya untuk kemajuan daerah.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro Dan Kesejahteraan Ekonomi

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh positif pada triwulan IV 2024. Ekonomi tercatat tumbuh 4,55% (yoy) terutama bersumber pada komponen konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Dengan capaian tersebut, perekonomian Provinsi Bengkulu keseluruhan tahun 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,26% (yoy). Dari sisi pengeluaran, terutama pada konsumsi rumah tangga dan PMTB tumbuh positif pada triwulan IV 2024, kecuali komponen ekspor luar negeri yang menunjukan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, terjadi akselerasi pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian dan LU Perdagangan pada triwulan IV 2024. Akselerasi pertumbuhan beberapa LU tersebut menopang pertumbuhan positif, di tengah kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Transportasi yang cenderung melambat pada periode laporan. Secara keseluruhan tahun 2024, sisi pengeluaran ditopang oleh meningkatnya Konsumsi Rumah Tangga (RT) seiring terjaganya daya beli dan belanja pemerintah sejalan momen Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Dari sisi Lapangan Usaha, peningkatan kinerja terutama didorong oleh LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Administrasi Pemerintah.

Keuangan Pemerintah

Realisasi belanja daerah se-Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 0,96% (yoy), sejalan dengan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh sebesar 23,63% (yoy). Secara tahunan, total realisasi belanja dan pendapatan meningkat dibandingkan periode tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah konsolidasi Provinsi Bengkulu tahun 2024 mencapai Rp12.037,95 miliar atau sebesar 87,36% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 2,20% (yoy). Realisasi pendapatan konsolidasi Provinsi Bengkulu hingga tahun 2024 sebesar Rp11.941,12 miliar atau 89,69% dari pagu. Realisasi belanja tersebut tumbuh sebesar 1,01% (yoy). Realisasi belanja APBN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp16.544,82 miliar atau sebesar 96,64% dari pagu. Kinerja belanja APBN di Provinsi Bengkulu tumbuh 4,78% (yoy), Hal ini didorong oleh transfer ke daerah dan dana desa dengan pangsa 66,38% yang tercatat tumbuh 4,17% (yoy). Pertumbuhan belanja APBN juga didorong oleh belanja pemerintah pusat yang tercatat meningkat 6,00% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2024 melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Meredanya tekanan inflasi terkait kondisi cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura pasca berlakunya La Nina, penurunan harga BBM non subsidi, dan penurunan tarif angkutan udara. Inflasi pada triwulan IV 2024 didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang disumbang oleh komoditas emas perhiasan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang disumbang oleh komoditas nasi dengan lauk. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya pada komoditas aneka cabai dan beras dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi penahan inflasi tahunan pada triwulan IV 2024. Pada triwulan I 2025, tekanan inflasi Provinsi Bengkulu diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV 2024. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Ketersediaan pasokan tanaman pangan diperkirakan berangsur meningkat dari lokal namun dalam level terbatas. Selain itu, tekanan harga emas perhiasan, rokok sigaret, dan BBM non subsidi diperkirakan akan berlanjut. Di sisi lain, kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga di bawah 2.200 VA sebesar 50% dan berbagai kebijakan subsidi tiket pesawat dapat menekan harga barang dan jasa secara umum.

Tabel 2. 83 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Bulan	Inflasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	0,14	0,39	0,54	0,62	0,82
Februari	0,09	0,14	-0,10	0,04	0,04
Maret	-0,02	0,23	0,74	0,25	-1,54
April	-0,35	0,10	1,45	0,28	-0,04
Mei	0,41	0,11	0,53	0,17	-0,04
Juni	0,04	0,31	0,60	0,21	0,06
Juli	-0,23	-0,12	0,91	0,49	0,14
Agustus	-0,22	0,16	-0,24	- 0,07	-0,02
September	0,08	0,17	1,22	0,23	0,03
Oktober	0,02	-0,02	-0,14	0,28	0,10
November	0,35	0,52	0,05	0,30	0,24
Desember	0,14	0,39	0,23	0,24	0,26
Tahunan	**0,89**	**2,42**	**5,92**	**3,09**	**0,09**

Sumber : Buku Profil Daerah, 2024.

Laju inflasi tahun kalender 2024 sebesar 0,09 persen lebih rendah dari tahun 2023 dengan laju inflasi sebesar 3,09 persen. Inflasi y-on-y di Provinsi Bengkulu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks harga kelompok pengeluaran, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel diatas perkembangan inflasi di Provinsi Bengkulu.

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan Provinsi Bengkulu pada periode triwulan IV 2024 menunjukkan kinerja yang stabil dari sisi rumah tangga, pelaku usaha, dan perbankan. Intermediasi perbankan tetap terjaga dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang masih positif dan kualitas kredit yang lebih sehat seiring dengan menurunnya rasio kredit bermasalah/Non Performing Loan. Laju pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan laporan mengalami perlambatan pada seluruh jenis penggunaan kredit. Penghimpunan dana juga melambat, sebagaimana ditunjukan oleh angka DPK yang ter deselerasi pada seluruh jenis simpanan. Sejalan hal tersebut, aset perbankan tercatat melambat pada triwulan laporan. Kinerja perbankan syariah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga. Kontribusi tersebut utamanya didorong oleh komponen giro dan deposito. Hal tersebut menggambarkan peningkatan keyakinan masyarakat pada penggunaan produk keuangan syariah. Pada triwulan IV 2024, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya dengan NPL yang mengalami perbaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aktivitas transaksi tunai di Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2024 mengalami net outflow hingga sebesar Rp 934 miliar. Hal ini terkait peningkatan kebutuhan uang kartal oleh masyarakat pada akhir tahun yang ditandai dengan penarikan uang tunai dari perbankan. Penggunaan APMK debit dan kredit, uang elektronik, dan QRIS menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rata-rata jumlah kartu kredit mengalami peningkatan sebesar 12,52% (yoy), diikuti penurunan volume transaksi dan nominal transaksi. Di sisi lain, kartu debit mengalami peningkatan jumlah kartu sebesar 7,02% (yoy). Sama halnya dengan rata-rata jumlah uang elektronik yang meningkat sebesar 24,29% (yoy). Sementara itu, perluasan ekosistem digital di

Provinsi Bengkulu yang terakselerasi ditunjukkan oleh peningkatan pengguna KRIS dan perluasan akuisisi merchant. Sedangkan untuk transaksi nontunai SKNBI tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan IV 2024, secara nominal, nilai transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp 156,45 miliar atau terkontraksi 9,21% dibandingkan triwulan IV 2023. Transaksi pembelian pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV 2023, sedangkan transaksi penjualan cenderung stabil. Lebih lanjut, jenis valuta asing yang paling banyak ditransaksikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu berturut-turut adalah Dollar Singapura (SGD), Ringgit Malaysia (MYR), dan Dollar Amerika Serikat (USD).

Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Melanjutkan tren pada periode sebelumnya, kondisi Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dengan adanya perbaikan pada kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), serta indikator kemiskinan. Kondisi perbaikan tersebut selaras dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

TPT Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan kondisi dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka TPT Provinsi membaik dari 3,42% pada Agustus 2023, menjadi 3,11% pada Agustus 2024. Nilai Tukar Petani (NTP) melanjutkan tren perbaikan di periode sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 198,60, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 187,60. Selanjutnya, pada Oktober 2024 NTP Provinsi Bengkulu kembali meningkat pada level 191,98. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada periode September 2024 berada pada angka 12,52% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2024 yang tercatat sebesar 13,56%.

Prospek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diperkirakan tumbuh positif pada level yang menyamai tahun 2024, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan investasi. Pada triwulan I 2025, ekonomi Provinsi Bengkulu diprakirakan melandai dibandingkan sebelumnya dipicu oleh kebijakan alokasi anggaran, konsolidasi ulang APBD yang baru selesai pada tengah triwulan, dan potensi berkurangnya MICE. Selain itu, musim trek pada tanaman kelapa sawit, kendala alur Pelabuhan dan jam kerja yang

lebih sedikit memberikan tekanan pada kondisi perekonomian. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh terbatas dipengaruhi oleh belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut, kinerja positif konsumsi RT seiring kenaikan UMP, THR dan kenaikan tunjangan pada ASN, dan berlanjutnya bantuan sosial. Konsumsi pemerintah di prakirakan ter deselerasi, dipengaruhi oleh normalisasi pasca berlakunya Pemilu dan Pilkada pada periode sebelumnya. Pengurangan anggaran fiskal terutama DAU (Dana Alokasi Umum) juga menekan belanja operasi dan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut, terdapat potensi tekanan pada mobilitas masyarakat dan aktivitas MICE menahan LU Akomodasi dan Makan/Minum. Adapun kinerja LU Pertanian diperkirakan lebih baik seiring hasil panen yang meningkat dan LU Perdagangan yang membaik. Kinerja LU Transportasi dan pergudangan diperkirakan masih terbatas seiring belum selesainya kendala alur Pelabuhan Pulau Baai. Dari sisi tekanan harga, inflasi di Provinsi Bengkulu pada 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dalam range sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Inflasi diperkirakan bersumber dari adanya peningkatan upah minimum provinsi (UMP), harga jual eceran (HJE) rokok, kebijakan perpanjangan HET beras dan minyak goreng. Sementara itu, meredanya tekanan inflasi terutama pada komoditas hortikultura seiring cuaca yang lebih mendukung. Di samping itu, berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) guna pengendalian inflasi, termasuk upaya dalam mengantisipasi perubahan cuaca diperkirakan dapat mengurangi tekanan inflasi lebih lanjut. Berikut disajikan data PDRB Provinsi Bengkulu :

Tabel 2. 84 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2020 – 2024

Lapangan Usaha/industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	20.782,22	22.532,99	24.951,08	27. 287 ,93	31.019,11
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	2.392,82	3.944, 49	6.71136	5..476 ,97	4.370,60
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4.385,81	4.628,45	4.942,40	5. 143, 87	5.396,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	78,70	85,99	93,81	98,81	103,15

Lapangan Usaha/industry		2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	145,73	149,56	158,86	167 ,83	188,34
F	Konstruksi/Construction	3.869,51	4.142,80	4.404,41	4 .777, 66	5.082,61
G	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10.592,33	11.457,52	12.631,28	13. 616, 51	14.353,35
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	6.031,09	6.303,42	8.245,02	9.784, 56	10.027,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1.331,70	1.377,35	1.51752	1.687,94	1.888,52
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	2.784,29	3.000,65	3.31723	3 .10,81	4.110,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2.46465	2.763,78	2.872,83	2.785,79	2.974,19
L	Real Estat/Real/ Estate Activities	2.797,39	2.842,81	3.000,27	3.232,93	3.406,85
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1.600,21	1.665,78	1.939,82	2.163,04	2.418,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7.429,98	7.660,69	7.68556	8.248,98	9.148,62
P	Jasa Pendidikan/Education	4.578,90	4.776,65	5.193,69	5.589,36	6.377,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Social/Human Health and Social Work Activities	1.403,21	1.589,77	1.685,48	1.915,02	2.149,94
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	636,74	679,92	761,34	863, 25	974,98

Lapangan Usaha/industry	2020	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	**73.305,27**	**79.602,64**	**90.111,95**	**96.583,09**	**103.991,92**

Sumber : BPS

Tabel 2. 85 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bengkulu (miliar rupiah) Tahun 2020–2024

Pengeluaran/Expenditure	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure	46.310,87	48.1510	53.229,38	58.301,73	62.588,46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NP/SH Consumption Expenditure	1.721,94	1.705,97	1.936,14	2.223,35	2.561,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	14.261,87	14.773,05	15.214,76	16.549,39	18.305,70
Pembentukan Modal Tetap Bruto/Gross Fixed Capital Formation	30.102,40	32.798,37	35.890,61	38,053,25	39.717,27
Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	960,38	28,89	522,31	-499,36	51,89
Ekspor Barang dan Jasa	2.562,90	3.510,16	4.729,04	4.203,02	3.494,25
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	72,00	48,97	23,36	3038	68,27
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	**73.305,27**	**79.602,64**	**90.111,95**	**96.583,09**	**103.991,92**

Sumber : BPS

Tabel 2. 86 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture Forestry, and Fishing	0,38	2,45	4,50	2,06	-0,40
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	-1,70	6,47	-2,82	7,85	16,57
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	-2,44	2,37	3,08	1,83	4,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	12,04	8,09	8,02	3,96	7,93
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage Waste Management, and Remediation Activities	0,85	1,24	5,23	4,57	1,72
F	Konstruksi/Construction	0,35	2,75	0,25	5,04	3,74
G	Perdagangan Besar dan Peran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-3,88	5,26	4,11	3,05	1,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	-2,86	1,82	13,45	7,22	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan inum/Accommodation and Food Service Activities	-1,04	1,44	8,39	9,88	9,06
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	3,73	6,36	8,24	9,61	9,02

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	15,50	6,90	-4,40	-5,09	5,20
L	Real Estate/Real Estate Activities	0,98	0,12	3,86	5,26	2,73
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-2,85	-0,81	11,34	7,84	6,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,55	2,42	0,20	6,16	18,14
P	Jasa Pendidikan/Education	1,21	2,45	4,90	4,88	8,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Activities	5,96	10,58	3,38	8,61	9,04
R,S,T, U	Jasa Lainnya/0ther Services	-0,50	1,41	8,13	9,93	9,08
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product		**-0,20**	**3,27**	**4,31**	**4,26**	**4,64**

Sumber : BPS

Tabel 2. 87 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bengkulu (miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.548,54	30.360,37	32.021,40	33.671,42	35.397,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.219,66	1.182,56	1.288,23	1.419,93	1.591,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.751,07	9.039,70	9.114,23	9.682,20	10.461,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.134,11	20.964,70	21.695,69	22.383,10	23.024,49
Perubahan Inventori	393,72	7,87	213,66	-272,94	46,56
Ekspor Luar Negeri	2.458,97	2.853,76	2.697,40	2.737,35	2.156,09
Impor Barang dan Jasa	60,75	37,31	11,99	15,31	36,34
Produk Domestik Regional Bruto	**46.338,43**	**47.853,78**	**49.916,06**	**52.051,56**	**54.454,65**

Tabel 2. 88 Distribusi Persentase PDRB ADHK Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,35	28,31	27,69	28,25	29,83
B	Pertambangan dan Penggalian	3,26	4,96	7,45	5,71	4,20
C	Industri Pengolahan	5,98	5,81	5,48	5,33	5,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,20	0,19	0,18	0,17	0,18
F	Konstruksi	5,28	5,20	4,89	4,95	4,89

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,45	14,39	14,02	14,10	13,80
H	Transportasi dan Pergudangan	8,23	7,92	9,15	10,13	9,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,82	1,73	1,68	1,75	1,82
J	Informasi dan Komunikasi	3,80	3,77	3,68	3,84	3,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,36	3,47	3,19	2,88	2,86
L	Real Estate	3,82	3,57	3,33	3,35	3,28
M,N	Jasa Perusahaan	2,18	2,09	2,15	2,24	2,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,14	9,62	8,53	8,54	8,80
P	Jasa Pendidikan	6,25	6,00	5,76	5,78	6,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	2,00	1,87	1,98	2,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,87	0,85	0,84	0,89	0,94
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Tabel 2. 89 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehuatanan dan perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	0,38	2,45	4,50	2,06	2,57
B.	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-1,70	6,94	-2,82	8,49	2,22
C.	Industri Pengolahan/Manufacturing	-2,44	2,37	3,08	1,83	1,49
D.	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	12,04	8,09	8,02	3,96	4,04
E.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,85	1,24	5,23	4,57	6,09
F.	Konstruksi/Construction	0,35	2,75	0,25	5,04	5,63
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,88	5,26	4,11	3,06	3,32
H.	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	-2,86	1,82	13,45	7,22	3,97
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-1,04	1,44	8,39	9,88	9,39
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	3,73	6,36	8,24	9,61	9,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	15,50	6,90	-4,40	-5,09	5,46
L.	Real Estate/Real Estate Activities	0,98	0,12	3,86	5,26	4,27
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-2,85	-0,81	11,34	7,84	8,21
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1,55	2,42	0,20	6,16	8,41

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan/Education	1,21	2,45	4,90	4,88	6,42
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial /Human Health and Social Work Activities	5,96	10,58	3,38	8,61	9,07
R,S T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-0,50	1,41	8,13	9,93	9,37
Produk Domestik Regional Bruto		**-0,02**	**3,24**	**4,31**	**4,26**	**4,62**

Sumber : Buku Profil Daerah

Tabel 2. 90 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,26	3,25	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	0,07	3,14	4,3	4,05	4,29
Bengkulu Utara	0,23	4,01	3,14	4,18	4,43
Kaur	0,12	3,08	3,78	3,4	4,15
Seluma	-0,01	2,18	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	0,06	3,35	4,33	3,69	4,05
Lebong	0,1	3,08	2,98	2,84	4,3
Kepahiang	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	-0,06	2,29	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	-0,25	3,47	5,69	5,53	5,39

Tabel 2. 91 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	73.305,27	79.602,64	90.111,95	96.583,09	103.991,92
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	46.338,43	47.853,78	49.916,06	52.051,56	54.454,65
PDRB perkapita ADHB (Juta Rupiah)	36,5	39,1	43,7	46,29	49,23
PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	23,1	23,5	24,2	24,9	n/a
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dimana pada tahun 2023 PDRB ADHB mencapai Rp. 96.583,09 miliar sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 103.991,92 miliar, Nilai PDRB ADHK tahun 2024

sebesar Rp. 54,45 miliar lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar Rp. 52.051,56 miliar Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai sebesar 4,28 % tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,62%.

Tabel 2. 92 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
	2024
Bengkulu Selatan	7.864,10**
Rejang Lebong	13.066,13**
Bengkulu Utara	12.781,53**
Kaur	4.963,57**
Seluma	6.344,92**
Mukomuko	7.566,42**
Lebong	4.580,72**
Kepahiang	6,265,45**
Bengkulu Tengah	6.781,90**
Kota Bengkulu	33.148,31**

Tabel 2. 93 PDRB Perkapita ADHK Kabupaten/Kota 2020-2024

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Miliar-Rupiah)
	2024
Bengkulu Selatan	4.169,51**
Rejang Lebong	7.101.11**
Bengkulu Utara	6.088,15**
Kaur	2.607,62**
Seluma	3.223,40**
Mukomuko	3.870,27**
Lebong	2.421,54**
Kepahiang	3.270,63*
Bengkulu Tengah	3.282,44
Kota Bengkulu	18.609,94**

Sumber: Buku Profil Daerah

PDRB adalah indikator penting untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, yang berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di sektor publik mengacu pada cara-cara pengelolaan dan pengaturan

yang efisien, efektif, serta akuntabel, dengan dasar prinsip keterbukaan informasi dan transparansi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup beberapa aspek berikut:

1. Perencanaan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Inovasi

a) Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan

prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota .

Perkembangan kinerja urusan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 94 Perkembangan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	24,19	24,34	22,28	22,13	22,00
Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	15,17	15,37	20,10	20,29	20,09

Sumber : Kemenpan RB, 2024

b) Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Bengkulu mampu di pertahankan dengan predikat WTP selama 5 tahun terakhir.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Perkembangan kinerja urusan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 95 Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PAD	Juta Rupiah	1.116.839	795.804	967.957	1.033.849	1.051.171

Sumber: Buku Profil Daerah

c) Inovasi

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 2019, nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 280 sesuai dengan Kepmendagri No.002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021. Perkembangan kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 96 Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52.69	57,93	48,57	51,49	53,39

Sumber: Buku Profil Daerah

2. Kepegawaian

Profesionalisme dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat menciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi menuju pelayanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalisme (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat

penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas. Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 97 Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	71,92	73,87	74,50	64,23	n/a

Sumber : BKD 2024

3. Akuntabilitas

Dalam pemerintahan yang baik, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini mencakup laporan keuangan yang jelas dan transparan, serta pengawasan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun lembaga negara terkait. Secara keseluruhan, tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif dalam pengelolaan sektor publik, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu 69,05.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini berisi uraian atau penjabaran dari kriteria dan ukuran keberhasilan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu mencapai 65,81 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 65,00.

Tabel 2. 98 Perkembangan akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	Angka	68,98	69,92	69,30	69,31	69,05
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	63,34	63,61	65,00	65,81	76,8

Sumber: Buku Profil Daerah

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maksud pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Perkembangan kinerja urusan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 99 Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	59,43 (Semester I Tahun 2020)	73,84	59,74	61,24	62,05
Tingkat Maturitas SPIP	Level	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Level 2,8875	Level 3 3,043	Level 3 3,007	n/a

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Level 2,8875	Level 3 3,000	Level 3 3,000	n/a

*Sumber: Buku Profil Daerah, 2024 *n/a = data belum tersedia/belum rilis*

4. Keterbukaan dan Transparansi

Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan untuk selalu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan, anggaran, dan keputusan-keputusan lainnya. Ini penting agar masyarakat dapat memahami dan memantau bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan tata Kelola PPID Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berfungsi mengumpulkan informasi, menyediakan dan mendistribusikan serta memberikan pelayanan informasi kepada publik atau masyarakat.

5. Kepatuhan pada Kerangka Hukum

Pemerintahan yang baik harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang ditetapkan di tingkat nasional maupun yang berlaku di tingkat provinsi. Ini termasuk memastikan bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, serta tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Produk hukum pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu selalu

Tabel 2. 100 Perkembangan Peraturan Daerah di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Perda	10	7	8	5	7

Sumber: Buku Profil Daerah

6. Pemberdayaan Masyarakat

Selain itu, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik itu melalui konsultasi publik atau mekanisme lain yang memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan pendapat terkait kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan saat pelaksanaan Forum Konsultasi

Publik dan Musrenbang serta penyediaan portal aplikasi untuk menampung usulan pembangunan masyarakat dan juga pokok-pokok pikiran DPRD.

7. Pemanfaatan Teknologi

Pada era digital ini, penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa memanfaatkan platform online untuk menyediakan informasi publik, melakukan e-Government, dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance.* Perkembangan kinerja

urusan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 101 Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Nilai	2,9	2,79	3,11	3,12	3,92
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,2	76,67	79,10	77,42	68,95

Sumber: Buku Profil Daerah

Evaluasi SPBE Tahun 2024 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan evaluator internal instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2024 Indeks SPBE sebesar 3,92 yang meningkat dari tahun sebelumnya dimana tahun 2023 sebesar 3,12. Hal ini menunjukkan semakin banyak implementasi aplikasi-aplikasi e-government yang digunakan oleh OPD dan kemudahan layanan pemerintah kepada pengguna sesuai dengan fungsi masing-masing dan adanya kebijakan-kebijakan/regulasi-regulasi yang mendukung penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, beri kepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang adil dan efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kehidupan masyarakat. Di dalam konteks ini, pembangunan hukum mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Supremasi Hukum yang Berkeadilan dan berlandaskan HAM

Supremasi hukum berarti bahwa hukum harus berlaku secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak ada pihak yang berada di luar hukum, dan hukum harus diterapkan secara merata pada setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Keadilan di sini mencakup keadilan substantif, yakni hukum harus mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghormati hak-hak individu.

a) Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum
Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. Terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah. Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 102 Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub	%	50	20	20	20	20
Penanganan kasus pelanggaran Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : Buku Profil Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, penanganan kasus pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) di Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan signifikan. Berdasarkan data dari Buku Profil Daerah 2025, persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub tercatat sebesar 50% pada tahun 2020, namun menurun drastis dan bertahan pada 20% mulai tahun 2021 hingga 2024. Sementara itu, penanganan kasus pelanggaran ketertiban umum menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan konsistensi di angka 100% sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga

ketertiban umum secara maksimal selama lima tahun berturut-turut.

Penurunan tajam pada penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub mungkin mengindikasikan adanya tantangan atau perubahan prioritas dalam penegakan regulasi. Sebaliknya, keberhasilan konsisten dalam penanganan ketertiban umum menonjolkan efektivitas kebijakan dan strategi pemerintah di sektor ini.

b) Satuan Perlindungan Masyarakat

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 103 Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Satlinmas	%	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk

Sumber : Buku Profil Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Provinsi Bengkulu tetap stabil di angka 61 anggota Satlinmas per 10.000 penduduk setiap tahunnya. Data ini, yang bersumber dari Buku Profil Daerah 2025, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan jumlah personel Satlinmas untuk mendukung upaya penegakan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan penanganan bencana. Stabilitas rasio ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam program pengelolaan dan keberadaan Satlinmas, namun juga mengindikasikan perlunya evaluasi apakah jumlah ini memadai untuk kebutuhan perlindungan masyarakat seiring dengan perkembangan populasi dan kompleksitas tantangan di daerah.

c) Angka Kriminalitas

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Statistik kriminalitas di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 104 Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Aspek Kriminal	2021	2022	2023	2024
Kejahatan yang dilaporkan	3.493	7.084	7.497	n/a
Kejahatan yang diselesaikan (clearance rate)	46,81	3.772	4.979	n/a

Sumber: Statistik Kriminal 2024.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

d) Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah

dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard, Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di Kabupaten/Kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 105 Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	Nilai	162,00	157,14	155,35	148,75	144,08

Sumber : Buku Profil Daerah, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Risiko Bencana di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren penurunan yang signifikan, mencerminkan adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Buku Profil Daerah 2025, nilai indeks ini tercatat sebesar 162,00 pada tahun 2020 dan secara konsisten menurun menjadi 157,14 pada tahun 2021, 155,35 pada tahun 2022, 148,75 pada tahun 2023, hingga akhirnya mencapai 144,08 pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait dalam mengimplementasikan strategi mitigasi bencana, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, edukasi masyarakat, dan kesiapan menghadapi bencana. Meski menunjukkan hasil yang positif, langkah-langkah berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga dan mempercepat penurunan risiko bencana, mengingat pentingnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

2. Demokrasi Substansial

Sementara itu, pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial di Provinsi Bengkulu menekankan

pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih dari sekedar prosedural, yaitu memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrasi substansial salah satunya yaitu Partisipasi Aktif Masyarakat. Demokrasi yang substansial mengedepankan partisipasi aktif masyarakat di provinsi bengkulu, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan sosial-politik. Ini mencakup transparansi, akses informasi melalui media sosial dan website resmi perangkat daerah, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik melalui media aplikasi e-Ngadu atau E-Lapor, atau usulan pembangunan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu melalui system yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu melalui Aplikasi SIPP BANG.

Dengan mengarahkan pembangunan hukum dan demokrasi ke arah yang mengutamakan supremasi hukum yang berkeadilan serta demokrasi substansial, Provinsi Bengkulu dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

a) Indeks Demokrasi

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektivitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kunci stabilitas daerah dan nasional. Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut, Kesbangpol diharapkan

turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada, serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa. Tak hanya persoalan radikalisme dan terorisme, menurut Tjahjo, Kesbangpol juga turut dapat mengambil peranan dalam memberantas Narkoba yang mengancam generasi bangsa. Dalam hal membumikan Pancasila, Kesbangpol harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, Forkopimda termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada. Perkembangan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 106 Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100
Indeks Demokrasi	%	78,79	72,20	72,73	74,26	n/a

Sumber: Buku Profil Daerah
**n/a = data belum tersedia/belum rilis*

2.1.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Analisis capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian tahunan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk masing-masing urusan pemerintahan. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif guna mengidentifikasi kecenderungan capaian, baik yang menunjukkan tren positif, stagnan, maupun yang belum mencapai target. Selain itu, analisis ini juga memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, seperti kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, kondisi sosial ekonomi, hingga dinamika kebijakan nasional.

Hasil analisis ini menjadi dasar untuk memberikan penilaian terhadap kinerja urusan secara keseluruhan dan untuk menyusun rekomendasi perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi capaian IKK tidak hanya menggambarkan hasil kinerja selama lima tahun terakhir, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian visi daerah

Tabel 2. 107 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	68,64	89,51	99,93	99,94	99,94
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	89,41	92,13	98,99	99,73	98,00
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,14	1.36	1,30	1,32	1,28
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100,00	100,00	80,00	100,00	100,00
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
1.c.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	6,17	6,17	6,29	6,29	6,29
1.c.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
1.c.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	88,01	82,75	49,54	44,81	47,87
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0	0	0	17,09
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	0	0	0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	66,28	75,88	58,15	63,67	62,82
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	7,12	21,37	4,95	8,62	11,22
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya ; 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam ; 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam ; 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi ; 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi ; 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi ; 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana ; 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi ; 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan;	0	0	100,00	0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM ; 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM ; 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM ; 4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM ;	0	0	0	0	0
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha ; 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH; 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	23,19	0	1,31	1,31
1.d.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU; 2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi; 3. Jumlah pengembang yang teregistrasi; 4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	34,48	100,00	100,00	11,81

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100,00	100	100,00	100,00	100,00
1.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada ; yang ditegakkan	100,00	100	100,00	100,00	100,00
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00	100	0	100,00	100,00
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100,00	100	100,00	100,00	20,00
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00	100	100,00	100,00	100,00
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100,00	100,00	100,00	0	100,00
2.a.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100,00	100,00	30,00	30,00	100,00
2.a.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	6,25	1,80	4,52	6,01	2,09

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		116,81	25.369.995,52	93.214.780,85	7,86
2.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	45,08	47,19	38,08	39,71	31,71
2.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	1,15	13,05	46,03	23,14	31,57
2.a.5	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	75,24	62,65	11,45	22,24	14,71
2.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,05	14,03	0	13,35	10,86
2.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,12	8,93	2,40	3,51	2,71

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0063	5,50	8,28	11,30	9,13
2.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pangan	Persentase cadangan pangan	83,60	77,28	34,27	37,38	163,62
2.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	0	0	0	0	100,00
2.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	0	0	100,00	100,00	100,00
2.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0	0	0	-	100,00
2.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	61,16	64,39	70,80	72,10	73,45

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
2.e.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0,71	11,11	25,00	12,50	0
2.f.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.f.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	100,00	100,00	27,78	30,56	41,67
2.g.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	38,97	26,55	50,00	89,33	58,67
2.g.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	50,00	24,56	0	74,37	20,56
2.h.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,40	2,30	2,30	2,27	2,23

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
2.h.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	52,84	79,65	43,23	43,23	43,26
2.h.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	47,16	20,35	10,92	10,92	6,35
2.i.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,88	0,88	0,88	0,88	0,85
2.i.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,36	0,36	0,36	0,36	0,32
2.j.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	100,00	100,00	100,00	94,44
2.j.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00	61,90	100,00	100,00	100,00

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
2.j.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100,00	92,77	73,35	100,00	97,68
2.k.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	80,38	81,58	70,62	69,71	76,47
2.k.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	7,46	12,16	17,61	26,21	56,06
2.l	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	1,11	-36,77	48,08	3,90	11,25
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,23	19,09	43,02	0,87	1,64
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,94	6,77	53,69	1,11	5,57

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	0	12,00	200,00	0	60,00
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.n.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Statistik	Persentase Perangkat Daerah ;yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.o	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	88,35	227,40	0	48,84	48,99
2.p	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	98,37	100,00	100,00	100,00	100,00
2.q.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	34,22	65,99	66,99	0	68,83

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Pelayanan Dasar							
2.q.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	32,93	86,85	13,10	113,09	65,96
2.r.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	61,14	65,41	75,43	75,42	72,65
2.r.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,67	23,64	0	3.016,30	98,92
3.a.1	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$ 298.634.397,00	305.819.595,00	71,91	77,06	36,97
3.a.2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	64,12	64,12	0	64,12	67,00
3.b.1	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	- 37,73	66,96	12,64	6,89	19,97

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-37,69	80,98	61,20	26,90	102,12
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	37,66	27,48	23,08	54,84	55,24
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,82	1,73	1,68	1,75	2,64
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	Produktivitas ;pertanian per hektar per tahun	532,68	5.399,12	5.552,53	4.686,69	575,82
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	83,90	51,61	735,29	-45,32	32,84
3.d.1	Urusan Pilihan	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100,00	96,24	1.444,44	694,74	82,56
3.d.2	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	8,65	11,12	4,96	4,96	15,18
3.d.3	Urusan Pilihan	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	93,41	1,28	0,05	0,03	2,14
3.e.1	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	99,46	99,46	100,00	100,00	100,00
3.e.2	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.f.1	Urusan Pilihan	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-20,41	93,0442834	33,57	-26,86	-21,24
3.f.2	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100,00	100	100,00	100,00	0
3.f.3	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0	100	100,00	100,00	100,00
3.f.4	Urusan Pilihan	Perdagangan	Tertib Usaha	100,00	100	0	0	0
3.f.5	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	99,52	90,78	98,57	77,95	84,81

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.f.6	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase Barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100,00	52,94	60,00	100,00	100,00
3.f.7	Urusan Pilihan	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5,98	6,31	9,89	4,85	7,90
3.g.1	Urusan Pilihan	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	4,76	22,73	12,96	4,92	1,56
3.g.2	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	70,00	100	70,00	70,00	100,20
3.g.3	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100	100,00	75,00	200,00
3.g.4	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
3.g.5	Urusan Pilihan	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
3.g.6	Urusan Pilihan	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	100	71,43	35,00	82,00
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	0	0	0	0	0

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.h	Urusan Pilihan	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	-
4.a.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,88	22,53	25,36	30,48	27,49
4.a.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	25,26	33,32	38,11	34,61	34,12
4.a.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	80,02	61,91	67,98	65,86	72,86
4.a.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4.a.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
4.a.6	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4.i.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.; yang ditandatangani pada kuartal pertama	45,71	0	0	0	0
4.i.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	66,67	98,20	94,79	100,00	95,20
4.i.3	Fungsi Penunjang	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	5,27	16,13	7,79	17,63	87,54

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
	Urusan Pemerintahan							
4.i.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan	-	-	417,41	- 58,11	879,07	1,00
4.j.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	478,28	85,68	644,21	88,21	90,65
4.j.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	60,32	25,67	28,05	25,28	23,53
4.j.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	98,30	63,44	54.465,49	61,78	66,77
4.k.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,81	5,63	6,61	4,90	1,56
4.k.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,19	3,77	12,60	6,81	1,29
4.k.3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Assets management	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4.k.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,26	3,80	0	2,21	3,89

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4.1.1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	103,78	114,68	99,77	93,75	98,04
4.1.2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00	100,00	0	100,00	100,00

2. 2.Gambaran Keuangan Daerah

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu pada periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 tidak hanya difokuskan pada capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga dilengkapi dengan uraian kebijakan pengelolaan keuangan yang telah ditempuh selama lima tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai konsistensi dan efektivitas pengelolaan fiskal daerah serta arah kebijakan keuangan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada periode 2020–2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya mengedepankan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi juga menyoroti kebijakan pengelolaan keuangan yang strategis. Data menunjukkan tren positif dengan realisasi pendapatan pada tahun 2023 mencapai Rp 2.991.013.990.544,34, sedikit melampaui target sebesar 100,12%, naik dari Rp2.953.744.560.516,20 di tahun sebelumnya. Di sisi belanja daerah, realisasi Rp3.123.414.680.971 menunjukkan peningkatan dibandingkan Rp3.026.385.524.151 di tahun 2022. Pembiayaan daerah pun tercapai sepenuhnya, yakni sebesar Rp 201,35 miliar, yang menghasilkan Silpa sebesar Rp 68,96 miliar. Sementara itu, data tahun 2021 memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan mencapai Rp3.051.751.862.802,73, dan total belanja sebesar Rp2.880.225.046.730,80, membuktikan stabilitas fiskal yang cukup baik sepanjang periode awal lima tahun menuju 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sejumlah kebijakan strategis yang berorientasi pada penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Upaya optimalisasi pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, disertai perbaikan tata kelola pajak dan retribusi. Sementara itu, kebijakan belanja diarahkan pada program yang lebih produktif, prioritas, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi juga memperkuat efektivitas pemanfaatan transfer ke daerah dan dana bagi hasil melalui sinkronisasi program dengan kebijakan nasional agar lebih tepat sasaran. Dari sisi pembiayaan, pengendalian defisit anggaran dilakukan dengan cermat, termasuk memanfaatkan skema pembiayaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Seluruh langkah tersebut ditunjang dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) dalam tata kelola keuangan yang semakin memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2020–2024 mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sekaligus tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 2. 108 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020 - 2024

Kebijakan Keuangan	
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Kebijakan Belanja Daerah**
a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru; b. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak; c. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana; d. Meningkatkan peranan dan fungsi UPTD dan Samsat Keliling dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak; e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur; f. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK; dan g. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	a. Belanja Tidak Langsung diarahkan pada: 1) Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. a) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; b) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. c) Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan. b. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya. c. Belanja Langsung 1) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat; 2) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2023 dihindari dan dapat direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya; 3) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada

Kebijakan Keuangan	
Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Kebijakan Belanja Daerah**
	minggu terakhir Desember 2023 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeure; dan 4) Belanja Pegawai berupa pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2023. 5) Belanja Barang dan Jasa a) Belanja Barang dan Jasa di setiap OPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan; b) Belanja Barang Habis Pakai disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan; dan c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. 6) Belanja Modal a) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset; b) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut; dan c) Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya. d. Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

2.2.1 Realisasi Pendapatan

Secara keseluruhan terdapat kecenderungan terjadinya fluktuasi peningkatan total pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024 dengan total pendapatan tercatat sebesar Rp2.786.928.036.207,91 pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan hingga Rp3.055.767.420.713,29 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan penerimaan dari berbagai sumber, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer.

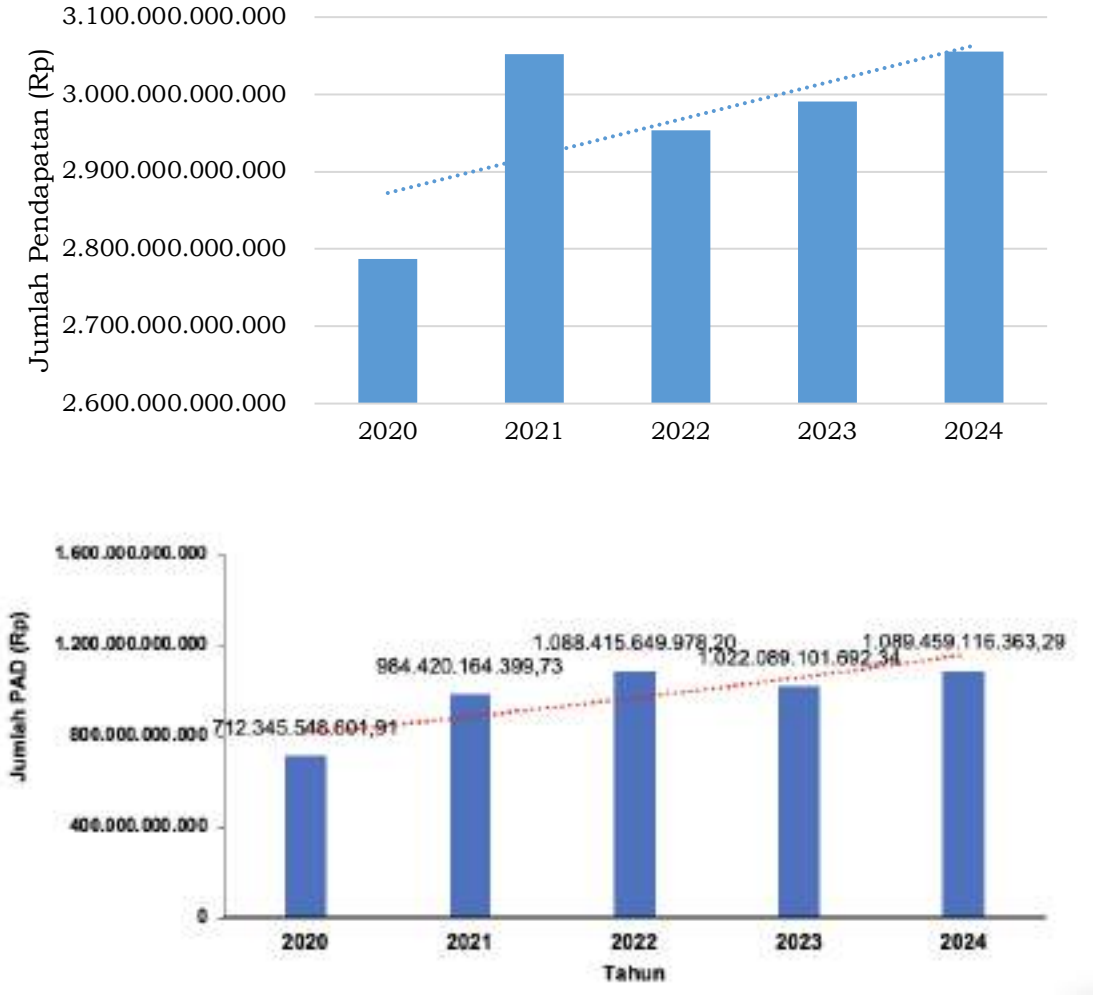

Gambar 2. 12 Jumlah Pendapatan dan PAD, 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan yang tidak bergantung pada transfer atau bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga PAD menjadi salah satu komponen yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan daerah, seperti pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan program

sosial. Fluktuasi PAD dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

a) **Pajak Daerah** merupakan kontributor terbesar terhadap PAD, dengan tren peningkatan yang terlihat pada tahun 2022 mencapai Rp895.737.250.906,00. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak relatif stabil, meskipun ada penurunan pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro atau kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan insentif atau keringanan pajak di tengah tantangan ekonomi global.

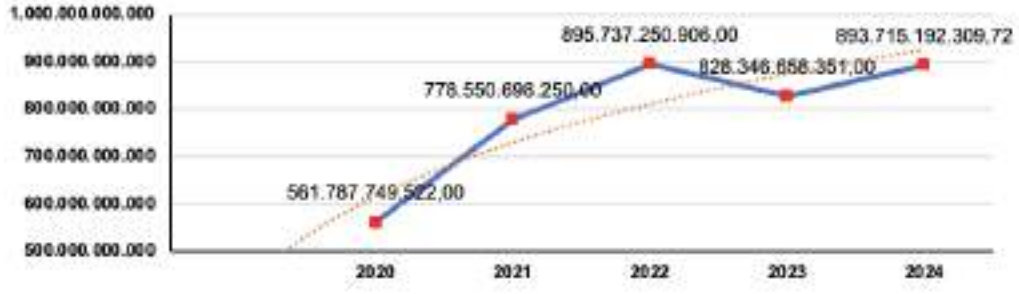

Gambar 2. 13 Pajak Daerah dari tahun 2020-2024

Sedangkan untuk sektor yang berkontribusi terhadap pajak daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini :

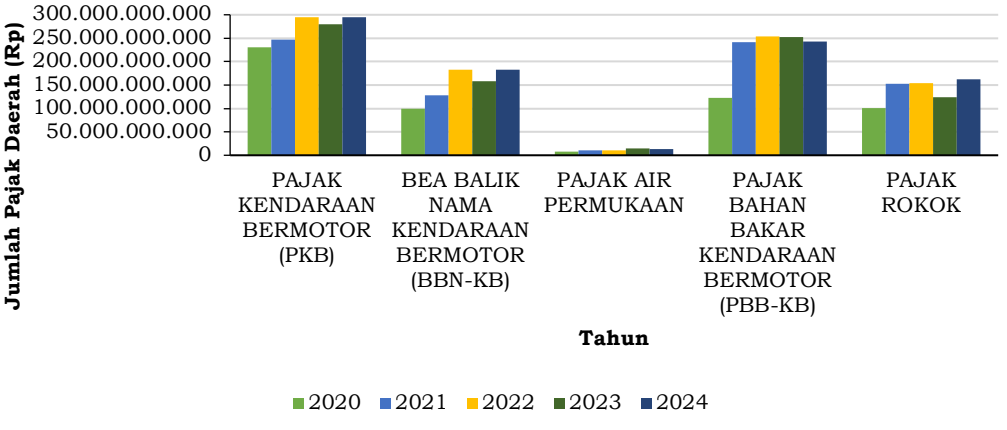

Gambar 2. 14 Pertumbuhan Sektor Pajak per tahun

b) **Retribusi Daerah** berkaitan langsung dengan pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada Masyarakat seperti retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pelabuhan, dan lainnya. Pada tahun 2020, kontribusi dari Retribusi Daerah terbilang kecil, namun pada tahun 2024

mengalami lonjakan luar biasa mencapai Rp160.970.113.958,00 yang disebabkan karena Pelayanan Kesehatan (RSJKO dan RSUD) per tahun 2024 masuk ke dalam sektor Retribusi Daerah.

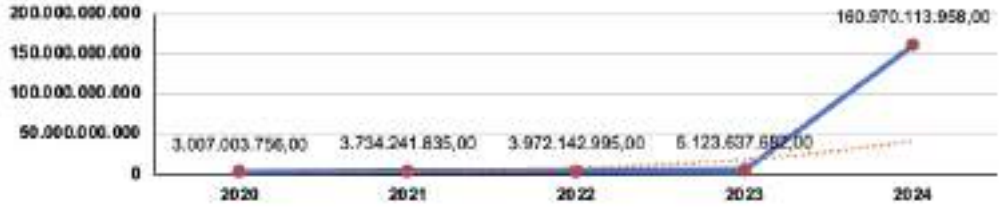

Gambar 2. 15 Retribusi Daerah dari tahun 2020-2024

Sedangkan untuk sektor yang berkontribusi terhadap retribusi daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini :

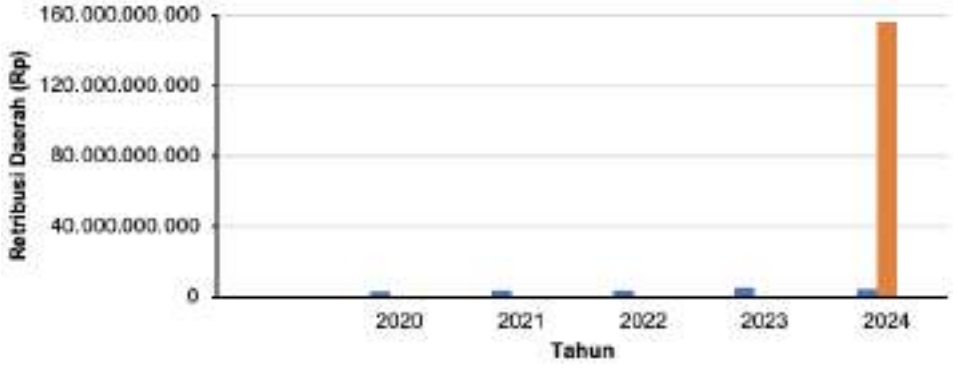

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Retribusi Daerah per tahun

c) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah** mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan angka Rp17.125.198.290,04 mengindikasikan pengelolaan kekayaan daerah yang lebih efektif. Namun berdasarkan trendline yang didapat, terjadi penurunan dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah dari tahun ke tahun.

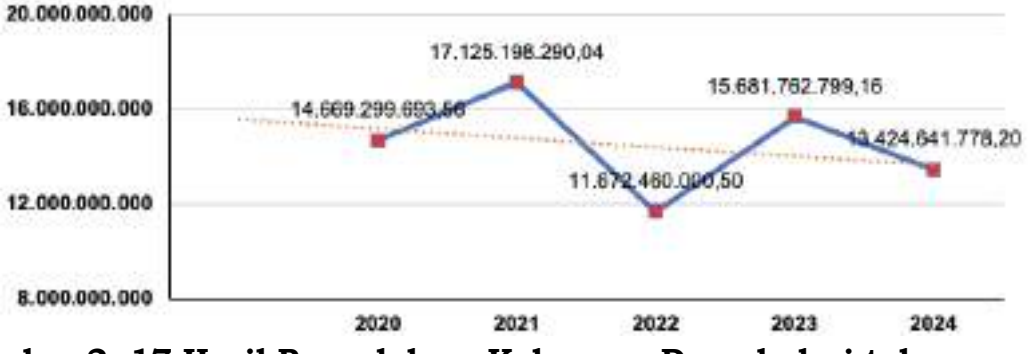

Gambar 2. 17 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dari tahun 2020-2024

Sedangkan untuk sektor yang berkontribusi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini :

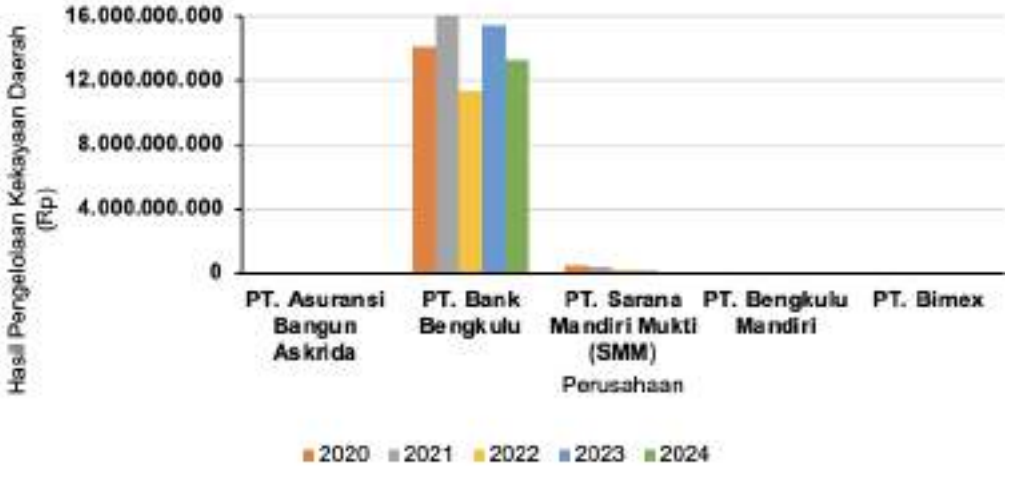

Gambar 2. 18 Sektor yang berkontribusi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

d) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** ini mencakup berbagai sumber pendapatan lain yang sah menurut hukum, seperti pendapatan dari bantuan atau donasi dari pihak ketiga yang diberikan kepada daerah. Sumber pendapatan ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam pada tahun 2024.

Pendapatan transfer adalah aliran dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat dan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah. Data menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam pendapatan daerah, dengan total pendapatan transfer yang relatif stabil.

a) **Dana Perimbangan,** terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terus menjadi sumber terbesar dalam transfer. Pada tahun 2021, Dana Perimbangan tercatat Rp 2.047.384.450.403,00, yang merupakan alokasi terbesar sepanjang periode tersebut. Fluktuasi pada alokasi ini bisa disebabkan oleh kebijakan alokasi dana dari pusat yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan daerah.

b) **Dana Transfer Umum dan Khusus**: Dana bagi hasil dan alokasi khusus menunjukkan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat, khususnya dalam hal dana transfer fisik dan non-fisik. Dana transfer fisik (seperti pembangunan infrastruktur)

menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, terkait dengan program pembangunan atau pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi.

c) **Dana Insentif Daerah**: Meskipun dana insentif daerah tidak sebesar dana perimbangan, namun peningkatannya pada beberapa tahun menunjukkan adanya insentif dari pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil dalam pengelolaan keuangan atau memiliki prestasi tertentu dalam pelaksanaan program pembangunan (Proses penyusunan APBD tepat waktu serta Pengendalian inflasi daerah). Peningkatan yang terlihat pada tahun 2021 dan 2024 bisa jadi menunjukkan adanya upaya penguatan ekonomi daerah melalui kebijakan insentif.

Pendapatan hibah, baik dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga, memiliki peran kecil dalam struktur total pendapatan daerah, namun tetap relevan untuk mendukung proyek-proyek tertentu.

a) **Hibah dari Pemerintah Pusat** pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp20.156.119.000,00. Sumber ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2024, yang menunjukkan adanya kebijakan pusat untuk membantu daerah dalam hal pendanaan. Hibah dari pemerintah pusat diarahkan untuk pembangunan yang mendukung kesejahteraan Masyarakat.

b) **Sumbangan Pihak Ketiga**: Sumbangan pihak ketiga yang tercatat pada beberapa tahun (terutama pada tahun 2021 dan 2022) menunjukkan adanya partisipasi masyarakat atau sektor swasta (Jasa Raharja) dalam pembiayaan kegiatan atau program pemerintah daerah. Peningkatan pada tahun 2024 dapat mencerminkan adanya kepercayaan dan kontribusi lebih banyak dari sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2. 109 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020-2024

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)						Realisasi				
						2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1						2	3	4	5	6
4	**Pendapatan**					2.786.928.036.207,91	3.051.751.862.802,73	2.953.744.560.516,20	2.991.013.990.544,34	3.055.767.420.713,29
4	**1**	**Pendapatan Asli Daerah**				712.345.548.601,91	984.420.164.399,73	1.088.415.649.978,20	1.022.089.101.692,34	1.089.457.835.878,29
4	1	1	Pajak Daerah			561.787.749.522,00	778.550.698.250,00	895.737.250.906,00	828.346.658.351,00	893.713.718.796,72
4	1	2	Retribusi Daerah			3.007.003.756,00	3.734.241.835,00	3.972.142.995,00	5.123.637.682,00	160.970.113.958,00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			14.669.299.693,56	17.125.198.290,04	11.672.460.000,50	15.681.762.799,16	13.424.641.778,20
4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			132.881.495.630,35	185.010.026.024,69	177.033.796.076,70	172.937.042.860,18	21.349.361.345,37
4	**2**	**Pendapatan Transfer**				2.053.310.368.606,00	2.066.215.698.403,00	1.864.171.870.538,00	1.967.756.058.852,00	1.930.085.427.835,00
4	2	1	Transfer Pemerintah Pusat			2.053.310.368.606,00	2.066.215.698.403,00	1.864.171.870.538,00	1.967.756.058.852,00	1.930.085.427.835,00
4	2	1	1	Dana Perimbangan		1.427.539.423.208,00	2.047.384.450.403,00	1.814.623.314.538,00	1.955.995.641.852,00	1.914.408.798.835,00
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	71.140.797.650,00	83.245.032.380,00	112.142.797.424,00	121.146.963.636,00	156.273.630.394,00
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.219.949.535.000,00	1.213.764.868.000,00	1.210.018.708.471,00	1.267.641.877.000,00	1.325.126.343.472,00
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus Fisik	136.449.090.558,00	177.195.802.118,00	207.523.114.398,00	268.641.168.385,00	262.114.688.943,00
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus Non Fisik		573.178.747.905,00	284.938.694.245,00	298.565.632.831,00	170.894.136.026,00
4	2	1	2	Dana Insentif Daerah			18.831.248.000,00	49.548.556.000,00	11.760.417.000,00	15.676.629.000,00
4	2	2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya			625.770.945.398,00				
4	2	2	3	Dana Penyesuainan		625.770.945.398,00				
4	**3**	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**				21.272.119.000,00	1.116.000.000,00	1.157.040.000,00	1.168.830.000,00	36.224.157.000,00
4	3	1	Hibah							
4	3	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	20.156.119.000,00				34.912.473.000,00
4	3	1	5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis						
4	3	1	5	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis					
4	3	1	5	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	1.157.040.000,00	1.168.830.000,00	1.311.684.000,00
4	3	2	Dana Darurat							
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
4	3	3	1	Lain-lain Pendapatan						
4	3	3	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS					
4	3	3	1	1	Pendapatan Hibah Dana BOS					
JUMLAH PENDAPATAN						**2.786.928.036.207,91**	**3.051.751.862.802,73**	**2.953.744.560.516,20**	**2.991.013.990.544,34**	**3.055.767.420.713,29**

2.2.2 Realisasi Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Pengelolaan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan dan fluktuasi dalam belanja ini juga mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan pada setiap tahunnya.

Total belanja selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, total belanja tercatat sebesar Rp2.698.458.077.971,87, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp3.140.472.406.450. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata kenaikan tahunan sekitar 8%. Peningkatan ini mencerminkan adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk berbagai sektor, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemenuhan kewajiban negara.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah Provinsi Bengkulu, dengan total yang sangat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, belanja operasi tercatat sebesar Rp2.138.443.065.952,10, melandai pada tahun 2021, 2022, 2023 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp2.401.947.454.836. Ini mencerminkan peningkatan kebutuhan untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah, termasuk gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, subsidi atau hibah serta bantuan sosial untuk berbagai program. Adapun penjabaran mengenai komponen Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

a) **Belanja Pegawai** merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja pegawai ini merupakan bagian yang paling besar dari belanja operasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk gaji yang merupakan belanja wajib dan

tunjangan pegawai tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran. Belanja pegawai mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp1.066.821.278.776,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.217.313.289.139,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh penyesuaian gaji atau bertambahnya jumlah pegawai dikarenakan adanya rekrutmen baru dan adanya perpindahan pegawai dari kabupaten ataupun daerah lainnya.

b) Pengeluaran **Belanja Barang dan Jasa** juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2020, belanja barang dan jasa tercatat Rp559.001.307.176,10, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp961.649.037.240. Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan daerah yang semakin meningkat akan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung program-program pembangunan dan operasional lainnya.

c) **Belanja Hibah** sebagian besar terjadi pada tahun 2020 (Rp512.620.480.000,00), namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 (Rp337.271.451.880,00) dan kembali meningkat pada tahun **2024.** Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan alokasi hibah atau pergeseran prioritas pemerintah daerah.

d) **Belanja Bantuan Sosial** pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Tahun 2020 pemerintah Provinsi Bengkulu tidak menganggarkan belanja bantuan sosial namun ditahun berikutnya realisasi belanja bantuan sosial ini sebesar Rp98.980.000,00 hingga di tahun 2024 pemerintah provinsi merealisasikan sebesar Rp3.005.000.000,00.

Belanja modal, yang digunakan untuk perolehan aset tetap, aset lainnya dan pengembangan infrastruktur, menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut :

a) **Belanja Tanah** pada tahun 2020 menunjukkan pengeluaran sebesar Rp910.700.000,00, tetapi kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022, dan tidak ada pengeluaran untuk belanja tanah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah bukan menjadi prioritas utama dalam beberapa tahun terakhir.

b) **Belanja Peralatan dan Mesin** menunjukkan angka yang signifikan pada tahun 2020 (Rp187.117.183.962,70), tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Ini

mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperbarui atau menambah peralatan dan mesin guna mendukung pembangunan daerah.

c) Pengeluaran untuk **Belanja Bangunan dan Gedung** mencatatkan variasi yang cukup besar. Pada tahun 2020, pengeluaran untuk belanja ini tercatat Rp61.322.534.260,23, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp149.474.189.332. Angka ini mencerminkan adanya pembangunan infrastruktur fisik yang lebih besar yang merupakan sebagai dari *major projects* yang diimplementasikan pada tahun-tahun tersebut.

d) **Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi** juga mengalami fluktuasi besar. Pada tahun 2020, anggaran untuk jalan dan infrastruktur lainnya tercatat Rp134.069.776.163,63, dengan lonjakan pada tahun 2023 menjadi Rp206.289.760.150. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur jalan dan irigasi, yang sangat penting untuk mendukung sektor ekonomi daerah.

Belanja tidak terduga menunjukkan pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, tetapi tetap penting sebagai cadangan untuk kebutuhan mendesak. Pada tahun 2020, belanja tidak terduga tercatat sebesar Rp12.515.896.300,00, namun menurun drastis pada tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali menjadi sangat kecil pada tahun 2024 (hanya Rp26.609.031,00). Penurunan ini mencerminkan kebijakan penghematan atau prioritas anggaran yang lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor lain. Sedangkan untuk penjabaran Belanja Transfer adalah sebagai berikut :

a) **Belanja Bagi Hasil** adalah salah satu komponen penting dalam belanja transfer. Angka yang tercatat pada tahun 2020 adalah Rp128.609.788.107,07, tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan karena terealisasi hingga Rp501.766.294.921,00. Namun realisasi belanja bagi hasil ini melandai pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi Rp311.411.095.710. Hal ini mencerminkan alokasi yang berubah dalam kebijakan transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, sebagai akibat dari perubahan kebijakan fiskal atau alokasi dana yang berbeda.

b) **Belanja Bantuan Keuangan** tercatat ada pengeluaran yang cukup kecil dengan angka Rp1.793.682.448,00 pada tahun 2020. Namun, di tahun-tahun berikutnya, anggaran ini hampir tidak digunakan. Hal ini mencerminkan pengurangan alokasi atau kebutuhan untuk bantuan keuangan ke daerah.

Tabel 2. 110Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020-2024

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)				Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Belanja							
5	1	**Belanja Operasi**		**2.138.443.065.952,10**	**2.120.610.505.189,51**	**2.103.881.283.168**	**2.124.119.855.500**	**2.401.947.454.836**
5	1	1	Belanja Pegawai	1.066.821.278.776,00	1.097.398.109.416,40	1.177.954.539.362	1.156.821.627.318	1.217.313.289.139
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	559.001.307.176,10	685.841.963.893,11	879.307.290.956	900.138.801.848	961.649.037.240
5	1	3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5	1	4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	1	5	Belanja Hibah	512.620.480.000,00	337.271.451.880,00	45.759.452.850	64.938.846.334	219.980.128.457
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	-	98.980.000,00	860.000.000	2.220.580.000	3.005.000.000
5	2	**Belanja Modal**		**417.095.645.164,70**	**324.342.084.410,29**	**417.048.457.014**	**586.890.214.822**	**427.113.855.904**
5	2	1	Belanja Tanah	910.700.000,00	351.833.957,00	20.678.364.316	-	-
5	2	2	Belanja peralatan dan Mesin	187.117.183.962,70	120.896.451.954,30	206.392.057.304	208.166.316.221	140.056.774.321
5	2	3	Belanja Bangunan dan Gedung	61.322.534.260,23	85.977.703.079,72	80.745.701.103	149.474.189.332	95.262.779.473
5	2	4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	134.069.776.163,63	91.465.065.504,27	81.197.169.397	206.289.760.150	163.562.317.166
5	2	5	Belanja Aset tetap Lainnya	33.675.450.778,14	25.651.029.915,00	28.035.164.893	22.959.949.119	27.733.984.944
5	2	6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	498.000.000
5	3	**Belanja Tidak Terduga**		**12.515.896.300,00**	**5.699.939.753,00**	**2.689.489.048**	**26.609.031**	**-**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	12.515.896.300,00	5.699.939.753,00	2.689.489.048,00	26.609.031,00	-
5	4	**Belanja Transfer**		**130.403.470.555,07**	**429.572.517.378,00**	**]502.766.294.921**	**412.378.001.618**	**311.411.095.710**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	128.609.788.107,07	429.572.517.378,00	501.766.294.921	412.378.001.618	311.411.095.710
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	1.793.682.448,00		1.000.000.000	-	-
JUMLAH BELANJA				**2.698.458.077.971,87**	**2.880.225.046.730,80**	**3.026.385.524.151**	**3.123.414.680.971**	**3.140.472.406.450**

2.2.3 Realisasi Pembiayaan

Upaya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk menyesuaikan penggunaan dana dan sumber daya secara efisien dilakukan dengan memprioritaskan pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan dan efisien. Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu telah mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam periode tersebut, dengan pemanfaatan pembiayaan yang meningkat pada tahun 2021-2022 namun lebih terkontrol pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan menunjukkan adanya aliran dana yang diterima oleh daerah untuk mendukung anggaran belanja daerah. Perlu diketahui bahwasannya penerimaan ini tidak berasal dari pendapatan yang biasa dimana penerimaan pembiayaan merupakan hasil dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang terdiri dari Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas lainnya yang merupakan saldo kas dana bantuan operasional sekolah. Di tahun 2020, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp29.072.636.817,45, namun jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dengan angka sebesar Rp102.542.595.053,49. Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan lebih tinggi lagi, mencapai Rp273.989.411.125,42, sebelum menurun pada tahun 2023 menjadi Rp201.348.447.490,68 dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan penerimaan sebesar Rp68.947.757.064,21. Penurunan ditahun 2023 dan tahun 2024 ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Pada setiap tahun anggaran, daerah dapat memiliki sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya, yang menjadi bagian dari penerimaan pembiayaan. Pada data yang diberikan, tidak ada perubahan besar pada komponen ini sepanjang periode yang tercatat, dengan angka yang sama persis dengan **Penerimaan Pembiayaan** pada setiap tahun. Artinya, sisa anggaran tahun sebelumnya berkontribusi langsung pada penerimaan tahun tersebut. **Konsistensi Sisa Lebih** yang tercatat pada setiap tahun menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang relatif stabil, di mana tidak ada penurunan atau peningkatan drastis pada sisa lebih anggaran yang berpotensi menunjukkan manajemen keuangan yang sehat dan konsisten.

Pengeluaran pembiayaan daerah mencakup berbagai pembiayaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan atau program-program daerah, termasuk penyertaan modal daerah. Terlihat bahwa pengeluaran pembiayaan terbesar tercatat pada tahun 2020, dengan jumlah Rp15.000.000.000,00. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan signifikan. Pada

tahun 2021, pengeluaran hanya tercatat sebesar Rp80.000.000,00, dan tidak ada pengeluaran untuk pengeluaran pembiayaan di tahun 2022 hingga 2024. **Pengurangan Pengeluaran Pembiayaan** pada tahun-tahun setelah 2020 menunjukkan bahwa daerah melakukan penghematan atau penundaan dalam penggunaan dana pembiayaan. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran atau karena kebutuhan yang menurun untuk pembiayaan luar daerah setelah tahun 2020 (pasca covid).

Penyertaan modal daerah tercatat pada tahun 2020 dan 2021 dengan angka masing-masing Rp15.000.000.000,00 dan Rp80.000.000,00. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, tidak ada penyertaan modal daerah yang tercatat. Penyertaan modal digunakan untuk mendanai investasi daerah dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan daerah atau investasi lainnya. **Penurunan Penyertaan Modal Daerah** menunjukkan bahwa daerah telah menyelesaikan program investasi dan memilih untuk tidak melanjutkan program penyertaan modal selama periode 2022-2024. Hal ini terjadi akibat adanya fokus anggaran yang beralih ke prioritas lain serta karena keterbatasan dana yang tersedia untuk investasi.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar aliran dana bersih yang diterima oleh daerah setelah pengeluaran pembiayaan. **Pembiayaan Netto** pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.072.636.817,45, dan meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi Rp102.462.595.053,49. Angka ini terus meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp273.989.411.125,42, meskipun kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi Rp201.348.447.490,68 dan menurun lebih lanjut pada tahun 2024 menjadi Rp68.947.757.064,21. **Kenaikan Pembiayaan Netto** pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya lebih banyak penerimaan pembiayaan dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk mendukung program-program daerah. Penurunan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya penurunan penerimaan atau peningkatan pengeluaran. Hal ini menggambarkan bahwasannya perencanaaan dan penggunaan anggaran telah semakin maksimal dimana pendapatan yang diterima telah dikelola dengan baik untuk membiayai belanja.

Tabel 2. 111 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020-2024

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)				Proyeksi Tahun Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Pembiayaan Daerah							
6	1	**Penerimaan Pembiayaan**		**29.072.636.817,45**	**102.542.595.053,49**	**273.989.411.125,42**	**201.348.447.490,68**	**68.947.757.064,21**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.072.636.817,45	102.542.595.053,49	273.989.411.125,42	201.348.447.490,68	68.947.757.064,21
6	2	**Pengeluaran Pembiayaan**		**15.000.000.000,00**	**80.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO				**14.072.636.817,45**	**102.462.595.053,49**	**273.989.411.125,42**	**201.348.447.490,68**	**68.947.757.064,21**

2.2.4 Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan tiga komponen utama dalam laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas, termasuk keuangan daerah. Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam gambaran keuangan daerah. Aset terdiri dari komponen aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan properti investasi. Total aset yang dimiliki oleh daerah selalu harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Jika daerah ingin meningkatkan aset, maka bisa dilakukan dengan meningkatkan kewajiban (misalnya dengan mengambil pinjaman atau obligasi) atau meningkatkan ekuitas (misalnya dengan menyisihkan surplus dari pendapatan). Pengelolaan yang bijaksana terhadap ketiganya akan memungkinkan daerah untuk tumbuh secara fiskal, meningkatkan kapasitas pembangunan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi. Aset yang dikelola dengan baik, kewajiban yang terkendali, dan ekuitas yang sehat adalah dasar bagi daerah untuk menciptakan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakatnya.

Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan tren Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Provinsi Bengkulu selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2024.

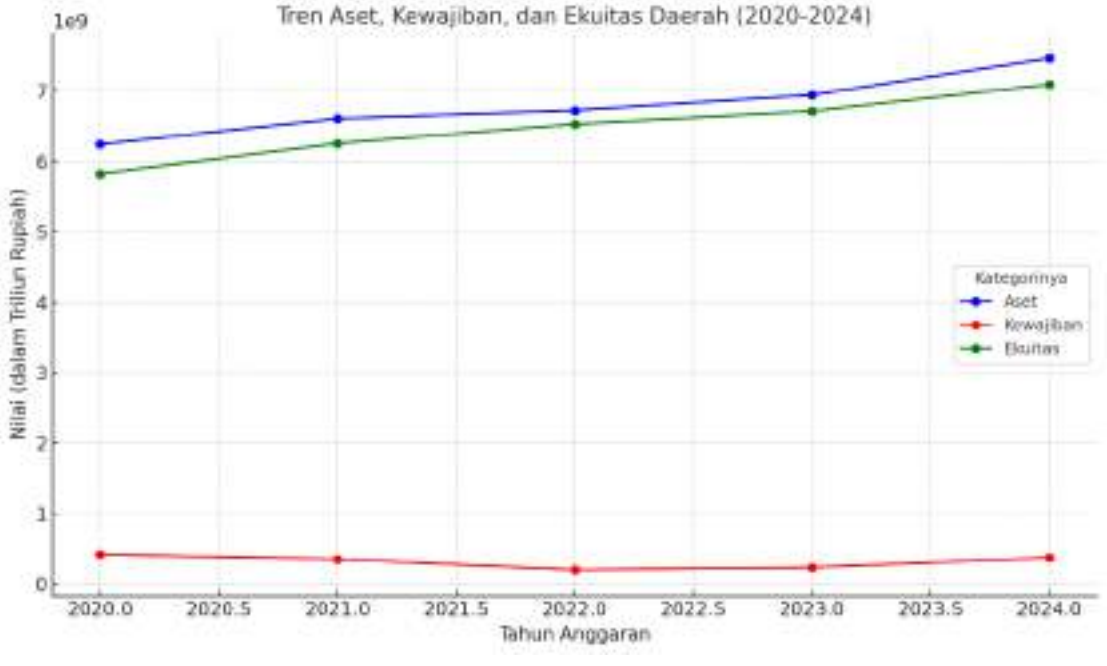

Gambar 2. 19 Tren Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Provinsi Bengkulu, 2020-2024

Tabel 2. 112Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)	Proyeksi Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. ASET					
A. Aset lancar	180.422.901.742,63	329.270.593.836,87	302.381.118.786,31	130.378.260.515,34	192.554.997.913,79
B. Investasi Jangka Panjang	482.180.496.415,80	481.143.712.825,49	484.511.626.295,90	490.034.572.199,82	522.178.280.904,55
C. Aset Tetap	5.422.793.106.082,10	5.550.755.589.560,44	5.746.842.790.539,09	6.082.894.081.021,07	6.508.921.972.987,84
D. Aset Lainnya	159.979.887.749,61	248.519.206.430,50	192.875.959.361,36	224.282.685.822,46	224.740.985.822,46
E. Properti Investasi	-			18.701.035.842,30	18.701.035.842,30
JUMLAH ASET	**6.245.376.391.990,14**	**6.609.689.102.653,30**	**6.726.611.494.982,66**	**6.946.290.635.400,99**	**7.467.097.273.470,94**
2. KEWAJIBAN					
A. Kewajiban Jangka Pendek	418.262.425.336,06	352.150.110.791,95	194.175.701.937,79	229.581.818.284,94	371.759.266.405,03
B. Kewajiban Jangka Panjang	78.715.500,00	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**418.341.140.836,06**	**352.150.110.791,95**	**194.175.701.937,79**	**229.581.818.284,94**	**371.759.266.405,03**
3. EKUITAS					
Ekuitas	5.827.035.251.154,08	6.257.538.991.861,35	6.532.435.793.044,87	6.716.708.817.116,05	7.095.338.007.065,91
JUMLAH EKUITAS	**5.827.035.251.154,08**	**6.257.538.991.861,35**	**6.532.435.793.044,87**	**6.716.708.817.116,05**	**7.095.338.007.065,91**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**6.245.376.391.990,14**	**6.609.689.102.653,30**	**6.726.611.494.982,66**	**6.946.290.635.400,99**	**7.467.097.273.470,94**

Berikut beberapa poin penting yang dapat diambil dari grafik:

- **Aset**: Menunjukkan tren kenaikan yang stabil, dengan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, mencerminkan pengelolaan aset yang positif dan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah.
- **Kewajiban**: Memiliki fluktuasi, tetapi dengan tren menurun dari 2020 hingga 2022, dan meningkat kembali pada 2024. Meskipun demikian, kewajiban tetap berada pada tingkat yang terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan karena kewajiban masih dibawah nilai aset yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu.
- **Ekuitas**: Peningkatan ekuitas yang konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan adanya akumulasi surplus fiskal, mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan ruang fiskal yang lebih besar untuk investasi dan pembangunan jangka panjang.

Grafik ini memberikan gambaran yang jelas tentang kestabilan keuangan daerah dan dapat menjadi dasar untuk perencanaan dan kebijakan lebih lanjut dalam pengelolaan aset dan kewajiban di masa mendatang. Total aset mengalami tren kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir, dari Rp6,24 triliun pada 2020 menjadi Rp7,47 triliun pada 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah yang terus meningkat. Adapun penjabaran mengenai komponen pembentuk aset adalah sebagai berikut :

a) **Aset Lancar** merupakan aset yang digunakan dalam jangka waktu dekat dan tidak lebih dari 12 bulan yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Angka yang tertera dalam saldo aset lancar menunjukkan kemampuan likuiditas pemerintah daerah. Saldo aset lancar mengalami kecenderungan yang berfluktuatif dan tidak stabil, dengan puncak tertinggi pada 2021 (Rp 329,27 miliar) dan penurunan drastis pada 2023 (Rp 130,37 miliar), sebelum naik kembali pada 2024 (Rp 192,55 miliar). Hal ini menunjukkan bahwasannya likuiditas Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami gejolak namun masih tetap terkendali karena secara total kewajiban masih dibawah total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
b) **Investasi Jangka Panjang** mengalami tren stabil dan naik dari Rp482,18 miliar (2020) menjadi Rp522,17 miliar (2024). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki strategi investasi jangka panjang yang konsisten, seperti dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD. Investasi ini diharapkan

dapat menghasilkan pendapatan daerah dalam jangka Panjang dan keuntungan dalam penyertaan modal atau aset ini digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

c) **Aset Tetap** merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah. Aset tetap ini menjadi komponen terbesar dari aset (di atas 85% dari total aset). Meningkat konsisten dari Rp5,42 triliun (2020) menjadi Rp6,50 triliun (2024). Kenaikan signifikan ini mencerminkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur fisik, seperti bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan aset tetap lainnya. Positif dari sisi akumulasi kekayaan daerah, tetapi juga memerlukan biaya pemeliharaan di masa mendatang.
d) **Aset Lainnya** mengalami kecenderungan yang berfluktuatif tapi stabil dalam kisaran Rp 160–224 miliar. Aset lainnya mencakup tagihan atau piutang jangka panjang yang belum tertagih, hak atas kekayaan intelektual, atau aset tidak berwujud lainnya.
e) **Properti Investasi** muncul pertama kali pada 2023, mencatat nilai Rp 18,70 miliar. Ini menunjukkan adanya diversifikasi portofolio aset daerah ke properti investasi, yang berpotensi menghasilkan pendapatan pasif, misalnya dari sewa bangunan atau tanah.

Total kewajiban cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan nilai tertinggi pada 2020 (Rp 418,34 miliar) dan terendah pada 2022 (Rp 194,17 miliar), sebelum naik kembali pada 2024. Adapun penjabaran mengenai komponen pembentuk kewajiban adalah sebagai berikut :

a) **Kewajiban Jangka Pendek** mendominasi seluruh komponen kewajiban (100%), karena tidak ada kewajiban jangka panjang signifikan. Perubahan pada kewajiban ini merefleksikan **tingkat utang jangka pendek seperti hutang pihak ketiga, utang belanja, atau pembayaran belum jatuh tempo**. Peningkatan tajam pada 2024 (Rp 371,75 miliar) menunjukkan adanya peningkatan tanggungan jangka pendek, dikarenakan hutang bagi hasil, hutang pada pihak ketiga dan hutang BLUD.
b) **Kewajiban Jangka Panjang** hanya muncul pada 2020 dalam jumlah sangat kecil (Rp 78,7 juta) dan nihil pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah **tidak memiliki utang jangka panjang**, atau memiliki kebijakan untuk menghindari pinjaman jangka panjang.

Ekuitas adalah sisa kekayaan daerah setelah dikurangi kewajiban. Ini mencerminkan kekuatan fiskal dan kemampuan pembangunan jangka panjang. Ekuitas Provinsi Bengkulu terus meningkat dari Rp 5,82 triliun (2020) menjadi Rp 7,09 triliun (2024). Menunjukkan bahwa surplus dari pembiayaan dan pendapatan diakumulasikan secara konsisten setiap tahun. Peningkatan ekuitas juga menunjukkan manajemen anggaran yang sehat dan berkelanjutan. Berdasarkan Analisa di atas, hal ini menunjukkan bahwa laporan neraca ini **seimbang** setiap tahun, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual.

Tabel 2. 113 Implikasi Kebijakan menggunakan prinsip akuntansi akrual

Aspek	Kesimpulan	Implikasi Kebijakan
Pertumbuhan Aset	Stabil dan meningkat	Pemerintah daerah mampu mengakumulasi aset dengan baik, tetapi harus disertai manajemen aset yang efektif agar aset menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Manajemen Kas	Aset lancar fluktuatif	Perlu strategi pengelolaan kas yang lebih tangguh agar belanja tidak mengganggu likuiditas.
Kewajiban Minim	Dominasi utang jangka pendek	Menunjukkan kehati-hatian fiskal, namun kewajiban tahun 2024 perlu dikendalikan agar tidak membebani tahun berikutnya.
Ekuitas Tinggi	Stabil meningkat	Pemerintah daerah punya ruang fiskal untuk inovasi pembiayaan pembangunan tanpa harus berutang.
Properti Investasi Baru	Diversifikasi aset	Peluang peningkatan PAD melalui optimalisasi aset milik daerah (sewa, kerjasama, pemanfaatan).

2.2.5 Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, aspek keuangan daerah menjadi landasan utama dalam menentukan arah, skala prioritas, serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan tren historis, potensi penerimaan, dan arah kebijakan fiskal nasional. Proyeksi ini mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta efektivitas alokasi anggaran demi mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 2. 114 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)						Proyeksi Tahun Anggaran				
						2026	2027	2028	2029	2030
1						4	5	6	7	8
4	**Pendapatan**					**3.294.824.058.588,45**	**3.442.427.297.659,40**	**3.604.895.535.484,77**	**3.784.386.717.507,25**	**3.983.696.820.752,34**
4	**1**				**Pendapatan Asli Daerah**	1.011.635.417.854,00	1.029.017.876.211,08	1.046.730.698.235,30	1.064.781.067.151,01	1.083.471.395.190,52
4	1	1			Pajak Daerah	794.635.417.854,00	807.462.876.211,08	820.515.873.235,30	833.798.764.776,01	847.611.041.929,89
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	200.000.000.000,00	204.000.000.000,00	208.080.000.000,00	212.241.600.000,00	216.486.432.000,00
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	150.000.000.000,00	151.500.000.000,00	153.015.000.000,00	154.545.150.000,00	156.090.601.500,00
4	1	1	03		Pajak Bahan Kendaraaan Bermotor (PBB-KB)	253.000.000.000,00	256.289.000.000,00	259.620.757.000,00	262.995.826.841,00	266.414.772.589,93
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan	18.000.000.000,00	18.540.000.000,00	19.096.200.000,00	19.669.086.000,00	20.554.194.870,00
4	1	1	05		Pajak Rokok	172.110.417.854,00	175.552.626.211,08	179.063.678.735,30	182.644.952.310,01	186.297.851.356,21
4	1	1	06		Pajak Alat Berat (PAB)	150.000.000,00	165.000.000,00	181.500.000,00	199.650.000,00	219.615.000,00
4	1	1	07		Opsen MBLB	1.375.000.000,00	1.416.250.000,00	1.458.737.500,00	1.502.499.625,00	1.547.574.613,75
4	1	2			Retribusi Daerah	190.000.000.000,00	193.800.000.000,00	197.676.000.000,00	201.629.520.000,00	205.662.110.400,00
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.000.000.000,00	17.255.000.000,00	17.513.825.000,00	17.776.532.375,00	18.043.180.360,63
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.000.000.000,00	10.500.000.000,00	11.025.000.000,00	11.576.250.000,00	12.155.062.500,00
4	**2**				**Pendapatan Transfer**	2.282.016.840.734,45	2.412.179.031.448,32	2.556.872.927.749,46	2.718.249.145.381,25	2.898.801.095.338,07
4	2	1			Transfer Pemerintah Pusat	2.282.016.840.734,45	2.412.179.031.448,32	2.556.872.927.749,46	2.718.249.145.381,25	2.898.801.095.338,07
4	2	1	1		Dana Perimbangan	2.232.016.840.734,45	2.361.679.031.448,32	2.505.867.927.749,46	2.666.734.095.381,25	2.846.770.894.838,07
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	200.000.000.000,00	235.000.000.000,00	276.125.000.000,00	324.446.875.000,00	381.225.078.125,00
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.373.401.501.900,00	1.404.989.736.443,70	1.437.304.500.381,91	1.470.362.503.890,69	1.504.180.841.480,17
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus Fisik	301.431.892.284,45	346.646.676.127,12	398.643.677.546,19	458.440.229.178,11	527.206.263.554,83
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus Non Fisik	357.183.446.550,00	375.042.618.877,50	393.794.749.821,38	413.484.487.312,44	434.158.711.678,07
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah	50.000.000.000,00	50.500.000.000,00	51.005.000.000,00	51.515.050.000,00	52.030.200.500,00
4	**3**				**Pendapatan Hibah**	1.171.800.000,00	1.230.390.000,00	1.291.909.500,00	1.356.504.975,00	1.424.330.223,75
4	3	1		1	Hibah					
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					
4	3	1	5		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.171.800.000,00	1.230.390.000,00	1.291.909.500,00	1.356.504.975,00	1.424.330.223,75
4	3	1	5	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis					
4	3	1	5	1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis					
JUMLAH PENDAPATAN						**3.294.824.058.588,45**	**3.442.427.297.659,40**	**3.604.895.535.484,77**	**3.784.386.717.507,25**	**3.983.696.820.752,34**
5	**Belanja**									
5	**1**				**Belanja Operasi**	**1.832.464.019.878,00**	**2.008.978.987.547,00**	**2.092.094.703.600,00**	**2.335.101.205.455,00**	**2.263.298.032.410,00**

Kode/Uraian (uraian dapat disesuaikan)						Proyeksi Tahun Anggaran				
						2026	2027	2028	2029	2030
1						4	5	6	7	8
5	1	1			Belanja Pegawai	1.520.299.353.378,00	1.596.314.321.047,00	1.676.130.037.100,00	1.759.936.538.955,00	1.847.933.365.910,00
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	300.000.000.000,00	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00
5	1	3			Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	4			Belanja Subsid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5			Belanja Hibah	12.064.666.500,00	12.164.666.500,00	15.164.666.500,00	174.164.666.500,00	14.164.666.500,00
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	500.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00
5	**2**			**Belanja Modal**		**999.302.040.022,05**	**1.049.972.061.149,48**	**1.191.480.900.839,73**	**1.259.873.859.003,01**	**1.537.962.988.906,67**
5	**3**			**Belanja Tidak Terduga**		**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
5	3	1			Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5	**4**			**Belanja Transfer**		**536.376.840.739,00**	**463.961.204.381,00**	**407.491.274.787,00**	**281.865.188.162,00**	**281.865.188.162,00**
5	4	1			Belanja Bagi Hasil	535.376.840.739,00	462.961.204.381,00	406.491.274.787,00	280.865.188.162,00	280.865.188.162,00
5	4	2			Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA						**3.373.142.900.639,05**	**3.527.912.253.077,48**	**3.696.066.879.226,73**	**3.886.840.252.620,01**	**4.093.126.209.478,67**
Total Surplus/ (Defisit)										
6	**Pembiayaan Daerah**									
6	1				Pembiayaan Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6	2				Pengeluaraan Pembiayaan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO						**37.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)										

2.2.5.1 Pendapatan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, kebutuhan pendanaan pembangunan daerah diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya target pembangunan yang harus dicapai, baik dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah maupun dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Kebutuhan belanja pembangunan meliputi belanja wajib dan mengikat, belanja prioritas pembangunan, serta belanja penunjang yang bersifat operasional. Sebagian besar kebutuhan tersebut diarahkan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan wilayah.
Di sisi lain, ketersediaan sumber pendanaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Proyeksi menunjukkan bahwa PAD memiliki potensi peningkatan rata-rata 4–5 persen per tahun melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan BUMD, serta pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, dana transfer dari pemerintah pusat relatif stabil namun tetap bergantung pada kebijakan fiskal nasional. Oleh karena itu, meskipun sumber-sumber pendanaan tersebut dapat mendukung sebagian besar kebutuhan pembangunan, namun belum sepenuhnya memadai untuk menutup keseluruhan pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih inovatif. Optimalisasi PAD harus disertai dengan peningkatan kepatuhan pajak daerah, penguatan kinerja BUMD, serta pengelolaan aset yang lebih produktif. Selain itu, pengendalian belanja operasional juga penting agar ruang fiskal dapat diperluas untuk belanja pembangunan. Di luar itu, alternatif pembiayaan seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan pinjaman daerah yang sesuai regulasi, serta sinergi dengan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) dapat menjadi instrumen untuk menutup kekurangan pendanaan.

Dengan strategi tersebut, kecukupan pendanaan pembangunan lima tahun ke depan dapat ditingkatkan hingga mencapai 90–95 persen dari total kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan keterbatasan fiskal, melalui inovasi pembiayaan dan tata kelola keuangan yang lebih efisien, target pembangunan daerah tetap dapat direalisasikan secara terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

1. **Total Pendapatan**

   Total pendapatan daerah Provinsi Bengkulu menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun 2026 hingga 2030. Pendapatan meningkat dari Rp3,29 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,98 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan antara 4,29% hingga 5,27%. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal secara bertahap dan stabil.

2. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

   Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat dari Rp1,01 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,08 triliun pada tahun 2030. Komponen PAD didominasi oleh pajak daerah, yang terdiri dari:

   - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Rp794,6 miliar → Rp847,6 miliar
   - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB): Rp200 miliar → Rp216,4 miliar
   - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB): Rp150 miliar → Rp156,1 miliar
   - Pajak Rokok dan Air Permukaan juga mengalami kenaikan secara proporsional

   Selain itu, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Penguatan PAD juga mencerminkan dorongan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

3. **Pendapatan Transfer**

   Pendapatan transfer dari pemerintah pusat meningkat dari Rp2,28 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,89 triliun pada tahun 2030. Komponennya meliputi:

   - Dana Alokasi Umum (DAU): Rp2,23 triliun → Rp2,84 triliun
   - Dana Bagi Hasil: Rp50 miliar → Rp52 miliar
   - Dana Insentif Daerah dan Dana Transfer Khusus (fisik dan non-fisik)

   Pendapatan transfer ini berfungsi sebagai dukungan fiskal pusat untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan percepatan pembangunan di daerah.

2.2.5.2 Belanja

Belanja daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Alokasi belanja tidak hanya diarahkan untuk belanja operasional pemerintahan, namun juga difokuskan pada belanja modal guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor riil daerah.

Peningkatan porsi belanja modal telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur pendukung produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pembangunan infrastruktur ini berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi biaya logistik, serta mendorong terbukanya akses bagi masyarakat dan dunia usaha.

Selain itu, belanja daerah yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat juga memberikan stimulus terhadap pertumbuhan sektor riil. Program bantuan permodalan UMKM, pengembangan pasar rakyat, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal telah meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, belanja daerah tidak hanya berdampak pada tersedianya sarana fisik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa efektivitas belanja daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya porsi belanja pegawai dan belanja rutin yang membatasi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Terhadap proyeksi belanja pegawai yang melebihi 30%, perlu disampaikan bahwa baseline perhitungan belanja pegawai pada dasarnya sudah melebihi 30%. Dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan, proyeksi kenaikan belanja pegawai memperhitungkan kemungkinan atas kenaikan gaji ASN secara nasional dan program prioritas daerah yaitu kenaikan TPP. Namun dalam pelaksanaan tahunan nya akan tetap memperhatikan regulasi dan perkembangannya, serta berupaya menekan belanja pegawai maksimal 30%, baik dengan efisiensi belanja pegawai maupun peningkatan pendapatan daerah.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi pengendalian belanja operasional dan peningkatan efisiensi belanja agar alokasi anggaran yang lebih besar dapat diarahkan untuk belanja produktif yang langsung berdampak terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor riil.

Dengan demikian, kinerja pelaksanaan belanja daerah tidak hanya dapat diukur dari sisi serapan anggaran, tetapi lebih penting adalah sejauh mana belanja tersebut mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1. **Total Belanja**
   Total belanja daerah meningkat dari Rp3,41 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp4,12 triliun pada tahun 2030. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Belanja Operasi**
   Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin dan belanja yang mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:
   - Belanja Pegawai: Rp1,52 triliun → Rp1,84 triliun
   - Belanja Barang dan Jasa: Rp999 miliar → Rp1,53 triliun
   - Belanja Hibah dan Bantuan Sosial: berkisar antara Rp5 miliar – Rp10 miliar
   - Belanja Bunga dan Subsidi: dialokasikan dalam batas efisiensi fiskal
3. **Belanja Modal**
   Belanja modal dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. Terdapat penurunan dari Rp536 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp281 miliar pada tahun 2030, menandakan adanya pergeseran fokus dari pembangunan fisik ke penguatan program berbasis masyarakat dan peningkatan layanan publik.
4. **Belanja Tidak Terduga**
   Belanja tidak terduga disiapkan sebagai dana kontinjensi untuk penanganan kejadian luar biasa atau kondisi darurat, dengan alokasi sekitar Rp35 hingga Rp40 miliar per tahun.
5. **Belanja Transfer**
   Belanja transfer ditujukan untuk penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Alokasi bantuan keuangan dan bagi hasil ditetapkan antara Rp17–18 miliar per tahun.

2.2.5.3 Pembiayaan

1. **Penerimaan Pembiayaan**
   Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan stabil sebesar Rp40 miliar setiap tahun selama periode RPJMD.
2. **Pengeluaran Pembiayaan**
   Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD atau entitas lain yang mendukung kebijakan

strategis. Jumlahnya diperkirakan berkisar Rp3 hingga Rp10 miliar per tahun, disesuaikan dengan kebutuhan investasi daerah.

3. **Pembiayaan Netto**
   Kondisi fiskal Provinsi Bengkulu secara umum menunjukkan defisit yang terkendali dan ditutupi oleh pembiayaan netto. Contohnya, defisit sebesar Rp116,6 miliar pada tahun 2026 dapat ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA dan penerimaan pembiayaan lainnya.

2.2.6 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Alternatif pembiayaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu. Pemanfaatan skema pembiayaan, seperti Pinjaman Daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hibah, dan sumber pendanaan lainnya, dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta kehati-hatian. Landasan hukum yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Permendagri Nomor 105 Tahun 2018, Permendagri Nomor 96 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

2.2.6.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan skema kerja sama antara Pemerintah (pusat/daerah) dan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik yang mengerahkan sumber daya swasta untuk membiayai, membangun, dan/atau mengoperasikan proyek yang melayani kepentingan umum. KPBU dirancang untuk menambah sumber pembiayaan, mempercepat penyediaan infrastruktur, dan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu menanggungnya. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini, integrasi KPBU dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 merupakan langkah krusial untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk

proyek-proyek besar yang memerlukan teknologi mutakhir, efisiensi manajerial, atau akses pendanaan swasta.

Bagian pendanaan RPJMD mengakui peran vital pendanaan non-APBD dari KPBU dan mengalokasikan dana APBD untuk mendukungnya. Alokasi ini mencakup biaya studi kelayakan, pendampingan transaksi, serta bentuk dukungan pemerintah seperti *Viability Gap Funding* (VGF) atau *Availability Payment* untuk menjamin kelayakan finansial proyek. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja khusus KPBU, seperti jumlah proyek prioritas yang disiapkan, proyek yang mencapai tahap lelang atau financial close, nilai investasi swasta yang terhimpun, serta kemajuan fisik proyek yang berjalan.

Dokumen RPJMD harus secara jelas memuat proyek-proyek prioritas yang ditujukan untuk KPBU, strategi pendanaannya, serta indikator keberhasilannya. Pelaksanaan KPBU berlandaskan kerangka hukum nasional yang kuat. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara dan pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Secara operasional, dasar utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang mengatur secara komprehensif tata cara, skema, tahapan, dan dukungan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menjadi pedoman teknis pelaksanaan PP tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan legal bagi provinsi untuk melakukan kerja sama ini, didukung oleh UU sektoral dan UU Pengadaan Tanah. Keberhasilan implementasi KPBU sangat bergantung pada kesiapan proyek (*bankable project*), kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Bengkulu, transparansi proses, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

2.2.6.2 Hibah Luar Negeri

Dalam rangka memperluas sumber pendanaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang perlu memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui Hibah Luar Negeri. Landasan hukum pelaksanaan Hibah Luar Negeri di tingkat daerah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang mengatur pengelolaan penerimaan hibah sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yang menjadi acuan teknis dalam proses perolehan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban hibah. Selain itu, pengelolaan hibah juga mengacu pada ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penerimaan, penatausahaan, dan pelaporan hibah.

Hibah Luar Negeri merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah negara lain, lembaga multilateral, lembaga internasional nonpemerintah, maupun pihak swasta asing yang diberikan dalam bentuk uang tunai, barang, jasa, atau kombinasi dari ketiganya, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan. Pemanfaatan Hibah Luar Negeri diutamakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah, serta memiliki dampak keberlanjutan yang mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pelaksanaan program atau kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri wajib memperhatikan prinsip keselarasan dengan kebijakan nasional dan rencana pembangunan daerah, kepatuhan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan, efektivitas penggunaan hibah untuk mencapai *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan, serta bebas dari ikatan politik yang dapat mengganggu kedaulatan daerah maupun nasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam proses pengusulan, persetujuan, dan penyaluran hibah. Pengelolaan Hibah Luar Negeri juga dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan, kemampuan teknis, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di tingkat daerah, sehingga hibah yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.2.6.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR)

Landasan hukum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan TJSL guna mendukung prioritas pembangunan daerah. Ketentuan teknis pelaksanaan TJSL di tingkat daerah juga diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah, yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan.

Pelaksanaan TJSL/CSR di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat diarahkan secara terencana, terkoordinasi, dan selaras dengan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Program TJSL diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia daerah. Pemanfaatan TJSL juga perlu memperhatikan prinsip keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan, keberlanjutan program, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Untuk mengoptimalkan peran TJSL dalam pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, forum TJSL/CSR, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan TJSL yang terintegrasi. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha melalui TJSL tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.2.6.3 Pinjaman Daerah

Dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta mempercepat pencapaian sasaran prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memanfaatkan skema pendanaan melalui Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemanfaatan pinjaman ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan strategis dan produktif yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Pinjaman Daerah akan dilakukan secara selektif, terukur, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, kemampuan pengembalian pinjaman, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyek atau kegiatan yang dibiayai akan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki nilai manfaat ekonomi tinggi, mendorong investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun regional. Proses perencanaan dan pengajuan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, meliputi identifikasi kebutuhan pendanaan, penyusunan studi kelayakan, analisis manfaat dan risiko, serta memperoleh persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pinjaman Daerah. Pelaksanaan kegiatan akan diawasi secara ketat untuk memastikan ketercapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Dengan pengelolaan yang tepat, Pinjaman Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang dapat mempercepat penyediaan infrastruktur strategis, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

2. 3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bengkulu selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok pembangunan adalah; (1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; (2) Belum optimalnya strategi ketahanan pangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (3) Belum optimalnya strategi peningkatan ekonomi rakyat dan daya saing daerah; (4) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis; (5) Masih rendahnya pengelolaan lingkungan hidup serta tingginya potensi bencana; dan (6) Belum optimalnya pembangunan manusia, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai berikut :

2.3.1.1 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah salah satu elemen fundamental untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Namun, di Provinsi Bengkulu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih belum optimal, yang mengakibatkan berbagai kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu isu utama yang masih menjadi permasalahan adalah **kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi pemerintah**. Pemerintah seharusnya dapat membuka akses informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program secara jelas kepada masyarakat, namun kenyataannya, banyak informasi yang tidak disampaikan dengan cukup terbuka. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempersulit masyarakat untuk memantau serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Hal ini tercermin

dari lemahnya pengawasan internal dan eksternal, rendahnya efektivitas implementasi sistem pengendalian internal pemerintah, serta masih adanya praktik pungutan liar dan maladministrasi di tingkat pelayanan publik. Secara nasional, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2024 berada di angka sekitar 37 dari 100, mencerminkan masih tingginya potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor publik. Akar permasalahan ini terletak pada sistem administrasi yang belum sepenuhnya berbasis digital dan transparan, lemahnya budaya integritas di birokrasi, serta belum optimalnya implementasi sistem merit dan *e-government* secara menyeluruh.

Selain masalah transparansi, aspek akuntabilitas pemerintah juga masih menjadi persoalan di Provinsi Bengkulu. Pemerintah yang akuntabel seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan anggaran negara dan hasil dari setiap kebijakan atau program yang dijalankan. Akan tetapi **sistem pengawasan dan evaluasi di Provinsi Bengkulu masih lemah**, yang menyebabkan kesulitan dalam mengukur apakah kebijakan yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal. Hal ini membuat masyarakat merasa terpinggirkan, karena tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan juga turut berkontribusi terhadap masalah tata kelola ini. Banyak aparatur yang belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang memadai mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang membuat mereka kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam melaksanakan pekerjaannya. **Kinerja aparat yang kurang optimal** pada gilirannya berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan, dan hal ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, masalah yang cukup signifikan adalah **praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi** di beberapa sektor pemerintahan. Meskipun telah ada upaya pemberantasan terhadap praktik-praktik ini, namun pengawasan yang belum maksimal serta proses pengadaan barang dan jasa yang tidak selalu transparan memberikan celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ini tentu saja merusak integritas pemerintahan, menghambat pembangunan daerah, dan memperburuk citra pemerintahan di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan jujur semakin menurun akibat temuan-temuan yang mengarah pada tindakan tidak etis tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga menjadi salah satu aspek yang masih terbatas. Meskipun prinsip partisipasi publik merupakan salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik, namun ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka masih sangat terbatas. Kurangnya forum atau saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat, membuat kebijakan yang dihasilkan terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan atau harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah ini menjadi penghambat dalam menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat.

Sistem pengaduan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu juga belum berjalan optimal. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengaduan seharusnya mampu memberikan tanggapan cepat terhadap keluhan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak pengaduan yang tidak ditanggapi dengan memadai atau tidak ada tindak lanjut yang jelas. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa keluhannya tidak dianggap serius dan meningkatkan rasa frustasi terhadap pemerintah.

Dengan demikian, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih konkret dan terukur sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memperkuat transparansi dengan menyediakan akses informasi yang lebih terbuka dan jelas kepada masyarakat (Nilai Indeks e-government (SPBE) dan Nilai SAKIP Daerah).
2. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan dan program dapat dievaluasi secara akuntabel (Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pelatihan yang relevan juga sangat penting agar prinsip-prinsip tata kelola dapat diterapkan dengan lebih baik dalam praktek sehari-hari (Indeks Sistem Merit).
4. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus menjadi prioritas utama, dengan memperketat pengawasan dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan (Indeks Persepsi Korupsi (IPK)).
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan juga harus menjadi

bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Indeks Demokrasi Indonesia dan Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

6. Kemudian sistem pengaduan masyarakat harus diperbaiki agar setiap keluhan bisa ditangani dengan cepat dan efektif (Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)).

Semua upaya ini akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Provinsi Bengkulu, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Provinsi Bengkulu dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pada beberapa indikator sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait tata Kelola pemerintahan ini, di antara lain :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
3. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)
5. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
6. Nilai Indeks e-Government (SPBE)
7. Nilai SAKIP Daerah
8. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9. Indeks Sistem Merit
10. Indeks Demokrasi

2.3.1.2 Belum Optimalnya Strategi Ketahanan Pangan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Ketahanan pangan yang kuat menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah, namun tantangan dalam **pemenuhan ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan masih menjadi hambatan yang signifikan**. Dalam aspek ketersediaan pangan, Provinsi Bengkulu masih menghadapi **kendala dalam meningkatkan produksi hasil** pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan. Produktivitas sektor pertanian masih di bawah potensi optimal akibat faktor seperti degradasi lahan, keterbatasan akses terhadap sarana produksi yang memadai, serta rendahnya penerapan teknologi pertanian modern. Sistem budidaya yang masih bergantung pada pola pertanian konvensional dan minimnya

diversifikasi komoditas strategis juga turut menyebabkan ketahanan pangan daerah menjadi rentan terhadap fluktuasi produksi. Selain itu, ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumsi menyebabkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang pada gilirannya meningkatkan volatilitas harga dan mengurangi kemandirian pangan.

Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertanian yang besar, strategi ketahanan pangan belum berjalan secara optimal. Data menunjukkan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di Bengkulu mencapai 9,25% pada 2023, lebih tinggi dari angka nasional yang berada di kisaran 8,53%. Beberapa provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Barat bahkan sudah mencapai 7,63%. Akar permasalahan mencakup produktivitas pertanian yang masih rendah, terbatasnya sarana dan prasarana irigasi serta distribusi, serta ketergantungan terhadap sistem pemasaran yang belum efisien. Di sisi lain, belum berkembangnya infrastruktur penunjang seperti cold storage dan sistem logistik berbasis teknologi juga memperbesar kehilangan hasil panen dan lemahnya akses pasar petani.

Dari aspek distribusi dan akses pangan, **permasalahan infrastruktur pendukung**, seperti keterbatasan jaringan irigasi, akses jalan ke sentra produksi, serta **minimnya fasilitas pascapanen dan logistik pangan**, menjadi hambatan utama dalam mendukung sistem rantai pasok yang efisien. **Keterbatasan akses pasar** bagi petani dan nelayan turut memperburuk kondisi ini, di mana masih terdapat ketergantungan tinggi terhadap sistem distribusi yang dikuasai oleh perantara atau tengkulak. Akibatnya, petani dan pelaku usaha pangan lokal sering mengalami kesulitan dalam memperoleh harga jual yang kompetitif, yang berdampak pada rendahnya daya saing sektor pertanian daerah.

Ketahanan pangan juga semakin diperburuk oleh **dampak perubahan iklim dan risiko bencana alam** yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu. Perubahan pola cuaca, meningkatnya intensitas curah hujan, serta kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor menjadi ancaman serius bagi stabilitas produksi pangan. Ketiadaan strategi mitigasi dan adaptasi yang optimal, seperti pengembangan sistem pertanian berbasis agroklimat dan peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan, menyebabkan ketahanan pangan menjadi semakin rentan terhadap gangguan eksternal.

Selain itu, **rendahnya efektivitas program penyuluhan dan pendampingan** bagi pelaku sektor pangan juga menjadi kendala

dalam upaya mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga riset, serta pelaku usaha dalam mendorong inovasi dan peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian dan pangan turut menghambat implementasi strategi yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan perumusan strategi ketahanan pangan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Peningkatan produktivitas berbasis teknologi pertanian modern, penguatan infrastruktur distribusi pangan, pengelolaan risiko bencana, serta penguatan kapasitas kelembagaan pangan menjadi langkah yang harus diprioritaskan dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang lebih terpadu dan berbasis keberlanjutan, diharapkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dapat lebih terjamin sehingga mampu menopang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Keberhasilan dalam menjawab permasalahan ini digambarkan melalui pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut upaya yang mesti dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut seperti Lindungi fungsi lahan pangan, Perluas produksi, Perkuat stok & anggaran pangan daerah, Dorong pengadaan alsintan & pelatihan SDM, Sinergi antar-pemangku kepentingan dan Bangun regulasi & pengawasan konversi lahan.

Dengan langkah-langkah di atas, Provinsi Bengkulu dapat memperkuat ketahanan pangannya, mengurangi defisit beras, memperlancar akses pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Jika Anda ingin fokus pada satu aspek (misalnya solusi irigasi, anggaran pangan, atau alsintan), saya siap bantu analisis lebih dalam.

2.3.1.3 Belum Optimalnya Strategi Peningkatan Ekonomi Rakyat dan Daya Saing Daerah

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor-sektor produktif, serta menciptakan daya saing yang kompetitif bagi daerah. **Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh sektor primer**, khususnya pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya produktivitas akibat keterbatasan adopsi teknologi, terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, serta ketergantungan pada komoditas unggulan yang rentan terhadap

fluktuasi harga global. **Diversifikasi ekonomi yang belum optimal** mengakibatkan keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah dari sektor pertanian dan perkebunan, sehingga potensi ekonomi daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi sektor-sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan, yang memiliki nilai tambah rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Bengkulu berada pada peringkat ke-28 dari 38 provinsi, dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih terasa. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkulu relatif meningkat, tetapi belum mampu mendorong daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh. Akar persoalan terletak pada belum berkembangnya hilirisasi produk unggulan daerah, rendahnya adopsi teknologi oleh pelaku UMKM, terbatasnya akses pembiayaan, serta belum optimalnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang menjadi indikator daya saing daerah juga masih belum berkembang secara signifikan. **Minimnya investasi** pada industri hilirisasi produk unggulan daerah menyebabkan rantai nilai ekonomi belum berjalan secara optimal, sehingga Provinsi Bengkulu lebih banyak mengekspor bahan mentah dibandingkan produk bernilai tambah. Hal ini tidak hanya menghambat penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap sektor-sektor yang kurang kompetitif di pasar regional maupun nasional.

Infrastruktur ekonomi yang belum memadai juga menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan daya saing daerah. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas, baik dalam hal transportasi darat, laut, maupun udara, masih menjadi kendala dalam distribusi barang dan jasa. Pelabuhan, bandara, dan kereta serta kondisi jalan yang kurang mendukung mobilitas ekonomi, menghambat kelancaran arus perdagangan dan investasi. Hal ini berdampak pada tingginya biaya logistik, sehingga harga komoditas daerah menjadi kurang kompetitif di pasar luar.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. **Rendahnya kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja** yang berorientasi pada kebutuhan industri menyebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan usia produktif.

Kurangnya sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem tenaga kerja yang kompetitif semakin memperlemah daya saing daerah dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Dari sisi kebijakan, belum optimalnya implementasi program dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi rakyat dan investasi daerah turut menjadi hambatan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Proses perizinan yang masih dinilai kurang efisien, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam fasilitasi investasi, serta kurangnya insentif bagi pelaku usaha lokal mengakibatkan lambatnya pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan infrastruktur ekonomi, pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta penciptaan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global harus menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029. Dengan strategi yang lebih terarah dan berbasis pada keunggulan daerah, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pada beberapa indikator sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait permasalahan ini, di antara lain :

1. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
2. Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap PDRB
3. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
5. Rasio Kewirausahaan Daerah
6. Nilai Investasi

2.3.1.4 Masih Rendahnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar dan Strategis

Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu permasalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat utama

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong daya saing daerah dalam skala regional maupun nasional. Namun, hingga saat ini, berbagai kendala masih dihadapi dalam **penyediaan dan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar**, yang mencakup transportasi, energi, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan internet masih menjadi kendala bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil. Pembangunan infrastruktur belum merata, terutama di daerah perbukitan dan kawasan pertanian produktif. Masih banyak irigasi tersier yang belum tersambung ke lahan pertanian secara optimal, sehingga mempengaruhi produktivitas pangan dan distribusi hasil pertanian. Akar permasalahan ini terletak pada keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, lemahnya perencanaan lintas sektor dan wilayah, serta terbatasnya kapasitas pelaksana teknis di daerah dalam merancang dan mengelola infrastruktur yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan penting demi memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk antar daerah dalam menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, utamanya untuk daerah sulit terjangkau dan terisolir.

Pada sektor transportasi, keterbatasan jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan utama dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Sebagian besar ruas jalan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, masih dalam kondisi yang belum memadai, baik dari segi kualitas maupun cakupan aksesnya. Keterbatasan infrastruktur transportasi ini berimplikasi pada meningkatnya biaya logistik, keterbatasan akses terhadap pusat-pusat ekonomi, serta rendahnya efisiensi rantai pasok. Selain itu, keberadaan pelabuhan, bandara, dan kereta juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung ekspor komoditas unggulan Bengkulu ke pasar luar daerah dan internasional.

Di sektor energi, **akses masyarakat terhadap sumber daya listrik** yang andal dan terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu, khususnya daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, masih mengalami keterbatasan akses listrik, baik dari sisi kapasitas suplai maupun kualitas layanan. Kondisi ini berdampak pada

terbatasnya produktivitas masyarakat, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti tenaga surya dan mikrohidro, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan ketahanan energi yang berkelanjutan.

Ketersediaan dan akses masyarakat terhadap air bersih serta fasilitas sanitasi juga masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Sebagian besar wilayah, terutama daerah perdesaan, masih menghadapi keterbatasan jaringan perpipaan yang memadai, sehingga masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan dan sumur gali yang kualitasnya belum terjamin. Permasalahan ini semakin diperburuk dengan rendahnya kualitas sanitasi, yang ditandai dengan masih tingginya angka rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap jamban sehat serta sistem pembuangan limbah yang layak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Selain itu, akses terhadap infrastruktur telekomunikasi yang belum merata juga menjadi tantangan dalam mendukung transformasi digital dan pemerataan informasi di Provinsi Bengkulu. Meskipun perkembangan teknologi informasi semakin pesat, masih terdapat wilayah-wilayah yang **belum terjangkau oleh jaringan internet yang stabil**, terutama di daerah pedalaman. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan digital, termasuk pendidikan daring, layanan keuangan digital, serta berbagai inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, **keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan** juga menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu diatasi. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah pelosok, masih terbatas, baik dari segi ketersediaan tenaga medis, peralatan kesehatan, maupun layanan kesehatan rujukan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pendidikan, di mana masih terdapat kesenjangan akses terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Permasalahan **rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis** ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berbasis

kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada peningkatan aksesibilitas transportasi, penyediaan energi yang berkelanjutan, perluasan jaringan air bersih dan sanitasi, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan kualitas layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pada beberapa indikator sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait permasalahan ini, di antara lain :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)
2. Nilai Komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI
3. Nilai Komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI

2.3.1.5 Masih Rendahnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Tingginya Potensi Bencana

Masih rendahnya pengelolaan lingkungan hidup di daerah ini telah berdampak pada **degradasi ekosistem, peningkatan frekuensi bencana alam, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan** yang terus terjadi. Secara geografis, Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik yang unik namun juga rawan terhadap berbagai jenis bencana. Bengkulu terletak di sepanjang pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menjadikannya sebagai daerah dengan risiko gempa bumi yang tinggi. Selain bencana tektonik, wilayah ini juga menghadapi ancaman hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang kerap melanda berbagai kabupaten dan kota terutama pada musim hujan.

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi, seperti banjir, longsor, abrasi pantai, dan gempa bumi. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas pembangunan secara konsisten. Masih ditemukan praktik penebangan hutan yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan terhadap izin lingkungan, serta minimnya program rehabilitasi lahan kritis dan kawasan pesisir. Akar permasalahan ini mencakup lemahnya sinergi antarinstansi dalam pengendalian lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi, serta belum optimalnya sistem mitigasi dan peringatan dini bencana.

Faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah **tingginya laju deforestasi dan alih fungsi lahan** yang belum terkendali.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di Bengkulu mengalami penurunan yang signifikan akibat ekspansi sektor pertambangan, perkebunan, dan perambahan ilegal. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tutupan hutan Bengkulu berkurang hingga lebih dari 20%, menyebabkan berkurangnya daya dukung ekosistem dalam menahan air hujan dan mencegah terjadinya banjir serta tanah longsor. Kabupaten Lebong, Bengkulu Tengah, dan Kepahiang menjadi daerah dengan tingkat kerentanan longsor yang tinggi akibat perubahan tata guna lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Selain itu, tingginya aktivitas pertambangan terutama batubara juga memperburuk kualitas lingkungan di Provinsi Bengkulu. **Eksploitasi sumber daya alam** ini seringkali tidak disertai dengan upaya reklamasi yang memadai sehingga menyisakan lubang-lubang tambang yang tidak terkelola dengan baik. Lubang-lubang bekas tambang ini menjadi sumber pencemaran air dan tanah, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Pencemaran sungai akibat limbah tambang di Bengkulu Utara dan Seluma menjadi salah satu contoh nyata dampak negatif dari pengelolaan lingkungan yang masih lemah.

Selain kerusakan ekosistem, pengelolaan sampah di daerah perkotaan juga masih menjadi tantangan besar. Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi masih menghadapi permasalahan dalam **pengelolaan limbah domestik dan industri**. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul yang menjadi pusat pembuangan sampah utama telah mengalami overkapasitas, sementara upaya pengolahan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) masih minim. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah sampah yang mencemari lingkungan, terutama di kawasan pesisir yang banyak ditemukan sampah plastik yang berakhir di laut. Kondisi ini mengancam biota laut dan sektor perikanan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Bengkulu.

Dari aspek mitigasi bencana, Provinsi Bengkulu juga masih menghadapi kendala dalam penyusunan kebijakan yang terintegrasi untuk menghadapi risiko bencana. Belum adanya perencanaan yang sistematis dalam tata ruang berbasis mitigasi bencana menyebabkan pembangunan infrastruktur seringkali tidak memperhitungkan aspek risiko bencana (***Contingency and mitigation plans***). Beberapa wilayah permukiman yang berada di zona rawan longsor dan banjir terus berkembang tanpa adanya pengawasan yang ketat, sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana seperti

sistem peringatan dini (***early warning system***) juga menjadi faktor yang memperburuk dampak bencana di Bengkulu.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta upaya mitigasi bencana di Provinsi Bengkulu. Perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam guna mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Revitalisasi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami degradasi harus menjadi prioritas, termasuk melalui program rehabilitasi hutan dan penanaman kembali (reboisasi). Selain itu, upaya mitigasi bencana harus dilakukan secara sistematis dengan memperkuat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pada beberapa indikator sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait permasalahan ini, di antara lain :

1. Penurunan Intensitas Emisi GRK
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
3. Persentase Peningkatan Infrastruktur EBT
4. Indeks Resiko Bencana

2.3.1.6 Belum Optimalnya Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Serta Terbatasnya Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu adalah **belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.** Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih belum berjalan secara maksimal, sementara akses dan inklusi bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas, mengakibatkan ketimpangan sosial yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bengkulu dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan, namun masih belum merata di seluruh wilayah, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. IPM Bengkulu masih di bawah rata-rata provinsi di Pulau Jawa, dan akses pendidikan serta kesehatan di daerah pedalaman masih terkendala infrastruktur dan tenaga

layanan. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih banyak bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara lintas sektor. Di sisi lain, belum banyak fasilitas umum dan layanan publik yang ramah disabilitas, sehingga membatasi partisipasi kelompok ini dalam pembangunan. Akar permasalahan meliputi kurangnya data terpilah, minimnya kebijakan inklusif yang aplikatif, serta rendahnya pemahaman tentang pendekatan pembangunan berbasis hak.

Dalam aspek pembangunan manusia, meskipun terjadi peningkatan IPM Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya masih relatif lambat dan belum mencapai angka yang ideal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah masih rendahnya akses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. **Kesenjangan pendidikan** antara perkotaan dan perdesaan masih cukup signifikan, baik dalam hal ketersediaan infrastruktur pendidikan, kualitas tenaga pendidik, maupun akses terhadap sarana pendukung pembelajaran. Tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih menunjukkan angka yang relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang tersedia di Bengkulu.

Di sektor kesehatan, permasalahan yang masih menjadi hambatan utama adalah masih **tingginya angka stunting dan gizi buruk di kalangan anak-anak**. Penyebab utama dari tingginya angka stunting ini antara lain adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola asuh anak yang sehat, serta masih terbatasnya akses terhadap makanan bergizi terutama bagi keluarga miskin. Selain itu, angka kematian ibu dan bayi juga masih menjadi perhatian, mengingat belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil serta terbatasnya tenaga medis yang berkualifikasi di puskesmas dan rumah sakit daerah.

Dalam aspek pemberdayaan perempuan, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai **tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan** dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender dalam akses terhadap kesempatan ekonomi. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Isu kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi permasalahan serius, dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan **kekerasan berbasis gender** dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (DP3A) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bengkulu mengalami peningkatan, dengan mayoritas kasus terjadi di lingkungan keluarga dan tempat kerja.

Perlindungan anak juga masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Meskipun berbagai program telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan pekerja anak, masih ditemukan di beberapa daerah, yang mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan sosial bagi anak-anak di Bengkulu. Selain itu, pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup tinggi, yang berakibat pada meningkatnya angka putus sekolah serta menurunnya kualitas hidup perempuan di usia produktif.

Sementara itu, **aksesibilitas bagi penyandang disabilitas** masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih besar dalam perencanaan pembangunan daerah. Fasilitas publik yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, baik dalam bentuk aksesibilitas fisik seperti jalanan, transportasi umum, dan gedung pemerintahan, maupun dalam hal kesempatan ekonomi dan sosial bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas yang masih mengalami diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan mereka. Program pemberdayaan bagi kelompok disabilitas masih belum berjalan secara optimal, sehingga banyak dari mereka yang kesulitan dalam mendapatkan kemandirian ekonomi dan sosial.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih terpadu dan berkelanjutan dalam peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang merata, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan pembangunan manusia di Bengkulu dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan inklusif.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, Badan Pusat Statistik menyediakan beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran, antara lain: tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan non makanan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta kondisi dan fasilitas perumahan. Dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemenuhan kebutuhan yaitu konsumsi masyarakat, keadaan ketenagakerjaan, keamanan serta keadaan perumahan dan lingkungannya. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penguatan pada beberapa indikator sebagai acuan dalam menjawab permasalahan terkait permasalahan ini, di antara lain :

1. Pendapatan per Kapita
2. PDRB ADHB Persentase TPT
3. Indeks Gini
4. Tingkat Kemiskinan
5. Indeks Modal Manusia (IMM)
6. Indeks Pemberdayaan Gender
7. Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
8. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain :

2.3.2.1 Isu Strategis Internasional

***Sustainable* Development *Goals* (SDGs)**

SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga

memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization,Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaranya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, baik negara maju, negara berkembang, dan Negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan berkelanjutan untuk semua;

8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Bengkulu. Tujuan SDGs memiliki tujuan yang baik, yaitu mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth, pro-job, propoor dan pro-environment* yang berfokus pada:

1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;
2. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;
3. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana; dan

4. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dan keadilan bagi semua orang.

Implementasi SDGs di Provinsi Bengkulu di evaluasi melalui penyusunan KLHS RPJMD. KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya subtansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Diharapkan akan terwujud pembangunan Provinsi Bengkulu yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan data baseline tahun 2023 menunjukkan jumlah yang sama yaitu sebanyak 216 indikator (91.91%). Indikator TPB yang sudah dilakasanakan oleh OPD di Provinsi Bengkulu dan sudah mencapai target sebanyak 109 indikator (50.46%). Indikator TPB yang sudah dilakasanakan oleh OPD di Provinsi Bengkulu namun belum mencapai target sebanyak 38 indikator (17.59%). Indikator TPB yang dilaksanakan namun tidak ada data (NA) sebanyak 69 indikator (31.94%). Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 19 indikator (8.09%).

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi prioritas di Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil kajian Analisis Gap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan yang terkait dengan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. TPB 1 Tanpa Kemiskinan
2. TPB 2 Tanpa Kelaparan
3. TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
4. TPB 8 Energi Bersih dan Terjangkau
5. TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
6. TPB 13 Penanggulangan Perubahan Iklim
7. TPB 15 Ekosistem Darat
8. TPB 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh

Isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dihasilkan dengan metode Critical Decission Factor (CDF) terhadap: 1) isu Capaian target indikator TPB berdasarkan baseline data, 2) Isu lingkungan dari kajian 6 muatan, dan 3) isu strategis dari dokumen kebijakan yang relevan di

Provinsi Bengkulu, maka disimpulkan isu paling strategis KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan,
2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat,
3. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah,
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur
5. Tingginya resiko bencana dan perubahan iklim
6. Alih fungsi, Degradasi lahan dan pencemaran lingkungan.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional dan Daerah

RPJMN Tahun 2025-2029

RPJM nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan telah ditetapkan melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2025. selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada rpjmn 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan presiden dan wakil presiden dan disusun berdasarkan rpjp nasional 2025-2045. rpjm nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. dokumen ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. rpjmn 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjpn) tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi indonesia emas 2045.

Didalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi presiden atau Asta Cita. berikut Delapan Prioritas Nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Tahun 2025-2029

Peluang Pembangunan

- **Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif**
  Menurut world bank (2024), indonesia adalah contoh negara di asia yang memiliki resiliensi positif dalam perekonomian ditengah ketidakpastian ekonomi global. pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5-6 persen selama periode 2005-2019 dan berkinerja positif pasca covid-19 dengan pertumbuhan 5,05 persen pada tahun 2023.

- **Keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan**
  Indonesia memiliki potensi kenakeragaman hayati yang sangat tinggi di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan, antara lain menjadi sumber pangan, obat, bioenergi, dan biomaterial.
- **Potensi sumber daya manusia dan modal sosial**
  indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dimana hal tersebut memberikan peluang bagi lndonesia untuk meraih bonus demografi dan meningkatkan daya saing nasional.
- **Pengembangan teknologi**
  teknologi digital berperan dalam mendorong kemajuan di berbagi sektor.
- **Sumber-sumber pertumbuhan inovatif**
  untuk mencapai target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah, dibutuhkan sektor-sektor produktif sebagai sumber-sumber pertumbuhan inovatif, antara lain industrialisasi dan hilirisasi, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pengembangan ekonomi digital.

Tantangan Pembangunan

- **Rendahnya produktivitas**
  Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas indonesia yang tercermin dari total factor productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.
- **Rendahnya kualitas sumber daya manusia**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia antara lain dicerminkan dari capaian rata-rata nilai programme for international student assessment siswa indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) masih tertinggal dibandingkan siswa negara oecd. selain itu, juga terdapat tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang tercermin dari rendahnya pendidikan tenaga kerja. data survei angkatan kerja nasional 2024 menunjukkan bahwa 52,32 peren penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (smp/mts ke bawah).

- **Pergeseran struktur kelas masyarakat**
  Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat. disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat. risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin,disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat.
- **Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif**
  Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71juta jiwa. hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
- **Krisis lingkungan**
  Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.
- **Geopolitik dan geoekonomi**
  Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi indonesia adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap indonesia dalam dunia intemasional.

- **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**
  Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.3.2.3 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1) Belum Optimalnya Penerapan Prinsip-Prinsip *Good and Clean Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan fondasi utama untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun demikian, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, yang menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang optimal.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Akses terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program-program yang ada seharusnya terbuka dan jelas bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, banyak informasi yang tidak disampaikan dengan baik. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Ketidakjelasan informasi ini berkontribusi pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, akuntabilitas pemerintah menjadi masalah yang juga perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah yang akuntabel seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana anggaran digunakan serta hasil dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Namun, di Provinsi Bengkulu, sistem pengawasan dan evaluasi yang ada

masih lemah, sehingga sulit untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan sudah memberikan hasil yang optimal. Hal ini berimplikasi pada ketidakpuasan masyarakat, yang merasa tidak mendapat informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah.

Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan juga turut berperan dalam ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Banyak aparatur pemerintahan yang belum terlatih dengan baik dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan standar yang diharapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan membuat mereka tidak sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan prinsip Good Governance dalam pekerjaan sehari-hari. Kinerja aparatur yang kurang optimal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga masih menjadi masalah besar di Provinsi Bengkulu. Meskipun ada upaya untuk memberantas praktik-praktik tersebut, masih banyak ditemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah memberi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih terbatas. Pemerintah seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Namun, seringkali masyarakat merasa suaranya tidak didengar. Kurangnya saluran efektif untuk menyampaikan aspirasi dan kritik menghambat terciptanya kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak selalu tepat sasaran dan tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

Selain itu sistem pengaduan masyarakat juga masih belum efektif. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengaduan yang responsif harus dapat memberikan solusi atas keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Namun, pengaduan yang masuk sering kali tidak

mendapatkan tanggapan yang memadai atau tidak ada tindak lanjut yang jelas. Kondisi ini menambah frustrasi masyarakat yang merasa keluhan mereka tidak direspons dengan serius oleh pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk memperlancar akses informasi tersebut. Akuntabilitas juga harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah dan menyediakan laporan yang lebih terperinci tentang penggunaan anggaran. Selain itu, perlu ada peningkatan pelatihan dan pembekalan bagi aparatur pemerintahan agar mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat, serta memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan transparan dan bebas dari manipulasi. Partisipasi masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas melalui konsultasi publik dan forum diskusi yang lebih sering. Terakhir, sistem pengaduan harus diperbaiki agar setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

2) Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan yang optimal merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Namun, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya ketahanan pangan yang memadai, sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat produksi pangan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki potensi alam yang besar di sektor pertanian, hasil produksi pangan di daerah ini masih terbatas dan belum dapat mencakup seluruh kebutuhan pangan masyarakat. Penyebab utama dari masalah ini adalah penerapan pola pertanian yang sebagian besar masih mengandalkan teknik tradisional, serta kurangnya adopsi teknologi modern dalam proses produksi.

Akibatnya, produktivitas pertanian rendah, sehingga pasokan pangan lokal menjadi terbatas dan harus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Keterbatasan infrastruktur distribusi pangan juga menjadi masalah yang signifikan dalam ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, kesulitan dalam memperoleh pasokan pangan yang cukup. Sistem distribusi yang tidak efisien seringkali menyebabkan harga pangan tidak stabil dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama yang tinggal di luar pusat kota. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan fasilitas penyimpanan pangan yang memadai, sehingga banyak produk pangan yang rusak atau hilang sebelum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di sektor pertanian turut menghambat pencapaian ketahanan pangan. Sebagian besar petani di Provinsi Bengkulu masih mengandalkan pengetahuan pertanian tradisional yang diwariskan turun-temurun, tanpa adanya pendidikan atau pelatihan yang cukup mengenai teknik bertani modern dan pemanfaatan teknologi pertanian. Hal ini berdampak pada hasil pertanian yang kurang optimal dan lebih rentan terhadap kerugian akibat serangan hama, penyakit tanaman, atau bencana alam.

Perubahan iklim juga semakin memperburuk keadaan ketahanan pangan. Pola cuaca yang tidak menentu menyebabkan gangguan pada musim tanam, yang berakibat pada hasil panen yang tidak stabil. Ketidakpastian cuaca ini membuat petani kesulitan untuk merencanakan waktu tanam yang tepat, sehingga mengurangi potensi hasil pertanian yang dapat dipanen dan berdampak pada ketersediaan pangan di daerah.

Selain itu, rendahnya keberagaman pangan lokal di pasar juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Sebagian besar masyarakat di Provinsi Bengkulu masih mengandalkan beberapa jenis pangan pokok seperti beras dan jagung, sementara potensi sumber pangan lokal lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, Provinsi Bengkulu memiliki keragaman produk pangan lokal yang melimpah, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya yang dapat mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai keberagaman pangan lokal ini menyebabkan rendahnya konsumsi pangan yang bergizi dan mendukung keberlanjutan sistem pangan.

Kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung sektor pertanian secara komprehensif juga menjadi hambatan. Meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, namun implementasinya seringkali tidak optimal. Program bantuan untuk petani sering kali tidak tepat sasaran atau sulit diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kebijakan pengelolaan lahan dan sumber daya alam yang belum sepenuhnya mendukung praktik pertanian berkelanjutan juga turut menghambat peningkatan produksi pangan di daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Provinsi Bengkulu perlu memperkuat kebijakan ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai sektor terkait, mulai dari peningkatan teknologi pertanian, perbaikan infrastruktur distribusi pangan, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Pendekatan yang lebih inklusif juga diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam membangun sistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus menciptakan kebijakan yang mendorong inovasi di sektor pertanian, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar daerah, serta meningkatkan kualitas pangan lokal yang tersedia bagi masyarakat.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mencapai ketahanan pangan yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3) Belum Berkembangnya Hilirisasi Komoditas Unggulan sehingga Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Hilirisasi komoditas unggulan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di pasar global. Namun, di Provinsi Bengkulu, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan masih menghadapi berbagai

kendala yang menghambat potensi ekonomi daerah untuk berkembang secara optimal.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, karet, dan hasil pertanian lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar komoditas unggulan tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa adanya pengolahan lebih lanjut di tingkat daerah. Padahal, jika komoditas-komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, maka akan tercipta peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya hilirisasi di Bengkulu adalah terbatasnya fasilitas dan industri pengolahan yang tersedia. Sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas, mengakibatkan banyak komoditas unggulan yang diekspor dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai ekonominya. Dengan adanya industri pengolahan yang berkembang, komoditas unggulan tersebut bisa diubah menjadi produk akhir yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar global.

Selain itu, keterbatasan teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam proses hilirisasi. Banyak komoditas unggulan di Provinsi Bengkulu yang sebenarnya memiliki potensi untuk diolah menggunakan teknologi modern, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Namun, teknologi yang tersedia di daerah ini masih terbatas, sehingga proses pengolahan produk belum dapat dilakukan secara efisien dan belum mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar internasional. Akibatnya, komoditas unggulan dari Bengkulu hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang lebih rendah.

Tantangan lainnya adalah minimnya investasi di sektor industri pengolahan. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan, banyak investor yang masih enggan untuk menanamkan modal di daerah ini karena terbatasnya infrastruktur dan fasilitas pendukung yang ada. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang buruk, keterbatasan pasokan energi, serta kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan, menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi. Hal ini

menjadikan sektor hilirisasi kurang menarik bagi para investor yang ingin berinvestasi dalam pengolahan komoditas unggulan.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengembangkan hilirisasi. Pengembangan komoditas unggulan yang lebih optimal memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah yang memberikan kebijakan yang mendukung, pelaku usaha yang mengelola produksi dan distribusi, serta masyarakat yang menyediakan bahan baku. Tanpa adanya sinergi yang baik antar pihak-pihak tersebut, pengembangan hilirisasi akan terhambat, meskipun potensi besar untuk pengolahan produk unggulan sebenarnya ada.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam bidang pengolahan juga menjadi faktor yang menghambat hilirisasi. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki banyak petani dan pelaku usaha lokal yang terlibat dalam sektor komoditas unggulan, banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola proses produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial membuat pengolahan komoditas unggulan di Bengkulu tidak dapat berkembang secara optimal.

Dampak dari berbagai permasalahan ini adalah terbatasnya kemampuan Provinsi Bengkulu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Bengkulu masih bergantung pada ekspor bahan mentah, yang harga jualnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Provinsi Bengkulu perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan. Langkah pertama adalah dengan mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan lokal. Pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang dapat menarik investasi, seperti memberikan insentif fiskal atau fasilitas lainnya untuk mempermudah para pengusaha dalam membangun industri pengolahan di daerah ini. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan, agar para pelaku usaha dapat mengelola proses produksi secara efisien dan menghasilkan produk yang bersaing di pasar global.

Selain itu, penting untuk memperkenalkan dan menerapkan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi di sektor pengolahan. Penggunaan teknologi yang tepat akan memungkinkan pengolahan komoditas unggulan menjadi lebih efisien dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi.

Dengan pengembangan hilirisasi yang baik, Provinsi Bengkulu tidak hanya akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi bagi Provinsi Bengkulu, serta menjadikan provinsi ini lebih kompetitif di pasar global.

4) Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Merata dan Berkualitas serta Konektivitas Wilayah

Isu ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu dalam mencapai pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Infrastruktur dasar yang mencakup jalan, jembatan, penyediaan air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Namun, kondisi infrastruktur di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pemerataan maupun kualitasnya.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu masih terkendala oleh ketidakmerataan distribusi yang cukup signifikan, di mana sebagian besar pembangunan infrastruktur masih terfokus di wilayah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi, sementara daerah pedesaan dan kawasan terpencil masih mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar. Kondisi jalan yang belum memadai, banyaknya ruas jalan yang rusak atau tidak teraspal, serta sulitnya akses menuju fasilitas layanan dasar

seperti air bersih dan listrik, masih menjadi tantangan besar. Hal ini memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan daerah-daerah pedesaan yang tertinggal, sehingga menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

Selain ketidakmerataan, kualitas infrastruktur yang ada juga menjadi permasalahan yang cukup serius. Meskipun ada sejumlah pembangunan infrastruktur, namun kualitasnya tidak selalu sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Banyak jalan yang sudah dibangun, namun cepat mengalami kerusakan karena kualitas bahan yang kurang memadai dan tidak terjaga dengan baik. Selain itu, di sektor penyediaan air bersih dan sanitasi, meskipun terdapat berbagai program untuk penyediaan air bersih, distribusinya masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat kota. Sementara itu, sektor energi juga masih menjadi permasalahan, di mana meskipun sebagian besar wilayah sudah teraliri listrik, namun akses listrik di daerah terpencil masih belum merata, sehingga menghambat perkembangan sektor ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya masih sangat terbatas. Keterbatasan kapasitas pelabuhan, bandara, dan kereta api menghambat kelancaran arus barang dan jasa serta mengurangi daya saing Provinsi Bengkulu dalam perdagangan dan investasi. Keterbatasan infrastruktur transportasi juga menghambat konektivitas antar daerah yang pada akhirnya mempengaruhi potensi ekonomi dan pariwisata daerah.

Terbatasnya alokasi anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur. Banyak proyek infrastruktur yang terhambat atau tidak berjalan sesuai rencana akibat keterbatasan dana. Meskipun ada program bantuan dari pemerintah pusat, tetapi anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah provinsi. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan proyek infrastruktur juga masih perlu ditingkatkan agar implementasi pembangunan infrastruktur lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampak dari permasalahan ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan peningkatan biaya logistik, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah tersebut. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Provinsi Bengkulu.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bengkulu perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Prioritas pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan penyediaan akses listrik yang lebih merata. Selain itu, pengembangan infrastruktur strategis seperti Pelabuhan, bandara, dan kereta api juga harus menjadi fokus utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai serta menggali potensi sumber pembiayaan alternatif, seperti kerjasama dengan pihak swasta, untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.

5) Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Serta Mitigasi Kebencanaan

Sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Bengkulu, seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber daya mineral, seharusnya dapat menjadi potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Namun, hingga saat ini, pengelolaan sumber daya alam tersebut belum optimal, yang berdampak pada rendahnya daya saing daerah dan potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya alam adalah minimnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi yang dilakukan

oleh sektor-sektor ekonomi, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Praktik-praktik yang tidak ramah lingkungan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, telah menyebabkan kerusakan alam yang serius, seperti deforestasi dan degradasi lahan. Selain itu, masih adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali mengarah pada kerugian jangka panjang, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengurangi potensi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah minimnya upaya mitigasi kebencanaan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Provinsi Bengkulu, yang berada di wilayah rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, masih menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan masyarakat dan infrastrukturnya untuk menghadapi bencana. Meskipun terdapat beberapa upaya mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, namun program-program tersebut belum berjalan secara maksimal karena terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas teknis. Akibatnya, ketika bencana terjadi, dampaknya sangat besar dan mengganggu kehidupan masyarakat serta kegiatan ekonomi.

Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana juga menjadi kendala besar. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih terbatas. Banyak daerah yang tidak memiliki sistem peringatan dini yang efektif, dan saat terjadi bencana, masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi yang dapat membantu mereka bertindak dengan cepat dan tepat.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi kebencanaan juga merupakan salah satu penghambat. Banyak aparatur yang belum memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk merancang dan menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta untuk merencanakan dan melaksanakan program mitigasi yang efektif. Hal ini berkontribusi pada rendahnya kualitas pengelolaan

lingkungan dan kebencanaan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Provinsi Bengkulu perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada prinsip keberlanjutan, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, dan mendorong penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor. Selain itu, pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana juga harus diperkuat.

Dalam hal mitigasi kebencanaan, Provinsi Bengkulu harus meningkatkan kapasitas teknis dan organisasi untuk merancang dan melaksanakan program mitigasi yang efektif. Ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya mitigasi yang komprehensif dan terintegrasi akan sangat membantu dalam mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mengelola sumber daya alamnya secara optimal, meningkatkan daya saing daerah, serta membangun ketahanan terhadap bencana yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan pembangunan.

6) Ketimpangan Dalam Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, Kesempatan Kerja, Kesetaraan Gender, serta Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas

Ketimpangan dalam kualitas dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun ada kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan, masih terdapat disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta

antar kelompok sosial ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sektor pendidikan, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan di beberapa daerah masih rendah. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, yang disebabkan oleh terbatasnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak anak di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan di masyarakat. Selain itu, ketidakmerataan ini juga memperburuk ketidaksetaraan kesempatan dalam mengakses pendidikan tinggi, yang berdampak pada peluang kerja dan mobilitas sosial.

Di sektor kesehatan, meskipun pelayanan kesehatan telah diperluas, namun kualitas layanan dan akses masih tidak merata. Banyak daerah, terutama yang jauh dari pusat kota, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Masalah ini diperburuk dengan terbatasnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu dan berkualitas. Kondisi ini menyebabkan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular, tetap tinggi di beberapa wilayah. Ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan ini berkontribusi pada ketidakseimbangan dalam kesehatan masyarakat di seluruh provinsi.

Selain itu, ketimpangan dalam kesempatan kerja juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun Provinsi Bengkulu memiliki berbagai potensi ekonomi, banyak lapangan kerja yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan tingkat pendapatan yang rendah. Di sisi lain, sektor industri dan ekonomi modern masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu yang lebih berkembang, sehingga kesenjangan kesempatan kerja semakin lebar. Hal ini menghambat penciptaan lapangan

kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan marginal.

Dalam hal kesetaraan gender, meskipun ada upaya untuk memberdayakan perempuan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa budaya dan norma sosial yang mengakar di masyarakat seringkali membatasi peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Keterbatasan ini menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, yang berkontribusi pada kesenjangan gender yang masih ada di provinsi ini.

Begitu juga dengan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas yang masih memerlukan perhatian khusus. Anak-anak di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, penyandang disabilitas sering kali mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam mengakses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa anak-anak dan penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-hak mereka, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang setara.

Ketimpangan yang terjadi dalam berbagai sektor ini memerlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapainya. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan program-program pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, perlu ada upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan inklusif, serta memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas. Dengan memperhatikan ketimpangan ini, Provinsi Bengkulu dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh masyarakatnya.

Tabel 2. 115 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan	Misinformasi dan disinformasi Cyber Insecurity	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah Rendahnya produktivitas	Belum optimalnya kualitas SDM	Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan
Pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan sistem ketahanan pangan terpadu	Belum optimalnya strategi ketahanan pangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Krisis sumber daya alam	Swasembada pangan	Keterbatasan lahan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing melalui pemanfaatan potensi lokal serta inovasi daerah	Belum optimalnya strategi peningkatan ekonomi rakyat dan daya saing daerah	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Persaingan global Krisis lingkungan Geopolitik	Geopolitik dan geoekonomi Pergeseran struktur kelas masyarakat	Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah	Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
Pengembangan dan pemerataan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Konektivitas antar wilayah dan antar pulau	Konektivitas, keselamatan dan keamanan transportasi	Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas
Penguatan tata kelola lingkungan dan pengembangan sistem mitigasi bencana yang	Masih rendahnya pengelolaan lingkungan hidup serta tingginya potensi bencana	Alih fungsi, degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan	Cuaca ekstrem Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Krisis lingkungan	Degradasi lingkungan Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
terintegrasi dan berkelanjutan		Tingginya resiko bencana dan perubahan iklim	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem			
Peningkatan kualitas SDM melalui pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas	Belum optimalnya pembangunan manusia, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	Ketimpangan akses layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan di tengah tuntutan pembangunan inklusif	Masih tingginya ketimpangan kualitas dan akses layanan dasar serta perlindungan bagi kelompok rentan	Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar	Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan anak dan penyandang disabilitas

BAB III.

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan tentang keadaan ideal yang ingin diraih oleh pemerintah daerah dalam suatu periode perencanaan tertentu. Untuk tahun 2025-2029, Visi Provinsi Bengkulu adalah "**Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan**." Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 untuk mencapai:

- **Bengkulu Maju**: Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, konstribusi PDN Maritim, konstribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat.
- **Religius:** Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun.
- **Sejahtera:** Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik.
- **Berkelanjuta**n: Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan empat misi utama sebagai berikut:

1. **Misi I: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional, serta religius.**

   Misi ini dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan akuntabel, dengan dukungan sumber daya manusia yang berilmu, berteknologi, berbudaya, profesional, serta religius. Untuk mencapai misi tersebut fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan tata

kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berbudaya dan religius, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pemerintahan.

2. **Misi II: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

   Misi kedua dilaksanakan dengan mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dibagi pada dua fokus utama yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah.

3. **Misi III: Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.**

   Misi ketiga berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan sosialidan demokratis dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan rasa aman. Untuk mewujudkan misi ini diperlukan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendorong peningkatan pendapatan per kapita, Selain itu juga fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan indeks modal manusia, termasuk pemberdayaan gender, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga.

4. **Misi IV: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan.**

   Misi keempat dilaksanakan dengan mewujudkan keseimbangan dalam pengembangan ekonomi daerah dengan memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, industri, serta investasi yang berbasis keberlanjutan. Fokus utama dari misi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan sumber daya

alam. Untuk mencapai tujuan tersebut diupaya dengan optimalisasi sektor pertambangan dan penggalian, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan potensial bagi daerah, dan mempercepat pertumbuhan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor koperasi serta UMKM agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, misi ini juga berfokus pada peningkatan investasi dengan menciptakan lingkungan usaha yang menarik bagi investor. Di samping itu, penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas secara berkelanjutan.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara visi RPJPD, Visi RPJMN dengan visi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Keselarasan Visi RPJPD 2025-2045, Visi RPJMN 2025-2029 dan Visi RPJMD 2025-2029

VISI RPJPD 2025-2045	VISI RPJMN 2025-2029	VISI RPJMD 2025-2029
"Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" o **Maju :** Kemajuan Provinsi Bengkulu harus tercermin dalam aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan sosial. Kemajuan ekonomi dan sosial Bengkulu ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. o **Sejahtera :** Memberikan kemakmuran utuh kepada masyarakat, yang ditunjukan dengan terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang memiliki daya saing dan peradaban yang tinggi, serta terpenuhinya kebutuhan layanan	**"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"** ● Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan.	**"Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan"** • **Maju :** Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, konstribusi PDN Maritim, konstribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat • **Religius:** Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan prilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun. • **Sejahtera:** Terpenuhinya

VISI RPJPD 2025-2045	VISI RPJMN 2025-2029	VISI RPJMD 2025-2029
masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, air bersih, energy dan informasi. o **Berkelanjutan :** Berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seimbang dengan pembangunan sosial, sumber daya alam dan lingkungan yang lestari, dan berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.		kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik. • **Berkelanjutan:** Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu yang telah disinkronkan dalam dokumen perencanaan Provinsi Bengkulu baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta disinkronkan dengan RPJMN 2025-2029, maka penjabaran Misi Provinsi Bengkulu adalah :

Tabel 3. 2 Keselarasan Misi RPJPD 2025-2045, Misi RPJMN 2025-2029, dan Misi RPJMD 2025-2029

MISI RPJPD 2025-2045	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD 2025-2029
Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima **(Misi 3)** Menciptakan atmosfir pembangunan yang lebih kondusif melalui perwujudan Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi yang berkeadilan **(Misi 4)**	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan **(Prioritas Nasional 7)** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) **(Prioritas Nasional 1)** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius **(Misi 1)**

MISI RPJPD 2025-2045	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD 2025-2029
	budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur **(Prioritas Nasional 8)**	
Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif **(Misi 2)** Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan **(Misi 6)**	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **(Prioritas Nasional 3)**	Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat **(Misi 2)**
Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing **(Misi 1)** Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi **(Misi 5)**	Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas **(Prioritas Nasional 4)** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan **(Prioritas Nasional 6)**	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman **(Misi 3)**
Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,	Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan

MISI RPJPD 2025-2045	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJMD 2025-2029
ekonomi baru **(Misi 7)** Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan **(Misi 8)**	ekonomi hijau, dan ekonomi biru **(Prioritas Nasional 2)** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **(Prioritas Nasional 5)**	mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan **(Misi 4)**

3.1.2 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, serta memastikan keterkaitan antara misi dan program pembangunan. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran konkret mengenai keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tujuan pembangunan merupakan pernyataan yang merinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, serta menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, sasaran (objective) merupakan rincian dari tujuan, yakni kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun. Sasaran dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan empat misi utama yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja hingga Tahun 2030.

Misi pertama diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional melalui reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tercermin dari target Indeks Reformasi Birokrasi yang terus meningkat dari 76,8 pada tahun 2025 menjadi 80 pada tahun 2029. Upaya pemberantasan praktik korupsi juga ditekankan melalui peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dari 71,72% pada tahun 2025 menjadi 75% pada tahun 2029. Kualitas pelayanan publik dipertahankan pada kategori tertinggi (88–100) pada tahun 2029, sedangkan dari sisi sosial budaya, kerukunan umat beragama ditingkatkan secara gradual hingga mencapai indeks 73,7 pada tahun 2029. Di bidang kebudayaan, pembangunan diarahkan agar nilainya naik dari 62,67 pada tahun 2025 menjadi 67,84 pada tahun 2029. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi juga menjadi prioritas dengan peningkatan Indeks SPBE dari 3,4 menjadi 3,7 pada

tahun 2029. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperkuat melalui peningkatan nilai SAKIP dari 69,05 menjadi 82 pada tahun 2029, serta konsistensi capaian Opini WTP setiap tahun. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pun diperkuat, dengan target nilai meningkat dari 256,5 menjadi 290,5 pada tahun 2029. Seluruh upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi yang tercermin dari Indeks Demokrasi Daerah yang naik hingga 80 pada tahun 2029.

Misi kedua menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, termasuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) ditargetkan naik dari 2,4 pada tahun 2025 menjadi 3,5 pada tahun 2029. Kenaikan tersebut mencakup perbaikan di bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelayanan dasar, serta pengembangan infrastruktur strategis dan jaringan konektivitas wilayah yang meningkat dengan Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI 0,8 pada tahun 2025 menjadi 1,1 pada tahun 2029 serta Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI 1,6 pada tahun 2025 menjadi 2,4 pada tahun 2029. Dengan demikian, pembangunan diharapkan semakin merata dan aksesibilitas antar wilayah semakin baik.

Misi ketiga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang adil dan demokratis, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Pendapatan per kapita masyarakat diproyeksikan naik signifikan dari Rp. 49,230 juta menjadi Rp. 68,406 - 79,300 juta pada tahun 2029, seiring dengan peningkatan PDRB ADHB hingga Rp. 147.203 triliun. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 3,11% menjadi 2,56% pada tahun 2029 serta penurunan ketimpangan yang tercermin dari rasio gini, dari 0,343 pada tahun 2025 menjadi 0,315 - 0,309 pada tahun 2029. Tingkat kemiskinan juga diturunkan secara bertahap dari 12,52% pada tahun 2025 menjadi sekitar 8,99 % pada tahun 2029. Di sisi peningkatan sumber daya manusia, Indeks Modal Manusia (IMM) ditingkatkan dari 0,53 pada tahun 2025 menjadi 0,57 pada tahun 2029. Usia Harapan Hidup dari 73,51 menjadi 74,23 pada tahun 2029, Total Fertility Rate dari 2,12 menjadi 2,10 pada tahun 2029, Angka Kematian Ibu dari 89 menjadi 77 pada tahun 2029 , Angka Kematian Balita dari 19 menjadi 15 pada tahun 2029, Prevalensi Stunting 17,7 menjadi 14,1 pada tahun 2029, Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional 99,5% menjadi 99,9% pada tahun 2029, Harapan lama Sekolah dari 14 menjadi 18 pada tahun 2029, Rata-rata Lama sekolah dari 9,58 menjadi 10,37 pada tahun 2029, Angka Literasi/ Numerasi Literasi SMA (68,04) SMK (57,28) Numerasi SMA (62,77) SMK (53,17) menjadi Literasi : SMA (72) SMK (61) Numerasi SMA (66) SMK (57) pada tahun 2029, Kesetaraan gender dijaga melalui stabilitas Indeks Pemberdayaan Gender di kisaran 70,05 – 70,08

tahun 2029, Lebih lanjut, kualitas keluarga juga diperkuat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dari 74,32 menjadi 77,05 pada tahun 2029, Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dari 23% menjadi 29,4% pada tahun 2029 serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak dengan target penanganan kasus kekerasan mencapai 100% untuk perempuan dan 96,25% untuk anak.

Misi keempat menekankan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan mengutamakan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta industri kreatif. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dari 4,3–5,1% pada tahun 2025 menjadi 7,2 - 7,4 % pada tahun 2029. Kontribusi PDRB Bengkulu terhadap nasional juga konsisten sebesar 0,5 %. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian ditargetkan tumbuh hingga 3,8% pada tahun 2029, sementara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin diperkuat dengan proporsi PDRB Ekraf yang meningkat dari 0,29% menjadi 0,42%. Industri pengolahan ditingkatkan kontribusinya hingga 1,54% pada tahun 2029, sedangkan koperasi dan UMKM terus diberdayakan melalui peningkatan rasio usaha terhadap PDRB serta rasio kewirausahaan daerah dari 0,3 menjadi 1. Nilai investasi juga ditargetkan naik dari Rp 7,01 triliun menjadi Rp 10,26 triliun pada tahun 2029. Selain itu, stabilitas ekonomi dijaga dengan pengendalian inflasi di kisaran 2,5–2,6%, Indeks Ketahanan Pangan dari 70,00 menjadi 70,04 pada tahun 2029, peningkatan inklusi keuangan hingga 95,95 %, serta penguatan indeks ekonomi hijau dari 49,83 menjadi 60,49. Kualitas lingkungan hidup diperhatikan melalui pengendalian emisi gas rumah kaca dari 57,74 pada tahun 2025 menjadi 67,6 pada tahun 2029, peningkatan indeks kualitas lingkungan dari 71,27 pada tahun 2025 menjadi 72,12 pada tahun 2029, serta penurunan risiko bencana dari 140 pada tahun 2025 menjadi 131 pada tahun 2029. Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan juga menjadi prioritas, dengan target peningkatan hingga 16,8 % pada 2029.

Tabel 3. 3 Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan **Misi 1** : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	77	78	80	82	84	86	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	71,72	72%	73%	74%	75%	76%	
			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	88,3 (Kualitas Tertinggi)	88.00-100 (Kualitas Tertinggi)	88.00-100 (Kualitas Tertinggi)	88.00-100 (Kualitas Tertinggi)	88.00-100 (Kualitas Tertinggi)	88.00-100 (Kualitas Tertinggi)	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	73,4	73,5	73,55	73,6	73,65	73,7	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,67	63,93	65,21	66,51	67,84	69,20	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK	Nilai Indeks *e-Government* (SPBE)	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	69,05	70	72	75	80	82	
			Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks Sistem Merit	256,5	262	270,5	278,5	290,5	301,5	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Indeks Demokrasi Daerah	76,5	77	78	79	80	80	
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan **Misi 2** : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	Meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	2,5 (sedang)	2,65 (sedang)	2,85 (sedang)	3,3 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,65 (Tinggi)	
		Meningkatnya indeks infrastruktur dasar	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2	
		Meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI	1,7	1,75	1,95	2,30	2,40	2,45	
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan **Misi 3** : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	Meningkatkan Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis		Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	49,230 - 53,200	54,536 - 59,725	60,480 - 66,250	64,358 - 72,775	68,406 - 79,300	72,591 - 85,825	
		Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta rupiah)	103.99-103.99	114.612 - 121.233	120.243 - 129.889	125.110 - 138.546	129.392 - 147.203	133.188 - 155.859	
			Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11 - 3.41	2,97 - 3,34	2,84 - 3,27	2,70 - 3,20	2,56 - 3,13	2,42 - 3,06	
			Indeks Gini	0,343-0,343	0,322-0,324	0,319-0,321	0,316-0,318	0,309-0,315	0,305-0,311	
		Menurunnya	Tingkat	12.52-	11,00-	10,69-	10,08-	8,99-	8,87-	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kemiskinan	Kemiskinan	12.52	11,91	11,30	11,07	10,08	9,48	
			Indeks Modal Manusia (IMM)	0.53-0.53	0.54-0.54	0.55-0.55	0.56-0.56	0.57-0.57	0.58-0.58	
		Meningkatnya Kualitas Sumber daya manusia	Usia Harapan Hidup	73,51	73,71	73,91	74,11	74,23	74,23	
			Total Fertility Rate	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	
			Angka Kematian Ibu	89	86	83	80	77	74	
			Angka Kematian Balita	19	18	17	16	15	14	
			Prevalensi Stunting	17,7	16,9	15,9	15	14,1	13,3	
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100	
			Harapan lama Sekolah	14	15	16	17	18	19	
			Rata-rata Lama sekolah	9,58	9,77	9,97	10,17	10,37	10,58	
			Angka Literasi/ Numerasi	Literasi : SMA (68,04) SMK	Literasi : SMA (69) SMK (58) Numerasi	Literasi : SMA (70) SMK (59) Numerasi	Literasi : SMA (71) SMK (60) Numerasi	Literasi : SMA (72) SMK (61) Numerasi	Literasi : SMA (73) SMK (62) Numerasi	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				(57,28) Numerasi : SMA (62,77) SMK (53,17)	: SMA (63) SMK (54)	: SMA (64) SMK (55)	: SMA (65) SMK (56)	: SMA (66) SMK (57)	: SMA (67) SMK (58)	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,05	70,06	70,06	70,07	70,08	70,08	
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	74,32	75,29	76,02	76,59	77,05	77,44	
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	23	24,6	26,2	27,8	29,4	31	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	58,15	58,91	59,68	60,44	61,20	61,96	
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan **Misi 4** : Menciptakan keselarasan	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,1-5,5	5,2-5,8	6,2-6,5	6,6-6,9	7,2-7,4	7,4-7,6	
			Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor	Persentase pertumbuhan	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.		unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB							
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Proporsi PDRB EKRAF	0,29 %	0,33 %	0,36 %	0,39 %	0,42 %	0,45 %	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55	
		Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Rasio volume usaha Koperasi terhadap PDRB	0.02:0.04	0.04:0.06	0.06:0.08	0.08:0.1	0.1:0.2	0.2:0.3	
			Rasio Kewirausahaan Daerah	0,28	0,3	0,5	0,8	1	1	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (triliun rupiah)	7,01	7,71	8,48	9,33	10,26	11,28	
		Stabilnya Perekonomian Daerah	Tingkat Inflasi	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	
			Inklusi Keuangan	93,98	94,47	94,96	94,45	95,95	96,16	
		Meningkatnya kemandirian daerah	Indeks Ketahanan	70,00	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	Pangan							
			Indeks Ekonomi HIjau Daerah	49.83	52,43	55,41	58,29	60,49	62.99	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK	57,74	60,07	63,07	66,11	67,60	70,35	
			Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	71,27	71,48	71,7	71,91	72,12	72,33	
			Indeks Risiko Bencana	140	140	137	134	131	131	
		Meningkatnya infrastruktur dan pembangkit EBT	Persentase peningkatan infrastruktur EBT	5,6	8,4	11,2	14	16,8	19	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi merupakan rumusan rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam mencapai visi, misi tujuan serta sasaran, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan Pembangunan, kokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029.

Strategi berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran Pembangunan, strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran Provinsi Bengkulu 2025 - 2029 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
MISI 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius		
Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	**Sasaran 1.1.1 :** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius **Sasaran 1.1.2 :** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK **Sasaran 1.1.3 :** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi dengan Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pengawasan Independen, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan KKN
MISI 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta		

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
konektivitas wilayah		
Tujuan 2.1 : Meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	**Sasaran 2.1.1 :** Meningkatnya indeks infrastruktur dasar **Sasaran 2.1.2 :** Meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan konektivitas guna menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
MISI 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.		
Tujuan 3.1 : Meningkatkan Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis	**Sasaran 3.1.1 :** Meningkatnya pendapatan per kapita **Sasaran 3.1.2 :** Menurunnya Kemiskinan **Sasaran 3.1.3 :** Meningkatnya kualitas sumber daya manusia **Sasaran 3.1.4 :** Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif
MISI 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.		
Tujuan 4.1 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	**Sasaran 4.1.1 :** Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah **Sasaran 4.1.2 :** Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif **Sasaran 4.1.3 :** Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah **Sasaran 4.1.4 :** Meningkatnya Produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah **Sasaran 4.1.5 :** Meningkatnya Nilai Investasi **Sasaran 4.1.6:** Stabilnya Perekonomian Daerah	Penguatan diversifikasi ekonomi, pemberdayaan sektor kreatif, industri dan pariwisata, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui dukungan terhadap UMKM dan peningkatan investasi di sektor ekonomi lokal.
	Sasaran 4.1.7: Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang	Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Arah Kebijakan**
	berkualitas secara berkelanjutan	produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.
	Sasaran 4.1.8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Mengembangkan infrastruktur berketahanan iklim melalui penerapan teknologi, memperkuat penegakan hukum dan regulasi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pelatihan SDM untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
	Sasaran 4.1.9 : Meningkatnya infrastruktur dan pembangkit EBT	

Tabel 3. 5 Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi Serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu 2025 – 2029

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	**Tujuan 1.1 :** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	**Sasaran 1.1.1 :** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius	1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi dengan Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pengawasan Independen, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan KKN	1. Penguatan fondasi pelaksanaan e-Governance serta penguatan kerjasama antar lembaga 2. Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi 3. Evaluasi sistem e-government dan peningkatan kualitas kapasitas SDM 4. Penguatan implementasi kebijakan antikorupsi dan memperluas partisipasi masyarakat 5. Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program
			Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK	Nilai Indeks e-Government (SPBE)		
			Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1. Nilai SAKIP Daerah 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Indeks Sistem Merit 4. Indeks Demokrasi Daerah		
Misi 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	**Tujuan 2.1 :** Meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	**Sasaran 2.1.1 :** Meningkatnya indeks infrastruktur dasar	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan konektivitas guna	1. Memperkuat kajian kesiapan kualitas dan kelayakan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis 2. Implementasi Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis 3. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur daerah
			Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI		

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
					menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	4. Percepatan pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 5. Monitoring, Pengembangan dan Penyempurnaan Infrastruktur
Misi 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	**Tujuan 3.1 :** Meningkatkan Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis	Pendapatan per kapita	**Sasaran 3.1.1 :** Meningkatnya pendapatan per kapita	1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif	1. Penguatan fondasi kebijakan dan kerangka kerja untuk peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan akses penyandang disabilitas. 2. Penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kualitas akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif 3. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan akses layanan yang inklusif untuk mendorong produktivitas dan daya saing SDM 4. Peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui keterbukaan akses pekerjaan tanpa diskriminasi 5. Mengevaluasi dampak kebijakan dan program
				2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka		
		Indeks Gini	**Sasaran 3.1.2 :** Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan		
		Indeks Modal Manusia (IMM)	**Sasaran 3.1.3 :** Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia	1. Usia Harapan Hidup		
				2. Total Fertility Rate		
				3. Angka Kematian Ibu		
				4. Angka Kematian Balita		
				5. Prevalensi Stunting		
				6. Cakupan Kepesertaan Aktif JKN		
				7. Harapan Lama Sekolah		
				8. Rata-rata Lama Sekolah		
				9. Angka Literasi/ Numerasi		
			Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Indeks Pemberdayaan gender		
				2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
				3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal		
				4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
						yang telah dilaksanakan, serta merencanakan keberlanjutan program untuk masa depan.
Misi 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	**Tujuan 4.1 :** Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	**Sasaran 4.1.1 :** Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	Penguatan diversifikasi ekonomi, pemberdayaan sektor kreatif, industri dan pariwisata, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui dukungan terhadap UMKM dan peningkatan investasi di sektor ekonomi lokal.	1. Penguatan fondasi kebijakan dan Peningkatan Akses Modal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan 2. Ekspansi dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi investasi 3. Optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan daya saing produk unggulan berskala internasional serta pariwisata berkualitas yang berkelanjutan berbasis digital 4. Inovasi dan penguatan sistem kreatif hub melalui integrasi ekonomi lokal dan pasar global melalui industrialisasi
			Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Proporsi PDRB Ekraf		
				Persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata		
			Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		
			Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya Produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
				2.Rasio Kewirausahaan Daerah		

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
			Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi		5. Terwujudnya Bengkulu sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru 6. Dukungan pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk mendukung UMKM, memperkuat ekonomi kreatif dan pariwisata
			Sasaran 4.1.6: Stabilnya Perekonomian Daerah	1. Tingkat Inflasi 2. Inklusi Keuangan		
			Sasaran 4.1.7 : Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.	1. Penguatan fondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan 2. Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran 3. Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui industrialisasi 4. Memperluas pasar global dan penerapan ekonomi sirkular 5. Menjadikan Bengkulu sebagai pusat agroindustri berkelanjutan
		Indeks Ekonomi Hijau	**Sasaran 4.1.8. :** Meningkatnya	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Mengembangkan infrastruktur	1. Penguatan penegakkan kebijakan lingkungan dan

Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Arah Kebijakan**	**Strategi**
			kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim	2. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah 3. Indeks Resiko Bencana	berketahanan iklim melalui penerapan teknologi, memperkuat penegakan hukum dan regulasi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pelatihan SDM untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	peningkatan kapasitas serta pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan 2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berketahanan iklim 3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan 4. Penguatan kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pendanaan untuk Program Lingkungan 5. Evaluasi, Penyesuaian Kebijakan, dan Penyusunan Rencana Ke Depan
			Sasaran 4.1.9 : Meningkatnya infrastruktur dan pembangkit EBT	Persentase peningkatan infrastruktur EBT		

3.2.1.1. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2029

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD, selaras dengan dengan arah kebijakan pada Tahun pertama RPJPD Tahun 2025-2045 pada Periode ini, fokus utama adalah membangun pondasi dasar yang kuat untuk transformasi jangka panjang Provinsi Bengkulu mengambil tema Penguatan Transformasi, dengan arah kebijakan pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sistem pendidikan, pembangunan kapasitas sosial, dan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan produktivitas sektor sumberdaya alam dan pembentukan dasar ekonomi kreatif;
3. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan;
4. Penyelenggaraan keamanan daerah dan pembentukan pondasi demokrasi yang kokoh;
5. Memperkuat infrastruktur sosial, mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya, serta menjaga keberlanjutan ekologi;
6. Penguatan pondasi transformasi dengan fokus mengidentifikasi dan mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah serta memperkuat infrastruktur dasar di seluruh wilayah Provinsi;
7. Peningkatan dan modernisasi jaringan transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di seluruh wilayah provinsi;
8. Pengembangan kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan dan selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan. Skenario arah kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2025-2029, sebagaimana berikut:

Tabel 3. 6 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu 2025 – 2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi dengan Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pengawasan Independen, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan KKN	
2.	Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan konektivitas guna menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	
3.	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif	
4.	Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	Penguatan diversifikasi ekonomi, pemberdayaan sektor kreatif, industri dan pariwisata, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui dukungan terhadap UMKM dan peningkatan investasi di sektor ekonomi lokal.	
		Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.	
		Mengembangkan infrastruktur berketahanan iklim melalui penerapan teknologi, memperkuat penegakan hukum dan regulasi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pelatihan SDM untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	

Tabel 3. 7 Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029

Arah Kebijakan RPJPD Tahun Pertama (2025-2029)	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029
Peningkatan kualitas sistem pendidikan, pembangunan kapasitas sosial, dan infrastruktur dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan konektivitas guna menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan pondasi transformasi dengan fokus mengidentifikasi dan mengatasi disparitas pembangunan antarwilayah serta memperkuat infrastruktur dasar di seluruh wilayah Provinsi	
Peningkatan dan modernisasi jaringan transportasi, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di seluruh wilayah provinsi	
Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan	Implementasi E-Governance yang Terintegrasi dengan Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Pengawasan Independen, dan Masyarakat untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan KKN
Penyelenggaraan keamanan daerah dan pembentukan pondasi demokrasi yang kokoh	
Memperkuat infrastruktur sosial, mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya, serta menjaga keberlanjutan ekologi	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan inklusif
Pengembangan kebijakan lingkungan yang progresif dan berkelanjutan, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam	Mengembangkan infrastruktur berketahanan iklim melalui penerapan teknologi, memperkuat penegakan hukum dan regulasi lingkungan, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pelatihan SDM untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas sektor sumberdaya alam dan pembentukan dasar ekonomi kreatif	Penguatan diversifikasi ekonomi, pemberdayaan sektor kreatif, industri dan pariwisata, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing daerah, melalui dukungan terhadap UMKM dan peningkatan investasi di sektor ekonomi lokal.
	Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan.

3.2.1.2. Tahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2030

Tahapan pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 - 2030 merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 - 2030, adapun

tahapan pembangunan Provinsi Bengkulu 2025 -2029 sebagi berikut :

Tabel 3. 8 Tahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2030

TAHUN	URAIAN
TAHAP I (2025)	Penguatan transformasi politik dan birokrasi untuk mewujudkan Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan
TAHAP II (2026)	Peningkatan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada pemerataan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
TAHAP III (2027)	Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing
TAHAP IV (2028)	Penguatan pembangunan ekonomi berkelanjutan didukung oleh penguatan SDM yang berdaya saing serta penciptaan iklim sosial dan iklim usaha yang kondusif
TAHAP V (2029)	Terwujudnya Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan
TAHAP VI (2030)	Evaluasi capaian pembangunan, penguatan kelembagaan, diversifikasi ekonomi daerah, akselerasi infrastruktur berwawasan lingkungan, serta penguatan resiliensi sosial dan ekologis dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

Tahapan Pembangunan Tahun 2025 "Penguatan transformasi politik dan birokrasi untuk mewujudkan Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan dalam pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan" dilakukan dengan :

1. Penguatan fondasi pelaksanaan e-Governance serta penguatan kerjasama antar lembaga
2. Memperkuat kajian kesiapan kualitas dan kelayakan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
3. Penguatan fondasi kebijakan dan kerangka kerja untuk peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan akses penyandang disabilitas
4. Penguatan fondasi kebijakan dan Peningkatan Akses Modal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan

5. Penguatan fondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan
6. Penguatan penegakkan kebijakan lingkungan dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan

Tahapan Pembangunan Tahun 2026 "Peningkatan ekonomi berkelanjutan dengan berfokus pada pemerataan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat " dilakukan dengan :

1. Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi
2. Implementasi Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis
3. Penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kualitas akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif
4. Ekspansi dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi investasi
5. Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran
6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Tahapan Pembangunan Tahun 2027 "Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing" dilakukan dengan :

1. Evaluasi sistem e-government dan peningkatan kualitas kapasitas SDM
2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur daerah
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan akses layanan yang inklusif untuk mendorong produktivitas dan daya saing SDM
4. Optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan daya saing produk unggulan berskala internasional serta pariwisata berkualitas yang berkelanjutan berbasis digital
5. Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui industrialisasi
6. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan

Tahapan Pembangunan Tahun 2028 "Penguatan pembangunan ekonomi berkelanjutan didukung oleh penguatan SDM yang berdaya saing serta penciptaan iklim sosial dan iklim usaha yang kondusif" dilakukan dengan:

1. Penguatan implementasi kebijakan anti korupsi dan memperluas partisipasi masyarakat

2. Percepatan pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui keterbukaan akses pekerjaan tanpa diskriminasi
4. Inovasi dan penguatan sistem kreatif hub melalui integrasi ekonomi lokal dan pasar global melalui industrialisasi
5. Memperluas pasar global dan penerapan ekonomi sirkular
6. Penguatan kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pendanaan untuk Program Lingkungan

Tahapan Pembangunan Tahun 2029 "Terwujudnya Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan melalui penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan" dilakukan dengan :

1. Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program
2. Monitoring, Pengembangan dan Penyempurnaan Infrastruktur
3. Mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta merencanakan keberlanjutan program untuk masa depan
4. Terwujudnya Bengkulu sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru
5. Menjadikan Bengkulu sebagai pusat agroindustri berkelanjutan
6. Evaluasi, Penyesuaian Kebijakan, dan Penyusunan Rencana Ke Depan

Tahapan Pembangunan Tahun 2030 “Evaluasi capaian pembangunan, penguatan kelembagaan, diversifikasi ekonomi daerah, akselerasi infrastruktur berwawasan lingkungan, serta penguatan resiliensi sosial dan ekologis dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045” tahun 2030 merupakan peralihan periode RPJMD dilakukan dengan :

1. Evaluasi dan Konsolidasi Pembangunan secara menyeluruh
2. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola pemerintahan yang kuat, adaptif, dan berintegritas.
3. Diversifikasi dan Hilirisasi Ekonomi Daerah pada pengembangan sektor unggulan baru berbasis potensi lokal.
4. Akselerasi Infrastruktur Hijau yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang
5. Penguatan Resiliensi Sosial dan Ekologis melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim, penguatan sistem ketahanan pangan dan energi lokal, serta pengembangan jejaring perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Syariah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen strategis. Ekonomi syariah dipandang memiliki potensi besar dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah, mengingat karakteristik masyarakat Bengkulu yang religius serta ketersediaan sumber daya yang dapat dikelola secara halal dan produktif.

Pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk:

1. Memperkuat sektor keuangan syariah melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro syariah.
2. Optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf/ZISWAF) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
3. Pengembangan ekosistem halal value chain dengan mendorong sektor-sektor unggulan daerah yang berorientasi halal, seperti pertanian, perikanan, industri makanan dan minuman, pariwisata halal, serta fashion muslim.
4. Penguatan kelembagaan dan regulasi daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk fasilitasi Peraturan Daerah maupun kebijakan turunan yang berorientasi pada penguatan usaha syariah.
5. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah melalui kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan guna mencetak tenaga kerja dan wirausahawan syariah yang kompetitif.
6. Pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses dan efisiensi layanan ekonomi syariah, termasuk digitalisasi ZISWAF dan pengembangan fintech syariah daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mendukung terwujudnya Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

3.2.1.2. Arah Pembangunan dan Pengembangan Kewilayahan Berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043, terdapat program utama pembangunan dan pengembangan kewilayahan sebagai berikut :

A. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Provinsi

1. Perwujudan Sistem Permukiman Perwujudan Sistem Permukiman dapat dicapai dengan :
    a) Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Nasional
        1) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berlokasi di Kota Bengkulu.
        2) Program Kawasan Permukiman yang berlokasi di Kota Bengkulu
        3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berlokasi di Kota Bengkulu.
        4) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berlokasi di Kota Bengkulu.
    b) Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Wilayah
        1) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mukomuko, Curup, dan Manna yang berlokasi di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
        2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang berlokasi pada Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
        3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berlokasi pada Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
    c) Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Lingkungan
        1) Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berlokasi pada Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong.
        2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang berlokasi pada Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong.
        3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berlokasi pada Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong.
        4) Pusat Pertumbuhan Kelautan yang berlokasi pada Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.

2. Sistem Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi

   Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi dapat dicapai dengan :

   a) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan
      1) Jalan Umum, Program Penyelenggaraan Jalan yang berlokasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
      2) Perwujudan Jalan Tol, Program Penyelenggaraan Jalan Tol (Lubuk Linggau - Kepahiang - Bengkulu, Padang - Bengkulu, Bengkulu - Provinsi Lampung)
      3) Perwujudan Terminal Penumpang, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berlokasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
      4) Perwujudan Jembatan Timbang, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berlokasi pada Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
      5) Program Penyusunan atau pemutakhiran Rencana Induk Transportasi
   b) Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api
      1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian yang berlokasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
   c) Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
      1) Program Pembangunan, Pemantapan, Rehabilitasi dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan yang berlokasi di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
      2) Program Pengelolaan Pelayaran yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang berada di pesisir pantai.
      3) Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang berlokasi di Kota Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Pulau Baai-Pulau Enggano.
   d) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut
      1) Program Pemantapan dan Pengembangan Pelabuhan Utama yang berlokasi di Kota Bengkulu.
      2) Program Pengembangan Pelabuhan Pengumpul yang berlokasi di Kabupaten Kaur.

3) Program Pengembangan Pelabuhan Pengumpan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko Muko.
4) Studi Kelayakan Pelabuhan Pengumpan yang berlokasi di Kota Bengkulu.
5) Kajian Pembangunan Pelabuhan sepanjang pesisir pantai barat Sumatera yang berlokasi di Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara.
6) Studi Kelayakan Pelabuhan Pengumpul yang berlokasi di Kabupaten Kaur.
7) Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal khusus yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara.
8) Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.
9) Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan yang berlokasi di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
10) Kajian Peningkatan Pendaratan Ikan Pasar Seluma menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Seluma.
11) Program Pengelolaan Pelayaran yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang berlokasi di pesisir pantai.
12) Program Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang berlokasi di pesisir pantai.
13) Program Alur Pelayaran di Laut yang berlokasi di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Utara.
14) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang berada di pesisir pantai.
15) Pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, misalnya untuk kepentingan militer atau pertahanan/ keamanan di Pulau Baai Kota Bengkulu dan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
16) Pengembangan jaringan transportasi laut antar kabupaten di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

17) Pemeliharaan alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai yang berlokasi di Kota Bengkulu.

e) Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
   1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara yang berlokasi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara

3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi Perwujudan Sistem Jaringan Energi dapat dicapai dengan :
   a) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
      1) Program pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi yang berlokasi di Kota Bengkulu.
      2) Program pengendalian kawasan andalan untuk minyak dan gas bumi.
   b) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya
      1) Program pengelolaan ketenagaan listrik yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi dapat dicapai dengan :
   a) Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Telekomunikasi
      1) Pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
      2) Jaringan bergerak yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air dapat dicapai dengan :
   a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
      Pembangunan dan pemeliharaan yang yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dapat dicapai dengan :
   a) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
      1) Program pengelolaan dan pengembangan SPAM yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Seluma.
      2) Program Infrastruktur Layanan Dasar yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
      3) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma.

b) Kajian Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
   1) Program pengembangan permukiman yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
   2) Kajian program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
c) Kajian Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
   1) Kajian Program pengendalian B3 dan Limbah B3 yang berlokasi di Kota Bengkulu d) Kajian Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah
   2) Kajian program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
   3) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi

1. Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi
   Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi dapat dicapai dengan :
   a) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung
      1) Program pengelolaan hutan yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Rejang Lebong
      2) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Rejang Lebong.
      3) Mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/ atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Rejang Lebong
      4) Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Muko Muko
      5) Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi yang berlokasi di Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Muko Muko

6) Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air yang berlokasi di CAT Painan-Lubukpinang, CAT Gedongmeneng, CAT Muaraduo-Curup

b) Perwujudan kawasan konservasi
   1) Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi berupa cagar alam, taman hutan raya, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru yang sudah terdegredasi yang berlokasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
   2) Pengembangan dan pemertahanan fungsi kawasan konservasi berupa cagar alam yang berlokasi di Cagar Alam Air Tebat Danau Tes, Danau Dusun Besar, Cagar Alam Telok Klowe
   3) Pengembangan dan pemertahanan fungsi kawasan konservasi berupa Taman Hutan Raya yang berlokasi di Tahura Bukit Rabang - Gluguran dan Taman Hutan Raya Raja Lelo
   4) Pengembangan dan pemertahanan fungsi kawasan konservasi berupa Taman Wisata Alam yang berlokasi di TWA Pantai Panjang - P. Baai, TWA Bukit Kaba, dan TWA Laut Enggano.
   5) Pemertahanan, pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi berupa taman buru yang berlokasi di Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Taman Buru Gunung Nanu'a
   6) Program pengelolaan ruang laut terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut yang berlokasi di Provinsi Bengkulu
   7) Pemertahanan, pelestarian dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem laut yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur
   8) Peningkatan fungsi, pelestarian dan pemertahanan dan koridor ekosistem yang berlokasi di koridor Jambi-Bengkulu dan koridor Bengkulu-Sumatera Selatan

c) Perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut
   Perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut yang berlokasi di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu

d) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove

Program pelestarian dan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove yang berlokasi di Kabupaten Muko Muko.

2. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya Perwujudan kawasan peruntukan budidaya dapat dicapai dengan :
   a) Perwujudan kawasan hutan produksi
      1) Program pengelolaan hutan yang berlokasi di Provinsi Bengkulu
      2) Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
      3) Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Kepahiang.
   b) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat
      Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan perkebunan rakyat yang berlokasi di Kabupaten Kaur
   c) Perwujudan Kawasan Pertanian
      1) Program penyediaan dan pengambangan sarana pertanian yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
      2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
      3) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
      4) Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas yang berlokasi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
      5) Program pengembangan dan pengendalian kawasan andalan sektor pertanian yang berlokasi di kawasan Bengkulu dan sekitarnya.
      6) Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/ tadah hujang yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu

Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Kaur.

7) Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Kaur
8) Pengendalian pengembangan kegiatan budidaya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
9) Pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Kaur
10) Perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alihfungsi peruntukan lahan hortikultura yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang
11) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Kaur
12) Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan yang berlokasi di provinsi Bengkulu
13) Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan yang berlokasi di Bengkulu Tengah.

d) Perwujudan kawasan perikanan
   1) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
   2) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu

3) Program pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu.
4) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur
5) Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu

e) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi
1) Program pengelolaan kawasan pertambangan dan energi yang berlokasi di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu
2) Program pembinaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang berlokasi di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur
3) Rehabilitasi lahan pasca tambang yang berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan

f) Perwujudan kawasan peruntukan industri
1) Program perencanaan dan pembangunan kawasan peruntukan industri yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
2) Program pengendalian izin usaha industri yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
3) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
4) Program pengembangan kawasan peruntukan industri berupa sektor industri pengolahan yang berlokasi di kawasan Manna dan sekitarnya

g) Perwujudan kawasan pariwisata
1) Program peningkatan daya tarik destinasi yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.
2) Program penembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu

h) Perwujudan kawasan permukiman
   1) Program kawasan permukiman yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   2) Program pengembangan permukiman yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   3) Program pengembangan perumahan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   4) Program penataan bangunan dan lingkungannya yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   5) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   6) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berlokasi di Pulau Enggano dan Pulau Mega
   7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah
   8) Program penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara
   9) Program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara
   10) Program pengelolaan pertanahan daerah yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara
   11) Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara
   12) Program pengembangan daya saing keolahragaan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.
   13) Program penataan bangunan gedung yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   14) Program retribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
i) Perwujudan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (dumping area)
   1) Pembangunan dumping area di laut yang berlokasi di Kota Bengkulu
   2) Kajian pengembangan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten

Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu

j) Perwujudan kawasan transportasi
   1) Peningkatan pengembangan kawasan transportasi yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu
   2) Program penyelenggaraan LLAJ yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   3) Program pengelolaan penerbangan yang berlokasi di Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Enggano, dan Bandara Mukomuko

k) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan
   1) Program perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu
   2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri yang berlokasi di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu

3. Perwujudan Kawasan Strategis Perwujudan kawasan strategis dapat dicapai dengan :
   a) Rehabilitasi/ Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang berlokasi di Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pulau Enggano, dan Pulau Mega
   b) Rehabilitasi/ Revitalisasi kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan budaya yang berlokasi di Kawasan BAITARITAM, Kawasan.
      Persada Fatmawati Soekarno, Kawasan Karabela, dan Kawasan Persada Soekarno
   c) Rehabilitasi/ Revitalisasi kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
      1) Kawasan P. Baai, Pelabuhan Linau, dan Pelabuhan P. Enggano
      2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais - Giri Mulya - Ketahun (KTM LAGITA)
      3) Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu
      4) Kawasan Perkotaan Bengkulu - Kabupaten Bengkulu Tengah - Kabupaten Seluma.

3.2.1.3. Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bengkulu Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 secara umum sebagai berikut :

1. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
2. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:
   - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
   - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
   - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
   - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
   - Revitalisasi pendidikan nonformal
   - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
3. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
   - Penurunan kematian ibu dan anak
   - Pencegahan dan Penurunan *stunting*
   - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
   - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
4. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
   - Penuntasan TBC
   - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
   - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
5. Penguatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara Iain melalui:
   - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
   - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
6. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari HuIu ke Hilir, antara lain melalui:
   - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
   - Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
7. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah antara lain melalui:
   - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan
   - Penerapan jaringan cerdas *(smart grid)* untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi
   - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik

- Penerapan *Intemet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time*
- Perluasan penggunaan kendaraan listrik

8. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
   - Perluasan infrastruktur digital
   - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital
   - Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok
9. Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:
   - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital
   - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN
   - Digitalisasi layanan publik prioritas
   - Pengembangan ekosistem layanan publik digital
10. Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bengkulu, antara lain melalui:
    - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
    - Penanggulangan judi dan penyelundupan
    - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Sedangkan arah pembangunan berbasis Kawasan di Provinsi Bengkulu terbagi atas:

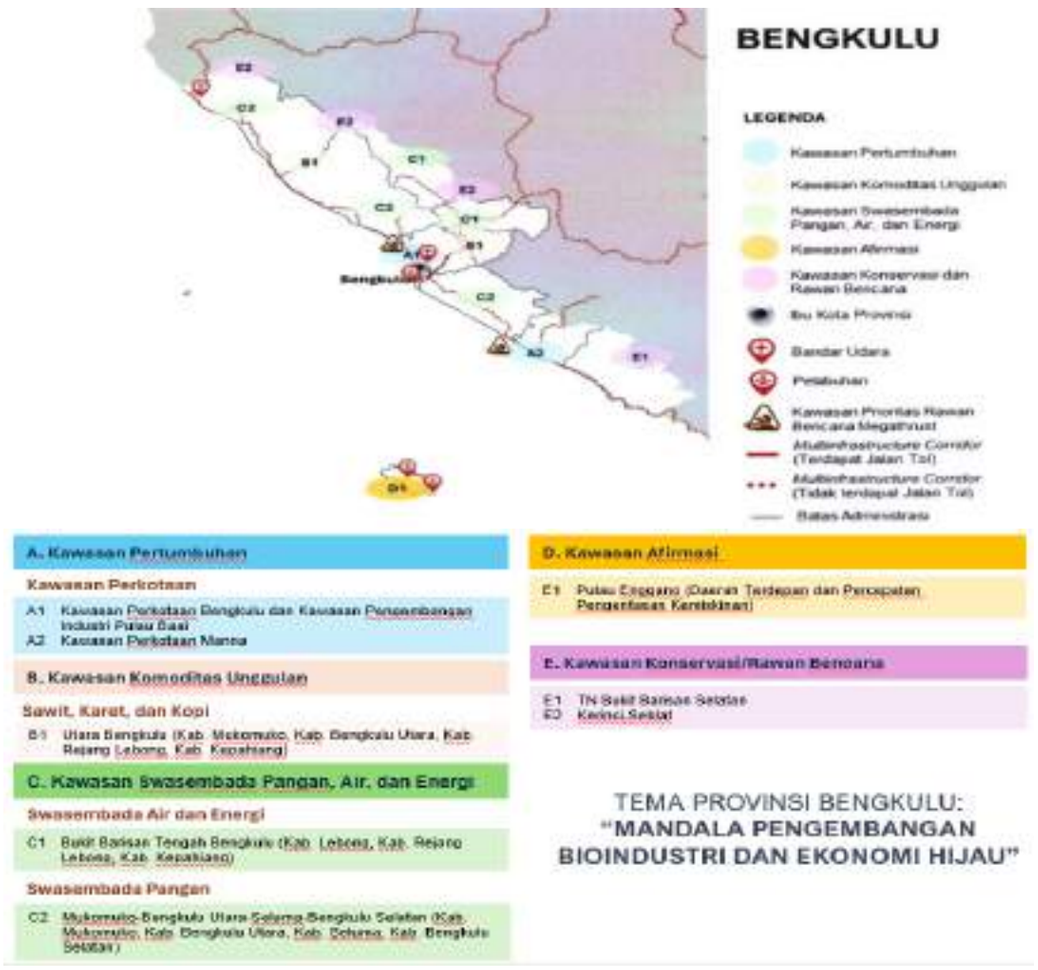

Gambar 3. 1 Tahapan Pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2030

Tahapan pembangunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 - 2030 merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 - 2030, adapun tahapan pembangunan Provinsi Bengkulu 2025 -2029 sebagi berikut :

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Industri Pulau baai berlokasi di Kota Bengkulu dengan intervensi :
   a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bengkulu, antara lain melalui:
      - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu.
      - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
      - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
      - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
   b. Pembangunan Pelabuhan Pulaubaai, yang terintegrasi dengan pengembangal kawasan industri Pulaubaai.
   c. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
   d. Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan
   e. Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema
   f. Pembangunan Jalan Tol
   g. Pembangunan TPST Regional Bengkulu-Seluma-Bengkulu Tengah
   h. Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Pulau Baai Bengkulu
   i. Pembangunan rumah murai bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bengkulu (PHTC)
   j. Preservasi jalan ruas Bengkulu-Tais, Bengkulu-Mukomuko, dan Bengkulu-Argamakmur-Tubei
   k. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu (PHTC)

l. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Bengkulu (PHTC)

2. Kawasan Perkotaan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan intervensi :
   a. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Manna, antara lain melalui :
      - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
      - Pemenuhan layanan dasar air minum, Penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
      - Penyediaan, dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
      - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

B. Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kopi

Kawasan komoditas unggulan sawit berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dengan dengan intervensi :

a. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi)
b. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi)
c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi)
d. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi)
e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, kopi, dan karet
f. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

1. Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan berlokasi di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dengan intervensi :
   a. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau, DAS Bengkulu, dan DAS Neles.
   b. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau, DAS Bengkulu, DAS Nelas, dan Danau Tes.
   c. Revitalisasi Danau Tes

d. Peningkatan cadangan dan produktivitas batu bara pada Formasi Lemau
e. Pembangunan infrastruktur PLTP Hululais
f. Pembangunan infrastruktur PLTP Kepahiang
g. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Lubuklinggau-Pulau Baai

2. Kawasan Swasembada Pangan berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan intervensi :
   a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I. Air Lais Kuro Tidur, D.I. Air Manjuto, D.I. Air Seluma, D.I. Air Nipis Seginim
   b. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
   c. Peningkatan daya guna Iahan pertanian (intensifikasi)
   d. Peningkatan produktivitas peternakan/ pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
   e. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
   f. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
   g. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita (Kabupaten Bengkulu Utara)
   h. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/ pakan organik
   i. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
   j. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik

dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

k. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangkaih diru pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
l. Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani

D. Kawasan Afirmasi

Kawasan Afirmasi berlokasi di Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) Kabupaten Bengkulu Utara dengan intervensi :

a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik pedesaan, serta rumah layak huni) , serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
b. Peningkatan ketahanan bencana
c. Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar/Trans Enggano
d. Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kelapa) dan perikanan
e. Pembangunan rumah sakit berkualitas di Pulau Enggano (PHTC)
f. Peningkatan 6A *ecotourism* di Kawasan Hutan Enggano
g. Peningkatan 6A *cultural tourism* Enggano
h. Pengembangan pusat penelitian biodiversitas tropis Enggano
i. Penguatan Pulau Enggano sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar
j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
k. Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan

E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

1. Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

   Kawasan Konservasi berlokasi di Taman Nasional (TN) Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Kaur) dan Taman Nasional (TN) Kerinci-Sebelat (Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu

Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong) dengan intervensi :

a. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
b. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan
c. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
d. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
e. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
f. Penguatan pengelolaan hutan lestari
g. Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
h. Perlindungan dan pengamanan hutan
i. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
j. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
k. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

2. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

   Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami berlokasi di Bengkulu dengan intervensi :

   a. Penerapan *Nature-Based Solution* dan *Gray Infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami
   b. Retrolit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik

Selain hal tersebut diatas terdapat daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC) di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

3.2.1.4. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 – 2029

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu 2025 – 2029, dirumuskan beberapa strategi Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan guna mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misinya, strategi pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi pertama RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari

KKN, berbudaya dan religius, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang dicapai dengan strategi yaitu :

1. Penguatan fondasi pelaksanaan e-Governance serta penguatan kerjasama antar lembaga
2. Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi
3. Evaluasi sistem e-government dan peningkatan kualitas kapasitas SDM
4. Penguatan implementasi kebijakan antikorupsi dan memperluas partisipasi masyarakat
5. Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program

Misi kedua RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 adalah mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah dengan bertujuan meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah dengan sasaran meningkatnya indeks infrastruktur dasar dan meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah yang dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Memperkuat kajian kesiapan kualitas dan kelayakan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis
2. Implementasi Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis
3. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur daerah
4. Percepatan pengembangan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
5. Monitoring, Pengembangan dan Penyempurnaan Infrastruktur

Misi ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 adalah terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan rasa aman dengan bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis dengan sasaran meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya Kemiskinan dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Penguatan fondasi kebijakan dan kerangka kerja untuk peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan akses penyandang disabilitas. Dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui:
    a. Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
    b. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;

c. Peningkatan partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
d. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; dan
e. Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.

Sedangkan kebijakan untuk akses penyandang disabilitas dilaksanakan melalui :

a. Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik;
b. Penyediaan Layanan Publik Inklusif;
c. Penguatan Regulasi dan Implementasi Kebijakan;
d. Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas;
e. Penguatan Kapasitas dan Kemandirian;
f. Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak; dan
g. Penguatan Data dan Informasi Disabilitas.

2. Penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kualitas akses pendidikan dan pelatihan yang inklusif.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur sosial dan akses layanan yang inklusif untuk mendorong produktivitas dan daya saing SDM.
4. Peningkatan produktivitas dan penguatan daya saing SDM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui keterbukaan akses pekerjaan tanpa diskriminasi.
5. Mengevaluasi dampak kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, serta merencanakan keberlanjutan program untuk masa depan.

Misi keempat RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 adalah Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya produktivitas sektor koperasi dan umkm terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya nilai investasi, stabilnya perekonomian daerah yang dilakukan dengan strategi yaitu:

1. Penguatan fondasi kebijakan dan Peningkatan Akses Modal untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan
2. Ekspansi dan diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, industri pengolahan, penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi investasi

3. Optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan daya saing produk unggulan berskala internasional serta pariwisata berkualitas yang berkelanjutan berbasis digital
4. Inovasi dan penguatan sistem kreatif hub melalui integrasi ekonomi lokal dan pasar global melalui industrialisasi
5. Terwujudnya Bengkulu sebagai daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru
6. Dukungan pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk mendukung UMKM, memperkuat ekonomi kreatif dan pariwisata

Sedangakan untuk sasaran meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan, dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Penguatan fondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan
2. Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran
3. Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui industrialisasi
4. Memperluas pasar global dan penerapan ekonomi sirkular
5. Menjadikan Bengkulu sebagai pusat agroindustri berkelanjutan

Dan untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim dan meningkatnya infrastruktur dan pembangkit ebt dilakukan dengan strategi yaitu :

1. Penguatan penegakkan kebijakan lingkungan dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan
2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berketahanan iklim
3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan
4. Penguatan kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pendanaan untuk Program Lingkungan
5. Evaluasi, Penyesuaian Kebijakan, dan Penyusunan Rencana Ke Depan

3.2.1.5. Strategi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8 % Pada Tahun 2030

Perekonomian Provinsi Bengkulu 2026-2030 diperkirakan mampu lebih tinggi dibandingkan baseline dengan salah satunya mendorong investasi langsung bidang infrastruktur umum, Pelabuhan, dan listrik. Selain itu, hilirisasi dan upaya peningkatan

pendidikan dapat memberikan dampak lebih tinggi. Berdasarkan simulasi skenario, realisasi proyek strategis infrastruktur utama (proyek kereta Batubara dan JTTS), Pembangunan PLTP dan revitalisasi pulau Baai dan Kawasan Industri mampu memberikan dorongan ekonomi tumbuh lebih tinggi, dan guna penyelarasan terhadap sasaran utama pembangunan Nasional yaitu Pendapatan perkapita menuju Negara Maju, dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8%. Provinsi Bengkulu merumuskan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan guna mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8% antara lain :

Tabel 3. 9 Strategi Pencapaian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Menuju 8% Provinsi Bengkulu 2030

Year	Baseline	Skenario Asumsi Makro	Strategi Pencapaian
2025	4,3 – 5,0	5.1 - 5.5	a. Pelaksanaan Program unggulan 1000 jalan mulus. b. Peningkatan infrastruktur pelabuhan pulau baai. c. Investasi dunia usaha
2026	4.3 - 5.0	5.2 - 5.8	a. Lanjutan Penyelesaian revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai tahap 1 (Pengerukan alur pelayaran -6.5 m) sesuai timeline b. Dimulainya pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai Tahap 2 (Pengerukan alur pelayaran ultimate di -12m serta pemulihan area abrasi dan normalisasi Sand Trap) c. Penyelesaian pembangunan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) d. Persiapan administrasi perizinan jalur KA batubara e. Persiapan Pembangunan PLTP Hululais f. Investasi dunia usaha
2027	4.3 - 5.1	6.2 - 6.5	Dampak investasi tahun sebelumnya ditambah: a. Dimulainya Pembangunan jalur KA batubara dan berlanjutnya Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) Tahap 2 b. Dimulainya Pembangunan PLTP Hululais c. Penyelesaian revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai termasuk Pengembangan Pulau Baai menjadi Kawasan industri d. Peningkatan produktivitas SDM dan hilirisasi industri kelapa sawit e. Investasi dunia usaha
2028	4.3 - 5.1	6.6 - 6.9	Dampak dari Pembangunan sebelumnya ditambah: a. Lanjutan pengerjaan pembangunan JTTS dan jalur KA batubara b. Mulai beroperasinya Pelabuhan Pulau

Year	Baseline	Skenario Asumsi Makro	Strategi Pencapaian
			Baai sebagai Kawasan Industri c. Mulai beroperasinya PLTP Hululais d. Peningkatan produktivitas SDM dan hilirisasi industri kelapa sawit e. Investasi dunia usaha
2029	4.3 - 5.1	7.2 - 7.4	Dampak dari Pembangunan sebelumnya ditambah: a. Berlanjutnya pengerjaan Pembangunan JTTS dan jalur KA b. Peningkatan produktivitas SDM dan hilirisasi industri kelapa sawit c. Investasi dunia usaha
2030	4.3 - 5.2	7.4 - 7.6	Dampak dari Pembangunan sebelumnya ditambah: a. Berlanjutnya pengerjaan Pembangunan JTTS dan jalur KA b. Peningkatan produktivitas SDM dan hilirisasi industri kelapa sawit c. Investasi dunia usaha

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Provinsi Provinsi Bengkulu adalah pendekatan perencanaan pembangunaan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daera. Inilah titik pusat (core) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik. Prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius dengan program prioritas antara lain:
   a. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan proyek-proyek pembangunan.
   b. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Penataan Birokrasi.
   c. Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.
   d. Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan program prioritas antara lain:
   a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Penegakkan Demokrasi, Keamanan dan Ketertiban.
   b. Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, sejahtera, dan berbudaya.
3. Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah dengan program prioritas antara lain:
   a. Percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar.
   b. Pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dengan peningkatan konektivitas serta pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur strategis.
4. Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas dengan program prioritas antara lain:
   a. Peningkatan perlindungan, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial yang inklusif.
   b. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas kesehatan.
   c. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
   d. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja.

e. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Penyediaan hak-hak Disabilitas.

5. Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal dengan program prioritas antara lain:
   a. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian.
   b. Pengembangan Ekonomi Kreatif serta peningkatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Pariwisata Daerah.
   c. Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi.
   d. Peningkatan iklim investasi.
6. Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan dengan program prioritas antara lain:
   a. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan mandiri.
   b. Hilirisasi pangan lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui industrialisasi.
7. Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim dengan program prioritas antara lain :
   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
   b. Peningkatan Ketahanan dan Kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim.
   c. Pengembangan Desa Wisata Hijau.

3.4. Program Unggulan Provinsi Bengkulu 2025 – 2029

1. Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi melalui Program Seribu Jalan Mulus.

Program “Seribu Jalan Mulus” merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi guna mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Bengkulu memiliki total jalan sepanjang 1.330,16 km. Data kondisi jalan terbaru menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 62% jalan yang berstatus mantap (berkualitas baik). Sebagian besar ruas jalan provinsi memiliki lebar antara 4,5 hingga 5 meter, yang masih di bawah standar nasional untuk jalan provinsi. Pada tahun 2025, program ini akan menanganani sebanyak

22 ruas jalan dengan total panjang 142,30 km. Dengan pencapaian ini, diperkirakan persentase jalan mantap akan meningkat menjadi sekitar 70% pada akhir 2025. Program telah direncanakan hingga tahun 2028, dengan target ambisius yaitu mencapai 100% jalan mantap di seluruh provinsi. Strategi penanganan dibagi menjadi dua fase:

- Tiga tahun pertama difokuskan pada peningkatan kualitas permukaan jalan agar mulus dan layak dilalui.
- Dua tahun terakhir difokuskan pada pelebaran ruas jalan dan penambahan lajur jalan guna memenuhi standar nasional yang berlaku.

Meskipun sudah ada peningkatan kualitas jalan, masih terdapat banyak jembatan dengan lebar yang menyempit dan belum memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Hal ini menjadi salah satu perhatian khusus dalam program perbaikan infrastruktur.

Dengan konsistensi alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi setiap tahun, diharapkan target 100% jalan mantap pada tahun 2028 dapat tercapai. Target ini juga sejalan dengan target nasional yang menetapkan pencapaian 82% jalan provinsi mantap pada akhir periode RPJMN.

Sebagian dana untuk program ini berasal dari APBD Provinsi, sementara dana dari Insentif Daerah (Inpres) saat ini baru difokuskan pada wilayah Bengkulu Utara dan Seluma. Pemerintah Provinsi terus berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan dan kerja sama lintas sektor agar program dapat berjalan secara optimal dan tepat waktu.

2. **Perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC) dengan menjamin Seluruh Masyarakat Provinsi Bengkulu Mendapatkan BPJS Gratis.**

   Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata melalui implementasi Program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjamin seluruh warga, khususnya masyarakat miskin dan rentan, untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan gratis melalui JKN-KIS BPJS Kesehatan, yang sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2025, dukungan anggaran Pemprov Bengkulu terhadap Program JKN meliputi:

   - Dukungan Anggaran untuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 berjumlah : 52.112 Jiwa

- Anggaran Untuk Kontribusi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI JK berjumlah: 860.000 jiwa
- Total Anggaran untuk Program JKN Provinsi tahun 2025 : Rp. 44.550.000.000-

Target nasional dalam RPJMN 2025 mencakup cakupan peserta 98,6% dan peserta aktif 80%, dengan fokus pada penguatan sistem JKN dan reaktivasi peserta non-aktif. Sementara itu, target RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029menunjukkan peningkatan bertahap tingkat keaktifan peserta JKN dari 78,4% (2024) menjadi 83% (2029).

Pelaksanaan UHC di Bengkulu juga didukung oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Bantu Rakyat Program JKN-KIS, sebagai bagian dari program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2029. URC dibentuk untuk merespons keluhan masyarakat yang belum memiliki KIS, serta memperkuat pendampingan dan fasilitasi terhadap proses kepesertaan dan layanan kesehatan. Adapun tugas dari Tim URC adalah sebagai berikut :

a) Memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan akses Kepesertaan dan Jaminan pelayanan kesehatan.
b) Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional KIS
c) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dan keluhan masyarakat Untuk mendapatkan akses Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan
d) Berkoordinasi dengan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tujuan dan tempat pelayanan kesehatan
e) Bila dibutuhkan dalam kondisi tertentu petugas URC dapat memfasilitasi warga masyarakat yang sakit untuk dirujuk ke Faskes
f) Meminta kepada keluarga pasien untuk menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam pengurusan kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan
g) Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu an. Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan menyertakan Dokumen Adminstrasi diantaranya Surat Keterangan di Rawat di Rumah Sakit/Puskesmas
h) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala paling lambat Minggu pertama setiap bulan

kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

i) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Unit Reaksi Cepat guna meningkatkan kualitas program Bantu Rakyat KIS Jaminan Kesehatan Provinsi Bengkulu

Penempatan Tim URC telah menjangkau seluruh rumah sakit dan puskesmas se-Provinsi Bengkulu, serta pusat koordinasi di Balai Raya Semarak. Program UHC ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan finansial dan kemudahan akses layanan kesehatan, tetapi juga mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada aspek harapan hidup sehat. Dengan perencanaan berbasis data dan penganggaran yang konsisten, Provinsi Bengkulu menargetkan terwujudnya cakupan kesehatan semesta yang adil dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Penyediaan Ambulans Gratis.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan menetapkan Program Penyediaan Ambulans Gratis sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kegawatdaruratan medis bagi masyarakat desa, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Program ini merupakan bagian dari Program Bantu Rakyat yang diinisiasi oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Mian. Hingga 29 Juli 2025, sebanyak 100 dari total 130 unit ambulans telah tiba di Balai Raya Semarak, sementara sisanya akan menyusul pada awal Agustus 2025. Ambulans desa disediakan secara gratis, dan akan difungsikan tidak hanya untuk keadaan darurat medis, tetapi juga pengantaran jenazah, kegiatan sosial, serta respons terhadap bencana.

Setiap desa ditargetkan memiliki satu unit ambulans, dengan penyerahan kendaraan dilakukan oleh Gubernur kepada para Bupati, untuk kemudian didistribusikan ke desa-desa sesuai kebutuhan. Pengemudi ambulans akan diberikan pelatihan terkait pengoperasian dan pengelolaan kendaraan, guna memastikan pelayanan yang optimal dan bertanggung jawab. Persyaratan pengajuan ambulans desa dilakukan melalui tahapan berikut:

a) Surat permohonan dari Bupati masing-masing kabupaten.

b) Surat pernyataan dari Kepala Desa yang berisi komitmen untuk:
   - Menggunakan ambulans desa semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
   - Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan ambulans.
   - Menyiapkan sopir yang profesional, tertib administrasi, dan bertanggung jawab.
   - Tidak memungut biaya apapun dari masyarakat yang menggunakan ambulans.

Salah satu realisasi awal program adalah penyaluran ambulans ke Pulau Enggano pada 22 Juli 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang bidang kesehatan.

Sumber pendanaan utama berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan dukungan tambahan yang memungkinkan dari DAK Kesehatan, hibah mitra pembangunan, CSR BUMN/BUMD, dan kerja sama donor. Program ini juga mencakup pengembangan sistem pemantauan digital, serta pelibatan SDM seperti sopir terlatih dan petugas kesehatan pendamping. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan:

- Respons terhadap kondisi darurat medis di desa dapat lebih cepat.
- Angka kematian akibat keterlambatan penanganan medis menurun.
- Layanan rujukan kesehatan menjadi lebih kuat dan merata.

Secara keseluruhan, Program Ambulans Desa Gratis menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, memperkuat sistem rujukan, dan mempercepat tercapainya Universal Health Coverage (UHC) yang menyeluruh dan berkeadilan di Provinsi Bengkulu.

4. Penyediaan Moda Angkutan Darat Perkotaan.

Penyediaan Moda Angkutan Darat Perkotaan Gratis di Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik, khususnya bagi pelajar dan masyarakat umum di kawasan perkotaan. Program ini dikembangkan dalam bentuk skema Buy The Service (BTS), di mana pemerintah menyediakan layanan bus kota secara gratis bagi masyarakat, dengan biaya operasional seperti bahan bakar ditanggung melalui intervensi APBD. Dalam Program ini akan bus BTS yang beroperasi di Kota Bengkulu dengan rute dan jadwal reguler, berputar dalam interval waktu 15 menit. Pada pagi hari, prioritas pengguna adalah pelajar agar mereka tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, sementara pada siang

hari bus juga melayani masyarakat umum. Skema ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan, mengurangi risiko kecelakaan pelajar, serta menjadi insentif nyata atas transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai penguatan, Dinas Perhubungan melalui Bidang Angkutan telah menyampaikan rencana revitalisasi terhadap 10 unit bus "Ayo" yang sebelumnya tidak lagi beroperasi. Dari jumlah tersebut, 4 bus telah dialokasikan ke wilayah Enggano, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Seluma, guna memperluas jangkauan layanan hingga ke kabupaten. Seluruh unit yang direvitalisasi akan digunakan untuk mendukung angkutan pelajar, termasuk melalui proses rehabilitasi fisik dan teknis. Selain itu, kajian teknis terhadap rute yang dilayani akan segera dilaksanakan untuk memastikan efisiensi dan kebutuhan riil masyarakat. Dalam lima tahun ke depan, program ini diproyeksikan akan terus diperluas melalui penambahan armada, optimalisasi rute layanan berbasis kebutuhan masyarakat, serta integrasi layanan dengan moda transportasi lainnya sebagai bentuk pembangunan sistem transportasi terpadu.

Program ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan layanan publik yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan, serta menjadi pendorong terciptanya budaya transportasi massal yang modern di daerah.

5. Stabilitasi harga dan ketersediaan BBM subsidi di Pulau Enggano.

Program stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar, khususnya di Pulau Enggano, merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjamin keadilan akses energi bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Saat ini, harga BBM subsidi di Enggano kerap mengalami ketimpangan signifikan dibandingkan wilayah daratan karena tantangan distribusi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur energi. Hal ini berdampak pada beban ekonomi masyarakat lokal, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM dengan harga terjangkau.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengupayakan intervensi melalui koordinasi lintas sektor dengan BPH Migas, Pertamina, dan Kementerian ESDM untuk memastikan agar distribusi BBM subsidi dapat dilakukan secara rutin dan merata di Pulau Enggano. Skema transportasi laut, penyediaan titik distribusi resmi (sub-penyalur), serta subsidi biaya angkut menjadi strategi yang dirumuskan untuk mengurangi disparitas harga. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi yang

mengikat serta pengawasan ketat terhadap rantai distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Program ini diharapkan tidak hanya menstabilkan harga BBM, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat Enggano melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya operasional.

6. Merdeka Ijazah Bagi Anak Bangsa.

Program Merdeka Ijazah bagi Anak Bangsa merupakan kebijakan progresif yang diinisiasi oleh Gubernur Bengkulu sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat pemenuhan hak dasar atas pendidikan. Program ini bertujuan untuk menjamin seluruh lulusan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menerima ijazah tanpa hambatan administratif maupun persoalan biaya, termasuk tunggakan yang selama ini kerap menjadi kendala.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan, Gubernur Bengkulu telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 900/010/Dikbud Tahun 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah di satuan pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Instruksi ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghapuskan praktik-praktik penahanan ijazah, yang selama ini menghambat akses peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Saat ini, kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu mencakup 232 sekolah negeri, terdiri atas 110 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), 66 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan 56 Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN).

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, seluruh sekolah tersebut telah melaksanakan kebijakan larangan penahanan ijazah dengan baik dan tanpa kendala yang berarti. Mulai tahun 2025, pelaksanaan program ini akan diperkuat dengan integrasi sistem e-Ijazah dari Kementerian Pendidikan, yang memungkinkan lulusan untuk mengunduh ijazah dalam bentuk digital (PDF) secara mandiri, tanpa memerlukan proses legalisasi manual.

Program Merdeka Ijazah juga saling melengkapi dengan Program Sekolah Gratis yang telah lebih dahulu berjalan. Keduanya memiliki semangat yang sama, yaitu menghapuskan hambatan dalam akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa Program Sekolah Gratis hanya mencakup pembiayaan dari dana BOS dan APBD, yang meliputi biaya operasional harian, kegiatan belajar-mengajar, serta pembelajaran dasar. Biaya di luar komponen tersebut, seperti kegiatan wisata

edukatif (study tour), wisuda, serta pungutan tidak resmi lainnya tidak dibenarkan dan telah dilarang melalui kebijakan internal Dinas Pendidikan.

Melalui Program Merdeka Ijazah, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Tidak boleh ada lagi anak bangsa yang kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, atau berkembang hanya karena ijazahnya tertahan. Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Provinsi Bengkulu, untuk bersama-sama mendukung keberlanjutan dan penguatan program ini, demi menciptakan masa depan generasi muda Bengkulu yang lebih baik dan berdaya saing.

7. Pengangkatan dan Penyantunan Anak Yatim.

Program Pengangkatan dan Penyantunan Anak Yatim tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Bengkulu merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi sebagai wujud kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan kelompok siswa rentan. Program ini menyasar siswa kelas X hingga XII yang berstatus yatim piatu serta berasal dari keluarga tidak mampu. Pendataan siswa penerima dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melalui pengumpulan data dari seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan provinsi. Proses verifikasi dan sinkronisasi data sedang berjalan untuk memastikan bahwa program menyasar anak-anak yang benar-benar layak secara faktual. Sertifikasi penerima manfaat akan diterbitkan oleh Dinas Sosial, sedangkan penyusunan landasan hukum program ini sedang diproses oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) dalam bentuk Peraturan Gubernur. Draf petunjuk pelaksanaan (Juklak) juga telah disusun oleh Dikbud dan menunggu pembahasan lebih lanjut antar instansi.

Program ini telah didukung oleh sejumlah dokumen resmi, seperti surat dari Pj. Sekretaris Daerah, surat undangan launching program dari Plt. Kadis Dikbud, serta surat perihal verifikasi faktual data. Adapun pelaksanaan program direncanakan mulai Agustus 2025 setelah seluruh komponen kebijakan dan administrasi siap. Koordinasi antara Dikbud, Dinsos, dan Pemkesra akan terus diperkuat untuk menjamin efektivitas pelaksanaan. Saat ini link pengumpulan data telah disebar ke sekolah-sekolah, namun masih dibutuhkan verifikasi kelayakan secara lebih mendalam. Sementara itu, perlu ditekankan pentingnya kejelasan legalitas serta kebutuhan akan Juklak dan Juknis sebagai pedoman implementasi.

Secara strategis, program ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat perlindungan sosial berbasis pendidikan, sekaligus membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk berperan sebagai orang tua asuh. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang baik, program ini berpotensi menjadi model replikasi nasional untuk perlindungan anak yatim dalam konteks keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

8. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi dan UKM serta Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Program penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa merupakan salah satu strategi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat ekonomi lokal, memperluas kemandirian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, seperti UMKM, pariwisata, dan pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan terintegrasi dalam kerangka One Village-One Product (OVOP), pengembangan Desa Wisata, serta penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hingga saat ini, terdapat 310 Desa Wisata di Provinsi Bengkulu yang akan diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan jenis dan potensi. Dinas Pariwisata sebagai pengampu program mencatat bahwa desa wisata dapat mengembangkan produk baik berupa barang (produk olahan, kerajinan) maupun jasa (atraksi wisata, guiding, homestay, dll). Contohnya, Desa Wisata Belitar Seberang memiliki keunggulan produk olahan seperti gula aren dan kerajinan lokal, serta jasa wisata seperti canyoning di Air Terjun Trimandiri Sakti. Saat ini, pemetaan potensi desa dan produk unggulan tengah disusun sebagai bagian dari strategi pengembangan terpadu.

Pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Pariwisata. Untuk memperkuat ekonomi kreatif (ekraf) desa, dilakukan pula klasifikasi produk berbasis limbah dan sumber daya lokal, seperti keripik kolang-kaling, gula semut, dan kerajinan dari limbah kayu. Klasifikasi desa wisata tingkat provinsi juga mengacu pada keikutsertaan desa dalam ajang lomba tingkat nasional, sesuai kebijakan yang disarankan oleh Dinas Pariwisata dan Badan Keuangan Daerah.

Dari sisi penguatan usaha desa, Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih di setiap desa untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku UMKM desa. Saat ini, terdapat 1.505 Koperasi Merah Putih tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu

yang menjadi motor penggerak UMKM di 513 desa yang telah terdata.

Sementara itu, dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu, hasil pemeringkatan terbaru menunjukkan bahwa hanya 6 BUMDes yang telah masuk kategori Maju, yakni tersebar di Bengkulu Utara (3), Rejang Lebong (2), dan Seluma (1). Mayoritas BUMDes masih dalam kategori Perintis, yang mencerminkan tantangan serius di aspek sumber daya manusia, kelembagaan, dan regulasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah melaksanakan pembinaan intensif di empat kabupaten (Kaur, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Seluma), dengan strategi memperkuat kapasitas melalui pelatihan, pendampingan legalitas, serta penyusunan regulasi BUMDes.

Permasalahan dan Solusi:

- Permasalahan SDM → Solusi: Pelatihan keterampilan pengelolaan usaha dan keuangan.
- Permasalahan regulasi → Solusi: Pendampingan legalitas kelembagaan dan penyusunan AD/ART.
- Permasalahan kelembagaan → Solusi: Penguatan struktur organisasi dan pemetaan unit usaha desa berbasis potensi lokal.

Melalui program ini, Pemprov Bengkulu menargetkan terjadinya lonjakan BUMDes kategori Maju, penguatan konektivitas UMKM desa ke pasar digital, serta peningkatan kontribusi sektor pariwisata desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan sinergi dari dana desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kolaborasi dengan stakeholder swasta dan lembaga keuangan mikro.

9. Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi, penguatan kelembagaan petani-nelayan, serta pengembangan pusat-pusat pengolahan berbasis kawasan agropolitan. Program ini disusun sebagai respon terhadap tantangan lapangan seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses alat produksi, dan rendahnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan.

Program difokuskan pada distribusi paket bantuan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan benih unggul untuk subsektor pangan, hortikultura, dan perkebunan. Upaya ini sejalan dengan peta jalan (roadmap) yang telah disusun hingga 2029 dan mencakup penyaluran bantuan sarana produksi secara

bertahap berdasarkan klaster komoditas dan wilayah produksi utama.

Dari sisi sektor perkebunan, perhatian khusus diberikan pada komoditas sawit rakyat, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan petani namun masih menghadapi ketimpangan harga antara petani dan perusahaan inti. Oleh karena itu, Pemprov mendorong mekanisme stabilisasi harga sawit dan memperkuat posisi tawar petani sawit melalui pengembangan kelembagaan kemitraan dan skema harga referensi. Hal ini bertujuan mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan petani.

Selain produksi hulu, program ini juga mendorong peningkatan nilai tambah (value added) melalui pengembangan sentra pengolahan berbasis kawasan agropolitan, khususnya pada komoditas unggulan seperti kopi, kelapa, pisang, dan hasil laut. Sentra ini akan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan, pengemasan, serta dukungan pemasaran digital dan logistik. Contohnya, di wilayah Enggano, kegiatan tanam tahap awal sudah dimulai pada bulan September–Oktober dengan dukungan benih dan infrastruktur pendukung dari DTPHP.

Implementasi program ini diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta membuka peluang kerja baru di sektor pengolahan dan distribusi. Dampak lainnya adalah perbaikan indikator NTP yang telah dimonitor secara tahunan dan menjadi tolok ukur keberhasilan intervensi pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu.

10. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kenaikan TPP, pemberian insentif serta penyediaan jasa medis.

Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya melalui peningkatan penghasilan langsung atau take home pay (THP). Latar belakang pelaksanaan program ini didasarkan pada pentingnya menjaga semangat, motivasi, dan kinerja ASN, yang merupakan penggerak utama roda pemerintahan daerah. ASN yang sejahtera diyakini mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, profesional, dan akuntabel. Strategi utama yang diusung mencakup kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), pemberian insentif tertentu, serta penyediaan layanan jasa medis yang mendukung kesehatan dan produktivitas ASN.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penyesuaian nilai TPP secara bertahap dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah dan regulasi yang berlaku. Untuk tahun anggaran 2025, alokasi TPP dalam APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 235.144.968.000,- per tahun. Angka ini belum termasuk tunjangan lainnya seperti Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bersyarat (Tamsil). Pelaksanaan program ini akan terus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah serta mengacu pada regulasi dan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup program dibatasi secara spesifik pada upaya peningkatan kesejahteraan ASN melalui penghasilan langsung, tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar pegawai negeri sipil sebagai bagian dari belanja wajib dan mengikat. Diharapkan, melalui program ini, kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat meningkat secara terukur dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi terhadap Peningkatan kinerja birokrasi, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

11. Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Khusus Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi

Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan menginisiasi program pengembangan layanan kesehatan spesialistik sebagai respons atas meningkatnya kasus penyakit katastropik, khususnya jantung, kanker, dan gagal ginjal. Program ini mendukung penguatan layanan rujukan dan Universal Health Coverage (UHC), dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pengadaan alat kesehatan.

Saat ini, pembangunan gedung layanan jantung telah dilaksanakan dalam dua tahap dan secara fisik hampir rampung. Namun, rumah sakit tersebut belum dapat beroperasi penuh karena :

- Prasarana pelayanan masih belum lengkap, seperti instalasi pusat oksigen, modular operating theatre (MOT), tempat tidur perawatan, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Belum tersedia alat kesehatan penunjang maupun alat utama untuk tindakan operatif (operasi jantung).
- Pelayanan dokter spesialis jantung masih mengandalkan kerja sama (MoU) dengan RS M. Hoesin Palembang. Sebagian besar tenaga kesehatan lainnya belum mengikuti pelatihan sesuai standar pelayanan penyakit jantung.

Terdapat empat jenis pelatihan yang menjadi standar minimal, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi RSUD M. Yunus dalam meningkatkan kapasitas SDM tersebut.

Sementara itu, Untuk Pelayanan Kanker di RSUD M. Yunus saat ini telah tersedia ruangan untuk pelayanan Radiotherapy, namun masih menunggu selesai perizinan dari BAPETAN dan alat pendukung lainnya yang belum lengkap. Telah tersedia beberapa jenis alat terapi pasien kanker yaitu :

- Perisai (Bunker) : ruangan khusus dengan dinding tebal yang melindungi pasien dan staf.
- Dosimeter : digunakan untuk mengukur paparan radiasi yang diterima pasien.
- Linear Accelerator (LINAC) : mesin yang memancarkan radiasi sinar-X intensitas tinggi untuk menghancurkan sel kanker.
- Brachytherapy : alat terapi radiasi internal dimana sumber radiasi ditempatkan di dalam atau dekat tumor.
- Kemoterapi : alat yang ditanamkan dibawah kulit untuk mempermudah pemberian obat kemoterapi.
- Alat CT Scan : Menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar detail tubuh, membantu mendeteksi tumor dan penyebarannya.

Sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan penyakit kanker di RSUD M. Yunus Bengkulu saat ini masih mengandalkan kerja sama (MoU) dengan RS Kanker Dharmais sebagai rumah sakit rujukan nasional. Namun, sebagian besar tenaga kesehatan belum mengikuti pelatihan yang menjadi standar pelayanan kanker. Untuk dapat melaksanakan pelayanan penyakit kanker dibutuhkan 4 komponen yaitu : Alat Kesehatan primer, alat Kesehatan penunjang, SDM (saat ini telah dokter spesialis onkologi radiasi), nanum belum tersedia perencanaan untuk pembangunan pengolahan limbah hasil radioaktif, yang akan diupayak pengusulan melalui dana DAK Fisik Kemenkes Tahun 2026.

Secara keseluruhan, RSUD M. Yunus dirancang menjadi rumah sakit rujukan provinsi dan pusat pengendalian penyakit katastropik di Bengkulu. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan SDM spesialis, sistem rujukan terpadu, serta alat kesehatan berteknologi tinggi. Pendanaan utama berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan potensi tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah kementerian, dan kerja sama investasi swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP). Diharapkan, rumah sakit ini mulai beroperasi bertahap pada 2026, mengurangi rujukan ke luar daerah, menekan

pembiayaan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien kronis di Bengkulu.

12. Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terbengkalai merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menata, menghidupkan kembali, serta memaksimalkan penggunaan aset daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset agar memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi faktual di lapangan, di mana sejumlah aset milik pemerintah provinsi dalam kondisi rusak, tidak terurus, atau bahkan terbengkalai, sehingga justru menjadi beban anggaran, khususnya dalam hal pemeliharaan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah sistematis berupa identifikasi, penilaian, dan penyusunan rencana pemanfaatan kembali, baik melalui pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa contoh aset yang telah masuk dalam skema ini antara lain:

- Taman Remaja (saat ini telah dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta),
- Bengkulu Indah Mall (BIM),
- Lahan di sisi kiri Stadion Semarak yang direncanakan akan dikembangkan menjadi pusat sarana olahraga.

Pelaksanaan program ini direncanakan dimulai secara bertahap pada tahun 2025, dengan cakupan aset yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Aset-aset yang telah teridentifikasi untuk ditindaklanjuti antara lain:

- Mess Pemda,
- Lahan Nala Cottage,
- Bangunan tidak terpakai,
- Ribuan unit kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat (dari total 3.908 unit).

Seluruh aset tersebut saat ini sedang dalam proses penilaian kelayakan untuk menentukan skema optimalisasi yang tepat, baik melalui pemanfaatan kembali, kerja sama, maupun penghapusan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Ruang lingkup program ini difokuskan pada aset yang memiliki potensi untuk menambah PAD. Sementara itu, aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan ditangani melalui program lain yang relevan.

Sumber pembiayaan program berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan peluang penguatan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk potensi kerja sama dengan pihak swasta dan investor melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bahwa melalui program ini, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Selain mendukung peningkatan PAD, program ini juga diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

13. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu strategi kunci Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Fokus utama diarahkan pada revitalisasi peran strategis PT. Bengkulu Impor Ekspor (PT. BIMEX) sebagai BUMD andalan provinsi yang memiliki potensi besar untuk menjadi mitra utama dalam pembangunan kawasan industri dan kerjasama investasi multilateral. Saat ini, PT. BIMEX tengah didorong untuk menjalin kemitraan dengan para investor, baik nasional maupun internasional, guna mengakselerasi pengembangan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu.

Keterlibatan aktif PT. BIMEX dalam mendukung pengembangan kawasan industri diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect), khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain membuka ruang investasi dan aktivitas ekonomi baru, penguatan kelembagaan dan manajemen bisnis PT. BIMEX juga menjadi bagian dari upaya untuk menjadikan BUMD tidak hanya sebagai instrumen bisnis daerah, tetapi juga sebagai lokomotif pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah provinsi akan memastikan adanya penguatan regulasi, model bisnis, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel agar BUMD seperti PT. BIMEX dapat bertransformasi menjadi entitas yang kompetitif dan berdampak nyata bagi perekonomian masyarakat Bengkulu.

14. Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi program ketahanan pangan daerah melalui dua strategi utama, yakni pencetakan sawah baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan

sistem irigasi pertanian. Program ini bertujuan memperluas lahan tanam produktif, meningkatkan ketersediaan pangan lokal, serta memperkuat daya tahan petani terhadap perubahan iklim dan fluktuasi produksi.

Pada tahun 2025, Provinsi Bengkulu mendapatkan dukungan untuk pencetakan sawah baru seluas 2.200 hektare, yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Launching kegiatan ini telah dilakukan di Pulau Enggano dengan luas awal 808 hektare, sebagai simbol dimulainya perluasan area tanam pangan secara bertahap di daerah terpencil. Kegiatan ini tidak hanya mencetak lahan, tetapi juga disertai dengan penyediaan sarana-prasarana produksi seperti bantuan benih padi, pupuk, pengolahan tanah (alsintan), serta pendampingan teknis dari petugas lapangan.

Hingga pertengahan tahun, Sistem Informasi Data (SID) menunjukkan bahwa dari total target 2.200 hektare, sebanyak 1.200 hektare telah tervalidasi dan siap masuk ke tahapan pengolahan lahan dan penanaman. Lokasi utama pelaksanaan CSB untuk tahun ini berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, dan Rejang Lebong, berdasarkan ketersediaan lahan tidur, kesiapan kelompok tani, serta akses terhadap sumber air.

Sebagai penunjang keberhasilan program CSB, Pemprov juga melakukan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi teknis dan setengah teknis, baik primer maupun sekunder, di wilayah yang menjadi lokasi prioritas CSB. Upaya ini penting untuk memastikan keberlangsungan masa tanam, efektivitas distribusi air, dan stabilitas hasil produksi pangan.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan produksi beras lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pangan luar daerah, serta membuka lapangan kerja baru di sektor hulu pertanian. Selain itu, kegiatan ini mendukung upaya nasional dalam memperkuat cadangan pangan strategis dan menghadapi potensi krisis pangan global.

Sumber pendanaan program berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian dan irigasi, serta skema pendanaan lain yang tidak mengikat. Ke depan, Pemprov akan terus memperluas cakupan program dan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencetak lebih banyak sawah baru secara berkelanjutan.

15. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Saat ini wilayah Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang relatif rukun, damai, harmoni, dan tidak termasuk wilayah konflik. Kondisi ini terwujud melalui keberhasilan menjaga

harmoni sosial dan moderasi beragama di tengah keberagaman masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah Desa Rama Agung di Kabupaten Bengkulu Utara, yang sejak 2018 ditetapkan sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama karena berhasil memelihara kehidupan lintas iman secara damai di tengah keberagaman suku dan agama.

Kerukunan di Provinsi Bengkulu juga ditopang oleh peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi melalui Kesbangpol dan Kanwil Kemenag terus memperkuat kapasitas FKUB dengan pelatihan resolusi konflik, fasilitasi dialog antarumat, dan penyusunan regulasi pendukung. Anggaran APBD khusus juga disiapkan untuk mendukung kegiatan lintas iman. Namun demikian, upaya menjaga kerukunan masih menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah melemahnya sikap toleran, fanatisme agama, kepentingan politik yang mengatasnamakan agama tertentu, radikalisme, penyalahgunaan media sosial, serta perbedaan interpretasi ajaran agama.

Studi di Kota Bengkulu juga mengungkap bahwa efektivitas FKUB dalam menyentuh akar permasalahan masyarakat masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi dan keterlibatan langsung. Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bengkulu bersama Kemenag dan Kesbangpol menginisiasi sejumlah program konkret:

- Penguatan FKUB dan dialog lintas iman.
- Pelatihan resolusi konflik dan moderasi beragama bagi tokoh agama, pemuka adat, dan pemuda lintas agama untuk membangun generasi moderat.

Program prioritas Kemenag seperti revitalisasi KUA, transformasi digital layanan agama, penguatan pondok pesantren, dan Indeks Religiusitas untuk mitigasi konflik sosial keagamaan. Dialog Kebangsaan dan sosialisasi Pilkada damai di berbagai kabupaten seperti Kaur dan Bengkulu Tengah untuk mencegah politik identitas dan radikalisme menjelang kontestasi politik.

Kegiatan simbolik lintas agama, seperti Dharma Santi Nyepi 2025 yang dihadiri Forkopimda dan perwakilan berbagai agama, sebagai bentuk konkret solidaritas spiritual lintas iman. Dalam aspek regulasi, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 telah mengatur pembentukan FKUB dari tingkat provinsi hingga desa, termasuk mekanisme dialog serta penanganan konflik berbasis keagamaan. Ke depan, fokus peningkatan kerukunan diarahkan pada peningkatan pemahaman pluralisme, pencegahan ekstremisme dan intoleransi, serta memperkuat keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan

moderasi beragama. Diperlukan sinergi antara Pemprov, Kemenag, FKUB, dan masyarakat sipil agar kerukunan tidak hanya menjadi simbol, tetapi bagian dari budaya hidup masyarakat Bengkulu secara berkelanjutan.

16. Peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulai Baai, Bandara Fatmawati, dan Kereta Api.

Program peningkatan infrastruktur transportasi di Provinsi Bengkulu fokus pada tiga fasilitas utama, yaitu Pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan jalur Kereta Api. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah dermaga ASDP. Saat ini, sedang direncanakan rehabilitasi fasilitas laut (dermaga) dan fasilitas darat (jalan akses ke dermaga), sehingga diharapkan dapat memperbaiki kondisi pelabuhan. Pemerintah Provinsi tetap melakukan koordinasi intensif serta menjalin kerja sama terkait pengelolaan pelabuhan, termasuk penanganan pendangkalan alur pelayaran agar tetap aman dan lancar.

Penambahan fasilitas berupa Garbarata pada Bandara Fatmawati sedang dalam tahap proses lelang, menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan fasilitas yang lebih modern dan efisien. Meskipun belum ada detail khusus terkait anggaran atau tahap konstruksi, Bandara Fatmawati menjadi fokus utama peningkatan konektivitas udara untuk mempercepat mobilitas penumpang dan barang di Provinsi Bengkulu. Pengembangan bandara disusun untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan infrastruktur daerah dan sebagai meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya mencari investor untuk pengembangan jalur kereta api. Namun, saat ini data teknis yang lengkap, termasuk produk unggulan dan alur operasional, masih dalam tahap penyusunan agar dapat meyakinkan dan menarik minat investor membangun jalur kereta api. Rencana pembangunan kereta api di Provinsi Bengkulu sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian NAsional (RIPNAS).

Saat ini alokasi dana untuk ketiga infrastruktur ini masih dalam proses perencanaan dan penyesuaian. Pemerintah Provinsi terus melakukan sinkronisasi anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dihasilkan dari peningkatan fasilitas tersebut. Program ini merupakan bagian penting dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi strategis

di Provinsi Bengkulu, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.

17. Pembebasan lahan PTPN VII untuk pembangunan wisata.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah menginisiasi program strategis berupa pembebasan lahan milik PTPN VII sebagai bagian dari rencana pembangunan destinasi wisata prioritas yang terintegrasi. Program ini diarahkan untuk menciptakan kawasan terpadu yang memiliki nilai strategis baik dari sisi pariwisata, ekonomi, maupun geopolitik nasional.

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, sebagai perangkat daerah pengampu sektor pariwisata, akan berperan aktif dalam memastikan bahwa aspek pemanfaatan destinasi dan pengelolaan kawasan wisata berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur utama kawasan. Fokusnya mencakup penyiapan narasi destinasi, promosi wisata, hingga strategi pemasaran untuk meningkatkan daya tarik kawasan, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Proses pembebasan lahan juga akan dikawal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan persuasif terhadap pemegang hak guna usaha dan masyarakat sekitar.

Pembangunan kawasan ini diharapkan dapat menjadi ikon baru Provinsi Bengkulu sekaligus menjadi titik tumbuh ekonomi baru melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan UMKM lokal, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan infrastruktur pendukung kawasan.

Untuk mendukung realisasi program, sumber pendanaan akan melibatkan APBD, APBN, serta potensi investasi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dengan tetap mengutamakan prinsip tata kelola lahan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

18. Penyelarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Fokus utama dari program ini adalah penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, menciptakan lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target 8% dalam jangka menengah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu sebagai pengampu program hilirisasi telah melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap 71 industri besar yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 industri besar masih aktif, sementara sisanya tidak lagi beroperasi. Mayoritas industri besar saat ini masih didominasi oleh sektor CPO (Crude Palm Oil), namun upaya hilirisasi diarahkan untuk mendorong sektor-sektor lain agar ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Dalam konteks hilirisasi pangan, misalnya, proses konversi gabah menjadi beras telah ditelusuri dan dipetakan di Kabupaten Mukomuko. Namun, kegiatan hilirisasi ini secara klasifikasi usaha (KBLI) tercatat di bawah kewenangan Dinas Ketahanan Pangan. Meskipun demikian, Disperindag tetap akan menyusun data potensi komoditas unggulan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menarasikan potensi hilirisasi turunannya secara komprehensif.

Upaya hilirisasi saat ini lebih banyak difokuskan pada peningkatan kualitas produk melalui proses pengemasan, pengolahan lanjutan, dan standarisasi mutu, yang memungkinkan produk Bengkulu menembus pasar nasional dan ekspor. Selain itu, Disperindag tengah menyusun Blueprint Hilirisasi Provinsi Bengkulu selama lima tahun sesuai dengan RPJMD, yang mencakup identifikasi komoditas potensial, rantai nilai, dan kebutuhan infrastruktur industri. Dokumen ini juga akan menjabarkan peran Kawasan Industri (KI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai yang saat ini sedang diusulkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai surat Gubernur yang telah dikirim ke Kementerian Perindustrian.

Terdapat dua industri besar saat ini sedang dalam proses pengembangan, yaitu industri minyak goreng dan beras di Mukomuko. Keduanya menjadi bagian dari prioritas hilirisasi agroindustri, yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang industri pengolahan lanjutan.

Program ini secara keseluruhan bertujuan menciptakan ekosistem industri yang sehat dan berbasis sumber daya lokal, dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan (sustainable development). Penyelarasan dengan sektor pariwisata dan pertambangan juga dilakukan melalui pendekatan nilai tambah berbasis budaya dan konservasi lingkungan.

Sumber pendanaan program berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dukungan pemerintah pusat, serta pembiayaan

kreatif melalui kerja sama investasi dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha dan investor industri.

19. Perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia.

Provinsi Bengkulu memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda lingkungan global melalui visi besar menjadi Provinsi Konservasi, sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Potensi ini tercermin dari luas kawasan hutan di Bengkulu yang mencapai 924.631 hektare, atau sekitar 46,16% dari total luas daratan provinsi. Kawasan ini terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Hutan konservasi di Provinsi Bengkulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun pemanfaatannya dapat dilakukan secara terbatas di zona penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Implementasi program konservasi pada wilayah ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Fokus kegiatan di antaranya perlindungan biodiversitas, pengendalian kebakaran hutan (karhutla), dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan.

Untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi dan penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan. Pendekatan ini dilakukan melalui inisiatif Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pembentukan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan secara lestari.

Sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya konservasi dan penurunan emisi karbon, Provinsi Bengkulu telah menerima insentif karbon sebesar US$757.255 (~Rp 11,8 miliar) dari skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) melalui Green Climate Fund/Result-Based Payment (GCF/RBP) atas capaian kinerja tahun 2014–2016. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bekerja sama dengan KKI Warsi sebagai lembaga perantara. Penggunaan dana insentif ini difokuskan untuk:

- Rehabilitasi hutan di daerah rawan kerusakan
- Penyusunan RPJHP (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Hutan) di wilayah Rejang Lebong,

Bengkulu Selatan, Seluma, dan kawasan Bukit Daun

- Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (Polhut) dan pelatihan masyarakat sektor kehutanan
- Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pengendalian karhutla
- Perlindungan Kawasan Hutan Adat Tingkat Tapak (KAHATI)
- Penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperluas manfaat ekonomi dari kelestarian hutan

Saat ini, Provinsi Bengkulu juga tengah mengimplementasikan dua skema nasional strategis, yaitu FOLU Net Sink 2030(Forestry and Other Land Use) yang menargetkan sektor kehutanan sebagai penyerap karbon bersih pada 2030, serta program PRKBI (Program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Melalui pendekatan ini, Bengkulu tidak hanya berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim global, tetapi juga membuka peluang ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan melalui skema-skema insentif karbon ke depan. Program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu lokus konservasi hutan lindung dunia.

20. Evaluasi kasus agraria dan pertambangan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah memperkuat langkah evaluasi terhadap konflik agraria dan aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan degradasi lingkungan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dihimpun dari Dinas Perkebunan serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), sejumlah titik konflik agraria telah diidentifikasi, terutama yang bersumber dari tumpang tindih lahan antara masyarakat dan konsesi perusahaan. Di sisi lain, data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu menunjukkan sebaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, IUP Eksplorasi, serta Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) di tujuh kabupaten dengan intensitas tertinggi tercatat di Kabupaten Rejang Lebong dan Seluma.

Dalam upaya memperkuat tata kelola sektor pertambangan, Pemerintah Provinsi menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, terutama dalam rangka mencegah konflik horizontal dan dampak kerusakan lingkungan. Pengawasan teknis menjadi ranah inspektur tambang di bawah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan

pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM mengambil peran pengawasan administratif dan pemantauan lapangan. Evaluasi menyeluruh atas izin-izin pertambangan serta mediasi pada titik-titik konflik agraria akan dilanjutkan dalam rangka menciptakan harmoni antara kepentingan investasi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

21. Pengembangan Desa wisata berbasis hutan dan alam melalui pembangunan Taman Berburu dan Taman Safari di Bengkulu Tengah, Seluma dan Kepahiang.

Dalam upaya mendiversifikasi daya tarik wisata alam di Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi mendorong pengembangan desa wisata berbasis hutan dan konservasi alam, dengan fokus pada pembangunan Taman Berburu Dan Taman Safari di beberapa kabupaten potensial, yaitu Seluma, Bengkulu Tengah, dan Kepahiang. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau yang berbasis kelestarian lingkungan.

Pengembangan Taman Berburu dirancang dengan konsep wisata khusus yang mengangkat nilai petualangan alam liar (hunting forest) yang terkelola, aman, dan sesuai regulasi konservasi. Lokasi potensial berada di kawasan Taman Buru Semidang Bukit Kabu (Seluma) – Desa Kota Niur (Kab Bengkulu Tengah) - Desa Air Selimang (Kab Kepahiang). Namun demikian, kawasan ini bukan merupakan kewenangan langsung Pemerintah Provinsi, melainkan berada di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Oleh karena itu, pelaksanaan program ini membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA untuk mendapatkan legalitas, skema pemanfaatan, dan zonasi aktivitas berburu yang dibolehkan sesuai UU Konservasi.

Sementara itu, pengembangan Taman Safari direncanakan berlokasi di Taman Hutan Raya (Tahura) Rajo Lelo, Kabupaten Kepahiang, yang merupakan kawasan hutan sekunder seluas 1.122 Ha, dengan 600 Ha masih dalam kondisi alami dan belum terganggu aktivitas manusia. Tahura ini diproyeksikan sebagai lokasi strategis pengembangan Taman Safari bertema konservasi satwa liar dan pendidikan lingkungan, bukan wisata berburu.

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu akan mengambil peran kunci dalam aspek branding, promosi, dan pengembangan narasi destinasi. Konsep pengembangan berbasis eco-tourism dan edutourism akan dipadukan dengan potensi lokal, guna

meningkatkan nilai ekonomi kawasan sekaligus memperkuat identitas pariwisata Bengkulu sebagai destinasi berbasis alam dan konservasi. Sementara itu, Dinas LHK dan instansi pusat seperti BKSDA akan berperan dalam aspek teknis pengelolaan kawasan hutan, perizinan, dan penetapan zonasi konservasi agar pengembangan wisata tidak bertentangan dengan fungsi ekologis kawasan hutan.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal, mengurangi tekanan ekonomi terhadap kawasan hutan, serta memperkuat posisi Bengkulu dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada sinergi antar-instansi, ketersediaan anggaran (APBD/APBN/kemitraan investasi), serta partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan destinasi.

Tabel 3. 10 Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran,Outcome berserta Indikator dengan Program Prioritas

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	**Tujuan 1.1 :** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius		1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga	Program Pemberdayaan Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 5. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan 2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya. 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan	Program Rehabilitasi Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				(APS)	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Program Pembinaan Sejarah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			informasi sejarah	Tinjauan Sejarah Lokal	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Program Pengelolaan Permuseuman
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK		Nilai Indeks e-Government (SPBE)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pembangunan		
		Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel		1. Nilai SAKIP Daerah 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Indeks Sistem Merit 4. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD. 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya penerapan sistem	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			informasi keuangan berbasis digital	Berbasis Digital	
			Meningkatnya tata kelola Pengembangan pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Misi 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta	**Tujuan 2.1 :** Meningkatkan indeks infrastruktur			Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya indeks		Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
konektivitas wilayah.	dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	infrastruktur dasar		IPI	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya indeks		Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah		serta Konektivitas Wilayah pada IPI	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Program Pengelolaan Penerbangan
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian
Misi 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar,	**Tujuan 3.1 :** Meningkatkan Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan			Pendapatan per kapita	
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya pendapatan per kapita		1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	sosial dan demokratis			3. Indeks Gini	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi nutuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga kerja
			Terlindunginya hak-hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Dasarnya	
		Sasaran 3.1.2 : Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 3. Persentase Daerah yang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data 4. Fakir Miskin Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar 5. Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya 6. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 7. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 8. Indeks Peranan Sosial	
		Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Modal Manusia (IMM) 2. Indeks pemberdayaan gender 3. Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Terjaminnya	Indeks Pemenuhan Hak	Program Pemenuhan Hak

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Anak (IPHA)	Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak
		Sasaran 3.1.4 : Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif		1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
Misi 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan,	**Tujuan 4.1.1 :** Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan			1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Kontribusi PDRP Provinsi (%)	
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya		Persentase pertumbuhan sektor Pertanian,	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.		pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah		Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Hutan
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
			Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya Produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 2. Rasio Kewirausahaan Daerah	
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Meningkatnya	Persentase Meningkatnya	Program Pemberdayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			produktivitas koperasi	Koperasi yang Berkualitas	dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
		Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya Nilai Investasi		Nilai Investasi	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		Sasaran 4.1.6 : Stabilnya Perekonomian Daerah	Meingkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1. Tingkat Inflasi 2. Inklusi Keuangan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Sasaran 4.1.7 : Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Sasaran 4.1.8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim		- Penurunan Intensitas Emisi GRK - Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			memitigasi dampak KRP		
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
		Sasaran 4.1.9 : Meningkatnya infrastruktur dan pembangkit EBT		Persentase peningkatan infrastruktur EBT	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	

BAB IV.

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4. 1. Program Perangkat Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Indikasi rencana program prioritas Daerah Provinsi Bengkulu berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif.

Rencana Program Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian integral dari dokumen RPJMD yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Program yang direncanakan pada tahun 2030 memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, yang akan menjadi dokumen perencanaan tahunan pertama bagi kepala daerah periode 2030–2034. Oleh karena itu, program tahun 2030 diarahkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan lintas periode pemerintahan dan menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan program prioritas strategis, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menerapkan pembiayaan *multiyears* yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Skema ini terintegrasi dalam RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan RKPD, dengan perencanaan pendanaan yang rinci. Rencana program perangkat daerah menjadi acuan SKPD dalam menyusun Renstra, menjabarkan kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaan, yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 berikut.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					490.090.318.598,00		572.661.503.798,00		622.611.503.798,00		675.464.303.798,00		728.317.103.798,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					453.465.318.598,00		453.660.303.798,00		453.710.303.798,00		453.763.103.798,00		453.815.903.798,00	
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah VIII Bengkulu Tengah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,5	70,5	71	88.700.000,00	72	88.700.000,00	73	88.700.000,00	74	88.700.000,00	75	88.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah VII Kepahiang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	89.500.000,00	73	89.500.000,00	74	89.500.000,00	75	89.500.000,00	76	89.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah VI Seluma	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	71.000.000,00	73	71.000.000,00	74	71.000.000,00	75	71.000.000,00	76	71.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah V Lebong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	88.000.000,00	73	88.000.000,00	74	88.000.000,00	75	88.000.000,00	76	88.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	109.000.000,00	73	86.500.000,00	74	86.500.000,00	75	86.500.000,00	76	86.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	452.123.818.598,00	73	452.223.818.598,00	74	452.223.818.598,00	75	452.223.818.598,00	76	452.223.818.598,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah III Bengkulu Selatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	96.000.000,00	73	96.000.000,00	74	96.000.000,00	75	96.000.000,00	76	96.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah IV Mukomuko	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	75.000.000,00	73	75.000.000,00	74	75.000.000,00	75	75.000.000,00	76	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah IX Kaur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	87.000.000,00	73	87.000.000,00	74	87.000.000,00	75	87.000.000,00	76	87.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - UPTD MUSEUM	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	0,00	73	66.500.000,00	74	66.500.000,00	75	66.500.000,00	76	66.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - UPTD Pendidikan Inklusi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	54.000.000,00	73	117.985.200,00	74	167.985.200,00	75	220.785.200,00	76	273.585.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	104.500.000,00	73	104.500.000,00	74	104.500.000,00	75	104.500.000,00	76	104.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - UPTD TAMAN BUDAYA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	71	306.500.000,00	72	306.500.000,00	73	306.500.000,00	74	306.500.000,00	75	306.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	62,67	62,67	63,93		65,21		66,51		67,84		69,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Presentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah I Bengkulu Utara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	81.300.000,00	73	81.300.000,00	74	81.300.000,00	75	81.300.000,00	76	81.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Presentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu - Cabang Dinas Wilayah II Rejang Lebong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	70	71	91.000.000,00	72	78.000.000,00	73	78.000.000,00	74	78.000.000,00	75	78.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					36.625.000.000,00		118.001.200.000,00		168.001.200.000,00		220.801.200.000,00		273.601.200.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah														
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah - UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)	86,27	86,31	86,5	50.000.000,00	87	50.000.000,00	87,5	50.000.000,00	88	50.000.000,00	88,5	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah - UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya akses dan kualitas layanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) (Persentase)	72,39	100	100	36.150.000.000,00	100	89.131.200.000,00	100	114.131.200.000,00	100	140.531.200.000,00	100	166.931.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	74	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi (Persentase)	40	43,60	47,20		50,80		54,40		58		58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi (Persentase)	50	53,60	57,20		60,80		64,40		68		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	405.000.000,00	73	28.800.000.000,00	74	53.800.000.000,00	75	80.200.000.000,00	76	106.600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	0,00	73	300.000.000,00	74	300.000.000,00	75	300.000.000,00	76	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	0,00	73	100.000.000,00	74	100.000.000,00	75	100.000.000,00	76	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0,00		250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	0,00	73	250.000.000,00	74	150.000.000,00	75	150.000.000,00	76	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Persentase Pengembangan Bahasa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	0,00	73	350.000.000,00	74	350.000.000,00	75	350.000.000,00	76	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					499.480.018.315,00		567.306.802.143,00		609.274.728.453,00		658.630.919.777,00		671.693.522.572,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					353.337.603.240,00		395.887.516.314,00		436.823.728.333,00		481.248.601.166,00		526.547.873.030,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel_Dinas Kesehatan	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	188.470.658.240,00	100	207.916.724.064,00	100	228.024.396.470,00	100	251.421.836.117,00	100	275.886.019.729,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel_RSKJ	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	3.876.945.000,00	100	4.070.792.250,00	100	4.274.331.863,00	100	4.701.765.049,00	100	4.936.853.301,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel_RSMY	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	160.990.000.000,00	100	183.900.000.000,00	100	204.525.000.000,00	100	225.125.000.000,00	100	245.725.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					144.712.415.075,00		169.775.285.829,00		171.019.800.120,00		175.745.998.611,00		143.384.548.542,00	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau_Dinas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	70,26	73	76	125.108.258.875,00	79	129.639.171.819,00	82	130.205.630.410,00	85	134.667.911.930,00	90	101.616.307.527,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,8	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	78,97	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	81,18	83	85		87		89		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12	12	11		11		11		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	19,4	19	18,4		18,4		18,4		17,4		17,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	15	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	39,9	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta. (Kab/Kota)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	75	80	85		90		93		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	48	90	90,1		90,2		90,3		90,4		90,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	85,03	85,05	85,10		85,15		85,20		85,25		85,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Kabupaten/Kota)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehetan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (%)	-	20	30		40		50		60		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	80,7	83	85		87		90		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	69,2	70	72		75		77		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	16,6	25	35		45		55		65		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)	75	77	79		81		83		85		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa yang memiliki kendaraan siaga desa / ambulance desa (%)	-	9,6	29		50		70		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	-	93	94		95		96		97		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Kab/Kota sanitasi total berbasis masyrakat (%)	10	10	20		30		40		60		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	-	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	78,4	82	82,4		82,9		83,3		83,7		84,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	tinggkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	0	85	87		89		91		93		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	93,75	94	94,5		95		95,5		96		96,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau_Dinas Kesehatan_RSUD dr. M.Yunus	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	85	85	87	1.165.000.000,00	90	21.575.000.000,00	93	21.675.000.000,00	95	21.775.000.000,00	100	21.875.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Pari Purna (%)	85	85	85		87		90		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Tercapainya Masyarakat yang Sehat Sesuai Siklus Hidup dan Layanan Kesehatan yang berkualitas baik adil dan Terjangkau RSKJ	tinggkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	80	82,5	85	18.439.156.200,00	88	18.561.114.010,00	88	19.139.169.710,00	90	19.303.086.681,00	93	19.893.241.015,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					630.000.000,00		814.000.000,00		568.200.000,00		737.020.000,00		821.871.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan_Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	53,63	54	54,5	400.000.000,00	55	480.000.000,00	55,5	480.000.000,00	60	640.000.000,00	60,5	720.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	66,7	68	72		74		77		80		83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	0,68	0,69	0,70		0,71		0,72		0,73		0,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan_RSUD dr. M. Yunus	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	85	85	85	40.000.000,00	88	42.000.000,00	90	44.100.000,00	93	48.510.000,00	96	50.935.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan_RSKJ	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	70	75	75	190.000.000,00	75	292.000.000,00	78	44.100.000,00	83	48.510.000,00	85	50.935.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	80	82		85		88		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah_Dinas Kesehatan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	330.000.000,00	100	363.000.000,00	100	399.300.000,00	100	439.230.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan_Dinas Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	90	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					937.776.714.914,00		1.181.823.839.977,00		1.926.548.089.496,00		2.226.845.350.521,00		2.329.803.544.230,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.196.852.204,00		44.575.860.615,00		45.770.870.123,00		46.621.445.585,00		50.664.013.591,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,81	74	75	37.661.852.204,00	76	37.595.860.615,00	77	40.320.870.123,00	78	40.571.445.585,00	80	43.764.013.591,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu dalam Kondisi Baik (%)	80	81	82	285.000.000,00	84	2.180.000.000,00	85	500.000.000,00	86	600.000.000,00	87	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional SPAM Kobema	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	17,08	32,87	49,66	35.000.000,00	66,44	550.000.000,00	83,22	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik (%)	92,5	92,5	92,6	215.000.000,00	92,7	4.250.000.000,00	92,8	4.300.000.000,00	92,9	4.800.000.000,00	93	5.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					14.475.000.000,00		38.890.000.000,00		238.840.000.000,00		438.840.000.000,00		438.840.000.000,00	
Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	47,87	48,10	50,17	14.475.000.000,00	50,75	38.890.000.000,00	50,98	238.840.000.000,00	51,32	438.840.000.000,00	51,55	438.840.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	12,92	12,94	12,96		12,97		13,01		13,05		13,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	6,84	6,84	6,84		6,84		7,01		7,18		7,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi (%)	47,67	48,10	50,17		50,75		50,98		51,32		51,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.543.212.710,00		8.855.531.862,00		11.938.249.748,00		14.701.646.116,00		16.713.873.622,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	17,08	32,87	49,66	1.543.212.710,00	66,44	8.855.531.862,00	83,22	11.938.249.748,00	100	14.701.646.116,00	-	16.713.873.622,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	17,1	19,25	21,4		23,55		25,7		27,85		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	26,44	27,43	28,42		29,41		30,4		31,4		32,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	17,08	32,87	49,66		66,44		83,22		100		-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					15.772.500.000,00		200.888.375.000,00		51.065.881.250,00		61.261.938.438,00		63.008.729.203,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	22,3	26	29,7	15.772.500.000,00	33,4	200.888.375.000,00	37,1	51.065.881.250,00	40,8	61.261.938.438,00	44,5	63.008.729.203,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	-	-	-		25		50		75		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					672.500.000,00		15.773.375.000,00		400.939.381.250,00		401.222.788.438,00		401.648.706.703,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	4,43	7,54	10,65	672.500.000,00	13,76	15.773.375.000,00	16,87	400.939.381.250,00	20	401.222.788.438,00	20	401.648.706.703,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	83,01	86,40	89,79		93,18		96,57		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.014.406.250,00		2.287.626.563,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	0	0	0,00	10,00	1.000.000.000,00	10,10	1.500.000.000,00	10,20	2.014.406.250,00	10,30	2.287.626.563,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					206.850.000.000,00		237.477.500.000,00		272.604.000.000,00		312.922.462.500,00		359.235.831.875,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik (%)	60,87	65,22	65,31	206.850.000.000,00	65,54	237.477.500.000,00	65,77	272.604.000.000,00	65,99	312.922.462.500,00	66,22	359.235.831.875,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					12.691.650.000,00		14.295.397.500,00		16.139.707.125,00		18.260.663.194,00		20.699.762.673,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	13,04	13,14	13,24	12.691.650.000,00	13,34	14.295.397.500,00	13,44	16.139.707.125,00	13,54	18.260.663.194,00	13,64	20.699.762.673,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					645.625.000.000,00		616.217.800.000,00		882.000.000.000,00		926.100.000.000,00		972.405.000.000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	62,84	63,58	71,55	645.625.000.000,00	88,65	616.217.800.000,00	90,03	882.000.000.000,00	100	926.100.000.000,00	100	972.405.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	4,95	6,18	11,13	1.450.000.000,00	15,25	1.450.000.000,00	20,2	1.450.000.000,00	25,56	1.450.000.000,00	30,92	1.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	0	0	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					500.000.000,00		2.400.000.000,00		4.300.000.000,00		3.450.000.000,00		2.850.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	0	0	0	500.000.000,00	100	2.400.000.000,00	100	4.300.000.000,00	100	3.450.000.000,00	100	2.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Penetapan RTRW (Perda/Perkada)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Penyelesaian Materi Teknis RTRW (Materi Teknis)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah (Provinsi)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.434.274.500,00		10.197.694.500,00		11.211.194.500,00		12.933.194.500,00		13.538.194.500,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.534.274.500,00		8.717.694.500,00		8.851.194.500,00		9.622.194.500,00		9.708.194.500,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel														
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77	80	80	7.534.274.500,00	80	8.717.694.500,00	85	8.851.194.500,00	85	9.622.194.500,00	90	9.708.194.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					225.000.000,00		80.000.000,00		235.000.000,00		461.000.000,00		520.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	2,05	2,79	7,19	225.000.000,00	8	80.000.000,00	9	235.000.000,00	11	461.000.000,00	12	520.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					525.000.000,00		850.000.000,00		1.075.000.000,00		1.600.000.000,00		1.750.000.000,00	
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	2,05	2,79	7,19	525.000.000,00	8	850.000.000,00	9	1.075.000.000,00	10	1.600.000.000,00	10	1.750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					150.000.000,00		550.000.000,00		1.050.000.000,00		1.250.000.000,00		1.560.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32,03	36,72	42,19	150.000.000,00	43	550.000.000,00	44	1.050.000.000,00	45	1.250.000.000,00	46	1.560.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	4,69	4,69	5,46		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					42.355.195.639,00		45.929.443.502,00		49.749.077.723,00		52.003.247.740,00		54.973.938.230,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.878.707.519,00		27.194.130.976,00		30.002.874.571,00		31.201.984.430,00		33.071.236.755,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel - BPBD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	11.728.184.269,00	100	12.408.555.401,00	100	13.010.546.671,00	100	13.690.404.205,00	100	14.200.404.205,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel - Satpol PP	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	13.150.523.250,00	100	14.785.575.575,00	100	16.992.327.900,00	100	17.511.580.225,00	100	18.870.832.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					550.000.000,00		907.500.000,00		1.020.000.000,00		1.132.500.000,00		1.245.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	232.500.000,00	100	255.000.000,00	100	277.500.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	277.500.000,00	100	315.000.000,00	100	352.500.000,00	100	390.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	75.000.000,00	100	132.500.000,00	100	145.000.000,00	100	157.500.000,00	100	170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	265.000.000,00	100	305.000.000,00	100	345.000.000,00	100	385.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	0	67,42	68,42		69,42		70,42		71,42		72,42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					16.826.488.120,00		17.667.812.526,00		18.551.203.152,00		19.478.763.310,00		20.452.701.475,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (%)	20	25	30	1.680.000.000,00	35	8.000.000.000,00	40	9.300.000.000,00	45	8.650.000.000,00	50	10.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Presentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	525.000.000,00	100	5.600.000.000,00	100	5.250.000.000,00	100	5.400.000.000,00	100	5.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Presentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	14.621.488.120,00	100	4.067.812.526,00	100	4.001.203.152,00	100	5.428.763.310,00	100	4.702.701.475,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					100.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	105.000.000,00	100	115.000.000,00	100	125.000.000,00	100	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					18.297.842.200,00		33.401.142.200,00		35.747.842.200,00		37.530.017.200,00		39.342.504.700,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.733.842.200,00		21.181.842.200,00		22.276.842.200,00		22.651.842.200,00		22.706.842.200,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel														
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	15.733.842.200,00	100	21.181.842.200,00	100	22.276.842.200,00	100	22.651.842.200,00	100	22.706.842.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					100.000.000,00		685.000.000,00		685.000.000,00		690.000.000,00		715.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	685.000.000,00	100	685.000.000,00	100	690.000.000,00	100	715.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0,00		20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya fasilitasi penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	0	0,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.788.000.000,00		4.678.300.000,00		5.500.000.000,00		5.552.175.000,00		5.827.662.500,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	1.788.000.000,00	100	4.678.300.000,00	100	5.500.000.000,00	100	5.552.175.000,00	100	5.827.662.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	82,6	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	87,5	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					425.000.000,00		5.016.000.000,00		5.691.000.000,00		6.676.000.000,00		8.118.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	0	100	425.000.000,00	100	5.016.000.000,00	100	5.691.000.000,00	100	6.676.000.000,00	100	8.118.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	0	0		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					226.000.000,00		1.120.000.000,00		1.120.000.000,00		1.475.000.000,00		1.475.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	226.000.000,00	100	1.120.000.000,00	100	1.120.000.000,00	100	1.475.000.000,00	100	1.475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					25.000.000,00		700.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan					25.000.000,00		700.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					33.916.055.800,00		35.977.088.420,00		38.295.015.100,00		40.121.815.000,00		44.012.915.800,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30.981.055.800,00		33.132.588.420,00		34.748.515.100,00		36.294.115.000,00		39.197.015.800,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	30.981.055.800,00	100	33.132.588.420,00	100	34.748.515.100,00	100	36.294.115.000,00	100	39.197.015.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		365.000.000,00		650.000.000,00		405.000.000,00		420.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	40	40	50	0,00	60	365.000.000,00	70	650.000.000,00	80	405.000.000,00	90	420.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					290.000.000,00		855.000.000,00		1.045.000.000,00		1.215.000.000,00		1.475.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih (%)	88,16	89,16	89,16	75.000.000,00	89,66	405.000.000,00	90,10	525.000.000,00	91,16	615.000.000,00	91,20	775.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	89,53	90,53	90,53		91,03		91,53		92,03		92,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	7,86	7,86	7,90		8,20		8,35		8,50		8,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
MeningkatnyaTenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi UPTD Pelatihan kerja Bengkulu					75.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
MeningkatnyaTenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi UPTD Pelatihan kerja Bengkulu Selatan					70.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
MeningkatnyaTenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi UPTD Pelatihan kerja Kepahiang					70.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					290.000.000,00		620.000.000,00		727.000.000,00		975.000.000,00		1.315.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	31,57	31,59	63,22	290.000.000,00	63,72	620.000.000,00	64,22	727.000.000,00	64,72	975.000.000,00	65,22	1.315.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))	23	23	24,6		26,2		27,8		29,4		31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	56,22	56,28	56,30		56,34		56,37		56,42		56,46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Proporsi tenaga kerja hijau (%)	1,90	2,00	2,09		2,15		2,24		2,35		2,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.240.000.000,00		829.700.000,00		927.700.000,00		1.021.000.000,00		1.273.100.000,00	
Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.260	1.500	1.500	2.240.000.000,00	2.000	829.700.000,00	2.300	927.700.000,00	2.500	1.021.000.000,00	3.000	1.273.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	32,52	34,88	35,38		35,88		36,38		36,88		37,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	31,71	31,71	32,05		32,30		33,16		33,80		34,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					115.000.000,00		174.800.000,00		196.800.000,00		211.700.000,00		332.800.000,00	
Meningkatnya jumlah perusahaan yang taat akan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Wil I					20.000.000,00		35.400.000,00		38.700.000,00		42.100.000,00		75.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya jumlah perusahaan yang taat akan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Wil II					20.000.000,00		35.400.000,00		38.700.000,00		42.100.000,00		75.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya jumlah perusahaan yang taat akan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Wil III					20.000.000,00		35.400.000,00		38.700.000,00		42.100.000,00		75.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Terlindunginya hak-hak pekerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	14,00	14,71	19,71	55.000.000,00	24,71	68.600.000,00	29,71	80.700.000,00	34,71	85.400.000,00	39,71	106.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					18.407.072.550,00		18.733.322.550,00		21.208.561.679,00		21.360.525.611,00		23.173.991.892,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.217.072.550,00		11.217.072.550,00		11.777.926.178,00		12.366.822.486,00		12.985.163.611,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	11.217.072.550,00	100	11.217.072.550,00	100	11.777.926.178,00	100	12.366.822.486,00	100	12.985.163.611,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.075.000.000,00		3.230.000.000,00		3.395.000.000,00		3.550.000.000,00		4.130.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10,89	10,89	11,25	3.075.000.000,00	11,30	3.230.000.000,00	11,35	3.395.000.000,00	11,40	3.550.000.000,00	11,45	4.130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	57,74	57,74	57,99		58,48		58,63		58,89		59,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					625.000.000,00		800.000.000,00		975.000.000,00		1.150.000.000,00		1.375.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	95	95	98	625.000.000,00	98,5	800.000.000,00	99	975.000.000,00	99,5	1.150.000.000,00	100	1.375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.025.000.000,00		1.250.000.000,00		1.410.000.000,00		1.500.000.000,00		1.450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	1	1	2	1.025.000.000,00	4	1.250.000.000,00	6	1.410.000.000,00	8	1.500.000.000,00	10	1.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					800.000.000,00		800.000.000,00		810.000.000,00		810.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	810.000.000,00	100	810.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000,00		400.000.000,00		490.000.000,00		570.000.000,00		920.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	66,25	66,25	68,18	140.000.000,00	68,91	400.000.000,00	66,59	490.000.000,00	70,60	570.000.000,00	71,61	920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.525.000.000,00		1.036.250.000,00		2.350.635.501,00		1.413.703.125,00		1.613.828.281,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	90	92,25	1.525.000.000,00	95,50	1.036.250.000,00	95,75	2.350.635.501,00	96	1.413.703.125,00	96,25	1.613.828.281,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	89,14	89,14	96,99		101,17		105,53		105,53		105,53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.009.745.800,00		8.232.791.881,00		8.407.791.881,00		8.472.791.881,00		8.675.837.962,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.389.745.800,00		7.522.791.881,00		7.622.791.881,00		7.622.791.881,00		7.790.837.962,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	100	7.389.745.800,00	100	7.522.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.790.837.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (%)	1	1	2	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					295.000.000,00		345.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan (Nilai)	90,7	90,74	90,8	295.000.000,00	91,2	345.000.000,00	91,5	385.000.000,00	91,8	400.000.000,00	92,2	410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan (Nilai)	89,5	90	90,5		90,8		91		91,5		91,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	163,62	138,65	50	215.000.000,00	50,5	230.000.000,00	60	245.000.000,00	60,5	265.000.000,00	61	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,7	8	7		6		5		4		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					60.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	78,60	78,65	85,5	60.000.000,00	86	75.000.000,00	86,5	85.000.000,00	87	105.000.000,00	87,5	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					50.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	97,53	100	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0,00		50.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	0	100	100	0,00	100	50.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					39.002.933.400,00		41.165.040.000,00		44.634.040.000,00		48.548.040.000,00		52.864.120.400,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.572.933.400,00		39.380.040.000,00		42.274.040.000,00		45.598.040.000,00		48.154.120.400,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	38.572.933.400,00	100	39.380.040.000,00	100	42.274.040.000,00	100	45.598.040.000,00	100	48.154.120.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					150.000.000,00		200.000.000,00		285.000.000,00		330.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	285.000.000,00	100	330.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					95.000.000,00		655.000.000,00		825.000.000,00		1.070.000.000,00		1.365.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	51,99	63,99	64,19	95.000.000,00	64,39	655.000.000,00	64,59	825.000.000,00	64,79	1.070.000.000,00	64,99	1.365.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,13	72,34	72,34		72,94		73,24		73,54		73,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					35.000.000,00		155.000.000,00		200.000.000,00		255.000.000,00		355.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	6	6	6	35.000.000,00	6	155.000.000,00	6	200.000.000,00	6	255.000.000,00	6	355.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					10.000.000,00		80.000.000,00		115.000.000,00		135.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	96	81	78	10.000.000,00	80	80.000.000,00	85	115.000.000,00	88	135.000.000,00	90	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					20.000.000,00		85.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	85.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					15.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		85.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	85.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					15.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	15.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000,00		95.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	95.000.000,00	100	140.000.000,00	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					70.000.000,00		430.000.000,00		575.000.000,00		755.000.000,00		1.855.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	23,2	26,5	29,7	70.000.000,00	33,4	430.000.000,00	37,1	575.000.000,00	40,8	755.000.000,00	44,5	1.855.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	33	34	35		36		37		38		39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.832.760.540,00		8.630.746.940,00		8.530.746.940,00		8.530.746.940,00		8.745.746.940,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.172.760.540,00		7.630.746.940,00		7.620.746.940,00		7.605.746.940,00		7.805.746.940,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	7.172.760.540,00	100	7.630.746.940,00	100	7.620.746.940,00	100	7.605.746.940,00	100	7.805.746.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	94,67	94	94		94		94		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					250.000.000,00		425.000.000,00		325.000.000,00		330.000.000,00		335.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,4	10	20	250.000.000,00	22	425.000.000,00	24	325.000.000,00	26	330.000.000,00	28	335.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	74	75	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					125.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	125.000.000,00	100	225.000.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	96	97	98		99		99,8		99,8		99,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					120.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	120.000.000,00	100	185.000.000,00	100	190.000.000,00	100	195.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	165.000.000,00	100	165.000.000,00	100	165.000.000,00	100	165.000.000,00	100	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,26	1,22	1,18		1,14		1,10		1,06		1,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Rasio Penduduk (%)	0,76	0,76	0,76		0,76		0,76		0,76		0,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Kepadatan Penduduk (Orang/km2)	105	106	108		109		110		111		112		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					14.257.072.550,00		14.969.926.178,00		15.718.422.486,00		16.504.343.611,00		17.329.560.793,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.217.072.550,00		11.777.926.178,00		12.366.822.486,00		12.985.163.611,00		13.634.421.791,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100	11.217.072.550,00	100	11.777.926.178,00	100	12.366.822.486,00	100	12.985.163.611,00	100	13.634.421.791,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	31.500.000,00	100	33.075.000,00	100	34.728.750,00	100	36.465.188,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Meningkatnya efektfitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	55.125.000,00	100	57.881.250,00	100	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					810.000.000,00		850.500.000,00		893.025.000,00		937.676.250,00		984.560.063,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasaan pemerintah desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	810.000.000,00	100	850.500.000,00	100	893.025.000,00	100	937.676.250,00	100	984.560.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.150.000.000,00		2.257.500.000,00		2.370.375.000,00		2.488.893.750,00		2.613.338.438,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	2.150.000.000,00	100	2.257.500.000,00	100	2.370.375.000,00	100	2.488.893.750,00	100	2.613.338.438,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					800.000.000,00		920.000.000,00		1.040.000.000,00		1.160.000.000,00		1.360.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					125.000.000,00		140.000.000,00		155.000.000,00		170.000.000,00		190.000.000,00	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,12	2,12	2,12	125.000.000,00	2,11	140.000.000,00	2,11	155.000.000,00	2,10	170.000.000,00	2,10	190.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	21,5	21.5-	19.1-		18.7-		18.3-		17.9-		17.3-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					250.000.000,00		280.000.000,00		310.000.000,00		340.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	69	69	69,18	250.000.000,00	69,3	280.000.000,00	69,42	310.000.000,00	69,55	340.000.000,00	69,68	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,2	8,2	7,39		7,01		6,64		6,27		5,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					425.000.000,00		500.000.000,00		575.000.000,00		650.000.000,00		770.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	98,58	98,58	98,58	425.000.000,00	98,58	500.000.000,00	98,58	575.000.000,00	98,58	650.000.000,00	98,58	770.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.765.575.100,00		10.609.110.750,00		11.251.343.250,00		12.059.169.625,00		13.051.728.619,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.154.575.100,00		9.967.560.750,00		10.577.715.750,00		11.351.860.750,00		12.309.054.300,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78	79	80	9.154.575.100,00	80,2	9.967.560.750,00	80,5	10.577.715.750,00	82	11.351.860.750,00	85	12.309.054.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	67,22	67,3	67,5		67,6		67,7		67,8		68		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					425.000.000,00		446.250.000,00		468.562.500,00		491.990.625,00		516.590.156,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	0,62	0,63	0,64	425.000.000,00	0,65	446.250.000,00	0,67	468.562.500,00	0,68	491.990.625,00	0,69	516.590.156,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					136.000.000,00		142.800.000,00		149.940.000,00		157.437.000,00		165.308.850,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	1	1	1	136.000.000,00	1	142.800.000,00	1	149.940.000,00	1	157.437.000,00	1	165.308.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	55.125.000,00	100	57.881.250,00	100	60.775.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					20.972.243.500,00		12.473.513.675,00		13.008.689.359,00		13.908.123.827,00		14.323.280.018,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.232.243.500,00		9.483.513.675,00		9.478.513.675,00		9.763.513.675,00		9.533.513.675,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.232.243.500,00	100	9.483.513.675,00	100	9.478.513.675,00	100	9.763.513.675,00	100	9.533.513.675,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.165.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	70	70	75	3.165.000.000,00	75	1.470.000.000,00	75	1.470.000.000,00	75	1.470.000.000,00	75	1.470.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					6.575.000.000,00		1.520.000.000,00		2.060.175.684,00		2.674.610.152,00		3.319.766.343,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,3	1	1,1	6.575.000.000,00	1,2	1.520.000.000,00	1,3	2.060.175.684,00	1,4	2.674.610.152,00	1,4	3.319.766.343,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					11.973.315.300,00		12.505.250.183,00		13.003.131.437,00		13.580.497.223,00		14.248.009.654,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.198.315.300,00		11.655.250.183,00		12.073.131.437,00		12.575.497.223,00		13.158.009.654,00	
Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu serta Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	11.198.315.300,00	100	11.655.250.183,00	100	12.073.131.437,00	100	12.575.497.223,00	100	13.158.009.654,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	71,05	71,35	71,45		73,05		74,05		75,05		76,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	85	85	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Persentase Koperasi binaan Provinsi yang dididik dan dilatih	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100	100	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00	
Persentase Koperasi binaan Daerah Provinsi yang diberdayakan dan dilindungi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-3,5	5	5	200.000.000,00	5,5	220.000.000,00	6	240.000.000,00	6,5	260.000.000,00	7	280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					175.000.000,00		195.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00	
Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					175.000.000,00		195.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					175.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20	20	20	175.000.000,00	20	190.000.000,00	20	205.000.000,00	20	220.000.000,00	20	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2	3	3		3		4		4		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					10.468.143.550,00		11.393.013.550,00		11.534.063.550,00		11.656.563.550,00		11.786.313.550,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.193.143.550,00		10.821.013.550,00		11.009.063.550,00		11.153.563.550,00		11.237.313.550,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	88,3	88,3	88,3	10.193.143.550,00	88,4	10.821.013.550,00	88,5	11.009.063.550,00	88,6	11.153.563.550,00	88,7	11.237.313.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		220.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	10	10	10	50.000.000,00	10	220.000.000,00	10	125.000.000,00	10	130.000.000,00	10	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	10	10	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	70.000.000,00	10	80.000.000,00	10	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		165.000.000,00		185.000.000,00		205.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	87,62	87,62	87,96	100.000.000,00	88,30	165.000.000,00	88,64	185.000.000,00	88,98	205.000.000,00	89,33	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	10	10	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	115.000.000,00	10	53.000.000,00	10	54.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi (%)	10	10	10	25.000.000,00	10	27.000.000,00	10	30.000.000,00	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					22.212.950.900,00		23.323.598.445,00		24.489.778.367,00		25.714.267.286,00		26.999.980.650,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.977.950.900,00		10.476.848.445,00		11.000.690.867,00		11.550.725.411,00		12.128.261.681,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada SAKIP (Angka)	72,50	73,65	74,50	9.977.950.900,00	75,25	10.476.848.445,00	77,40	11.000.690.867,00	79	11.550.725.411,00	80	12.128.261.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00		255.256.313,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57	59,98	60,83	210.000.000,00	61,68	220.500.000,00	62,53	231.525.000,00	63,38	243.101.250,00	64,23	255.256.313,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					11.325.000.000,00		11.891.250.000,00		12.485.812.500,00		13.110.103.125,00		13.765.608.281,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Indeks Partisipasi Olahraga (Persentase)	0	40	42	11.325.000.000,00	43	11.891.250.000,00	44	12.485.812.500,00	45	13.110.103.125,00	50	13.765.608.281,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	11	13		15		17		20		22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					700.000.000,00		735.000.000,00		771.750.000,00		810.337.500,00		850.854.375,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	4,8	5	5,2	700.000.000,00	5,5	735.000.000,00	5,8	771.750.000,00	6	810.337.500,00	6,5	850.854.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					75.000.000,00		490.000.000,00		550.000.000,00		630.000.000,00		710.000.000,00	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya data statistik sektoral di OPD lingkungan Pemerintah Provinsi	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	70	70	72	25.000.000,00	72	25.000.000,00	73	25.000.000,00	75	25.000.000,00	75	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50.000.000,00		465.000.000,00		525.000.000,00		605.000.000,00		685.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,4	2,65	2,7	50.000.000,00	2,75	465.000.000,00	2,8	525.000.000,00	2,85	605.000.000,00	2,85	685.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					180.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					180.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	316	0	384	180.000.000,00	439	100.000.000,00	494	100.000.000,00	549	100.000.000,00	550	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					438.000.000,00		3.878.000.000,00		3.878.000.000,00		3.878.000.000,00		3.878.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					225.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00	
Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	50.000.000,00	73	600.000.000,00	74	600.000.000,00	75	600.000.000,00	76	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan - UPTD Taman Budaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	175.000.000,00	73	175.000.000,00	74	175.000.000,00	75	175.000.000,00	76	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					43.000.000,00		503.000.000,00		503.000.000,00		503.000.000,00		503.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	40.000.000,00	73	500.000.000,00	74	500.000.000,00	75	500.000.000,00	76	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional - UPTD Taman Budaya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	3.000.000,00	73	3.000.000,00	74	3.000.000,00	75	3.000.000,00	76	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					20.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	20.000.000,00	73	700.000.000,00	74	700.000.000,00	75	700.000.000,00	76	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					25.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00	
Meningkatnya Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	25.000.000,00	73	1.400.000.000,00	74	1.400.000.000,00	75	1.400.000.000,00	76	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					125.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	72	125.000.000,00	73	500.000.000,00	74	500.000.000,00	75	500.000.000,00	76	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					12.307.430.050,00		12.922.801.552,00		13.568.941.630,00		14.247.388.712,00		14.959.758.148,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.842.430.050,00		12.434.551.552,00		13.056.279.130,00		13.709.093.087,00		14.394.547.741,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	11.842.430.050,00	100	12.434.551.552,00	100	13.056.279.130,00	100	13.709.093.087,00	100	14.394.547.741,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	97,32	97,35	97,38		97,42		97,46		97,52		97,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.188,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,83	68,83	69	350.000.000,00	70	367.500.000,00	71	385.875.000,00	72	405.168.750,00	73	425.427.188,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					115.000.000,00		120.750.000,00		126.787.500,00		133.126.875,00		139.783.219,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	25	28	30	115.000.000,00	35	120.750.000,00	40	126.787.500,00	45	133.126.875,00	50	139.783.219,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					275.000.000,00		297.500.000,00		321.375.000,00		346.346.875,00		364.264.219,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					275.000.000,00		288.750.000,00		303.187.500,00		318.346.875,00		334.264.219,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	73	73,5	74	275.000.000,00	75	288.750.000,00	76	303.187.500,00	77	318.346.875,00	78	334.264.219,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0,00		8.750.000,00		18.187.500,00		28.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK					0,00		8.750.000,00		18.187.500,00		28.000.000,00		30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					42.585.567.230,00		53.870.000.000,00		49.597.000.000,00		55.140.000.000,00		60.240.000.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.655.567.230,00		20.395.000.000,00		20.680.000.000,00		20.890.000.000,00		20.575.000.000,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76,15	76,35	76,55	18.655.567.230,00	76,75	20.395.000.000,00	76,95	20.680.000.000,00	77,15	20.890.000.000,00	77,35	20.575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	76,15	76,35	76,55		76,75		76,95		77,15		77,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					245.000.000,00		255.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		335.000.000,00	
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sumber Nilai Tambah Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Pelestarian Ekosistem (Nilai)	1	1	2	245.000.000,00	3	255.000.000,00	4	300.000.000,00	4	315.000.000,00	5	335.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					13.860.000.000,00		16.045.000.000,00		16.145.000.000,00		21.230.000.000,00		26.370.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	40.201.807	87.437	90.959	13.860.000.000,00	94.597,36	16.045.000.000,00	98.381,25	16.145.000.000,00	102.316,50	21.230.000.000,00	106.409,16	26.370.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					9.180.000.000,00		16.520.000.000,00		11.765.000.000,00		11.955.000.000,00		12.150.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	144.482,09	233.108	234.759	9.180.000.000,00	241.801,77	16.520.000.000,00	249.055,82	11.765.000.000,00	256.527,49	11.955.000.000,00	264.233,31	12.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					340.000.000,00		340.000.000,00		375.000.000,00		405.000.000,00		450.000.000,00	
Peningkatan Angka Pelaku Usaha yang Taat Aturan	Jumlah Pelaku Usaha Taat Aturan/ Hukum (Nilai)	3	3	5	340.000.000,00	5	340.000.000,00	7	375.000.000,00	10	405.000.000,00	10	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					305.000.000,00		315.000.000,00		332.000.000,00		345.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat					305.000.000,00		315.000.000,00		332.000.000,00		345.000.000,00		360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					12.412.692.150,00		26.970.000.000,00		27.820.000.000,00		28.770.000.000,00		29.670.000.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.117.692.150,00		16.820.000.000,00		16.820.000.000,00		16.820.000.000,00		16.820.000.000,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,75	80	81	10.117.692.150,00	82	16.820.000.000,00	83	16.820.000.000,00	84	16.820.000.000,00	85	16.820.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					225.000.000,00		3.700.000.000,00		4.350.000.000,00		5.000.000.000,00		5.650.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata					225.000.000,00		3.700.000.000,00		4.350.000.000,00		5.000.000.000,00		5.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.500.000.000,00		3.300.000.000,00		3.300.000.000,00		3.400.000.000,00		3.450.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase dokumen pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi yg dipasarkan (%)	5	5	6	1.500.000.000,00	7	3.300.000.000,00	8	3.300.000.000,00	9	3.400.000.000,00	10	3.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					50.000.000,00		700.000.000,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		1.300.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase ekosistem ekraf yg dikembangkan (%)	5	10	15	50.000.000,00	20	700.000.000,00	25	900.000.000,00	30	1.100.000.000,00	35	1.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					520.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00		2.450.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sdm pariwisata dan ekraf tingkat lanjutan yg ditingkatkan kapasitasnya (%)	30	40	50	520.000.000,00	60	2.450.000.000,00	70	2.450.000.000,00	80	2.450.000.000,00	90	2.450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					55.988.440.716,00		70.377.009.100,00		74.091.567.842,00		79.596.174.301,00		85.292.389.703,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					50.480.931.212,00		57.701.798.646,00		60.972.131.342,00		63.789.087.276,00		67.284.048.269,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	14.925.018.662,00	100	15.447.020.528,00	100	16.576.522.581,00	100	17.140.174.839,00	100	18.258.192.323,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Administrasi Perangkat Daerah secara Profesional dan Akuntabel	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100	35.555.912.550,00	100	42.254.778.118,00	100	44.395.608.761,00	100	46.648.912.437,00	100	49.025.855.946,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.380.000.000,00		8.732.450.000,00		9.140.200.000,00		10.903.426.875,00		12.087.815.269,00	
Meningkatnya Populasi Ternak (%)	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	0,5	0,5	0,5	500.000.000,00	0,5	1.047.500.000,00	0,5	1.455.250.000,00	0,5	2.138.275.000,00	0,5	2.816.602.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	-0,60	1	1	880.000.000,00	1	7.684.950.000,00	1	7.684.950.000,00	1	8.765.151.875,00	1	9.271.212.769,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	1,54	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	2,93	2	2		2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.575.000.000,00		1.893.000.000,00		1.880.000.000,00		2.327.500.000,00		2.463.750.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	47.658	47.658	47.658	2.500.000.000,00	47.658	1.700.000.000,00	47.658	1.675.000.000,00	47.658	1.812.500.000,00	47.658	1.888.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian (%)	Persentase Ketercukupan Prasarana Pertanian (%)	75	80	40	75.000.000,00	40	193.000.000,00	80	205.000.000,00	80	515.000.000,00	100	575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					150.000.000,00		475.000.000,00		620.000.000,00		905.000.000,00		1.125.000.000,00	
Menurunnya Angka Kematian Hewan (%)	Penurunan Angka Kematian Hewan (%)	20	20	2	150.000.000,00	2	475.000.000,00	2	620.000.000,00	2	905.000.000,00	2	1.125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Terjaminnya Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	0	0	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					650.000.000,00		415.000.000,00		456.500.000,00		502.150.000,00		1.052.365.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	0	65	650.000.000,00	65	415.000.000,00	65	456.500.000,00	65	502.150.000,00	65	1.052.365.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					200.000.000,00		450.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	80	80	81	200.000.000,00	82	450.000.000,00	84	220.000.000,00	88	242.000.000,00	90	266.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					552.509.504,00		709.760.454,00		802.736.500,00		927.010.150,00		1.013.211.165,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	8	8	8	527.509.504,00	8	629.760.454,00	8	692.736.500,00	8	762.010.150,00	8	838.211.165,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya Kelembagaan Kelompok Petani/Peternak (%)	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok (%)	10	83	30	25.000.000,00	40	80.000.000,00	50	110.000.000,00	70	165.000.000,00	100	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					865.000.000,00		2.600.000.000,00		3.495.000.000,00		4.365.000.000,00		5.311.000.000,00	
3.28.03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					590.000.000,00		2.060.000.000,00		2.740.000.000,00		3.410.000.000,00		4.046.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas hasil hultan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (Persentase)	0,41	0,6	0,65	590.000.000,00	0,7	2.060.000.000,00	0,75	2.740.000.000,00	0,8	3.410.000.000,00	0,85	4.046.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan hutan														
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					75.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		310.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelestrian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanegarakaman Hayati (Indeks)	0,613	0,615	0,617	75.000.000,00	0,619	170.000.000,00	0,62	200.000.000,00	0,621	250.000.000,00	0,623	310.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.28.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					175.000.000,00		285.000.000,00		450.000.000,00		560.000.000,00		780.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Presentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Persentase)	6,1	7,42	8,45	175.000.000,00	10,8	285.000.000,00	13,15	450.000.000,00	15,5	560.000.000,00	17,85	780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
	Presentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Persentase)	11,54	13,12	15,28		19,13		27,03		37,04		58,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.28.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					25.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		145.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai DAS	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (Persentase)	32,14	32,24	32,67	25.000.000,00	32,92	85.000.000,00	33,17	105.000.000,00	33,42	145.000.000,00	33,67	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					15.482.292.750,00		15.686.600.000,00		15.591.600.000,00		15.891.600.000,00		17.440.600.000,00	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					12.917.292.750,00		12.576.600.000,00		12.826.600.000,00		13.246.600.000,00		14.405.600.000,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76	77	78	12.447.292.750,00	79	12.203.600.000,00	80	12.566.600.000,00	81	12.806.600.000,00	82	13.715.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel Cabang Dinas Manna					88.000.000,00		85.000.000,00		70.000.000,00		88.000.000,00		124.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel UPTD					210.000.000,00		120.000.000,00		60.000.000,00		180.000.000,00		320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel Cabang Dinas Arga Makmur					86.000.000,00		84.000.000,00		64.000.000,00		86.000.000,00		123.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Meningkatnya Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel Cabang Dinas Curup					86.000.000,00		84.000.000,00		66.000.000,00		86.000.000,00		123.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					390.000.000,00		340.000.000,00		390.000.000,00		360.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota (Liter)	3.666.000	3.665.000	3.664.000	390.000.000,00	3.663.000	340.000.000,00	3.662.000	390.000.000,00	3.661.000	360.000.000,00	3.660.000	470.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					820.000.000,00		1.240.000.000,00		860.000.000,00		680.000.000,00		900.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR (Unit)	0	0	0	820.000.000,00	0	1.240.000.000,00	9	860.000.000,00	9	680.000.000,00	9	900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah (Meter)	0	0	0		3.000.000		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					675.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		740.000.000,00		710.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	37	45	48	625.000.000,00	51	620.000.000,00	54	620.000.000,00	57	690.000.000,00	60	660.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
Persentase sektor EBT Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang dilaporkan tepat waktu					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					680.000.000,00		860.000.000,00		845.000.000,00		865.000.000,00		955.000.000,00	
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	99,94	99,95	99,97	680.000.000,00	99,97	860.000.000,00	99,99	845.000.000,00	99,9901	865.000.000,00	99,9902	955.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					220.000.000,00		477.500.000,00		600.000.000,00		725.000.000,00		860.000.000,00	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					25.000.000,00		77.500.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	30	30	25.000.000,00	30	77.500.000,00	30	100.000.000,00	30	125.000.000,00	30	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	3,89	3,60	3,60	75.000.000,00	3,60	100.000.000,00	3,60	125.000.000,00	3,60	150.000.000,00	3,60	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	7	7,05	7,05	50.000.000,00	7,10	200.000.000,00	7,15	250.000.000,00	7,20	300.000.000,00	7,25	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					70.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	40	80	80	70.000.000,00	80	100.000.000,00	80	125.000.000,00	80	150.000.000,00	80	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					12.078.202.750,00		14.589.561.025,00		14.876.905.127,50		16.360.858.640,25		18.021.632.504,28	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.473.202.750,00		13.902.061.025,00		14.120.655.127,50		15.512.258.640,25		17.093.172.504,28	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.455.202.750,00	100	13.881.361.025,00	100	14.098.085.127,50	100	15.487.631.640,25	100	17.066.282.804,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel (UPTD PPMB)	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18.000.000,00	100	20.700.000,00	100	22.570.000,00	100	24.627.000,00	100	26.889.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					570.000.000,00		649.000.000,00		713.900.000,00		785.290.000,00		863.819.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	1,55	1,75	2,0	570.000.000,00	2,1	649.000.000,00	2,2	713.900.000,00	2,3	785.290.000,00	2,4	863.819.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	35,4	35,5	35,6	10.000.000,00	35,7	11.000.000,00	35,8	12.100.000,00	35,9	13.310.000,00	36	14.641.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Indutri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	39	40	41	25.000.000,00	42	27.500.000,00	43	30.250.000,00	44	50.000.000,00	45	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					90.000.000,00		412.000.000,00		483.600.000,00		577.800.000,00		648.800.000,00	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					0,00		35.400.000,00		35.400.000,00		38.000.000,00		42.300.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	50,00	60,00	65,00	0,00	67,50	35.400.000,00	70,00	35.400.000,00	75,00	38.000.000,00	80,15	42.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					40.000.000,00		246.000.000,00		296.700.000,00		362.800.000,00		409.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Angka)	5	5	5	40.000.000,00	5	246.000.000,00	5	296.700.000,00	5	362.800.000,00	5	409.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					50.000.000,00		130.600.000,00		151.500.000,00		177.000.000,00		197.500.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan yang Dibina dan Diberdayakan (Angka)	2	1	1	50.000.000,00	1	130.600.000,00	1	151.500.000,00	1	177.000.000,00	1	197.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					140.040.985.616,00		149.141.700.000,00		151.925.070.000,00		155.950.577.000,00		163.200.934.700,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					108.150.985.616,00		113.878.700.000,00		113.463.470.000,00		114.227.717.000,00		118.173.888.700,00	
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	-	78,99	79,09	630.000.000,00	79,19	735.000.000,00	79,29	840.000.000,00	79,39	945.000.000,00	79,49	1.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro Hukum	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,68	74,78	74,88	407.000.000,00	74,98	447.700.000,00	75,08	492.470.000,00	75,18	541.717.000,00	75,28	595.888.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro Ekonomi	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	300.000.000,00	100	430.000.000,00	100	470.000.000,00	100	510.000.000,00	100	550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro PBJ dan Adm Pembangunan	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,75	-	-	600.000.000,00	-	645.000.000,00	-	690.000.000,00	-	735.000.000,00	-	780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro Organisasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	82,65	83	84	675.000.000,00	85	875.000.000,00	86	1.025.000.000,00	87	1.225.000.000,00	88	1.352.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	-	80,75	80,85		80,95		81,05		81,15		81,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola Penunjang Perangkat Daerah - Biro Umum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	85,00	85,00	85,00	105.538.985.616,00	85,50	110.746.000.000,00	86,00	109.946.000.000,00	86,50	110.271.000.000,00	86,50	113.846.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.325.000.000,00		1.575.000.000,00		1.825.000.000,00		2.050.000.000,00		2.250.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	83,37	85	88	1.325.000.000,00	91	1.575.000.000,00	94	1.825.000.000,00	97	2.050.000.000,00	100	2.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi General (Angka)	70,57	70,6	70,65		70,7		70,8		70,9		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada SAKIP (Angka)	69,31	69,35	69,50		70		70,50		71		71,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah Yang Rigsizing (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,94	3,98	4,00		4,10		4,15		4,20		4,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran Yang Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Berakhlak (Budaya Kerja) (Angka)	59,3	60	62		64		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.200.000.000,00		1.420.000.000,00		1.600.000.000,00		1.890.000.000,00		2.250.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	1.200.000.000,00	100	1.420.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.890.000.000,00	100	2.250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					24.350.000.000,00		26.550.000.000,00		28.750.000.000,00		30.950.000.000,00		33.150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	24.350.000.000,00	100	26.550.000.000,00	100	28.750.000.000,00	100	30.950.000.000,00	100	33.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.060.000.000,00		2.266.000.000,00		2.492.600.000,00		2.741.860.000,00		3.016.046.000,00	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	indeks kualitas kebijakan (Nilai)	85	85	87	2.060.000.000,00	87	2.266.000.000,00	88	2.492.600.000,00	89	2.741.860.000,00	90	3.016.046.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87	88	89		90		91		92		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					870.000.000,00		1.057.000.000,00		1.154.000.000,00		1.251.000.000,00		1.251.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	870.000.000,00	100	1.057.000.000,00	100	1.154.000.000,00	100	1.251.000.000,00	100	1.251.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Inklusi Keuangan ((%))	93,98	93,98	94,47		94,96		94,45		95,95		96,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Inflasi ((%))	2,5	2,5	2,5		2,5		2,6		2,6		2,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB ((%))	18,45	18,45	20,70		22,96		25,21		27,46		29,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Aset Dana Pensiun/PDRB ((%))	0,13	0,13	0,32		0,50		0,69		0,88		1,07		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai transaksi saham per provinsi berupa nilai rata-rata tahunan (Rupiah)	1.418.072,14	1.418.072,14	1.893.474,67		2.368.877,19		2.844.279,72		3.319.682,25		3.795.084,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Total Kredit/PDRB ((%))	29,1	29,1	30,77		32,44		34,11		35,78		37,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan rumusan kebijakan BUMD dan BLUD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					840.000.000,00		1.000.000.000,00		1.115.000.000,00		1.240.000.000,00		1.370.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	40	41	42	840.000.000,00	43	1.000.000.000,00	44	1.115.000.000,00	45	1.240.000.000,00	46	1.370.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.245.000.000,00		1.395.000.000,00		1.525.000.000,00		1.600.000.000,00		1.740.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan					1.245.000.000,00		1.395.000.000,00		1.525.000.000,00		1.600.000.000,00		1.740.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					74.021.695.101,00		77.722.779.856,00		81.608.918.849,00		85.689.364.792,00		89.973.833.030,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					53.962.657.400,00		56.660.790.270,00		59.493.829.784,00		62.468.521.273,00		65.591.947.336,00	
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Operasional dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah secara Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	53.962.657.400,00	100,00	56.660.790.270,00	100,00	59.493.829.784,00	100,00	62.468.521.273,00	100,00	65.591.947.336,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					20.059.037.701,00		21.061.989.586,00		22.115.089.065,00		23.220.843.519,00		24.381.885.694,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	80,00	90,00	100,00	11.794.037.701,00	100,00	12.579.037.701,00	100,00	13.315.037.701,00	100,00	14.239.037.701,00	100,00	14.879.037.701,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	80,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	90	100	8.265.000.000,00	100	8.482.951.885,00	100	8.800.051.364,00	100	8.981.805.818,00	100	9.502.847.993,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					22.791.885.468,00		26.494.574.015,00		28.268.591.416,00		31.087.950.558,00		34.288.945.614,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.037.885.468,00		21.066.674.015,00		21.848.341.416,00		24.025.675.558,00		26.518.243.114,00	
Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Administrasi Perangkat Daerah Secara Profesional dan Akuntabel	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	100	18.037.885.468,00	100	21.066.674.015,00	100	21.848.341.416,00	100	24.025.675.558,00	100	26.518.243.114,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.377.000.000,00		2.507.700.000,00		2.983.250.000,00		3.281.575.000,00		3.610.832.500,00	
Terwujudnya Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah														
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung sistem pengukuran kinerja yang akurat dan berbasis data	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	2.377.000.000,00	100	2.507.700.000,00	100	2.983.250.000,00	100	3.281.575.000,00	100	3.610.832.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Yang Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.377.000.000,00		2.920.200.000,00		3.437.000.000,00		3.780.700.000,00		4.159.870.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	777.000.000,00	100	1.160.200.000,00	100	1.501.000.000,00	100	1.651.100.000,00	100	1.817.310.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	545.000.000,00	100	599.500.000,00	100	659.450.000,00	100	725.395.000,00	100	797.934.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	1.055.000.000,00	100	1.160.500.000,00	100	1.276.550.000,00	100	1.404.205.000,00	100	1.544.625.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Kelengkapan Laporan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim yang Tepat Waktu (%)	25	30	35		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					341.247.106.375,00		369.762.098.564,00		388.123.239.592,00		444.175.093.169,00		477.038.302.533,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					83.255.454.550,00		94.375.512.648,00		98.716.696.380,00		140.298.222.796,00		157.967.588.636,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif efisien dan akuntable di Bappenda Provinsi Bengkulu	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	95	95	95	58.081.031.400,00	95	63.188.205.220,00	95	65.970.023.581,00	95	69.268.524.759,00	95	72.731.950.992,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Dukungan Administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif efisien dan akuntable di BKAD Provinsi Bengkulu	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	90	91	92	25.174.423.150,00	93	31.187.307.428,00	94	32.746.672.799,00	95	71.029.698.037,00	96	85.235.637.644,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					248.804.951.825,00		262.825.449.416,00		275.966.721.887,00		289.765.057.981,00		304.253.310.880,00	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	49	49	49	248.804.951.825,00	49	262.825.449.416,00	49	275.966.721.887,00	49	289.765.057.981,00	49	304.253.310.880,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.100.000.000,00		5.107.200.000,00		5.630.688.000,00		5.912.222.400,00		6.207.833.520,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	2	2	3	3.100.000.000,00	4	5.107.200.000,00	5	5.630.688.000,00	6	5.912.222.400,00	7	6.207.833.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					6.086.700.000,00		7.453.936.500,00		7.809.133.325,00		8.199.589.992,00		8.609.569.497,00	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	35,65	36,38	30,70	2.625.000.000,00	29,89	3.245.511.500,00	29,04	3.395.287.075,00	28,14	3.565.051.429,00	27,20	3.743.304.005,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	888.500.000,00	100	1.483.425.000,00	100	1.557.596.250,00	100	1.635.476.063,00	100	1.717.249.867,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan berbasis Digitak (%)	-	95	95	2.573.200.000,00	95	2.725.000.000,00	95	2.856.250.000,00	95	2.999.062.500,00	95	3.149.015.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					16.444.030.250,00		17.203.306.704,00		18.064.722.040,00		18.969.207.392,00		19.918.918.111,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					15.094.030.250,00		15.785.806.704,00		16.576.347.040,00		17.406.414.392,00		18.277.985.111,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan oprasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif efisien dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	15.094.030.250,00	100	15.785.806.704,00	100	16.576.347.040,00	100	17.406.414.392,00	100	18.277.985.111,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.350.000.000,00		1.417.500.000,00		1.488.375.000,00		1.562.793.000,00		1.640.933.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasinya (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	94	94	95	300.000.000,00	96	325.000.000,00	97	350.000.000,00	98	375.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	80	80	82	600.000.000,00	82,5	650.000.000,00	83,1	688.375.000,00	84	712.793.000,00	84,15	740.933.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya (%)	10,6	10,6	12,5	250.000.000,00	15,3	242.500.000,00	17	200.000.000,00	18,9	200.000.000,00	20	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					28.795.000.000,00		36.820.000.000,00		44.320.000.000,00		28.120.000.000,00		26.720.000.000,00	
5.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					18.095.000.000,00		26.120.000.000,00		33.620.000.000,00		17.420.000.000,00		16.020.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Yang Didukung Oleh Layanan Administrasi Dan Operasional Secara Tepat Waktu	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	18.095.000.000,00	100	26.120.000.000,00	100	33.620.000.000,00	100	17.420.000.000,00	100	16.020.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	95	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					10.700.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00		10.700.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	50,00	50,00	57,20	5.000.000.000,00	64,40	5.000.000.000,00	71,60	5.000.000.000,00	78,80	5.000.000.000,00	86,00	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN Yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Manajerial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial (%)	80	80	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Umum (%)	80	80	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN Yang Lulus Pendidikan dan PElatihan Umum dan Fungsional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Jaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	2,00	2,00	5,60	2.500.000.000,00	9,20	2.500.000.000,00	12,80	2.500.000.000,00	16,40	2.500.000.000,00	20,00	2.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Akreditasi Lembaga (Nilai)	81,026	81,026	82,276		83,526		84,776		86,026		87,276		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Program yang Memenuhi Akreditasi B (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	2,00	2,00	5,60	1.700.000.000,00	9,20	1.700.000.000,00	12,80	1.700.000.000,00	16,40	1.700.000.000,00	20,00	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase ASN Yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis (%)	80	80	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		2.030.000.000,00		2.376.000.000,00		2.851.200.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.380.000.000,00		1.600.000.000,00		2.000.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Litbang untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.380.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		776.000.000,00		851.200.000,00	
Terbangunnya Ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	30	40	50	500.000.000,00	60	550.000.000,00	70	650.000.000,00	80	776.000.000,00	90	851.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatlan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah (%)	30	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					10.271.355.575,00		12.843.500.000,00		13.155.000.000,00		13.771.500.000,00		14.388.000.000,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.991.355.575,00		12.453.500.000,00		12.670.000.000,00		13.191.500.000,00		13.713.000.000,00	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan,yang diukur melalui persentase pemenuhan jasa penujang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,60	76,65	80	9.991.355.575,00	80,5	12.453.500.000,00	81	12.670.000.000,00	81,5	13.191.500.000,00	82	13.713.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
	Nilai PAD dari Pengelolaan Mess Bengkulu (Juta Rupiah)	193,075	300	305		310		315		320		325		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					280.000.000,00		390.000.000,00		485.000.000,00		580.000.000,00		675.000.000,00	
Terwujudnya pelayanan umum, promosi dan informasi Badan Penghubung yang berkualitas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum, Promosi dan Informasi Badan Penghubung (Angka)	93	94	94	280.000.000,00	95	390.000.000,00	95	485.000.000,00	96	580.000.000,00	96	675.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					27.368.564.685,00		30.573.871.153,00		33.326.113.519,00		36.116.113.519,00		41.088.097.357,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.458.064.685,00		27.023.871.153,00		29.601.113.519,00		32.071.113.519,00		36.703.097.357,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	24.458.064.685,00	100	27.023.871.153,00	100	29.601.113.519,00	100	32.071.113.519,00	100	36.703.097.357,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.938.500.000,00		2.425.000.000,00		2.450.000.000,00		2.635.000.000,00		2.810.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya terjadinya penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	70	72	72	1.938.500.000,00	74	2.425.000.000,00	76	2.450.000.000,00	78	2.635.000.000,00	80	2.810.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi APIP (%)	75	75	76		77		78		79		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					972.000.000,00		1.125.000.000,00		1.275.000.000,00		1.410.000.000,00		1.575.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	972.000.000,00	Terdefinisi	1.125.000.000,00	Terdefinisi	1.275.000.000,00	Terdefinisi	1.410.000.000,00	Terdefinisi	1.575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					14.891.043.750,00		15.684.363.937,00		16.549.291.634,00		17.361.000.000,00		18.075.000.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.336.043.750,00		7.762.863.937,00		8.171.004.134,00		8.695.000.000,00		9.045.000.000,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didukung oleh layanan administrasi dan operasional secara tepat waktu (%)	100	100	100	7.336.043.750,00	100	7.762.863.937,00	100	8.171.004.134,00	100	8.695.000.000,00	100	9.045.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase realisasi belanja operasional terhadap rencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.580.000.000,00		1.659.000.000,00		1.775.000.000,00		1.825.000.000,00		1.920.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	71	73	75	1.580.000.000,00	77	1.659.000.000,00	79	1.775.000.000,00	81	1.825.000.000,00	82	1.920.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.915.000.000,00		4.110.000.000,00		4.316.287.500,00		4.500.000.000,00		4.700.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	80	81	82	3.915.000.000,00	83	4.110.000.000,00	84	4.316.287.500,00	85	4.500.000.000,00	86	4.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					175.000.000,00		190.000.000,00		192.000.000,00		202.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	31	33	35	175.000.000,00	37	190.000.000,00	39	192.000.000,00	41	202.000.000,00	43	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					250.000.000,00		262.500.000,00		275.000.000,00		289.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	68	69	70	250.000.000,00	71	262.500.000,00	72	275.000.000,00	73	289.000.000,00	74	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.635.000.000,00		1.700.000.000,00		1.820.000.000,00		1.850.000.000,00		1.900.000.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	70	71	72	1.635.000.000,00	73	1.700.000.000,00	74	1.820.000.000,00	75	1.850.000.000,00	76	1.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					3024471525622.00		3550970994598.00		4448928956868.50		4939608893048.25		5199629970227.28	

4. 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes).*

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 4. 2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,8	77	78	80	82	84	86
2.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Angka	2,4 (sedang)	2,5 (sedang)	2,65 (sedang)	2,85 (sedang)	3,3 (tinggi)	3,5 (tinggi)	3,65 (tinggi)
4.	PDRB Per kapita	Rp Juta	49,230	49,230 - 53,200	54,536 - 59,725	60,480 - 66,250	64,358 - 72,775	68,406 - 79,300	72,591 - 85,825
5.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	3.11	3,11-3,41	2,97-3,34	2,84-3,27	2,70-3,20	2,56-3,13	2,42-3,06
6.	Indeks Gini	Angka	0,343	0.343-0.343	0.322-0.324	0.319-0.321	0.316-0.318	0.309-0.315	0.305-0.311
7.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	12,52	12.52-12.52	11,00-11,91	10,69-11,30	10,08-11,07	8,99-10,08	8,87-9,48
8.	Indeks Modal Manusia (IMM)	Angka	0.53	0.53-0.53	0.54-0.54	0.55-0.55	0.56-0.56	0.57-0.57	0.58-0.58
9.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,62	5,1 - 5,5	5,2 - 5,8	6,2 - 6,5	6,6 - 6,9	7,2 - 7,4	7,4 - 7,6
10.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Angka	56,59	57,74	60,07	63,07	66,11	67,60	70,35
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71,27	71,27	71,48	71,7	71,91	72,12	72,33

Tabel 4. 3 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	***ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI***								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	angka	69,9	70,00	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05
2.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	9,86	8,33	7,946	7,562	7,178	6,794	6,41
3.	Konsumsi listrik perkapita	Kwh/Kapita	581	609	639	670	703	738	775
4.	Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	23,9556	27,92	31,524	35,128	38,732	42,336	45,94
5.	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	angka	71.27	71.27	71.48	71.7	71.91	72.12	72.33
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	n/a	4,05	6,3475	8,645	10,9425	13,34	15,5375
7.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	%	n/a	2	6,1	10,2	14,3	18,40	22,50
8.	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan Sampah	% RT	19,374	26	29,7	33,4	37,1	40,8	44,5
9.	Penurunan Intensitas Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan	%	 20,63 30,94	 20,37 30,35	 21,10 31,67	 21,91 34,18	 22,80 37,01	 23,59 37,59	 24,45 39.57
10.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	angka	140	140	140	137	134	131	131
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,26	1,22	1,18	1,14	1,10	1,06	1,02
12.	Rasio Penduduk Provinsi Bengkulu terhadap Jumlah	%	68,85	68,75	68,65	68,53	68,41	68,28	68,03

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penduduk Indonesia								
13.	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	105	106	108	109	110	111	112
II.	***ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT***								
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	**%**	4.62	5,1 - 5,5	5,2 - 5,8	6,2 - 6,5	6,6 - 6,9	7,2 - 7,4	7,4 - 7,6
2.	Tingkat Kemiskinan	**%**	12.52	12.52-12.52	11.00-11.91	10.69-11.30	10.08-11.07	8.99-10.08	8.87-9.48
3.	Kemiskinan Ekstrem	**%**	0.69	0,50-0,25	0,25-0	0	0	0	0
4.	PDRB Per kapita	Rp Juta	49,230	49,230 - 53,200	54,536 - 59,725	60,480 - 66,250	64,358 - 72,775	68,406 - 79,300	72,591 - 85,825
5.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp Juta	103,99	103.99-103.99	114.612 - 121.233	120.243 - 129.889	125.110 - 138.546	129.392 - 147.203	133.188 - 155.859
6.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3.41-3,11	3,34-2,97	3,27-2,84	3,20-2,70	3,13-2,56	3,06-2,42
8.	Indeks Gini	angka	0.343	0.343-0.343	0.322-0.324	0.319-0.321	0.316-0.318	0.309-0.315	0.305-0.311
9.	Indeks Modal Manusia (IMM)	angka	0.53	0.53-0.53	0.54-0.54	0.55-0.55	0.56-0.56	0.57-0.57	0.58-0.58
10.	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,51	73,51	73,71	73,91	74,11	74,23	74,23
11.	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10
12.	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26	0,28	0,3
13.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	89	89	86	83	80	77	74
14.	Angka Kematian Balita (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	19	19	18	17	16	15	14
15.	Prevalensi Stunting	%	17,7	17,7	16,9	15,9	15	14,1	13,3
16.	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	48	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate*)	%	66	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5
18.	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,58	9,58	9,77	9,,97	10,17	10,37	10,58
19.	Harapan Lama Sekolah	tahun	14	14	15	16	17	18	19
20.	Persentase kabupaten / kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk-Literasi membaca	%	10	10	10	20	20	30	30
21.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	10	10	10	20	20	30	30
22.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	%	30,99	32,65-34,65	34,31-35,380	35,97-36,94	37,63-38,09	39,23-39,30-	40,38-40,96
23.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	20,80-22,80	20,80-22,80	22,72-24,72	24,64-26,64	26,56-28,56	28,48-30,48	30,41-32,41
24.	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,87	12,87	12,94	13,01	13,08	13,15	13,22
25.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan	%	74,97	74,97	75,47	75,97	76,47	76,98	77,48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi								
26.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	23	23	24,6	26,2	27,8	29,4	31
27.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	23	38	58	75	80	100	115
28.	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	4	5	6	7	9	10	11
29.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	nilai	0.02:0.02	0.02:0.04	0.04:0.06	0.06:0.08	0.08:0.1	0.1:0.2	0.2:0.3
30.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,15	58,15	58,91	59,68	60,44	61,20	61,96
31.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	angka	2,4	2,5 (sedang)	2,65 (sedang)	2,85 (sedang)	3,3 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,65 (Tinggi)
32.	Angka Literasi/Numerasi	%	Literasi : SMA (68,04) SMK (57,28) Numerasi : SMA (62,77) SMK (53,17)	Literasi : SMA (68,04) SMK (57,28) Numerasi : SMA (62,77) SMK (53,17)	Literasi : SMA (69) SMK (58) Numerasi : SMA (63) SMK (54)	Literasi : SMA (70) SMK (59) Numerasi : SMA (64) SMK (55)	Literasi : SMA (71) SMK (60) Numerasi : SMA (65) SMK (56)	Literasi : SMA (72) SMK (61) Numerasi : SMA (66) SMK (57)	Literasi : SMA (73) SMK (62) Numerasi : SMA (67) SMK (58)
33.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	65,96	74,22	82,48	90,73	98,99	107,25	115,51
34.	Cakupan kepesertaan jaminan	%	99,5	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan nasional								
35.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	32,52	33,02	34,88	35,38	35,38	36,38	36,88
36.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	73,4	73,4	73,5	73,55	73,6	73,65	73,7
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	61,45	62,67	63,93	65,21	66,51	67,84	69,20
38.	Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak	%	90	90	95,25	95,5	95,75	96	96,25
39.	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	95	97,5	98	98,50	99	99,50	100
40.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	3742	3850	3950	4050	4150	4250	4350
41.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	11,73	11,841	11,952	12,063	12,174	12,285	11,73
42.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	angka	74,32	74,32	75,29	76,02	76,59	77,05	77,44
43.	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47
44.	Indeks Pembangunan Gender	angka	91,41	91,78 - 91,85	91,85 - 91,96	91,93 - 92,07	92,02 - 92,19	92,11 - 92,30	92,82
45.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka	70,05	70,05	70,06	70,06	70,07	70,08	70,08
46.	Indeks Pembangunan Pemuda	angka	57,33	59,98	60,83	61,68	62,53	63,38	64,23
47.	Indeks Kesejahteraan Sosial	angka	N/A	50.12	50.62	51.12	51.62	52.12	52.62
III.	***ASPEK DAYA SAING DAERAH***								
1.	Persentase pertumbuhan sektor	%	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Industri Pengolahan terhadap PDRB								
2.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,82	1,88	1,92	2,12	2,38	2,5	2,5
3.	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	%	3,5	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9
4.	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	%	0,29	0,29	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45
5.	Rasio Kewirausahaan	%	0,28	0,28	0,3	0,5	0,8	1	1
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,6	70,62	70,62	70,92	71,12	71,32	71.52
7.	Indeks inovasi daerah	angka	53,39	54	56	58	60	61,50	63
8.	Indeks ekonomi hijau	angka	49,83	49.83	52,43	55,41	58,29	60,49	62.99
9.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	angka	n/a	26,66	29,03	31,41	33,78	36,16	38,5
10.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	%	n/a	37	38,58	40,15	41,73	43,30	44,88
11.	Persentase peningkatan infrastruktur EBT	%	0	5,6	8,4	11,2	14	16,8	19
12.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	6,00	6,00	6,07	6,15	6,22	6,30	6,38
13.	Pembentukan Tetap Modal Bruto	% PDRB	39,70	39,70	39,73	39,77	39,80	39,84	39,87
14.	Inklusi Keuangan	%	93,98	93,98	94,47	94,96	94,45	95,95	96,16
15.	Nilai Investasi	Triliun (Rp)	7,01	7,01	7,71	8,48	9,33	10,26	11,28
16.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	5,55	5,55	5,62	5,70	5,78	5,85	5,93

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Angka	2.4 (sedang)	2.4 (sedang)	2.4 (sedang)	2.85 (sedang)	3.3 (tinggi)	3.5 (tinggi)	3.65 (tinggi)
18.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	56,52	61,57	63,49	65,41	67,33	69,36	71,18
19.	Persentase Desa Mandiri	%	0,07	0,07	0,42	0,77	1,12	1,47	1,82
20.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,86	1,32	1,34	1,36	1,38	1,4	1,42
21.	Return on Asset BUMD	%	1,32	1,32	1,48	1,64	1,80	1,97	2,13
22.	Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB	%	18,45	18,45	20,70	22,96	25,21	27,46	29,71
23.	Aset Dana Pensiun/ PDRB	%	0,13	0,13	0,32	0,50	0,69	0,88	1,07
24.	Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi	Rupiah	1.418.072,14	1.418.072,14	1.893.474,67	2.368.877,19	2.844.279,72	3.319.682,25	3.795.084,77
25.	Total Kredit/ PDRB	%	29,1	29,1	30,77	32,44	34,11	35,78	37,45
26.	Tingkat Inflasi	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
27.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	13.515	18.127	18.191	18.254	18.307	18.336	18.365
28.	Intensitas energi primer (ketahanan energi)	SBM/ Rp Milyar)	53,254	49,224	45,223	41,223	37,223	33,223	28,223
29.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	angka	n/a	0,616	0,617	0,619	0,620	0,621	0,623
30.	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Nilai	n/a	2,56	2,54	2,53	2,51	2,49	2,47
31.	Aset Perbankan Syariah/PDRB	Persentase	3.42	3.69	4.20	4.59	5.25	6.12	7.08
32.	Indeks Zakat Nasional	angka	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	0.57	0.59
33.	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI	Angka	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1,1	1,2
34	Nilai komponen Bidang	Angka	1,7	1,7	1,75	1,95	2,30	2,40	2,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI								
IV.	***ASPEK PELAYANAN UMUM***								
1.	Indeks Reformasi Hukum	angka	87,66	88	89	90	91	92	93
2.	Indeks Persepsi Korupsi	angka	71,72	71,72	72	73	74	75	76
3.	Nilai Indeks e-Government (SPBE)	angka	3,4	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
4.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	88,3	88-100 (Kualitas Tinggi)	88-100 (Kualitas Tinggi)	88-100 (Kualitas Tinggi)	88-100 (Kualitas Tinggi)	88-100 (Kualitas Tinggi)	88-100 (Kualitas Tinggi)
5.	Indeks Integritas Nasional	Angka	72,58	72,58	73,32	74,07	74,81	75,55	76,29
6.	Persentase Penegakan Perda	%	96%	97	98,6%	98,6%	99 %	100%	100%
7.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	n/a	67,42	68,29	69,16	70,03	70,90	71,77
8.	Persentase Capaian Aksi HAM	%	85	85	87	87	88	89	90
9.	Indeks Demokrasi Daerah	angka	74,26	76,5	77	78	79	80	80
10.	Indeks Aktualisasi Pancasila	angka	n/a	79.37	80.15	80.87	81.59	82.3	83.02
11.	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,33	3,33	3,36	3,40	3,43	3,47	3,50
12.	Nilai SAKIP Daerah	angka	69,05	69,05	70,00	72,00	75,00	80,00	82,00
13.	Indeks Sistem Merit	angka	256,5	256,5	262	270,5	278,5	290,5	301,5

BAB V.
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

5. 1. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi kualitas, ketepatan waktu, dan konsistensi substansi dokumen perencanaan. Risiko dapat bersumber dari faktor internal kelembagaan, seperti kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor, maupun faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika politik, kondisi fiskal, dan perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan risiko disusun melalui komponen-komponen utama yang saling terkait dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pembangunan, yaitu:

1. **Mekanisme Perubahan**
   Mekanisme ini dirancang untuk mengakomodasi dinamika dan perubahan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap perubahan terhadap visi, misi, arah kebijakan, maupun program prioritas harus dikelola secara terstruktur melalui prosedur revisi atau penyesuaian dokumen perencanaan, sehingga tetap menjaga relevansi dan konsistensi pencapaian tujuan jangka menengah.
2. **Sistem Pengendalian Pelaksanaan**
   Sistem ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian dilakukan melalui pelaporan berkala, pemantauan indikator kinerja, serta evaluasi hasil. Penerapan insentif dan disinsentif juga menjadi bagian penting untuk mendorong kinerja perangkat daerah sesuai dengan capaian pembangunan yang telah ditetapkan.
3. **Komunikasi Publik**
   Komunikasi publik yang efektif merupakan faktor penentu dalam membangun partisipasi masyarakat. Transparansi informasi, keterlibatan melalui forum konsultasi publik, dan penyediaan akses terhadap dokumen perencanaan adalah cara strategis untuk memperkuat legitimasi RPJMD serta memperluas dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya.
4. **Pendanaan Pembangunan**
   Risiko pembiayaan dikelola melalui perencanaan anggaran yang terukur dan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah luar negeri, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), serta investasi swasta. Apabila diperlukan, pembiayaan juga dapat dilakukan melalui skema pinjaman daerah yang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Efektivitas pendanaan menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi program dan kegiatan strategis yang tertuang dalam RPJMD.

5. **Konsistensi Pelaksanaan RPJMD dan Keterkaitan dengan RPJPD**

   Konsistensi antara RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijaga melalui koordinasi lintas OPD, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya (seperti Renstra OPD dan RKPD), serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang menyeluruh. Pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai sektor juga menjadi elemen penting dalam memastikan keterpaduan implementasi kebijakan pembangunan.

Manajemen risiko yang terintegrasi dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 juga bertujuan untuk:

1. Menjamin proses penyusunan dokumen berjalan tepat waktu, sesuai prosedur, dan bermutu tinggi secara substansi;
2. Meningkatkan akurasi perencanaan, responsivitas terhadap perubahan, serta akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pembangunan;
3. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan agenda global (seperti SDGs dan RPJPN 2025–2045).

Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan Daerah akan disusun secara terpisah dan ditetapkan melalui regulasi khusus di tingkat provinsi, yang akan memberikan dasar hukum untuk penerapan mekanisme-mekanisme pengendalian, penyesuaian, dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan RPJMD. Regulasi ini juga akan memastikan bahwa seluruh strategi dan sistem yang dirancang mampu menjawab tantangan pembangunan jangka menengah, mendukung pencapaian sasaran RPJPD 2025–2045, serta mewujudkan visi Provinsi Bengkulu: *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”*

5. 2. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memiliki posisi strategis dalam sistem pembangunan nasional dan daerah. RPJMD ini menjadi pedoman operasional jangka menengah yang menurunkan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045, dan secara teknokratik merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

RPJMD ini juga menjadi dokumen kunci dalam menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta mengikuti arahan dan pedoman teknis dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi landasan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta acuan penyusunan RPJMD kabupaten/kota di wilayah Bengkulu.

1. **RPJMD sebagai Alat Transformasi Pembangunan Daerah**
   Keberhasilan implementasi RPJMD 2025–2029 akan sangat ditentukan oleh:
   a) Kepemimpinan yang berkomitmen dan konsisten: Kepala daerah dan jajaran birokrasi dituntut untuk memiliki visi yang kuat, integritas, serta konsistensi dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.
   b) Pembangunan yang berorientasi pada rakyat: Setiap program dan kegiatan harus dirancang untuk memberi manfaat nyata kepada masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan akses terhadap layanan dasar, peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan, maupun peningkatan kualitas hidup secara merata.
   c) Partisipasi kolaboratif antar pemangku kepentingan: RPJMD tidak dapat dijalankan oleh pemerintah sendiri. Perlu keterlibatan aktif dari sektor swasta, akademisi, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat.
   d) Fleksibilitas dan daya adaptasi terhadap dinamika eksternal: Dalam lima tahun pelaksanaannya, RPJMD akan menghadapi perubahan regulasi, perkembangan sosial-ekonomi, dan tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta disrupsi teknologi. Oleh karena itu, dokumen ini harus dinamis, dapat diperbaharui dan dievaluasi secara berkala.

2. **Regulasi Daerah sebagai Pendukung Pencapaian Sasaran**
   Sebagai bagian dari pendekatan teknokratik dan sistemik, RPJMD juga menegaskan pentingnya penguatan kerangka regulasi daerah. Berdasarkan evaluasi atas implementasi pembangunan sebelumnya, keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tidak hanya tergantung pada program, tetapi juga

pada kerangka hukum dan kebijakan daerah yang mendasarinya. Oleh karena itu, diperlukan:

a) Identifikasi regulasi daerah yang menghambat efektivitas pembangunan, termasuk Perda yang tidak sinkron dengan RPJMD dan RPJPD;
b) Penyusunan regulasi baru yang mendukung pelaksanaan pembangunan, seperti Perda tentang inovasi daerah, insentif fiskal daerah, pembangunan hijau, perlindungan sosial, dan pengelolaan kawasan strategis;
c) Revisi terhadap kebijakan lintas sektor yang sudah tidak sesuai dengan tantangan pembangunan terkini.

Dengan demikian, RPJMD juga menjadi instrumen untuk mereformasi aspek regulatif pembangunan daerah, memastikan bahwa kebijakan dan implementasi pembangunan memiliki dukungan legal yang kokoh dan terintegrasi.

3. Pengarusutamaan Kebijakan Pembangunan: Pilar Lintas Sektor

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Bengkulu secara eksplisit menginternalisasi lima agenda pengarusutamaan pembangunan yang wajib menjadi pedoman seluruh perangkat daerah, yaitu:

a) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (G&I)
   Seluruh kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk menjamin akses yang setara bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Analisis gender, penyusunan Gender Budget Statement (GBS), dan penyediaan indikator gender responsif menjadi instrumen wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan program.
b) Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
   RPJMD harus sejalan dengan target 17 tujuan SDGs, baik melalui indikator langsung (indikator outcome program) maupun indikator pengiring (indikator dampak). Penguatan sistem monitoring berbasis SDGs menjadi bagian dari reformasi tata kelola perencanaan daerah.
c) Pengarusutamaan Transformasi Digital
   Pelayanan publik, perizinan, sistem informasi pembangunan daerah, dan konektivitas antarwilayah harus diarahkan menuju digitalisasi secara bertahap. Transformasi digital juga menjadi landasan inovasi dalam pendidikan, ekonomi kreatif, dan tata kelola pemerintahan.
d) Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon:
   RPJMD mengintegrasikan kebijakan pembangunan hijau (green economy), efisiensi energi, transportasi rendah emisi,

pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem. Penurunan emisi GRK menjadi bagian dari indikator pembangunan.

e) Pengarusutamaan Ketahanan Iklim:
Penggunaan hasil kajian risiko iklim, analisis kerentanan wilayah, dan rencana adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi bagian dari strategi pembangunan. Infrastruktur hijau dan mitigasi bencana berbasis ekosistem diprioritaskan untuk mendukung wilayah rawan bencana.

Kelima pengarusutamaan tersebut harus tercermin dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, hingga RKPD dan APBD.

4. RPJMD sebagai Dokumen Dinamis dan Strategis

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 bukanlah dokumen statis, melainkan alat dinamis untuk merespons perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjawab kompleksitas pembangunan daerah secara strategis dan terukur. RPJMD menjadi:

a) Kompas strategis bagi arah pembangunan daerah;
b) Instrumen konsolidasi kebijakan antar level pemerintahan;
c) Sarana koordinasi dan kolaborasi multipihak;
d) Platform evaluasi capaian kinerja dan reformasi birokrasi;
e) Dasar perumusan dokumen turunan perencanaan, seperti Renstra PD, RKPD, dan dokumen sektoral lainnya.

Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, sinergi lintas perangkat daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan sistem regulasi yang adaptif, RPJMD ini diharapkan mampu mewujudkan visi "*Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan*" secara nyata dan inklusif.

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Pembangunan No. 15 Kota Bengkulu 38225

Telp : 0736-21255 Fax : 0736-21502 Email : bappeda@bengkuluprov.go.id
Website : https://bappeda.bengkuluprov.go.id/